



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. atas-bawah dan bawah atas;
- e. holistik-tematik;
- f. integratif; dan
- g. spasial.

BAB III

PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
- (3) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten/kota.
- (4) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahunan, yaitu:
 - a. RPJMD I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJMD II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJMD III Tahun 2035-2039;

- d. RPJMD IV Tahun 2040-2045.

Bagian Kedua
Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
- a. BAB I memuat pendahuluan;
 - b. BAB II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. BAB III memuat permasalahan dan isu strategis;
 - d. BAB IV memuat visi dan misi Daerah;
 - e. BAB V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. BAB VI memuat penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menghasilkan rekomendasi untuk perubahan RPJPD Tahun 2025-2045, maka perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL. MUKTABAR,

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024
Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (4-231/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk. 1/IV.b

NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pada pelaksanaannya, daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah harus memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdiri sejak Tahun 2000, Provinsi Banten telah mengalami berbagai transformasi pada berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data, Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten mengalami peningkatan, dari 61,14 pada Tahun 2007 menjadi 75,77 pada Tahun 2023, pendapatan per kapita naik sebesar Rp53,11 juta rupiah dalam kurun waktu Tahun 2007-2023, tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebesar 2,90 persen dari 9,07 persen pada Tahun 2007 menjadi 6,17 persen pada Tahun 2023. Bahkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pun dapat diturunkan dari 15,75 persen pada Tahun 2007 menjadi 7,52 persen pada Tahun 2023. Demikian juga nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) melonjak dari Rp107,43 triliun pada Tahun 2007 menjadi Rp814,12 triliun pada Tahun 2023. Sedangkan rasio gini berangsur menurun dari 0,370 pada Tahun 2007 menjadi 0,368 pada Tahun 2023. Hal demikian dapat terjadi karena ditopang oleh besarnya berbagai modalitas yang dimiliki oleh Provinsi Banten, seperti letaknya yang amat strategis, serta potensinya dalam sektor industri, energi, perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, pariwisata, dan pertanian.

Meskipun demikian Provinsi Banten masih harus tetap berbenah, mengoptimalkan segenap modalitas dan potensi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu dituntaskan seiring dengan perkembangan dinamika global dan domestik yang semakin kompetitif, baik dari segi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan sosial, infrastruktur, lingkungan dan kebencanaan maupun reformasi

birokrasi. Tantangan yang paling mendasar yaitu pada sektor kualitas SDM yang harus terus dibenahi agar mampu bersaing secara global. Hal ini seiring dengan kondisi demografi Provinsi Banten yang masih menikmati bonus demografi, dimana jumlah penduduk berusia produktif masih sekitar 60 persen. Sehingga kondisi ini harus dioptimalkan agar dapat memberikan "keuntungan" bagi kemajuan Provinsi Banten, karena bagaimanapun SDM produktif merupakan aktor utama keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang dilakukan secara transparan, partisipatif, efektif, efisien, akuntabel, responsif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.

Penyusunan RPJPD 2025-2045 ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Selanjutnya penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 ini juga tentunya memperhatikan hasil evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2005-2025, isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045, mempedomani terhadap RTRW Daerah Tahun 2023-2043 serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya meliputi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2022-2050, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2045, serta dokumennya lainnya.

Proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 ini dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045, dimana RPJPD wajib memperhatikan visi, sasaran visi, misi

hingga kepada arah kebijakan serta indikator utama pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 agar tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" secara bersama-sama dapat terwujud.

Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas diproyeksikan dapat tercapai pada Tahun 2045 melalui lima sasaran. Sasaran pertama Negara Indonesia bertekad untuk dapat masuk dalam lima besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045 dengan gambaran pendapatan per kapita sekitar USD23.000-30.300 yang didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan, kondisi tersebut dapat meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80,0 persen. Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi, terciptanya pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, juga akan menurunkan kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen dan ketimpangan pendapatan antar penduduk dengan rasio gini berkisar 0,290-0,320, serta ketimpangan antar wilayah dengan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi 28,5 persen. Selain itu, pada sasaran ketiga terhadap peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional diupayakan untuk terus meningkat yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia. Sasaran keempat Negara Indonesia bertekad untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) atau *Human Capital Index* menjadi 0,73, dan kondisi ini harus ditopang melalui sasaran kelima melalui komitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang ramah lingkungan yang ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 93,5 persen dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 83,00.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu "Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa", berangkat dari visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi yaitu:

1. mewujudkan masyarakat yang produktif, unggul, dan berdaya

saing;

2. mewujudkan perekonomian yang tangguh, inklusif, dan kondusif;
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan profesional;
4. mewujudkan keamanan yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan perekonomian daerah yang stabil;
5. mewujudkan sosial budaya yang beradab dan ekologi yang lestari;
6. mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, penguatan pemerataan, dan interkoneksi pembangunan;
7. mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan; dan
8. mewujudkan kesinambungan pembangunan yang inovatif dan berdaya saing global.

Untuk menjamin pencapaian RPJPD Tahun 2025-2045, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui jangka menengah dan jangka pendek.

Lebih jauh daripada itu komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif serta dapat mengakomodir terhadap berbagai masukan, kritik bahkan dukungan dari berbagai *stakeholder* pembangunan. Komunikasi publik yang transparan ini diharapkan adanya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk kebersamaan dan berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 untuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, melalui pelaksanaan visi Banten Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan teknokratif yaitu menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendekatan politis yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Gubernur terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendekatan holistik tematik yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pendekatan integratif yaitu dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pendekatan spasial yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 109

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 Ayat 1).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pada pelaksanaannya, daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah harus memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdiri sejak Tahun 2000, Provinsi Banten telah mengalami berbagai transformasi pada berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data, Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten mengalami peningkatan, dari 61,14 pada Tahun 2007 menjadi 75,77 pada Tahun 2023, pendapatan per kapita naik sebesar Rp53,11 juta rupiah dalam kurun waktu Tahun 2007-2023, tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebesar 2,90 persen dari 9,07 persen pada Tahun 2007 menjadi 6,17 persen pada Tahun 2023. Bahkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pun dapat diturunkan dari 15,75 persen pada Tahun 2007 menjadi 7,52 persen pada Tahun 2023. Demikian juga nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) melonjak dari Rp107,43 triliun pada Tahun 2007 menjadi Rp814,12 triliun pada Tahun 2023. Sedangkan rasio gini

berangsur menurun dari 0,370 pada Tahun 2007 menjadi 0,368 pada Tahun 2023. Hal demikian dapat terjadi karena ditopang oleh besarnya berbagai modalitas yang dimiliki oleh Provinsi Banten, seperti letaknya yang amat strategis, serta potensinya dalam sektor industri, energi, perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, pariwisata, dan pertanian.

Meskipun demikian Provinsi Banten masih harus tetap berbenah, mengoptimalkan segenap modalitas dan potensi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu dituntaskan seiring dengan perkembangan dinamika global dan domestik yang semakin kompetitif, baik dari segi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan sosial, infrastruktur, lingkungan dan kebencanaan maupun reformasi birokrasi. Tantangan yang paling mendasar yaitu pada sektor kualitas SDM yang harus terus dibenahi agar mampu bersaing secara global. Hal ini seiring dengan kondisi demografi Provinsi Banten yang masih menikmati bonus demografi, dimana jumlah penduduk berusia produktif masih sekitar 60 persen. Sehingga kondisi ini harus dioptimalkan agar dapat memberikan "keuntungan" bagi pemajuan Provinsi Banten, karena bagaimanapun SDM produktif merupakan aktor utama keberlanjutan pembangunan.

Mengingat RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya, maka Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya harus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk merumuskan dan menyusun RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa perencanaan pembangunan daerah selain harus menggunakan pendekatan proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah atas, juga harus berorientasi pendekatan substansi HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial) sebagaimana diatur pada Pasal 9.

Pemerintah Provinsi Banten menyusun RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang dilakukan secara transparan, partisipatif, efektif, efisien, akuntabel, responsif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Proses penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045, dimana RPJPD Provinsi Banten wajib memperhatikan visi, sasaran visi, misi hingga kepada arah kebijakan serta indikator utama pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 agar tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" secara bersama-sama dapat terwujud.

Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas diproyeksikan dapat tercapai pada Tahun 2045 melalui lima sasaran. Sasaran pertama Negara Indonesia bertekad untuk dapat masuk dalam lima besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045 dengan gambaran pendapatan per kapita sekitar USD23.000-30.300 yang didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan, kondisi tersebut dapat meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80,0 persen. Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi, terciptanya pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, juga akan menurunkan kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen dan ketimpangan pendapatan antar penduduk dengan rasio gini berkisar 0,290-0,320, serta ketimpangan antar wilayah dengan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi 28,5 persen. Selain itu, pada sasaran ketiga terhadap peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional diupayakan untuk terus meningkat yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia. Sasaran keempat Negara Indonesia bertekad untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia untuk

kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) atau *Human Capital Index* menjadi 0,73, dan kondisi ini harus ditopang melalui sasaran kelima melalui komitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang ramah lingkungan yang ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 93,5 persen dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 83,00.

Pemerintah Provinsi Banten, selain berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045, juga berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya muatan arah kebijakan dan sasaran pokok. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD merupakan landasan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 merupakan bentuk pengejawantahan terhadap muatan yang terkandung dalam RPJPN Tahun 2025-2045, sebagai kerangka kontribusi pembangunan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Cita-cita ini tentu sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan berinovasi untuk memajukan daya saing daerah dikancah nasional maupun global.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini mempedomani beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

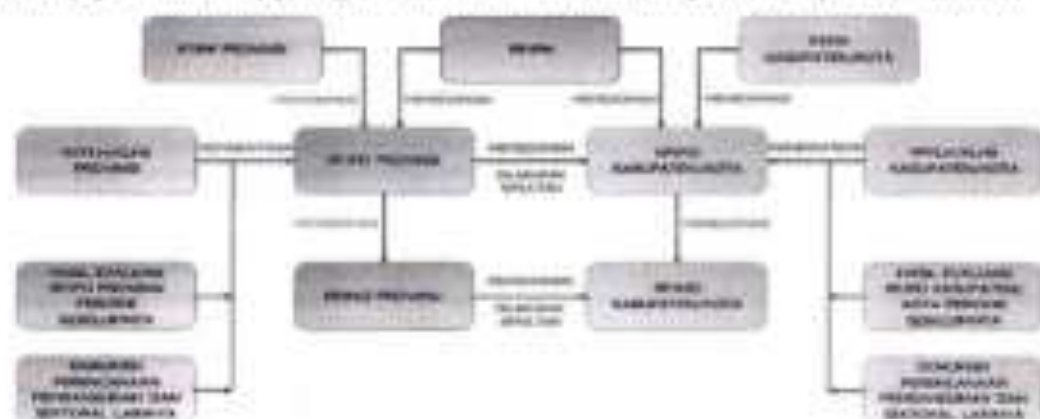
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Banten Tahun 2022-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, maka RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 disusun secara simultan, terkoordinasi dan selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045. RPJPN digunakan sebagai pedoman penyelarasan visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, pentahapan periode pembangunan serta indikator utama pembangunan jangka panjang nasional dengan Provinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.



Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Sektoral Lainnya

(Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024)

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
- Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 selain harus selaras dengan RPJPN, juga harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan, harus memperhatikan beberapa dokumen strategis lainnya seperti:

- a. Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, terutama terkait rekomendasi yang dihasilkan guna mendukung pencapaian indikator makro daerah;
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Banten Tahun 2025-2045, terutama terkait rumusan isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043, terutama terkait arah pengembangan pusat pertumbuhan wilayah serta indikasi-indikasi program strategis kewilayahan; dan
- d. Dokumen perencanaan lainnya.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Banten yang pada akhirnya memberikan dukungan terhadap pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan penyusunannya adalah:

- a. Menjadi landasan dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2025-2045;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten;
- c. Menjadi acuan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dengan segenap kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitasnya untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan modal dasar pembangunan (kondisi eksisting pembangunan daerah dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan (aspek geografi

dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), hasil evaluasi RPJPD 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah berupa hasil analisa kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi serta evaluasi terhadap yang harus diperhatikan dalam perencanaan mendatang yang dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat cita-cita pembangunan daerah Provinsi Banten 2045 yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat penjelasan arah kebijakan, arah kebijakan transformasi pembangunan serta sasaran pokok yang menjelaskan terperinci tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045 dengan disertai indikator utama dan skenario pembangunan.

BAB VI PENUTUP

Memuat kesimpulan yang disertai kaidah pelaksanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mekanisme perubahan dan komunikasi publik.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini mengandung hasil analisis gambaran kondisi Provinsi Banten, analisis permasalahan pembangunan daerah, serta analisis terhadap isu strategis yang akan menjadi isu krusial dan berdampak terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Banten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Analisa mencakup aspek-aspek sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 serta Inmendagri 1 Tahun 2024 meliputi kondisi geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Awal abad ke-15 Banten memiliki pelabuhan penting yang masuk dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional, dengan potensi ini yang menjadikan perekonomian Kerajaan Banten bertumpu pada perdagangan. Komoditas perdagangan itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab Kerajaan Banten dapat mencapai kejayaan di bawah Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683) dan pada Tahun 1954 di Provinsi Banten telah didirikan lembaga perbankan berbasis koperasi bernama Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Banten yang berpusat di daerah Swatantra Tingkat II Pandeglang. Lebih lanjut secara geostrategis Provinsi Banten memiliki posisi sangat menjanjikan untuk pemajuan pembangunan diantaranya adalah:

- a. Pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta;
- b. Penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa;
- c. Bagian dari sirkulasi perdagangan asia dan internasional, bagian ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I;
- d. Lokasi Aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial;
- e. Produsen utama baja, petrokimia dan alas kaki, industri pengolahan berkontribusi hingga 30 persen terhadap PDRB di Provinsi Banten dan juga berperan besar terhadap produksi nasional yaitu industri logam baja (32 persen), industri petrokimia (29 persen), dan industri alas kaki (51 persen);

- f. Simpul logistik Sumatera Utara, sektor logistik di Provinsi Banten berperan dalam menghubungkan pusat produksi di Sumatera dan pusat konsumsi di Jawa, dimana *traffic* jalan tol Tangerang-Merak mencapai 150 ribu kendaraan/hari;
- g. Wilayah penyangga Metropolitan Jakarta, populasi penduduk wilayah Tangerang dan sekitarnya tertinggi di wilayah Jabodetabek dengan 7,8 juta jiwa (22 persen dari seluruh penduduk metropolitan Jabodetabek);
- h. Sumber listrik Pulau Jawa, pembangkit listrik di Provinsi Banten berperan dalam pemenuhan hingga 39 persen produksi listrik di sistem transmisi di Jawa-Bali dan berkontribusi terhadap 23 persen konsumsi *Domestic Market Obligation* (DMO) batubara.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI

Pembahasan aspek geografi mencakup kondisi fisik wilayah Provinsi Banten saat ini yaitu luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFI

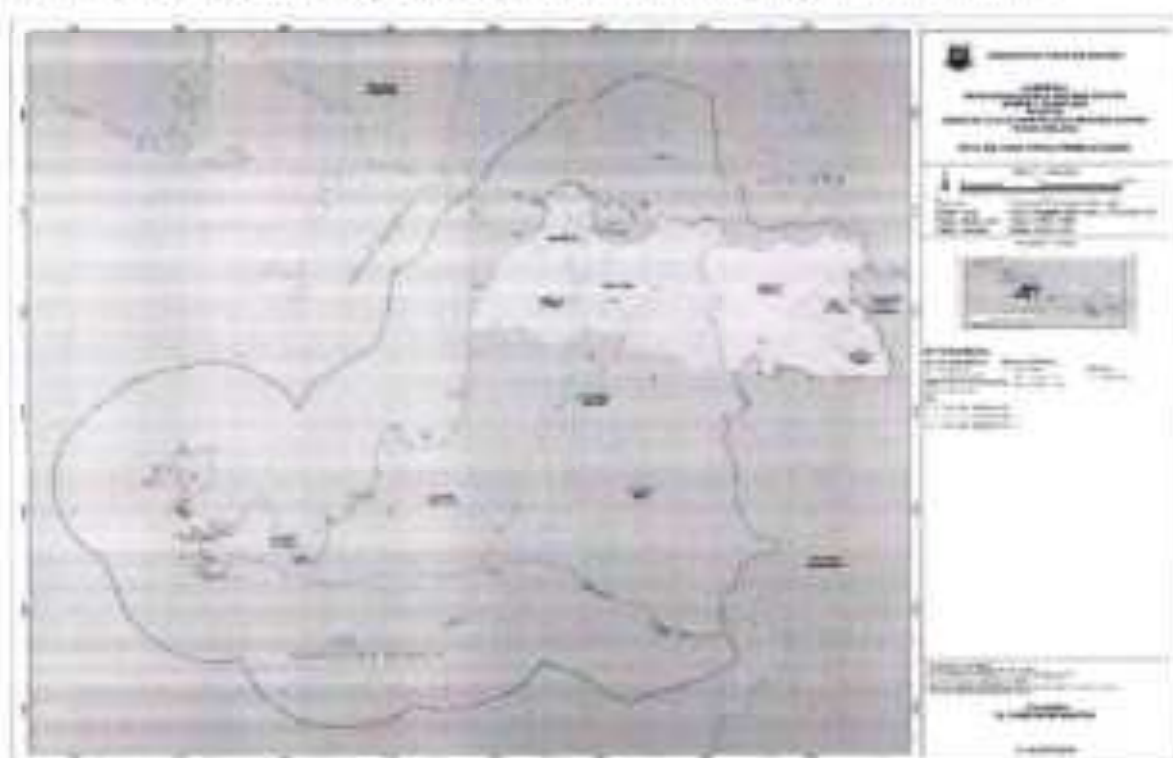
Letak astronomis Provinsi Banten pada batas 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Secara geografis, Provinsi Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa di dekat Selat Sunda. Provinsi Banten berada pada posisi geostrategis bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Secara geografis, Provinsi Banten berbatasan langsung dengan beberapa daerah, yaitu: batas utara yaitu Laut Jawa, batas selatan yaitu Samudra Hindia, batas barat yaitu Selat Sunda serta batas timur yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, Pelabuhan Banten merupakan pintu masuk utama bagi berbagai komoditas pangan strategis yang berasal dari mancanegara. Terletak sekitar 10 km dari pusat Kota Serang, pelabuhan ini merupakan pelabuhan penting bagi perdagangan internasional abad ke-15. Saat itu, kapal-kapal asing yang berasal dari Persia, Arab, India, Tiongkok, Inggris, dan Portugis, hilir mudik dari dan menuju Pelabuhan Banten. Perkembangan pesat Pelabuhan Banten didukung oleh pertumbuhan industri di sekitarnya, mulai dari industri pengolahan logam, mesin, kimia, hingga minyak kelapa sawit. Sedangkan pelabuhan ikan di Banten terdapat 20 pelabuhan. Berdasarkan sektor usaha, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi memberikan kontribusi

terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu adanya sarana pusat distribusi perdagangan, pelabuhan laut, dan sistem distribusi rantai pasok.

2.1.1.2 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Secara administrasi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada 9 November 2022, Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.352,767 km² yang terdiri dari 4 (empat) kota yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan serta 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Rincian luas administrasi per kabupaten/kota terlihat pada tabel di bawah ini.



Gambar II.1
Peta Provinsi Banten

(Sumber: Peta Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTN Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043)

Luas wilayah per masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten sebagaimana diinformasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	LUAS WILAYAH*		JUMLAH		
			(KM ²)	(PERSEN)	KECA MATAN	DESA	KELU RAHAN
1	Kab. Pandeglang	Pandeglang	2.771,414	29,63	35	326	13
2	Kab. Lebak	Rangkasurung	3.312,180	35,41	28	340	5
3	Kab. Tangerang	Tigaraksa	1.027,757	10,99	29	246	28
4	Kab. Serang	Ciruas	1.459,908	15,72	29	326	-

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	LUAS WILAYAH*		JUMLAH		
			(KM ²)	(PERSEN)	KECA MATAN	DESA	KELU RAHAN
5	Kota Tangerang	Tangerang	178.347	1,91	13	-	104
6	Kota Cilegon	Purwakarta	162.514	1,74	8	-	43
7	Kota Serang	Serang	265.767	2,84	6	-	67
8	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	164.860	1,76	7	-	34
Provinsi Banten		Kota Serang	9.352.767	100,00	155	1.238	314

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024 (Diolah oleh Suppedita)

2.1.1.3 KONDISI TOPOGRAFI

Secara umum morfologi permukaan di Provinsi Banten dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan topografinya. Kelompok pertama yaitu morfologi dataran rendah berkisar 0-50 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL) pada bagian utara dan sebagian selatan. Kelompok kedua yaitu morfologi perbukitan bergelombang rendah-sedang berkisar 50-200 mdpl meliputi Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Kelompok ketiga yaitu dataran tinggi dan pegunungan pada bagian wilayah selatan yaitu sebagian kecil Kabupaten Pandeglang dan daerah Lebak Tengah memiliki ketinggian berkisar 201-2.000 mdpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501-2.000 mdpl yang ditunjang oleh Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

2.1.1.4 KONDISI KLIMATOLOGI

Iklim Provinsi Banten dipengaruhi oleh La Nina atau El Nino serta Angin Monsun. Saat musim hujan (Bulan November hingga Bulan Maret), cuaca di Provinsi Banten umumnya didominasi oleh angin barat (berhembus dari Sumatera, Samudera Hindia sebelah selatan India) yang juga bergabung dengan angin dari Asia yakni melewati Laut Cina Selatan. Sementara itu, cuaca pada Bulan Agustus didominasi oleh angin timur yang menyebabkan kekeringan (terlebih lagi apabila sedang berlangsung El Nino) di Provinsi Banten, terutama di wilayah bagian pantai utara. Adapun suhu di daerah pantai dan perbukitan Provinsi Banten memiliki kisaran antara 22°-32°C, sedangkan suhu di daerah pegunungan dengan ketinggian 400-1.350 mdpl mencapai 18°-29°C.

2.1.1.5 KONDISI GEOLOGI

Berdasarkan stratigrafi, Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter di mana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 meter. Formasi batuan yang berada di Provinsi Banten antara lain Formasi

Bojongmanik, Formasi Cipocar, Formasi Bojong dan Formasi Bayah. Selain empat formasi batuan di atas, terdapat formasi batuan lainnya, seperti Formasi Cicarucup, Formasi Cijengkool, Formasi Citarate, Formasi Cimapag, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimanceuri, dan Formasi Cikotok.

Batuan gunung api di Provinsi Banten dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Tersier (Paleogen dan Neogen) hingga Kwartir. Struktur geologi di Provinsi Banten didominasi oleh struktur lipatan antiklin dan sinklin yang berarah barat-timur dan barat laut-tenggara, sedangkan sesar didominasi oleh arah utara-selatan dan sebagian berarah barat laut-tenggara hingga barat daya-timur laut. Pola sesar yang berarah utara-selatan masih berpola sama dengan struktur sesar di zona sesar Sumatera (pull apart basin) yang terbentuk sejak Paleosen (Eosen-Oligosen) yang kemudian mengalami reaktivasi kembali pada zaman Neogen (Mio-Pliosen).

Gunung Anak Krakatau di selat Sunda merupakan salah satu gunungapi di Indonesia yang masih aktif yang dapat memberikan ancaman bencana, pada Tahun 22 Desember 2018 gunungapi ini mengalami letusan yang mengakibatkan bongkahan seluas 64 hektar longsor dilautan setelah erupsi sehingga menyebabkan terjadinya bencana tsunami di daerah pantai bagian barat di Provinsi Banten dan bagian Pulau Sumatera. Sejarahpun mencatat bahwa pada 26-28 Agustus 1883 gunungapi ini juga pernah mengalami letusan besar menghasilkan 15 meter (50 kaki) gelombang tsunami dan menyebabkan lebih dari 35.000 korban tewas di sepanjang pantai Selat Sunda di Indonesia.

Kondisi geologi di Provinsi Banten yang didominasi oleh kegiatan vulkanisme atau magmatic dapat berpotensi terhadap perekonomian daerah, yang mana Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya mineral seperti bijih sulfida yang mengandung Au dan Ag, batuan beku, mineral hasil alterasi seperti Zeolit, Kaolinit, dan Bentonit. Selain itu di Provinsi Banten terdapat batuan silisiklastik yang terdapat potensi batu bara dan batuan karbonat yang memiliki potensi batu gamping.

2.1.1.6 KONDISI HIDROLOGI

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Potensi sumber daya air di Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak karena sebagian wilayahnya masih berupa hutan. Berdasarkan pembagian daerah aliran sungai, Provinsi Banten terbagi

menjadi enam Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Ujung Kulon, DAS Cibaliung-Cibareno, DAS Ciujung-Cidurian, DAS Rawadano, DAS Teluklada, dan DAS Cisadane-Ciliwung.

Pengelolaan sungai sebagai sumber daya air di Provinsi Banten telah ditetapkan 4 Wilayah Sungai (WS). Berdasarkan Keppres RI No. 12 Tahun 2012, terdapat dua klasifikasi wilayah sungai yang ada di Provinsi Banten, yaitu WS Lintas Provinsi (Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane) yang dikelola Pemerintah Pusat dan WS Lintas Kabupaten/Kota (WS Ciliman-Cibungur dan WS Cibaliung-Cisawarna) yang dikelola oleh Provinsi Banten.

Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur terdiri dari 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas total 1.750,93 km² memiliki potensi air sebesar 120 m³/detik. Sedangkan WS Cibaliung-Cisawarna terdiri dari 75 DAS dengan luas total 2.613,37 km² mempunyai potensi air sekitar 122,34 m³/detik.

Wilayah Sungai Cibungur-Ciliman berada di lokasi Kabupaten Pandeglang terdiri dari 65 sungai dan yang berada di Kabupaten Lebak terdapat 5 sungai. Sementara itu untuk WS Cibaliung-Cisawarna di Kabupaten Lebak terdapat 34 sungai dan Kabupaten Pandeglang terdapat 31 sungai, diantaranya Sungai Ciujung, Sungai Ciliman, Sungai Cidanau, dan Sungai Cibanten.

b. Air Tanah

Terdapat lima satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten/kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano, dan CABT Malingping dan lintas provinsi meliputi CABT Serang-Tangerang dan CABT Jakarta.

2.1.1.7 KONDISI HIDROLOGI OCEANOGRAFI

Pantai pesisir utara Pulau Jawa pada umumnya merupakan perairan yang dangkal dengan dasar perairan umumnya lumpur berpasir. Perairan Laut Jawa pada umumnya dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat dan musim timur.

Pasang surut di Kawasan Perairan Provinsi Banten yang berada di sebelah barat tepatnya di sekitar Tanjung Lesung berjenis campuran condong harian ganda (*mixed tide prevailing semidiurnal*) dengan karakteristik dalam satu siklus pasang surut (24 jam 50 menit) terjadi dua kali pasang dan dua kali surut, dengan tinggi dan periode yang berbeda. Ketinggian air pada Bulan Januari, surut terendah (*Low Water Level/LWL*)

-0,64 meter, pasang tertinggi (*High Water Level/HWL*) 0,74 m, dan tunggang pasang-surut 1,38 meter.

Tinggi gelombang yang terjadi di perairan Bagian Utara Provinsi Banten (Kabupaten Serang) pada musim barat sekitar 2,6 meter dengan rata-rata 1,03 meter. Pada musim timur sekitar 1,9 meter dengan rata-rata 0,76 meter. Serta pada musim peralihan tinggi gelombang umumnya relatif rendah kurang dari 0,5 meter. Pada wilayah perairan Bagian Selatan Provinsi Banten tinggi gelombang pada musim timur lebih besar daripada musim barat, ketinggian gelombangnya rata-rata 2,07 meter dan dapat mencapai maksimum dengan ketinggian 4,3 meter. Sedangkan musim barat tinggi gelombang maksimum mencapai 2,4 meter dengan rata-rata 0,56 meter.

2.1.1.8 KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

Penataan ruang di Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 2023, terdiri atas 14 Bab dan 140 Pasal. Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Banten terdiri atas Ruang Lingkup Wilayah dan Ruang lingkup Substansi. Tujuan RTRW untuk mewujudkan penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang strategis, aman, nyaman, produktif berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri, dan pariwisata. Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang daerah. Kebijakan dan strategi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang kawasan lindung, pengembangan pola ruang kawasan budi daya, perwujudan kawasan strategis provinsi, dan rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertahanan dan keamanan (KSNT).

Salah satu pelaksanaan penataan ruang dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 21 Tahun 2021 salah satunya dilakukan melalui penilaian

perwujudan rencana tata ruang yang didalamnya menilai perwujudan pola ruang dan struktur ruang. Perwujudan pola ruang dilakukan melalui kesesuaian pemanfaatan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang tersebut, dilakukan dengan melakukan overlay penggunaan lahan eksisting tahun penilaian dengan rencana pola ruang RTRW.

2.1.1.9 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Provinsi Banten terdiri dari lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi teknis; sawah irigasi setengah teknis; sawah irigasi sederhana; sawah irigasi desa atau non PU; sawah tadah hujan; sawah pasang surut; sawah lebak; polder dan sawah lainnya; serta sawah yang sementara tidak diusahakan.

Total luas lahan sawah di Provinsi Banten pada Tahun 2023 sebesar 198.258,4 hektar atau 22,13 dari total keseluruhan sawah di Provinsi Banten, dengan luas sawah terbesar berada di Kabupaten Pandeglang dengan luas 52.640 Ha. Luas lahan bukan sawah mencapai 507.884,1 Ha atau sekitar 56,69 persen dari total luas Provinsi Banten. Terdapat 2 (dua) wilayah yang memiliki luas lahan bukan sawah terbesar di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Tabel II.2
Penggunaan Lahan di Provinsi Banten Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS PENGGUNAAN LAHAN (HA)		
		LAHAN SAWAH	LAHAN BUKAN SAWAH	LAHAN BUKAN PERTANIAN
1	Kab. Pandeglang	52.640,0	207.039,0	15.010,0
2	Kab. Lebak	51.298,0	206.190,0	46.984,0
3	Kab. Tangerang	36.202,0	20.403,0	39.356,0
4	Kab. Serang	47.901,5	53.007,0	42.219,1
5	Kota Tangerang	351,1	1.789,7	16.279,6
6	Kota Cilegon	1.364,4	6.894,0	9.271,6
7	Kota Serang	8.474,4	10.750,4	7.720,7
8	Kota Tangerang Selatan	7,0	1.811,0	12.907,0
Provinsi Banten		198.258,4	507.884,1	189.784,0

Sumber: BPN Provinsi Banten, 2022 (Data oleh Bappeda)

Sementara itu, luas lahan bukan pertanian di Provinsi Banten mencapai 189.784 hektar. Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan luas lahan bukan pertanian terbesar yang mencapai 46.984 hektar. Selanjutnya, disusul oleh Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.

2.1.1.10 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Provinsi Banten, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti pariwisata, pertanian, dan industri.

a. Pariwisata

Perwilayahan pembangunan pariwisata di Provinsi Banten terdiri dari 8 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP).

Tabel II.3
Kawasan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Banten

NO	DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	KAWASAN PENGEMBANGAN
1	DPP Pantai Utara Tangerang dan sekitarnya	a. KSPP Tangerang Utara dan sekitarnya b. KPPP Selar dan sekitarnya
2	DPP Kota Tangerang dan sekitarnya	a. KSPP Ciseane dan sekitarnya
3	DPP Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya	a. KPPP Situ Gunung dan sekitarnya b. KPPP Situ Pamulang dan sekitarnya c. KPPP Situ Rawa Kutuk dan sekitarnya
4	DPP Pantai Barat Serang dan sekitarnya	a. KSPP Anyer-Cinangra dan sekitarnya b. KPPP Pamarayan dan sekitarnya
5	DPP Pantai Utara Serang dan sekitarnya	a. KSPP Kawasan Kesultanan Banten dan sekitarnya b. KPPP Minapolitan Pontika dan sekitarnya
6	DPP Cilegon dan sekitarnya	a. KSPP Situ Rawa Arum dan sekitarnya b. KPPP Cikerei dan sekitarnya c. KPPP Cipala dan sekitarnya
7	DPP Pantai Barat-Selatan Pandeglang dan sekitarnya	a. KSPP Situ Rawa Arum dan sekitarnya b. KPPP Cikerei dan sekitarnya c. KPPP Cipala dan sekitarnya
8	DPP Pantai Selatan Lebak-Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya	a. KSPP Ujung Kulon dan sekitarnya b. KSPP Tanjung Lesung dan sekitarnya c. KSPP Carita dan sekitarnya

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 (Diolah oleh Supriatna)

b. Pertanian

Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043, luasan lahan pertanian kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel II.4
Luasan Lahan Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 (hektar)

NO	KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERTANIAN DALAM POLA RUANG (RA)	KP2B (RA)	LAHAN BAKU SAWAH (RA) (SESUAI SK MENTERI ATR MPN TAHUN 2024)	LUAS SAWAH YANG DILINDUNGI (RA) SESUAI SK MENTERI ATR BPN TAHUN 2021)
1	Kab. Lebak	171.052,523	27.987,96	52.035	49.542,76
2	Kab. Pandeglang	123.409,401	45.704,80	52.373	49.295,42
3	Kab. Serang	64.234,555	32.238,76	48.050	41.313,65
4	Kab. Tangerang	14.766,553	13.926,28	36.712	35.947,87

NO	KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERTANIAN DALAM POLA RUANG (HA)	KP2B (HA)	LAHAN BAKU SAWAH (HA) (SESUAI SK MENTERI ATR BPN TAHUN 2024)	LUAS SAWAH YANG DELINDUNGI (HA) SESUAI SK MENTERI ATR BPN TAHUN 2021)
5	Kota Cilegon	1.950,354	203,79	1.151	1.367,55
6	Kota Serang	4.985,115	3.034,87	7.353	7.595,56
7	Kota Tangerang	-	-	183	270,72
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-
Provinsi Banten		380.398,611	123.216,46	197.843	183.383,53

Sumber: APD Provinsi Banten, 2024 (Dilak oleh Bappeda)

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang tersebar pada 8 kabupaten/kota. Sektor pertanian di Provinsi Banten ini berkontribusi terhadap sumber pangan, penyerapan tenaga kerja bahkan pendorong bergeraknya sektor ekonomi lainnya. Sebagaimana pada Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 terdapat kawasan pertanian dalam pola ruang sebesar 380.398,611 Ha yang terbagi menjadi lebih kurang sebesar 124.263,54 Ha kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Sementara itu seluas 123.216,46 Ha sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan sawah baku seluas 204.334,98 Ha.

c. Industri

Sektor perindustrian memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 kurang lebih sebesar 60.762 Ha luas lahan di Provinsi Banten diperuntukkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Tabel II.5
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pandeglang	10	9	10	8	13
2	Kab. Lebak	27	26	29	26	42
3	Kab. Tangerang	1.137	1.131	1.353	1.596	1.827
4	Kab. Serang	243	236	306	349	362
5	Kota Tangerang	776	731	941	1.022	855
6	Kota Cilegon	95	86	103	99	88
7	Kota Serang	40	31	37	33	33

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN				
		2017	2018	2019	2020	2021
8	Kota Tangerang Selatan	185	180	148	158	179
Provinsi Banten		2.513	2.430	2.927	3.291	3.399

Sumber: SPD Provinsi Banten, 2022 (Dolah oleh Bappenas)

Jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Banten pada Tahun 2021 sebanyak 3.399 perusahaan, dengan Kabupaten Tangerang sebagai daerah terbanyak memiliki industri sebanyak 1.827 perusahaan, sementara yang paling sedikit adalah Kabupaten Pandeglang dengan 13 perusahaan. Kawasan industri prioritas di Provinsi Banten direncanakan di Kawasan Industri Wilmar Serang yang berada di wilayah bagian utara Provinsi Banten.

2.1.1.11 WILAYAH RAWAN BENCANA

Provinsi Banten secara geografis merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau Jawa, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) bahkan potensi ancaman bencana sebagai konsekuensi letak geografis yang berdekatan dengan patahan Sumatera dan Cincin Api (terdekat Gunung Anak Krakatau).

Tabel II.6
Potensi Luas Bahaya per Jenis Ancaman Bencana di Provinsi Banten

NO	JENIS BAHAYA	LUAS BAHAYA (HA)				KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Banjir	8.750	126.354	135.876	267.980	Tinggi
2	Banjir Bandang	5.419	10.252	20.951	36.622	Tinggi
3	COVID-19	775.233	110.250	80.799	966.292	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	340.783	126.013	387.650	854.445	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	951.573	-	-	951.573	Rendah
6	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	8.036	1.867	6.275	13.178	Tinggi
7	Gempa Bumi	198.934	388.502	179.056	966.292	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	221.957	113.029	72.750	407.736	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	28.851	1.536	-	30.387	Sedang
10	Kekeringan	-	796.812	169.480	966.292	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Karung	7.713	1.407	-	9.120	Sedang
12	Letusan Gunungapi Pulisan	6.892	1.483	507	8.881	Tinggi
13	Likuefaksi	30.077	161.518	6.937	198.533	Sedang
14	Tanah Longsor	31.463	106.228	184.401	324.093	Tinggi
15	Tsunami	5.219	1.481	12.836	19.536	Tinggi

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Banten Tahun 2023-2027 (Dolah oleh Bappenas)

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 kawasan rawan bencana tersebut meliputi rawan banjir, rawan tsunami, rawan gempa bumi, rawan kebakaran hutan dan lahan, rawan cuaca ekstrem,

angin topan dan puting beliung, rawan tanah longsor, rawan kekeringan dan rawan gagal teknologi.

Potensi bencana di Provinsi Banten dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Seluruh bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kembali. Kelas bahaya bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Banten.

Memperhatikan tabel terkait potensi luas bahaya per jenis ancaman bencana di Provinsi Banten, bahwa tingkat bahaya di Provinsi Banten berada pada rentang kelas rendah, sedang, dan tinggi. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu epidemik wabah penyakit sedangkan tingkat bahaya sedang yaitu kegagalan teknologi, letusan gunungapi Karang, dan likuefaksi. Bencana yang memiliki tingkat bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, COVID-19, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi pulosari, dan tanah longsor. Kondisi ini wajib menjadi pertimbangan di Provinsi Banten untuk memasukan program prioritas dan anggaran penanggulangan bencana khususnya untuk tingkat bahaya tinggi.

Total luas wilayah rawan banjir di Provinsi Banten secara keseluruhan adalah 267.980 Ha dan berada pada kelas bahaya tinggi. Secara lebih rinci, kelas bahaya tersebut dibagi menjadi 3 kelas bahaya, yaitu bahaya dengan kelas rendah seluas 5.750 Ha, bahaya dengan kelas sedang seluas 126.345 Ha, sedangkan daerah dengan kelas bahaya tinggi memiliki luas sebesar 135.876 Ha. Kabupaten/kota dengan bahaya banjir terluas adalah Kabupaten Serang dengan luas sebesar 74.898 Ha dan masuk dalam kelas bahaya tinggi.

Tabel II.7
Tingkat Risiko per Jenis Ancaman Bencana di Provinsi Banten

NO	JENIS BAHAYA	KELAS BAHAYA	KELAS KERENTANAN	KELAS KAPASITAS	KELAS RISIKO
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	COVID-19	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
6	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
10	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Karang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

NO	JENIS BAHAYA	KELAS BAHAYA	KELAS KERENTANAN	KELAS KAPASITAS	KELAS RISIKO
12	Letusan Gunungapi Pulosari	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
13	Likuefaksi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
14	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
15	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Rencana Pembangunan Bencana Provinsi Banten Tahun 2023-2027 (Molah oleh Bappeda)

Memperhatikan tabel terkait tingkat risiko per jenis ancaman bencana di Provinsi Banten, bahwa tingkat risiko bencana di Provinsi Banten menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko rendah untuk bencana COVID-19, epidemik wabah penyakit. Tingkat risiko sedang untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, kekeringan, letusan gunungapi Pulosari, Tanah Longsor dan tsunami memiliki tingkat risiko tinggi.

Berdasarkan tabel potensi kerugian dan kerusakan lingkungan per jenis ancaman bencana di Provinsi Banten, dapat diketahui bahwa kelas kerugian rendah ada pada bahaya kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan, kelas kerugian sedang ada pada bahaya gelombang ekstrem, kegagalan teknologi dan letusan gunungapi sedangkan jenis bahaya lain memiliki kelas kerugian tinggi. Untuk kelas kerusakan rendah untuk jenis bahaya Tsunami. Kelas kerusakan sedang pada banjir bandang. Kelas kerusakan tinggi pada banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi, likuefaksi dan tanah longsor.

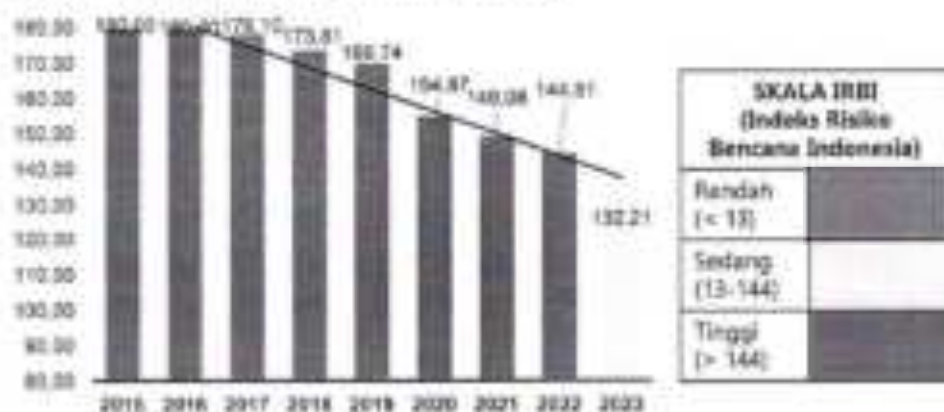
Tabel II.8
Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan per Jenis Ancaman Bencana di Provinsi Banten

NO	JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN (JUTA RUPIAH)			KELAS	POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FSHK	EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS
1	Banjir	21.807.159	14.200.886	36.008.045	Tinggi	1.198	Tinggi
2	Banjir Bandang	2.233.452	928.473	3.161.925	Tinggi	98	Sedang
3	COVID-19	-	-	-	-	-	-
4	Cuaca Ekstrem	98.169.815	23.543.209	118.712.824	Tinggi	-	-
5	Epidemi Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
6	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	630.913	40.373	671.286	Sedang	715	Tinggi
7	Gempabumi	28.761.401	16.366.343	45.127.744	Tinggi	-	-
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.143.607	1.143.607	Rendah	10.598	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	3.627	487	4.114	Sedang	-	-
10	Kekeringan	-	21.983.823	21.983.823	Rendah	43.301	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Karang	2.985	45.379	48.364	Sedang	308	Tinggi
12	Letusan Gunungapi Pulosari	45.411	205.269	250.680	Tinggi	878	Tinggi

NO	JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN (JUTA RUPIAH)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS
13	Likuefaksi	7.367.543	815.718	8.283.259	Tinggi	511 Tinggi
14	Tanah Longsor	3.127.257	9.524.341	7.651.578	Tinggi	9.802 Tinggi
15	Tsunami	1.053.416	84.208	1.127.620	Tinggi	26 Rendah

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Banten Tahun 2023-2027 (Disalah oleh Dapgedu)

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir di Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki karakteristik topografi datar dan berada di sekitar sungai. Potensi bencana banjir di Provinsi Banten didominasi di wilayah bagian utara yang termasuk wilayah padat penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan dengan parameter bahaya banjir, maka didapatkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Banten sebagaimana tabel di atas.

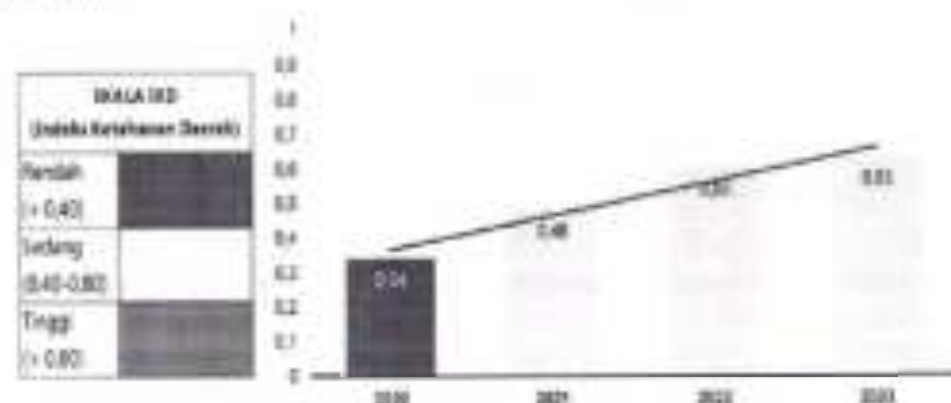


Gambar II.2
Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) di Provinsi Banten Tahun 2015-2023
 (Sumber: BNPB, 2024; Disalah oleh Dapgedu)

Di Tahun 2015-2022 diperoleh realisasi nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) di Provinsi Banten yang masih masuk kepada kategori tinggi seperti pada gambar di atas, hal tersebut menggambarkan kondisi yang tidak baik, masih kurangnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana khususnya di Wilayah Provinsi Banten yang memiliki risiko tinggi. Lebih lanjut kesiapan masyarakat di Tahun 2019 belum juga menampilkan performa yang baik, karena diperolehnya capaian yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Namun, tren positif baru dapat ditampilkan di Tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan nilai capaian terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Banten sejak Tahun 2020 hingga 2023 mengalami kenaikan, dengan data tertinggi sepanjang kurun waktu Tahun 2020-2023 yaitu 0,63 (skala sedang). Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan IRB di Provinsi Banten, sehingga mencapai nilai 132,21 (skala sedang). Keberhasilan atas pencapaian target

kinerja IKD dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparaturnya dan masyarakat Banten untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain itu juga didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terkait yang berjalan dengan baik.



Gambar II.3
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Banten Tahun 2020-2023
(Sumber: BNPB, 2024; Diolah oleh Appedia)

2.1.1.12 KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERUBAHAN IKLIM

Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten masih terjaga kelestariannya, termasuk di kawasan lindung, seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir, dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

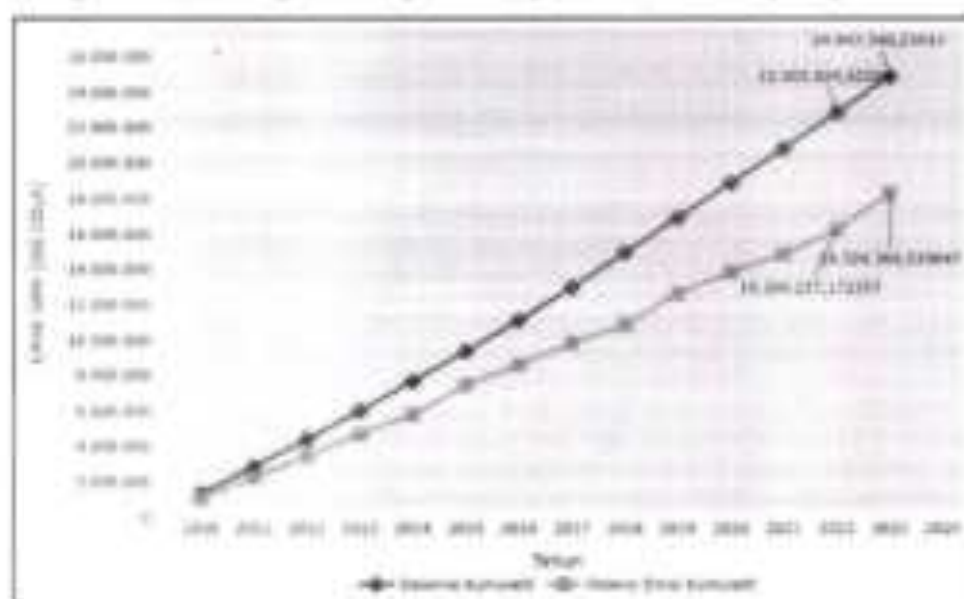
Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, namun masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktivitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai

sebagai akibat aktivitas industri dan pemukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (*up land*) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai, dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun), abrasi pantai, hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung, eksploitasi sumber daya alam yang berlebih (*over exploitation*) dan bencana alam.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kualitas air dan kuantitas air. Aspek kualitas air dimana pencemaran air sungai dan air laut menunjukkan kondisi yang semakin buruk dengan berbagai sumber pencemar. Aspek kuantitas air tanah lambat laun menunjukkan kondisi yang semakin kritis akibat semakin banyaknya penggunaan air tanah dalam.

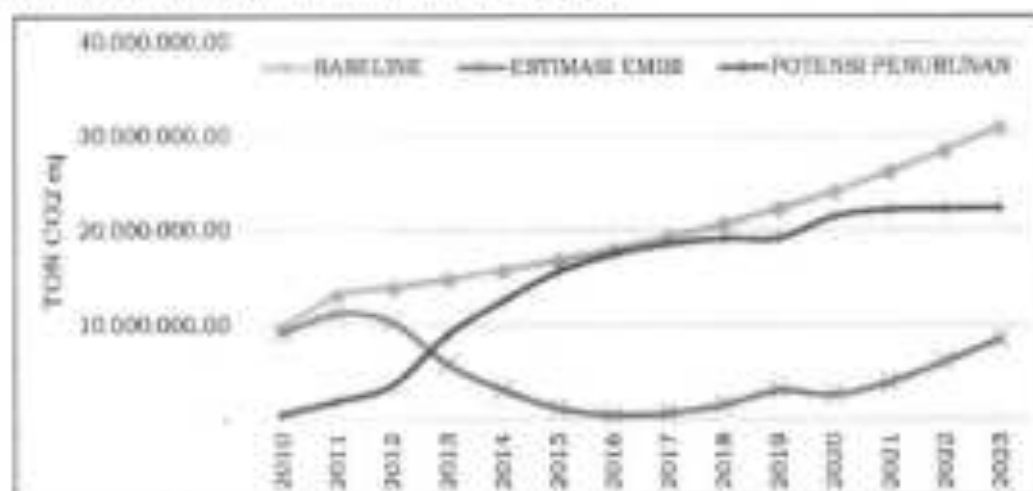
Implementasi kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Provinsi Banten telah dilaksanakan sejak Tahun 2010, dimulai dengan penyusunan dan implementasi RAD-GRK dan dilanjutkan dengan PRK. Kegiatan PRK di Provinsi Banten dikoordinasikan oleh Bappeda dan implementasi dilaksanakan oleh OPD teknis terkait di bidang kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah.



Gambar II.4
Nilai Baseline dan Potensi Emisi Tahunan Kumulatif Hingga 2023
(Sumber: NPD Provinsi Banten, 2023; Diolah oleh Bappeda)

Pada tabel di bawah terlihat potensi penurunan emisi rumah kaca di Provinsi Banten cenderung fluktuatif. Secara total kumulatif sampai

dengan Februari 2023, telah tercatat terdapat 1.387 kegiatan aksi PRK dalam sistem AKSARA dengan potensi capaian sebagai berikut. Potensi Penurunan Emisi GRK 8.570.561,8 juta ton CO₂e atau 72,2 persen dibandingkan dengan *baseline* Tahun 2021.



Gambar II.5
Capaian Kumulatif Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Banten
Tahun 2010-2023
(Sumber: Aksara Bupptenas, 2024)

Pada Tahun 2023 terlaksana 8 Aksi PRK. Secara total kumulatif sampai dengan Februari 2023, telah tercatat terdapat 1.387 kegiatan aksi PRK dalam sistem AKSARA dengan potensi capaian yaitu Potensi Penurunan Emisi GRK 8.570.561,8 juta ton CO₂e atau 72,2 persen dibandingkan dengan *baseline* Tahun 2023.

Perencanaan dan implementasi pembangunan saat ini harus dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan perlu dikedepankan untuk meminimalisir degradasi mutu lingkungan yang akan dan sudah terjadi saat ini. Gambaran kondisi permasalahan dalam bidang lingkungan berupa terbatasnya daya dukung lingkungan dan belum optimalnya pengelolaan sumber hutan serta penanganan ketahanan iklim dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Permasalahan lainnya yang perlu penanganan adalah penurunan kualitas air, udara, air laut, akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dilihat berdasarkan masih rendahnya nilai IKLH di Provinsi Banten sebesar 65,52 dimana sebelumnya mencapai 63,52. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi pencemaran udara ini dikarenakan semakin banyaknya kendaraan dan pembangunan wilayah industri di Provinsi Banten. Selain itu indeks kualitas air dipengaruhi oleh kualitas air sungai

yang banyak mengandung bahan kimia dimana air limbah industri dan rumah tangga menjadi faktor memburuknya kualitas air sungai. Beberapa sungai yang tercemar antara lain Cidurian, Ciujung, Cisadane, dan Cimanceuri.

Tabel II.9
Indeks Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 (indeks)

NO	INDEKS	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	49,02	56,66	62,94	62,73	63,52	62,52
2	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,33	52,07	54,83	54,47	55,96	58,93
3	Indeks Kualitas Air Laut (Indeks)	-	-	78,91	85,92	77,76	82,95
4	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	72,36	73,35	73,74	74,14	73,89	66,67
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	29,03	48,09	37,09	29,85	39,06	43,13

Sumber: SDG Provinsi Banten, 2024 (Diolah oleh Rappesha)

Terkait dengan isu permasalahan penurunan GRK, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan Kaji Ulang GRK 2018-2030. Hasil perhitungan nilai baseline dan perkiraan penurunan emisi pada Tahun 2030 menunjukkan bahwa dari berbagai kegiatan mitigasi yang diusulkan diproyeksikan dapat menurunkan emisi hingga 14,48 persen dari BAU baseline pada Tahun 2030. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras dari seluruh stakeholder yang memiliki peranan dalam aksi bersama penurunan emisi gas rumah kaca mengingat target Pemerintah Pusat dalam penurunan emisi GRK ini sebesar 27,3 persen di Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa estimasi penurunan Emisi GRK hanya 14,48 persen. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari capaian rata-rata nasional yang mencapai nilai 22,6 persen di Tahun 2018 (lampiran 1 RPJMN 2020-2024) dan target SDG's sebesar 29 persen di Tahun 2030. Upaya penurunan yang harus secara intensif dilakukan adalah pada bidang mitigasi Pertanian serta Energi dan transportasi.

Tabel II.10
Nilai Baseline dan Estimasi Penurunan Emisi GRK Tahun 2030

NO	BIDANG MITIGASI	BAU BASELINE (tonCO ₂ eq)	ESTIMASI PENURUNAN EMISI GRK PADA TAHUN 2030	
			tonCO ₂ eq	PERSEN
1	Pertanian	3.258.217,46	9990,55	0,31
2	Kehutanan	640.333,27	233.150,40	36,41
3	Energi dan Transportasi	104.107.491,00	14.951.773,00	14,37
4	Limbah	4.143.200,00	1.036.630,00	25,02
Total		112.149.241,73	16.241.543,95	14,48

Sumber: Dokumen Kaji Ulang GRK 2018-2030 (Diolah oleh Rappesha)

Kebijakan Mitigasi Penurunan dan Intensitas Emisi GRK Sektoral dalam rangka Penurunan Emisi GRK Sektoral antara lain:

a. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Kegiatan yang paling banyak dilaksanakan adalah penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pembangunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm, Hutan Desa, Hutan Kota, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat), serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan maupun *illegal logging*).

b. Bidang Pertanian

Kegiatan yang paling banyak dilaporkan pada bidang pertanian adalah kegiatan pengelolaan tanaman terpadu.

c. Bidang Energi

Kegiatan mitigasi yang mendominasi pelaporan pada bidang energi adalah kegiatan pembangunan energi terbarukan *off grid* dalam bentuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Selain itu, kegiatan mitigasi berupa substitusi bahan bakar fosil juga banyak dilaporkan. Kegiatan pendukung lainnya seperti program sosialisasi ataupun penyusunan *feasibility study* suatu pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

d. Bidang Transportasi

Aksi mitigasi yang mendominasi pelaporan antara lain aksi mitigasi hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), reformasi sistem transit, dan *smart driving* (*eco driving*).

e. Bidang Pengelolaan Limbah

Kegiatan yang banyak dilakukan oleh provinsi meliputi, sub-bidang persampahan domestik: pemanfaatan gas metan di TPA, proses komposting di TPST/TPS 3R, dan proses *reuse* dan *recycle* sampah kertas/kardus/karton di bank sampah. Sub-bidang air limbah: operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) baik itu secara aerobik dan anaerobik.

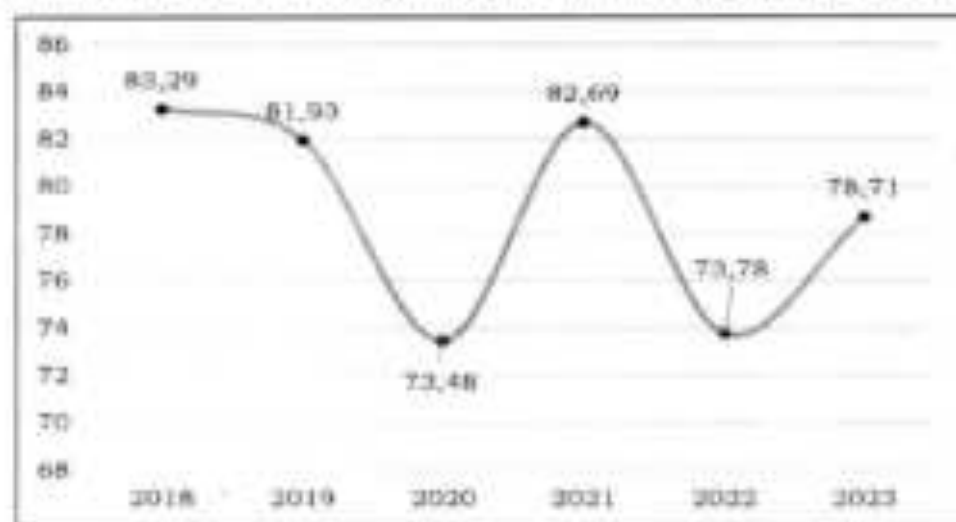
2.1.1.13 INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah melalui 3 (tiga) aspek seperti: 1) ketersediaan pangan; 2) keterjangkauan pangan; dan 3) pemanfaatan pangan. IKP dilakukan pengukuran oleh Badan Pangan

Nasional yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Lebih lanjut, kondisi ideal terhadap konsumsi pangan yang berpedoman pada standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari, yaitu sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein. Rata-rata konsumsi kalori penduduk di Provinsi Banten pada 2023 menunjukkan angka sebesar 2.207,37 kkal yang sudah mencapai standar kecukupan yang ditentukan, sedangkan rata-rata konsumsi protein juga sudah di atas standar kecukupan yakni sebesar 66,93 gram protein.

Secara umum, IKP di Provinsi Banten mengalami penurunan nilai di Tahun 2022 sebesar 8,91 poin dan meningkat kembali di Tahun 2023 dengan nilai 78,71, selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar II.6
Nilai Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2018-2023 (nilai)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappeda)

2.1.1.14 ENERGI

Energi dan emisi merupakan dua variabel yang penting dalam konteks pengembangan ekonomi hijau. Penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi sumber pemanasan global dan perubahan iklim.

a. Energi Listrik

Salah satu jenis energi yang cukup penting bagi suatu perekonomian adalah penggunaan energi listrik. Secara umum, kondisi kelistrikan di Provinsi Banten sudah cukup baik. Dari sisi *supply*, di Provinsi Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT. Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi *demand*, distribusi atau penjualan listrik PLN di

Provinsi Banten dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

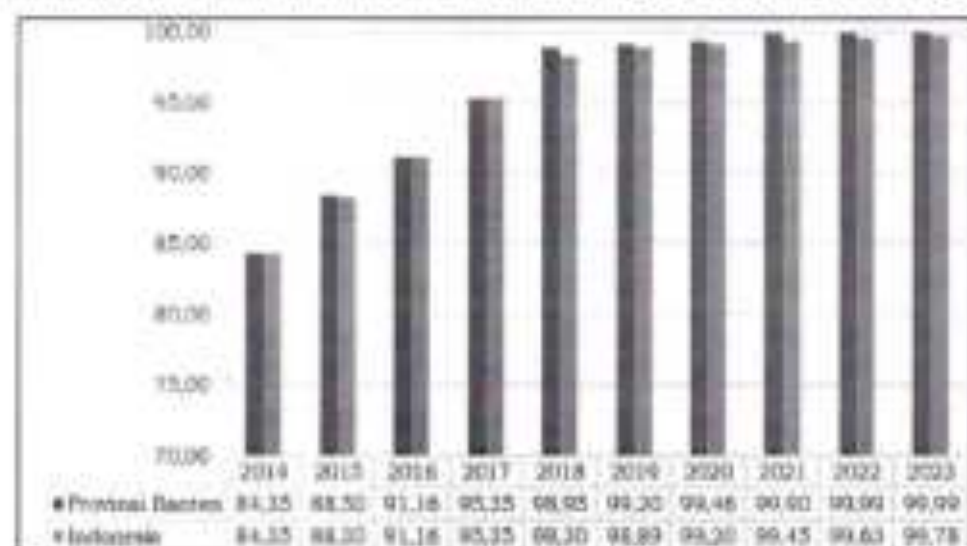
Tabel II.11
Daya Listrik Terpasang di Provinsi Banten

KABUPATEN/ KOTA	DATA LISTRIK TERPASANG (KWH)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	210.715.718	231.913.686	204.876.510	249.223.260	294.566.816	307.880.060
Kab. Lebak	383.383.626	419.833.676	473.621.720	502.866.070	476.993.888	509.334.300
Kab. Serang	3.877.062.651	3.287.742.301	3.403.422.404	3.583.002.732	4.687.279.653	4.546.744.702
Kota Serang	1.320.036.750	1.396.794.400	1.686.258.000	1.876.560.450	2.115.916.300	2.263.153.800
Kota Tangerang	1.807.083.119	1.933.983.683	1.528.498.186	1.658.512.586	2.214.407.436	2.306.826.986
Kota Cilegon	1.481.011.240	1.466.344.320	1.463.443.000	1.522.771.070	1.826.209.550	1.964.362.800
Kota Tangerang Selatan	227.345.810	247.264.310	306.344.310	385.946.650	398.579.500	390.686.600
Kota Tangerang Selatan	2.534.469.750	2.145.193.600	2.156.514.600	2.292.092.300	1.810.693.450	1.952.884.300
Provinsi Banten	10.201.087.000	11.062.119.942	11.347.379.000	12.284.560.646	13.499.366.196	13.408.127.176

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (Diolah oleh Bappenas))

Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di masing-masing kabupaten/kota. Daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten diikuti oleh Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga.

Gambar di bawah menunjukkan realisasi rasio elektrifikasi antara Provinsi Banten dengan nasional, diketahui bahwa di Tahun 2023 Provinsi Banten telah mencatatkan realisasi rasio elektrifikasi lebih kurang sebesar 99,99 persen. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menginformasikan bahwa realisasi rasio elektrifikasi nasional di Tahun 2023 sebesar 99,78 persen.



Gambar II.7
Perkembangan Perbandingan Realisasi Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2014-2023

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappenas)

b. Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Realisasi terhadap indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral Tahun 2018-2022 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana pada tabel di bawah, di Tahun 2022 indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB mengalami penurunan realisasi sebesar 0,07 persen dari 0,68 persen pada Tahun 2020 menjadi 0,55 persen, hal ini dimungkinkan terjadi akibat ketidakpastian hukum terkait kewenangan provinsi di sub sektor mineral dan batubara pasca terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut menghapus semua kewenangan provinsi dalam pengelolaan mineral dan batubara, hal tersebut berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan program dan kegiatan terkait mineral dan batubara di Tahun 2022.

Jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten pada Tahun 2023 adalah sebanyak 155 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan andesit (64 perusahaan), pasir kuarsa (21 perusahaan), dan pasir darat (20 perusahaan). Jumlah perusahaan ini menurun 16,22 persen dari Tahun 2021. Jika dilihat berdasarkan wilayah penambangannya, pada Tahun 2022, jenis bahan tambang emas memiliki area tambang terluas yaitu mencapai 7,76 ribu hektar, diikuti oleh area tambang batu gamping seluas 6,31 ribu hektar, dan area tambang pasir laut seluas 5,83 ribu hektar.

c. Energi Baru Terbarukan

Secara definisi, Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah kegiatan pengusahaan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non-listrik yang di dalamnya meliputi kegiatan wisata, agribisnis, industri dan kegiatan lainnya yang menggunakan panas bumi secara langsung.

- i. Kaldera Danau Banten: Surat Keputusan Kementerian ESDM Nomor 0026/K/30/MEM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- ii. Gunung Endut: Surat Keputusan Kementerian ESDM Nomor 1154/K/30/MEM/2011 tanggal 21 April 2011.

Pada Tahun 2021, terdapat 2 (dua) WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan akan diinventarisir 4 (empat) wilayah sumber panas bumi di Banten yang diperkirakan memiliki potensi pemanfaatan langsung (manifestasi) yang jumlahnya belum diketahui (N/A) dan belum ada pengembangan atau rencana pemanfaatannya sampai dengan kondisi 2021, yaitu:

- i. Wilayah Rawa Dano;
- ii. Wilayah Gunung Karang;
- iii. Wilayah Gunung Pulosari; dan
- iv. Wilayah Gunung Endut.

Tabel II.12
Potensi Sumber Panas Bumi di Provinsi Banten

NO	WKP	LOKASI POTENSI	POTENSI (MW)	LUAS WKP	KETERANGAN
1	Kaldera Dano, Banten	1. Rawa Dano: 85 MW 2. Gunung Karang: 86 MW 3. Gunung Pulosari: 87	115 (possible)	104.300 Ha	WKP
2	Gunung Endut	Gunung Endut: 88 MW	80 (Cadangan Terdaftar)	25.870 Ha	WKP
3	Pamanculan	Pamanculan: 225 MW	225 (Cadangan Terdaftar)	-	Non WKP

Sumber: RPD Provinsi Banten, 2023 (Dolah oleh Dgppada)

Sesuai Rencana Umum Energi Nasional, potensi energi di Provinsi Banten sebagaimana pada Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Banten Tahun 2022-2050 seperti pada tabel di bawah.

Tabel II.13
Potensi Energi di Provinsi Banten

NO	JENIS ENERGI	SATUAN	POTENSI
1	Arus Laut	MW	227,3
2	Batu	MW	1.753
3	Biogas	MW	118,6
4	Biomassa	MW	346,5
5	Surya	MW	2.461
6	Panas Bumi (cadangan)	MW	365
7	Minihidro/Mikrohidro	MW	72
8	Batu bara (cadangan)	Juta Ton	7,23

Sumber: Ditjen EBTKE-KESDM RI, PSDMHP Banten Geologi RESDM RI pada Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022

2.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

2.1.2.1 STRUKTUR PENDUDUK

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk di Provinsi Banten yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

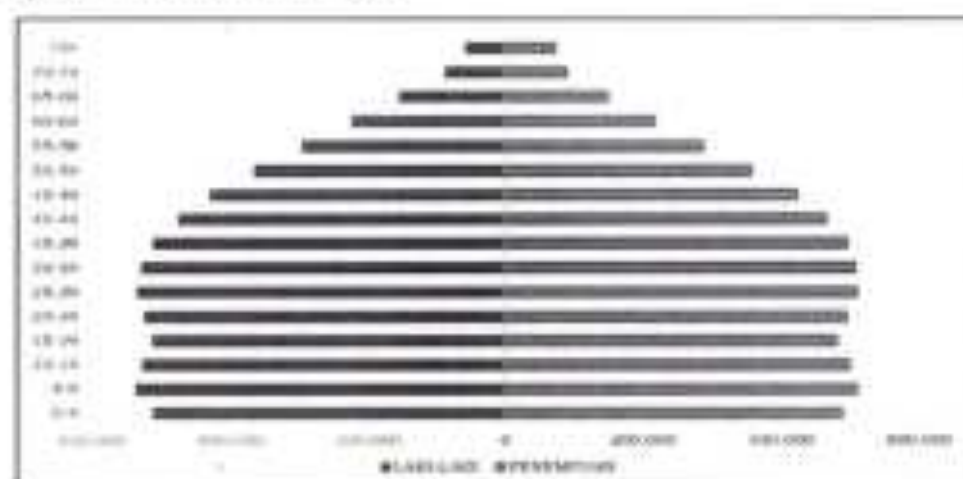
Dari kelompok umur, susunan penduduk berdasarkan umurnya dapat mudah dipahami dari gambar piramida penduduk, yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk berusia muda lebih banyak dari jumlah penduduk usia tua. Dari data usia penduduk tersebut juga dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Dependency ratio* adalah rasio yang menggambarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun) yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tabel II.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten (jiwa) Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0-4	511.518	499.283	1.000.801
5-9	534.556	510.723	1.045.279
10-14	525.883	498.863	1.024.746
15-19	512.430	481.126	993.556
20-24	523.505	495.614	1.019.119
25-29	534.139	510.080	1.044.219
30-34	527.210	507.518	1.034.728
35-39	510.637	495.797	1.006.434
40-44	474.327	464.557	938.884
45-49	428.662	422.554	851.216
50-54	364.360	357.568	721.928
55-59	294.603	287.271	581.873
60-64	222.713	215.194	437.907
65-69	153.514	147.931	301.445
70-74	86.929	88.285	175.214
75+	57.542	71.641	129.183
Total	6.262.727	6.045.005	12.307.732

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Diolah oleh Supriyadi)

Pada Tahun 2023 jumlah penduduk di Provinsi Banten sebesar 12.307.732 jiwa, hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) yang memperhatikan terhadap hasil sensus penduduk (SP) 2020 (September) dan berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2020-2035 hasil sensus penduduk Tahun 2020.



Gambar II.5
Piramida Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2023
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Supriyadi)

Dari kelompok jenis kelamin, susunan penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Penghitungan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah cara penggambaran susunan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu dengan menghitung perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

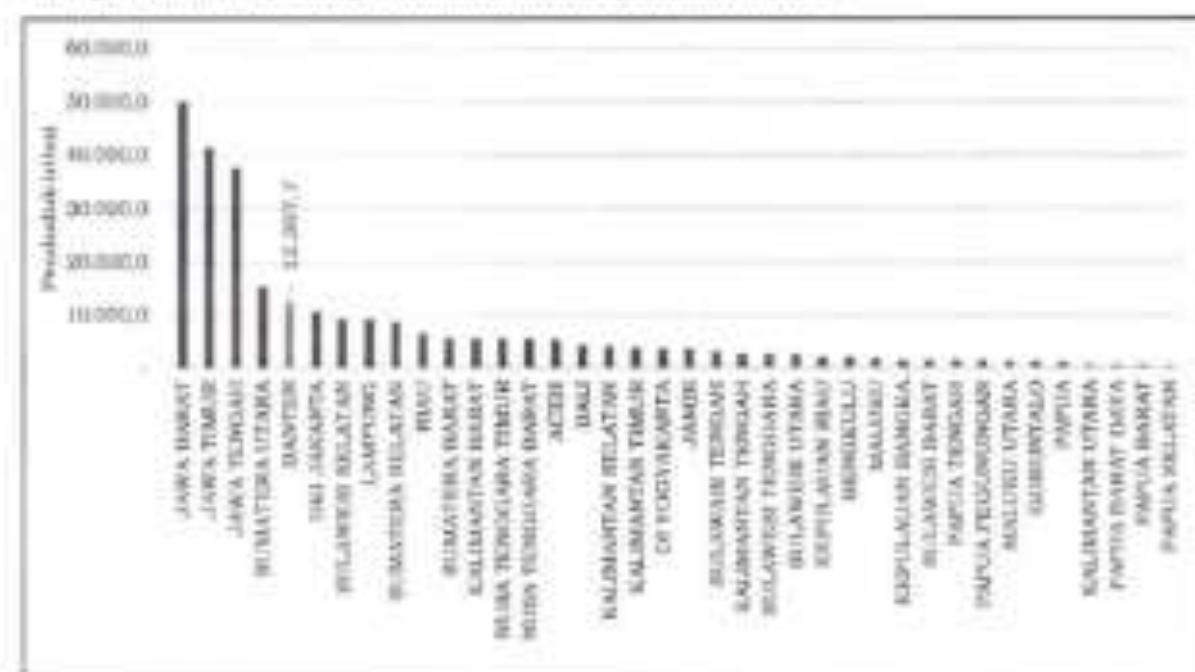
Tabel II.15
Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Persentase Jumlah Penduduk serta Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	RASIO JENIS KELAMIN	PERSENTASE PENDUDUK (PERSEN)	KEPADATAN PENDUDUK PER KM PERSEGI
1	Kabupaten Pondokgang	1.312.766	103,14	10,67	474
2	Kabupaten Lebak	1.433.698	105,83	11,85	433
3	Kabupaten Tangerang	3.362.605	104,31	27,32	3.272
4	Kabupaten Serang	1.882.133	104,35	13,67	1.144
5	Kota Tangerang	1.950.580	101,83	15,85	10.937
6	Kota Cilegon	450.507	102,80	3,86	2.772
7	Kota Serang	723.794	104,33	5,88	2.723
8	Kota Tangerang Selatan	1.391.649	99,75	11,31	8.441
Provinsi Banten		12.307.732	103,60	100,00	1.316

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Ditolah oleh Bappenas)

2.1.2.2 JUMLAH PENDUDUK

Menurut data Tahun 2023, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-5 sebagaimana data yang disajikan pada gambar di bawah ini, dengan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi paling besar jumlah penduduknya dan Provinsi Papua Selatan sebagai daerah paling rendah jumlah penduduknya.

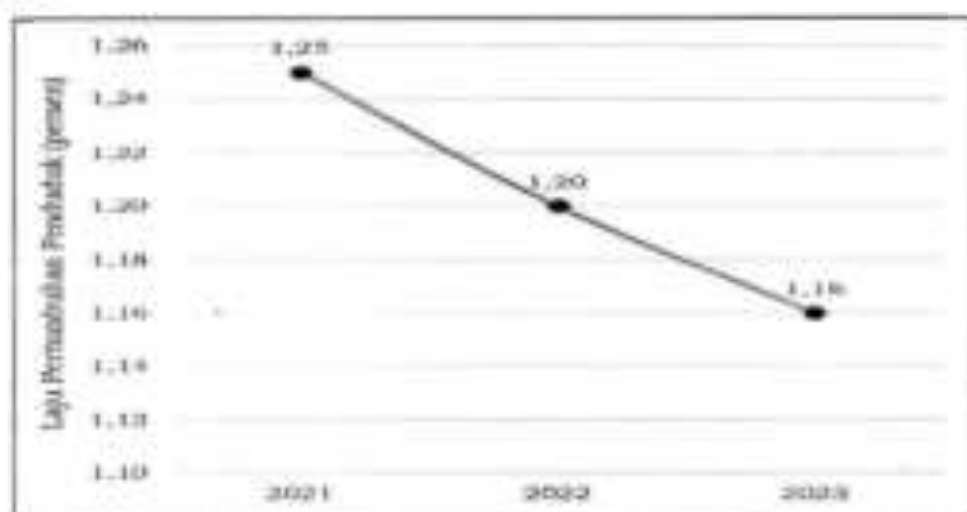


Gambar II.9
Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2023
(Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2024; Ditolah oleh Bappenas)

2.1.2.3 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Memperhatikan data yang disajikan pada Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPS, terhadap angka laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya pelambatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk secara teoritis adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu, yang mana angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar melalui perhitungan metode geometrik.

Jika berbicara persebaran penduduk di Provinsi Banten Tahun 2023 mencapai 1.316 jiwa/km². Kota Tangerang menjadi wilayah terpadat dengan tingkat kepadatan sebesar 10.937 jiwa/km² dan Kabupaten Lebak sebagai wilayah yang paling rendah tingkat kepadatannya sebesar 433 jiwa/km².



Gambar II.10
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2021-2023
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Rappedia)

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA

2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dianalisis melalui pembahasan pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, angka input dan output, indeks/koeffisien gini, pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia, indeks/koeffisien williamson, klasifikasi perkotaan dan perdesaan, garis kemiskinan, angka kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, kemiskinan ekstrem, indeks pembangunan manusia, keluarga prasejahtera dan sejahtera, persentase PAD terhadap pendapatan daerah, cadangan pangan,

pandemi mencapai titik -3,09 persen dan berhasil tumbuh kembali pada Tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,03 persen.



Gambar II.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten
Tahun 2018-2023

(Sumber: Ditolah oleh Bappeda, 2024)

Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Banten secara umum cenderung stabil dan Kota Tangerang merupakan kota dengan laju pertumbuhan tertinggi 5,7 persen per tahunnya. Pada Tahun 2020 terjadi perlambatan ekonomi sehingga laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota turun sekitar -0,5 persen sampai 2 persen kecuali Kota Tangerang yang menurun hingga 7 persen.

b. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi yang menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk selama kurun waktu tertentu. Tabel di bawah ini menunjukkan PDRB ADHB dan ADHK per kapita menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2023.

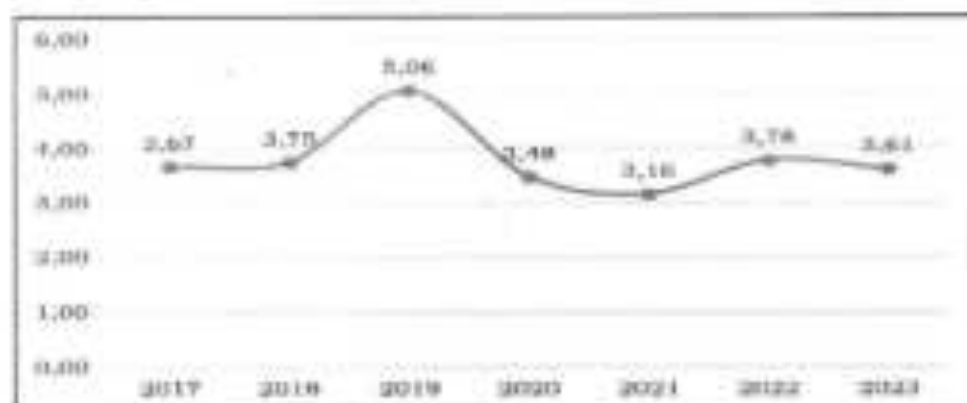
Tabel II.16
PDRB ADHB dan ADHK per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2023 (dalam ribu rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	PDRB PER KAPITA	
		ADHB 2023*	ADHK 2023*
1	Kabupaten Pandeglang	25.913,27	16.256,58
2	Kabupaten Lebak	24.810,66	13.837,92
3	Kabupaten Tangerang	51.538,22	32.287,60
4	Kabupaten Serang	56.523,73	35.889,29
5	Kota Tangerang	105.915,85	61.038,43
6	Kota Cilegon	287.525,89	187.649,79
7	Kota Serang	55.040,78	35.446,00
8	Kota Tangerang Selatan	75.010,07	49.985,51
Provinsi Banten		66.147,39	41.328,33

Sumber: SPD Prostat Banten, 2024 (Ditolah oleh Bappeda)

Nilai PDRB per kapita paling tinggi tercatat pada Kota Cilegon dengan angka sebesar 287.525,89 (ADHB) dan 187.649,79 (ADHK), sementara Kabupaten Lebak memperoleh angka rendah di kisaran

24.810,66 (ADHB) dan 15.837,92 (ADHK). Besaran PDRB per kapita ini sangat bergantung pada jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota, dimana kabupaten/kota dengan penduduk banyak cenderung memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang relatif lebih banyak.

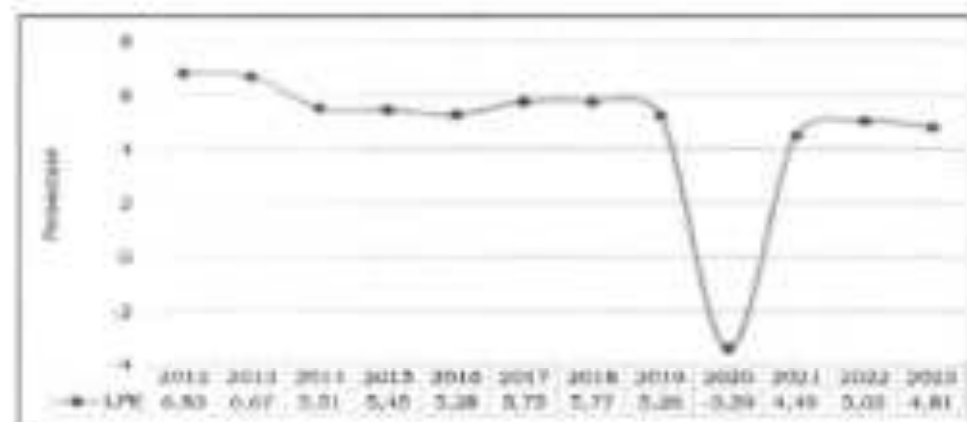


Gambar II.13
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK di Provinsi Banten
Tahun 2017-2023 (persen)

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Didah oleh Bappenas)

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

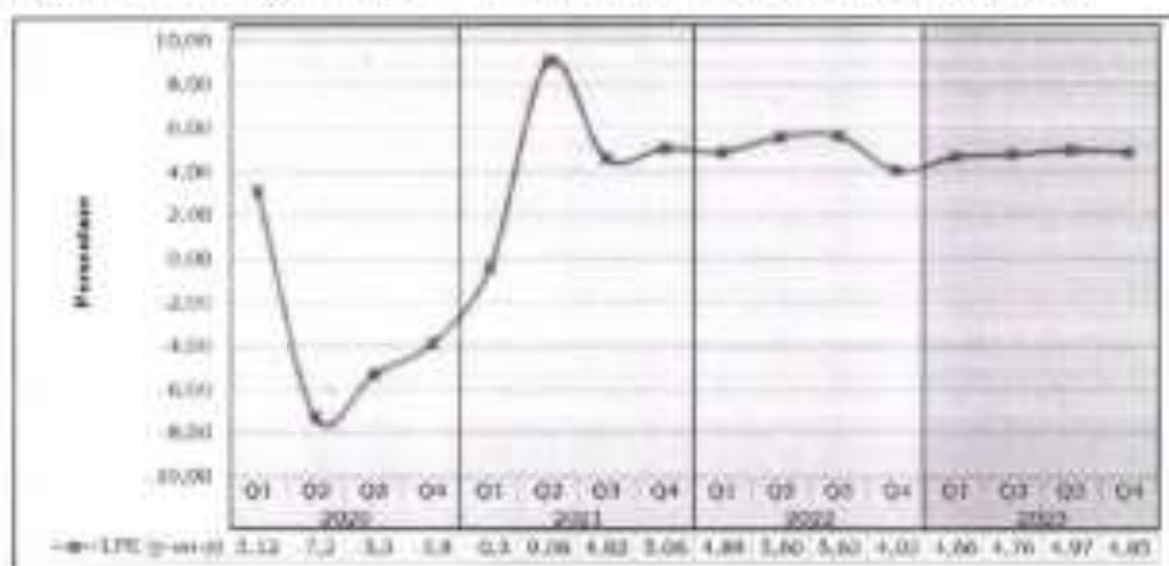
Perekonomian di Provinsi Banten pada Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp814,12 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp66,15 juta atau US\$ 4.341,08. Perekonomian di Provinsi Banten pada Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,81 persen, tumbuh melambat dibandingkan Tahun 2022 yang tumbuh 5,03 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,44 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen total net ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,35 persen.



Gambar II.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2012-2023 (persen)

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Didah oleh Bappenas)

Perekonomian di Provinsi Banten pada Triwulan IV-2023 terhadap Triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,85 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,88 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPR) sebesar 10,72 persen. Perekonomian di Provinsi Banten pada Triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 17,50 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,63 persen.

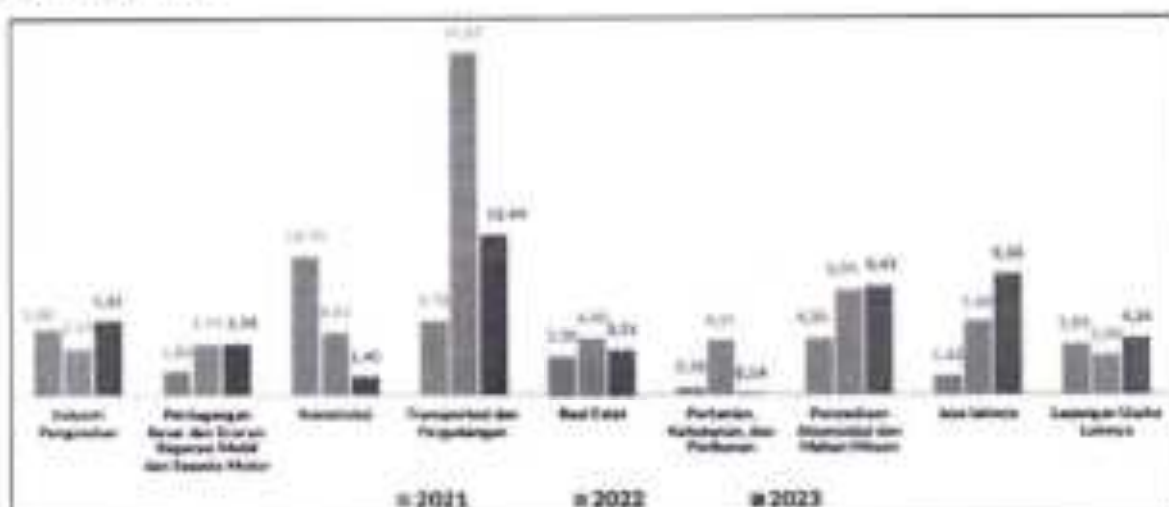


Gambar II.16
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Triwulan IV-2023 (y-on-y)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024) Ditolah oleh Bappenas

Lima lapangan usaha yang memiliki *share* besar terhadap perekonomian di Provinsi Banten pada Triwulan IV-2023 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,84 persen serta Real Estat 0,54 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi masing-masing sebesar 1,55 persen, 0,26 persen, dan 5,26 persen.

Struktur perekonomian di Provinsi Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Perekonomian di Provinsi Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,41 persen;

Konstruksi sebesar 11,75 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,12 persen; serta Real Estate sebesar 7,88 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Banten mencapai 73,41 persen.

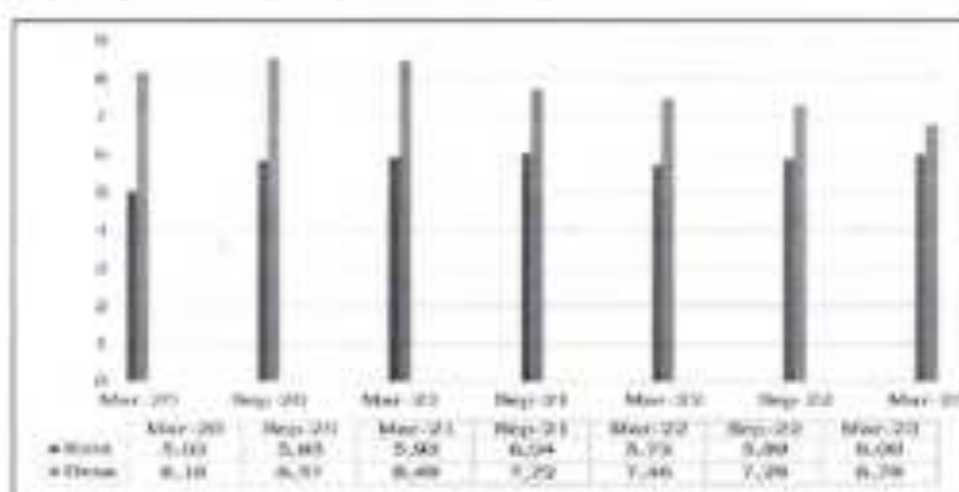


Gambar II.16
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021-2023

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Ruggenda)

d. Kemiskinan

Angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS berisi gambaran persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Angka kemiskinan Provinsi Banten pada bulan Maret 2022 sebesar 6,16 persen, mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dibandingkan kondisi Bulan September Tahun 2021 yang sebesar 6,50 persen. Pada periode Maret 2023 jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten cenderung menurun, penurunan hanya terjadi pada wilayah perdesaan saja.

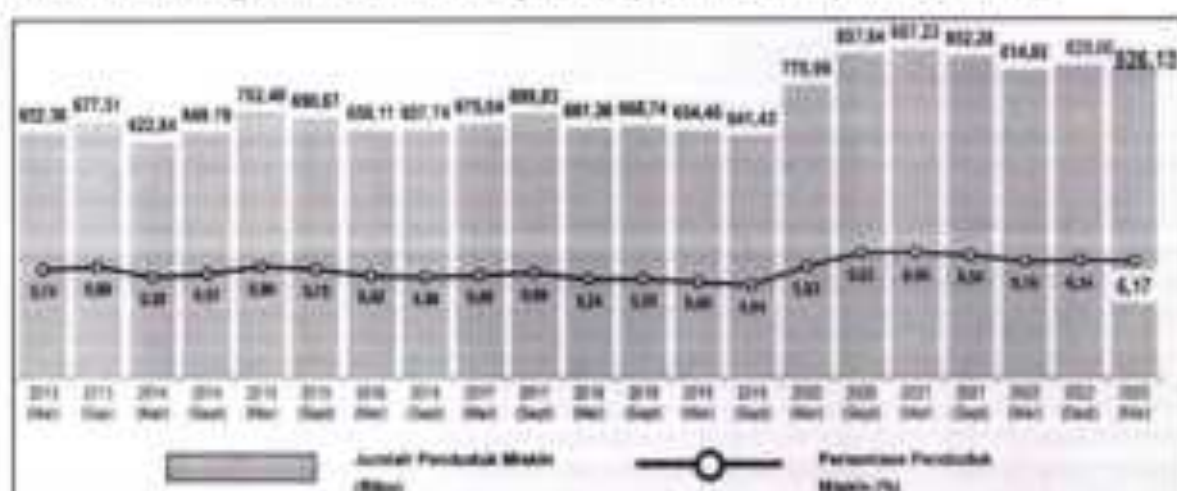


Gambar II.17
Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan di Provinsi Banten
Tahun 2020-2023

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Ruggenda)

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 5,89 persen, naik menjadi 6,00 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 7,29 persen, turun menjadi 6,79 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan naik sebanyak ±36,98 ribu orang (dari 586,21 ribu orang pada September 2022 menjadi 623,19 ribu orang pada Maret 2023, atau sebanding dengan kenaikan sebesar 0,11 persen dari 5,89 persen menjadi 6,00 persen). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak ±40,52 ribu orang (dari 243,45 ribu orang pada September 2022 menjadi 202,93 ribu orang pada Maret 2023, atau sebanding dengan penurunan sebesar 0,50 persen dari 7,29 persen menjadi 6,79 persen).

Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen, menurun 0,07 persen poin terhadap September 2022 namun meningkat sebesar 0,01 persen poin terhadap Maret 2022.

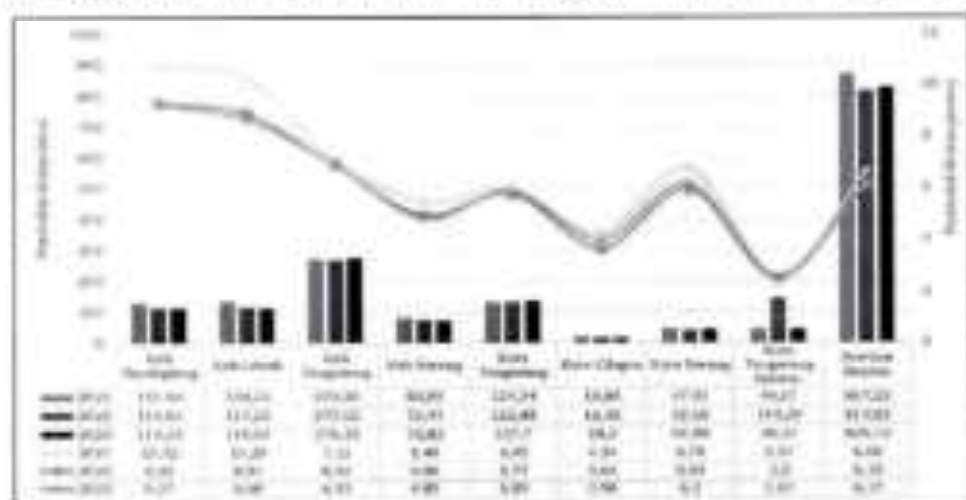


Gambar II.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2013-2023
(Sumber: SP2D Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappenas)

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 826,13 ribu orang, menurun 3,53 ribu orang terhadap September 2022 namun mengalami peningkatan 12,11 ribu orang terhadap Maret 2022. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022-Maret 2023 antara lain adalah:

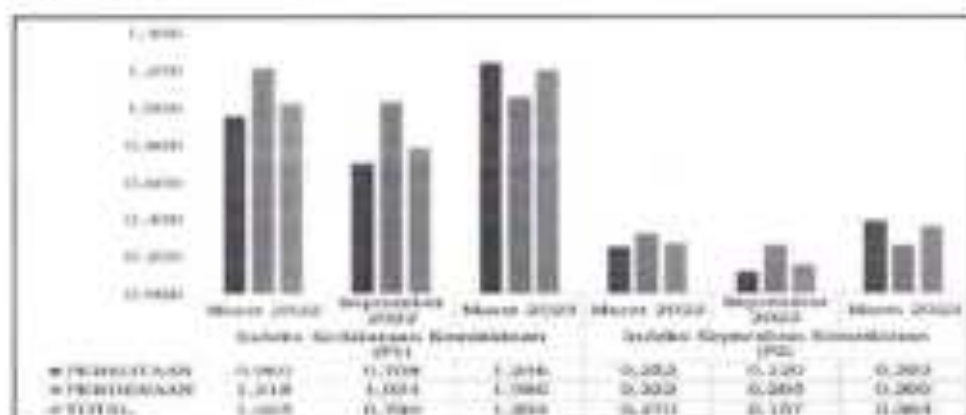
- i. Terjadi pengurangan tenaga kerja di beberapa industri padat karya pada akhir 2022;
- ii. Inflasi umum periode September 2022-Maret 2023 sebesar 1,05 persen lebih rendah dibandingkan inflasi umum periode Maret 2022-September 2022 sebesar 3,08 persen;

- iii. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III 2022-Triwulan I 2023 turun sebesar 0,87 persen, dibandingkan dengan triwulan I 2022-Triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 2,72 persen;
- iv. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2023 sebesar 102,47 meningkat dibanding September 2022 sebesar 99,97;
- v. Pada Februari 2023, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,97 persen. Dimana di daerah perkotaan sebesar 8,06 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan sebesar 7,73 persen.



Gambar II.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2021-2023
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappeda)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar II.20
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2022-2023
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappeda)

Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,204 naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,790. Demikian juga dengan Indeks Keparahatan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,157 menjadi 0,363. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,246, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 1,060. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,393 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,260.

e. Laju Inflasi Provinsi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi Provinsi Banten dipengaruhi pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 3 kota di Provinsi Banten pada bulan Desember 2023 sebesar 116,56 dan perubahannya (inflasi) sebesar 0,48 persen. Komoditas berdasarkan kelompok pengeluaran yang merupakan penyumbang tertinggi inflasi di bulan Desember Tahun 2023 adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,42 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,96 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,82 persen; kelompok transportasi sebesar 1,56 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,98 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,40 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,47 persen.

Berdasarkan pengamatan selama Tahun 2023, secara bulanan terjadi inflasi sebanyak 11 kali dan deflasi sebanyak 1 kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 0,58 persen dan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 0,06 persen. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,12 persen. Tingkat inflasi *month to month* (mtm) Maret 2024 sebesar 0,98 persen dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) November 2023 sebesar 0,48 persen.

Tabel II.17
Inflasi Tahun ke Tahun di Provinsi Banten Tahun 2018-2023 (persen)

BULAN	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	3,47	3,55	2,85	1,37	1,91	0,48
Februari	3,23	3,30	3,03	1,38	1,99	0,23
Maret	3,55	2,97	2,99	1,39	3,00	0,12
April	3,80	3,14	2,99	1,31	3,42	0,58
Mei	3,35	3,54	2,66	1,49	3,77	0,09
Juni	3,00	3,72	2,80	1,15	4,62	0,15
Juli	3,47	3,53	2,01	1,24	4,88	0,06
Agustus	3,68	3,76	1,52	1,46	4,58	0,12
September	3,42	3,94	1,63	1,40	5,86	0,22
Oktober	3,44	3,77	1,57	1,38	5,64	0,18
November	3,49	3,73	1,43	1,43	5,34	0,57
Desember	3,42	3,30	1,45	1,91	7,22	0,48

Sumber: SPTD Provinsi Banten, 2024 (diolah oleh Bapenas)

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Banten di 5 kabupaten/kota, pada Maret 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,42 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,66 pada Maret 2023 menjadi 106,17 pada Maret 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,98 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,46 persen.

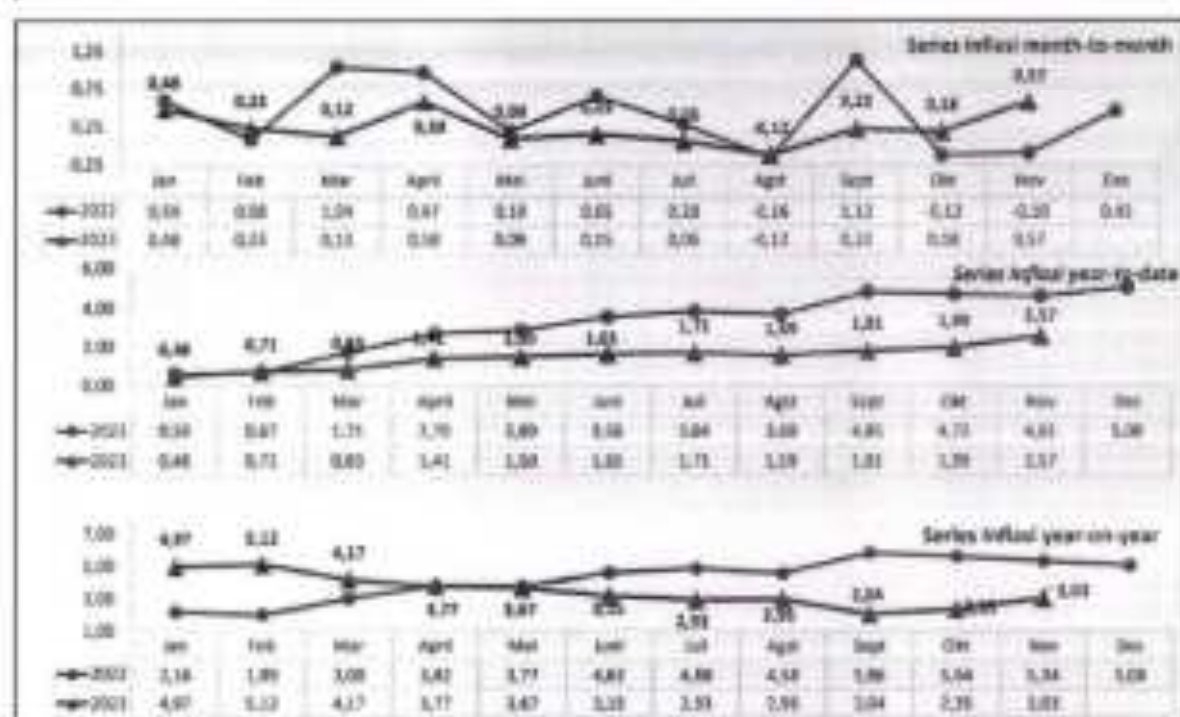
Tabel II.18
IHK dan Tingkat Inflasi di Provinsi Banten Menurut Kelompok Pengeluaran

KELOMPOK PENGLUAR AN	IHK	IHK	IHK	TINGKAT INFLASI	TINGKAT INFLASI	TINGKAT INFLASI	ANDIL	ANDIL
	MAR ET 2023	DESEM BER 2023	MARET 2024	M-TO-M MARET 2024 1) (%)	Y-TO-D MARET 2024 2) (%)	Y-ON-Y MARET 2024 3) (%)	INFLASI M-TO-M MARET 2024 (%)	INFLASI Y-ON-Y MARET 2024 (%)
Umum (Berkas)	102,66	104,94	106,17	0,98	1,46	3,42	0,98	3,42
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,33	106,9	110,07	1,82	2,97	7,30	0,50	2,3
Pakaian dan Aksesori	101,85	102,07	103,08	0,97	0,97	1,09	0,05	0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Gas Beras	101,79	101,6	101,61	0	0,01	0,42	0	0,06
Pengangkutan, Rekreasi, dan Pemerintahan	102,32	103,89	104,35	0,41	0,44	1,58	0,61	0,12
Kesehatan	104,03	102,86	103,33	0,58	0,95	1,25	0,02	0,04

KELOMPOK PENGELUARAN	IKH	IKH	IKH	TINGKAT INFLASI M-TO-M MARET 2024 1) (%)	TINGKAT INFLASI Y-TO-D MARET 2024 2) (%)	TINGKAT INFLASI Y-ON-Y MARET 2024 3) (%)	ANDIL INFLASI M-TO-M MARET 2024 (%)	ANDIL INFLASI Y-ON-Y MARET 2024 (%)
	MAR 2023	DESEM 2023	MARET 2024					
Transportasi	108,51	116,27	110,03	0,13	-0,22	1,4	0,01	0,18
Inflasi, Kesehatan, dan Jasa Keuangan	100,14	100,39	100,49	0,08	0,1	0,3	0	0,03
Kelompok Lainnya, dan Subsidi	101,1	101,78	102,12	0,13	0,33	1,01	0	0,03
Perumahan	100,58	100,93	101,36	0,38	0,43	0,78	0,02	0,04
Perumahan Makanan dan Minuman/Rumit	101,62	102,62	103,55	1,97	2,86	3,67	0,21	0,41
Perumahan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,48	106,2	107,87	1,19	1,37	3,24	0,07	0,19

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Dilolah oleh Bappeda)

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,39 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,42 persen.



Gambar II.21
Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Banten Tahun 2022 dan 2023 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Dilolah oleh Bappeda)

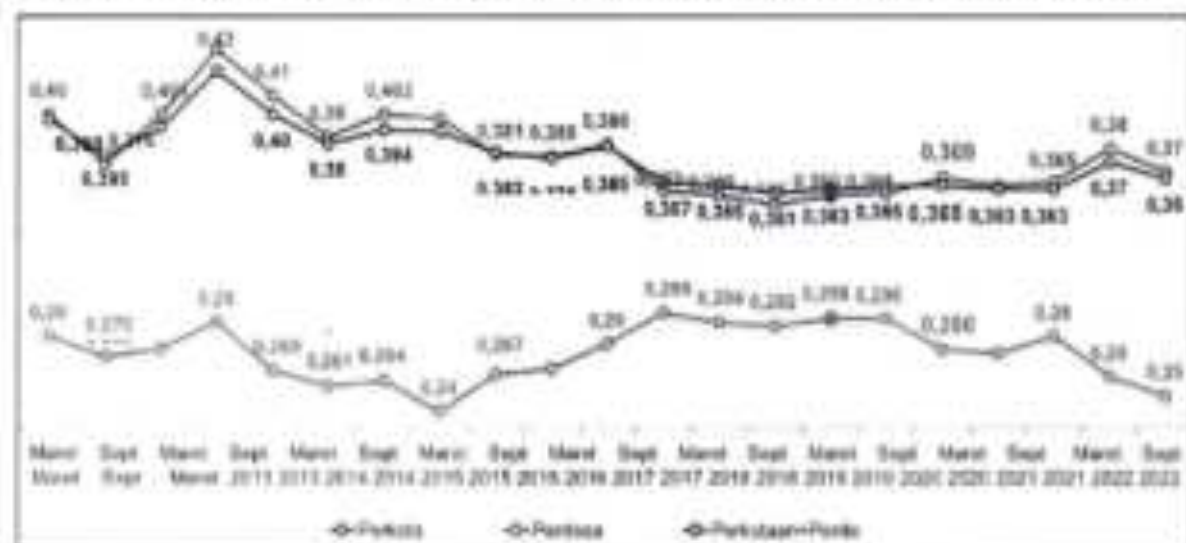
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2024, antara lain: beras, daging ayam ras, tomat, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), sedangkan komoditas yang

memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: bawang merah, dan ikan kembung.

f. Rasio Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut. Pada Maret 2013 rasio gini Banten tercatat sebesar 0,399. Angka ini terus bergerak turun hingga September 2013 yaitu sebesar 0,380. Pada September 2014 nilai rasio gini mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,424. Kemudian pada periode Maret 2015-Maret 2023 nilai rasio gini menunjukkan kecenderungan fluktuatif hingga mencapai angka 0,368.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 0,372, hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,012 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,384 dan meningkat sebesar 0,005 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,367. Untuk daerah pedesaan, rasio gini pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,256, turun sebesar 0,010 poin dibandingkan dengan kondisi September 2022 dan turun sebesar 0,031 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022. Rasio gini di daerah pedesaan pada September 2022 dan Maret 2022 masing-masing tercatat sebesar 0,266 dan 0,287.

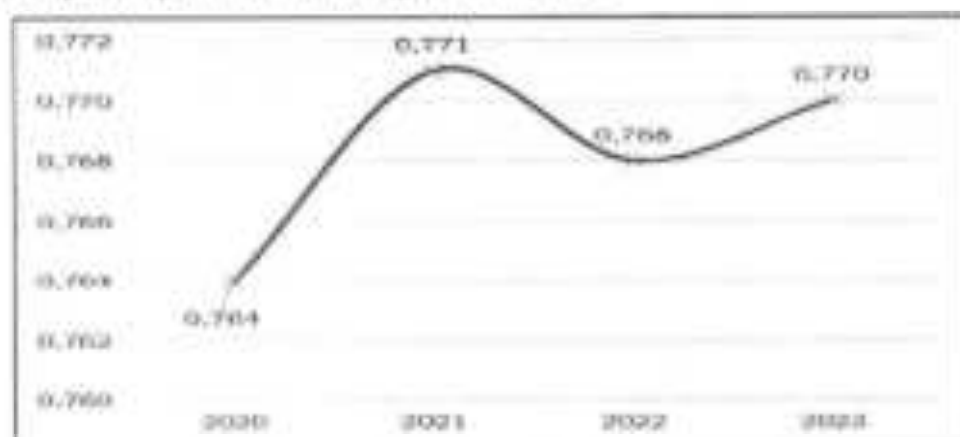


Gambar II.22
Nilai Indeks Gini di Provinsi Banten Tahun 2013-Maret 2023 (nilai)
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Ditulis oleh Bapspada)

g. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks Williamson merupakan indikator makro ekonomi untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah di suatu wilayah

dalam periode waktu tertentu. Indeks ini menggunakan angka PDRB per kapita dan proporsi penduduk wilayah tersebut. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin timpang distribusi pendapatan antar bagian wilayah.



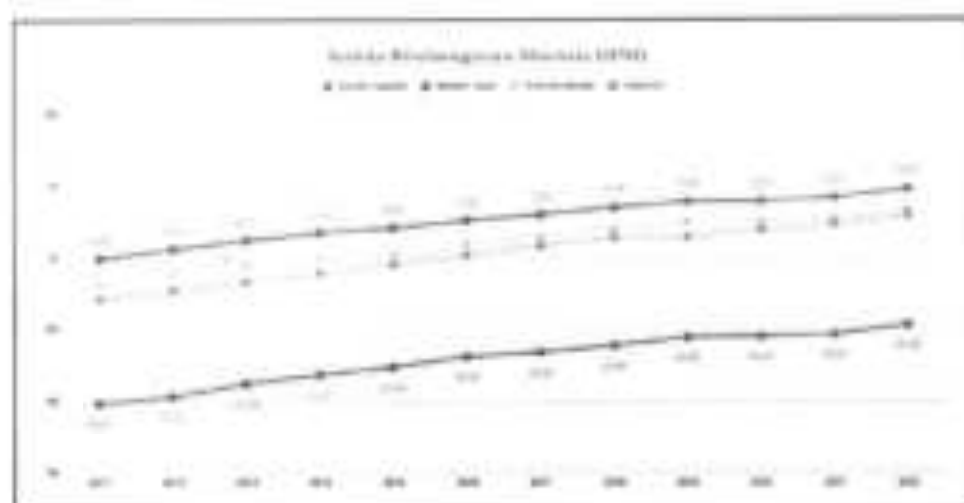
Gambar II.23
Nilai Indeks Williamson di Provinsi Banten Tahun 2020-2023
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappenas)

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan indikator yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mencakup kondisi kualitas hidup manusia atau penduduk, IPM dibangun melalui tiga dimensi atau kelompok utama, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan metodologi statistik yang dilakukan oleh BPS, pengukuran IPM aspek kesehatan mengacu pada angka harapan hidup. Sementara untuk melihat capaian pengembangan pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun aspek hidup layak diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang umumnya dilihat dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita yang dinilai dapat mewakili capaian pembangunan hidup layak.

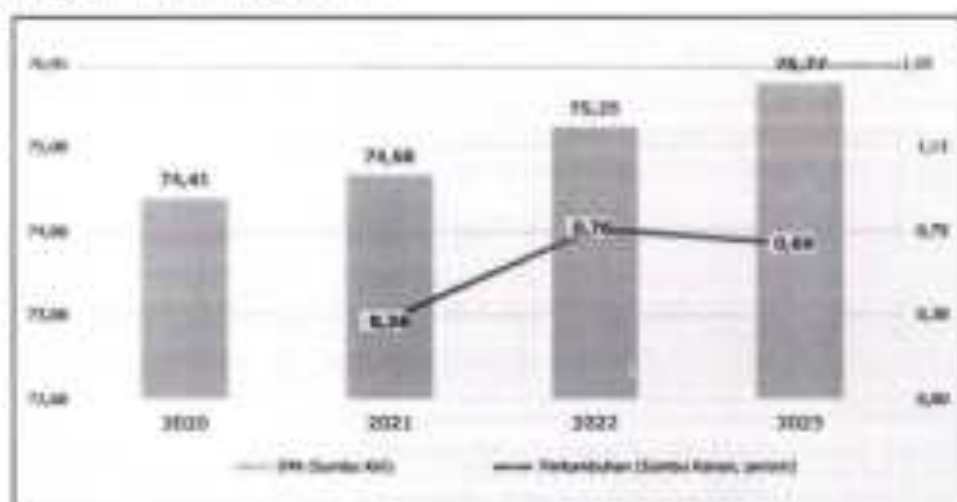
Diagram di bawah ini merupakan perbandingan IPM nasional, Provinsi Banten, dan daerah Banten Utara-Selatan. Berdasarkan diagram tersebut terlihat gap yang besar antara IPM di Banten Utara dan di Banten Selatan.



Gambar II.24
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Banten, dan Banten Utara-Selatan

(Sumber: IPS Nasional dan IPS Provinsi Banten, 2023; Ditolah oleh Bappeda)

Dalam rentang waktu Tahun 2020-2023 indikator IPM di Provinsi Banten terus melampaui besaran yang ditargetkan dan tergolong kepada level "Tinggi". Pembangunan manusia di Provinsi Banten terus mengalami kemajuan. IPM di Provinsi Banten meningkat dari 74,41 Tahun 2020 menjadi 75,77 Tahun 2023 atau meningkat 0,52 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 75,25. Selama periode tersebut, status IPM di Provinsi Banten selalu berada pada status IPM "tinggi" ($70 < \text{IPM} < 80$) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,61 persen per tahun. Hal ini menunjukkan kualitas penduduk di Provinsi Banten dari sisi pendidikan dan kesehatan terus mengalami peningkatan.



Gambar II.25
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2020-2023 (poin)

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Ditolah oleh Bappeda)

Peningkatan IPM Tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup

layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,77 tahun, meningkat 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang sebesar 74,46. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,05 menjadi 13,09 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun, dari 9,13 tahun menjadi 9,15 tahun pada Tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 12,60 juta atau meningkat 385 ribu rupiah (3,15 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Secara rinci, perkembangan IPM Banten berdasarkan komponen pembentuknya dari Tahun 2017-2023, disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel II.19
Komponen Pembentuk IPM di Provinsi Banten Tahun 2017-2023

KOMPONEN IPM	TAHUN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH, tahun)	69,49	69,64	69,84	69,96	70,02	70,36	74,77
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,78	12,85	12,88	12,89	13,02	13,08	13,09
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,53	8,62	8,74	8,89	8,93	9,13	9,15
Pengeluaran per Kapita (PKP, Ribuan Rupiah)	11.659	11.994	12.367	11.986	12.033	12.216	12.601
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32	75,77
Pertumbuhan (Persen)	-	0,74	0,68	0,01	0,37	0,83	0,69

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Data oleh Bappenas)

Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada Tahun 2023 terlihat cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi menjadi milik Kota Tangerang Selatan (83,57) dan terendah untuk Kabupaten Lebak (67,68). Jika dilihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM, tercatat Kabupaten Serang tumbuh 0,89 persen, sedangkan yang paling lambat adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 0,35 persen.

Tabel II.20
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

NO	KABU PATEN/ KOTA	UMUR HARAPAN HIDUP (UHH, TAHUN)	HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS, TAHUN)	RATA- RATA LAMA SEKOLAH (RLS, TAHUN)	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (PKP, RIBU RUPIAH)	CAPAI AN IPM	PERTUMB UHAN (PERSEN)
1	Kab. Pandeglang	74,01	13,73	7,15	9.151	70,28	0,83
2	Kab. Lebak	73,80	12,10	6,60	9.130	67,58	0,73
3	Kab. Tangerang	75,18	12,87	8,93	12.749	75,56	0,58
4	Kab. Serang	74,62	12,66	7,79	11.320	72,63	0,89
5	Kota Tangerang	75,30	13,89	10,91	15.377	80,98	0,67
6	Kota Cilegon	74,81	13,21	10,38	13.663	78,24	0,72
7	Kota Serang	75,13	12,82	8,91	14.088	76,43	0,85
8	Kota Tangerang Selatan	75,64	14,66	11,86	16.225	83,57	0,35
Provinsi Banten		74,77	13,09	9,15	12.601	75,77	0,69

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024 (Dilakuk oleh Bappeda)

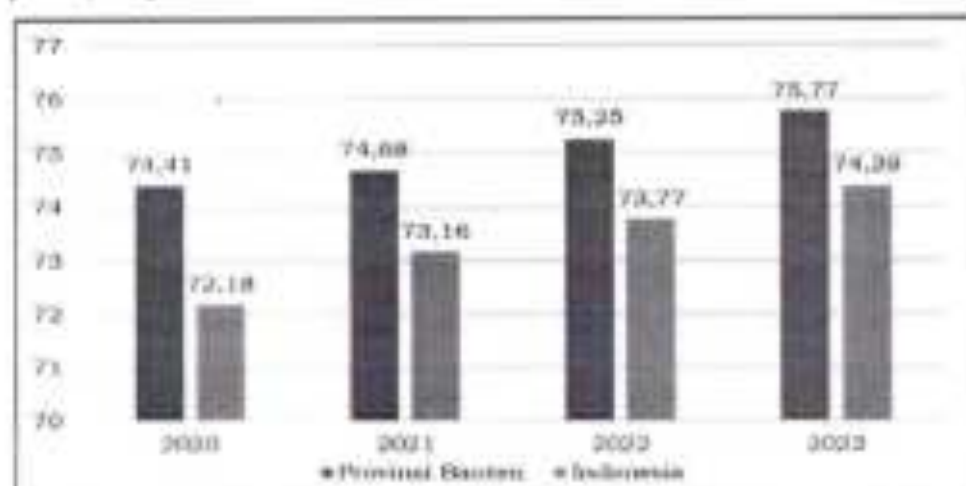
Pada Tahun 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang meningkat dari "sedang" menjadi "tinggi", dengan capaian IPM 70,28. Sementara itu, dalam kurun waktu 2020-2023 terjadi peningkatan status dari "tinggi" ke "sangat tinggi" dialami Kota Tangerang, yaitu sejak 2021. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang "sangat tinggi" ($IPM \geq 80$) menjadi sebanyak dua, dengan status "tinggi" ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak lima, dengan status "sedang" ($60 \leq IPM < 70$) ada sebanyak satu, dan tidak ada kabupaten/kota dengan status "rendah" ($IPM < 60$).

Tabel II.21
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Peringkat 10 Besar Nasional Menurut Komponen Tahun 2023

NO	PROVINSI	UMUR HARAPAN HIDUP (UHH, TAHUN)	HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS, TAHUN)	RATA- RATA LAMA SEKOLAH (RLS, TAHUN)	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (PKP, RIBU RUPIAH)	NILAI IPM	PERTUMB UHAN (PERSEN)
1	DKI Jakarta	75,81	13,33	11,45	19.373	83,53	0,94
2	DI Yogyakarta	75,18	15,66	9,83	14.924	81,09	0,55
3	Kepulauan Riau	74,90	13,05	10,41	14.998	79,08	0,76
4	Kalimantan Timur	74,72	14,02	9,99	13.202	78,20	1,09
5	Bali	74,88	13,58	9,45	14.382	78,01	0,70
6	Banten	74,77	13,09	9,15	12.601	75,77	0,69
7	Sumatera Barat	74,14	14,11	9,28	11.380	75,64	0,64
8	Sumatera Utara	73,67	13,48	9,82	11.049	73,13	0,83
9	Sulawesi Utara	73,85	12,96	9,77	11.497	75,04	0,70
10	Malu	74,18	13,30	9,32	11.448	74,95	0,67
Nasional		73,93	13,16	8,77	11.699	74,39	0,84

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024 (Dilakuk oleh Bappeda)

Pencapaian IPM di Provinsi Banten selama setahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan Riau, Sumatera Barat, dan DI Yogyakarta. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM yang menempati urutan ketujuh di antara provinsi berperingkat 10 besar IPM. Hanya saja, kecepatan penurunan masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,84 persen.



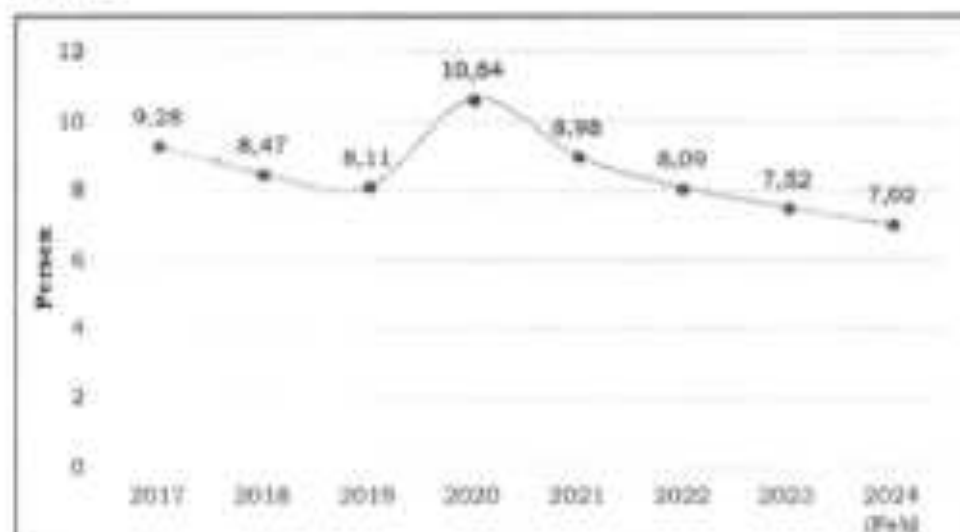
Gambar II.26
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Dengan
Indonesia Tahun 2020-2023 (poin)
(Sumber: SDPD Provinsi Banten, 2024; Ditambah oleh Bappenas)

Jika besaran angka dan peringkat IPM di Provinsi Banten tidak ingin dilampaui oleh Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, harus dilakukan perbaikan pada beberapa dimensi/komponen pembentuk. Pertama, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus diperbaiki, karena capaian jauh di bawah Sumatera Barat bahkan masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Kedua, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Hal ini karena dalam jangka panjang, capaiannya tersebut dapat mempengaruhi capaian komponen Rata-rata Lama Sekolah. Capaian Harapan Lama Sekolah Banten sendiri berada di bawah Sumatera Barat dan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk mengindikasikan besaran angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Makna dari pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT di Provinsi Banten mengalami tren yang cukup fluktuatif sepanjang Tahun 2017-Februari 2024 yang secara konsisten menurun, namun meningkat tajam Tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang mana secara dominan terjadi pada daerah lainnya. TPT di Provinsi Banten Tahun 2021 tercatat sebesar 8,98 persen dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 8,09 persen, kemudian pada Tahun 2023 per Agustus menurun kembali menjadi 7,52 persen dan data terakhir berada pada posisi 7,02 persen di Februari 2024. Hal dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 5,97 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,28 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,52 juta orang. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,19 juta orang. Sebanyak 2,96 juta orang (53,69 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,64 persen poin dibanding Agustus 2022.



Gambar II.27
Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten
Tahun 2017-Februari 2024

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Disolah oleh Bappenas)

Berdasarkan data BPS (2024) bahwa berdasarkan perkembangan sepuluh tahun terakhir, secara rata-rata penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Banten berkurang lebih kurang 0,25 persen atau 10 ribu orang setiap tahun.

TPT di Provinsi Banten pada Februari 2022 yaitu sebesar 8,53 persen menurun 0,56 persen menjadi 7,97 persen di Tahun 2023 dan kembali menurun lebih kurang 0,95 persen di Tahun 2024 menjadi sebesar

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN (PERSEN)						PER AGUSTUS 2023
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5	Kota Tangerang	7,16	7,39	7,14	8,63	9,07	7,16	6,75
6	Kota Cilegon	11,88	9,21	9,64	12,69	10,13	8,10	7,25
7	Kota Serang	8,43	8,10	8,07	9,26	9,41	8,17	7,45
8	Kota Tangerang Selatan	6,83	4,67	4,78	8,48	8,60	6,59	5,91
Provinsi Banten		9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52

Sumber: SPN Provinsi Banten, 2023 (Data oleh Dgpeda)

Dengan permasalahan pengangguran ini maka diperlukan kebijakan yang mampu menuntaskan permasalahan diantaranya mencakup:

- Peningkatan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan, dual-system, dan kewirausahaan;
- Peningkatan pelatihan *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja dengan memanfaatkan teknologi seperti keterampilan digital;
- Peningkatan fasilitasi mobilitas pekerja untuk mengisi pasar kerja global;
- Peningkatan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif termasuk lapangan kerja hijau, biru, dan digital.

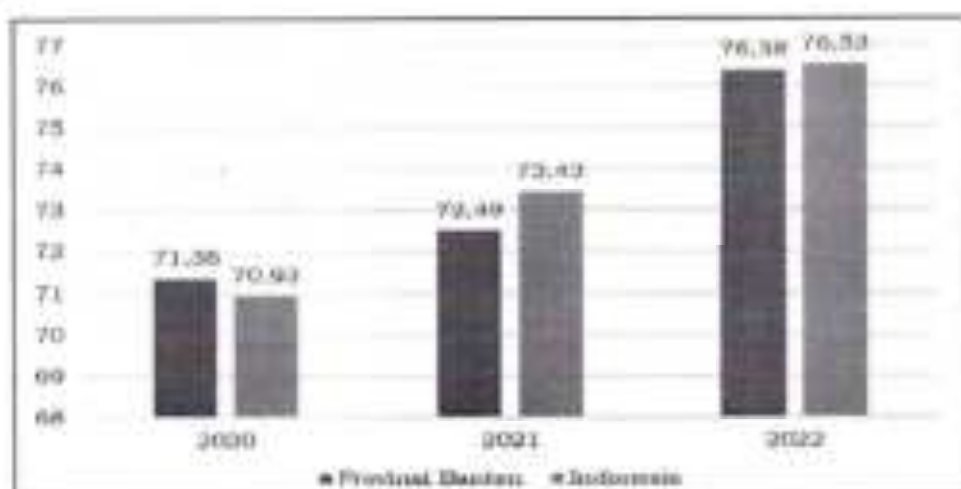
2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

2.2.2.1 INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama BPS mengembangkan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia, dikenal dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK), dengan tujuan memberikan gambaran tentang kondisi keluarga dan membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang hilirnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga secara inklusif.

Berdasarkan data perubahan indikator pembentuk IKK di Provinsi Banten Tahun 2020-2022, diketahui bahwa kelima dimensi pembentuk IKK yaitu dimensi Ketahanan Legalitas-Struktur (KLS), Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) menunjukkan nilai yang berfluktuatif.

Capaian IKK di Provinsi Banten Tahun 2020-2022 jika dibandingkan dengan capaian nasional maka dapat dilihat pada gambar di bawah.

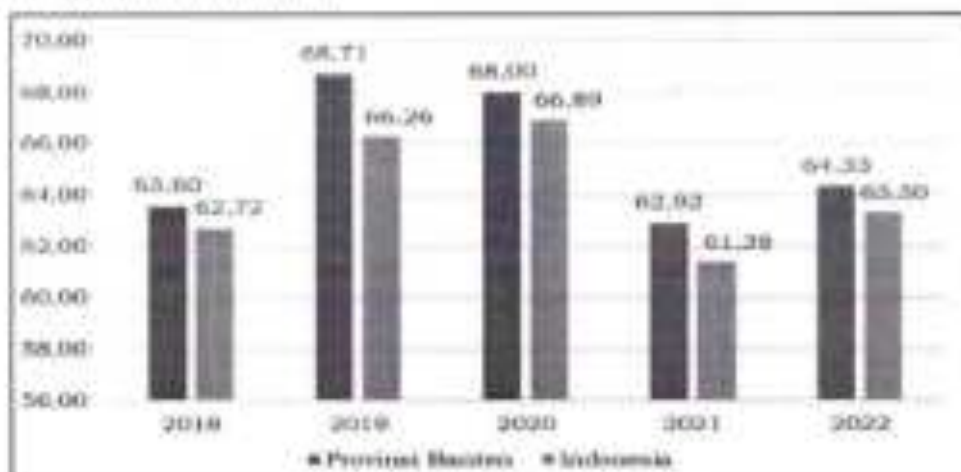


Gambar II.29
Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2020-2022

(Sumber: Kemen PPPA, 2023; Diolah oleh Bappenas)

2.2.2.2 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Selain IKK, Kemen PPPA dan BPS pun mengembangkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebagai upaya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Lebih lanjut IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian terhadap komponen pemenuhan hak anak dan komponen perlindungan khusus anak.



Gambar II.30
Perbandingan Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2020-2022

(Sumber: Kemen PPPA, 2023; Diolah oleh Bappenas)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) merupakan indikator dalam mengukur sejauh mana setiap anak telah terpenuhi haknya, meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan dari kekerasan. Sementara itu komponen selanjutnya Indeks Perlindungan Khusus Anak

(IPKA) yang merupakan indikator dalam menilai perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi, diskriminasi maupun kekerasan lainnya. Capaian IPA di Provinsi Banten jika dibandingkan dengan capaian nasional sebagaimana pada gambar di atas.

2.2.2.3 PEMENUHAN LAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF

Banten masih memiliki permasalahan dalam penyediaan layanan kesehatan terkait masih belum meratanya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, belum meratanya tenaga kesehatan, dan permasalahan pembiayaan kesehatan. Selain itu masih diperlukan optimalisasi layanan yang ramah terhadap masyarakat rentan di fasilitas kesehatan. Terkait layanan kepada lansia, seluruh puskesmas di Provinsi Banten sudah mampu memberikan layanan lansia tetapi masih terdapat puskesmas yang belum optimal dalam menyediakan sarpras pendukung yang ramah lansia. Jumlah Puskesmas di Provinsi Banten terjadi peningkatan pada bulan Desember dibandingkan pada Juni 2023 sebanyak 22 Puskesmas, dari 231 unit meningkat menjadi 253 unit. Dari 253 unit, Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 247 unit, yang belum terakreditasi/masih dalam proses akreditasi sebanyak 6 unit (Kab. Lebak 1 unit, Kab. Tangerang 1 unit, Kota Tangerang 4 unit).

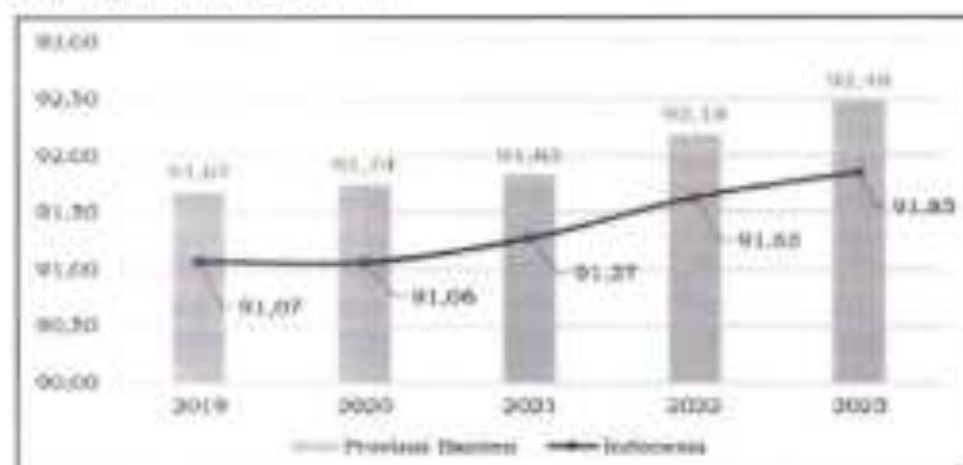
Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait cakupan jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Terdapat peningkatan capaian UHC pada Bulan Desember dibandingkan bulan Juni 2024, dari 94,44 persen menjadi 96,54 Persen. Selain itu perlu peningkatan cakupan jaminan kesehatan dari sisi promotif, preventif, rehabilitatif, dan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas miskin. Untuk itu perlu koordinasi dengan *stakeholder* terkait terutama dengan kabupaten/kota terkait sinkronisasi data.

2.2.2.4 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG), INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) DAN INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator yang mengukur suatu keberhasilan atas pembangunan manusia berbasis gender, yang dilihat melalui tiga dimensi capaian dasar manusia, yaitu: 1) dimensi umur panjang dan hidup sehat; 2) pengetahuan; dan 3) standar hidup layak. Perhitungan indikator ini melalui perbandingan tingkat

capaian mengenai pembangunan manusia perempuan terhadap capaian pembangunan manusia laki-laki.

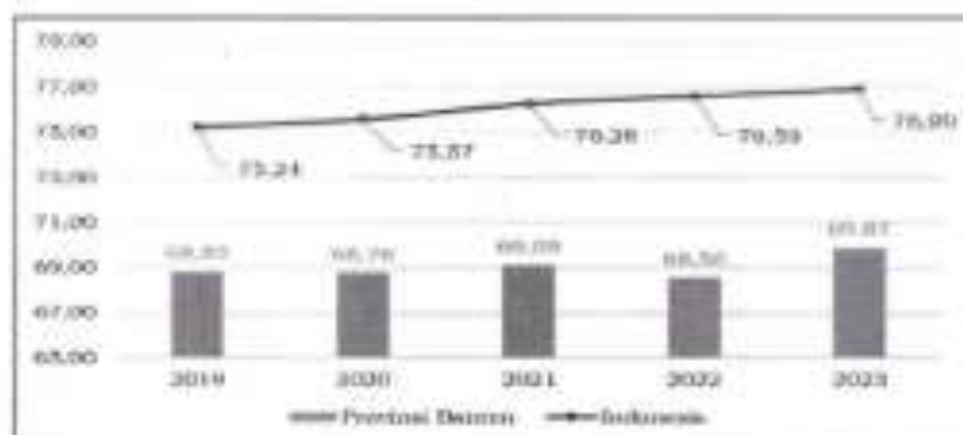
Capaian IPG di Provinsi Banten Tahun 2019-2023 jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian Provinsi Banten lebih baik dengan nilai yang semakin meningkat dan melebihi capaian nasional, artinya pembangunan telah lebih setara dan adil akibat rendahnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, selengkapnya seperti pada gambar di bawah.



Gambar II.31
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Rappesdu)

Sementara itu lain hal dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan dan kesetaraan gender terhadap sejauh mana perempuan dapat berperan aktif berpartisipasi dalam hal politik dan kehidupan ekonomi. Indikator ini diukur melalui tiga komponen utama mencakup: 1) keterlibatan perempuan di parlemen; 2) perempuan sebagai tenaga profesional; dan 3) sumbangan pendapatan perempuan.

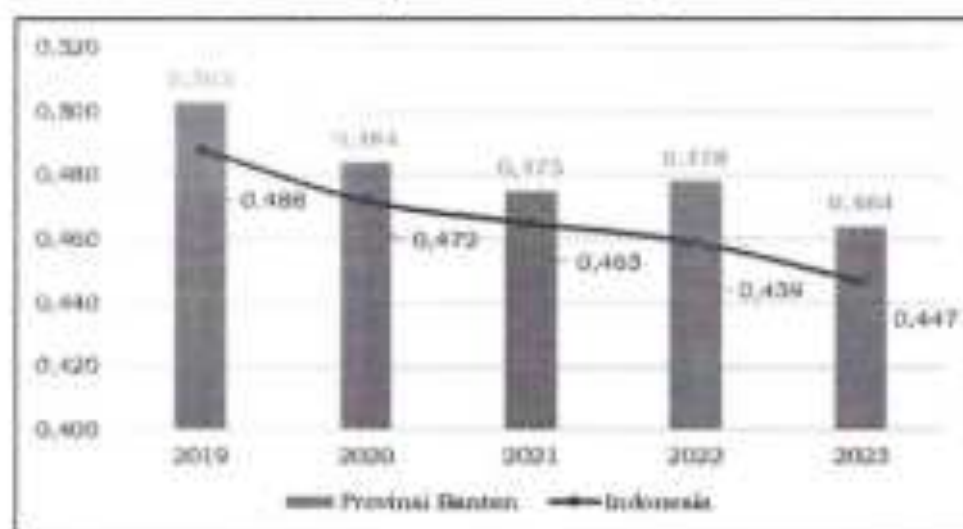


Gambar II.32
Perbandingan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Rappesdu)

Lebih lanjut pada gambar di atas merupakan capaian IDG di Provinsi Banten dibandingkan dengan capaian nasional. Capaian Provinsi Banten lebih rendah daripada capaian nasional, IDG yang rendah menunjukkan bahwa masih terbatasnya perempuan terhadap akses sumber daya dan kesempatan dalam keterlibatan di parlemen/politik, tenaga profesional serta sumbangan pendapatan ekonomi.

Indikator lainnya terkait gender yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembangunan manusia. Indikator ini dilakukan pengukuran melalui tiga dimensi utama, seperti: 1) kesehatan reproduksi; 2) pemberdayaan; dan 3) partisipasi ekonomi. Capaian IKG di Provinsi Banten mengalami fluktuatif yang kecenderungannya mengalami penurunan sehingga memberikan kondisi yang baik, namun capaian ini masih di bawah nilai nasional, terjadinya peningkatan di Tahun 2021 ke 2022 dipengaruhi oleh peningkatan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja, nilai IKG di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar II.33
Perbandingan Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2019-2023

(Sumber: IPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappenas)

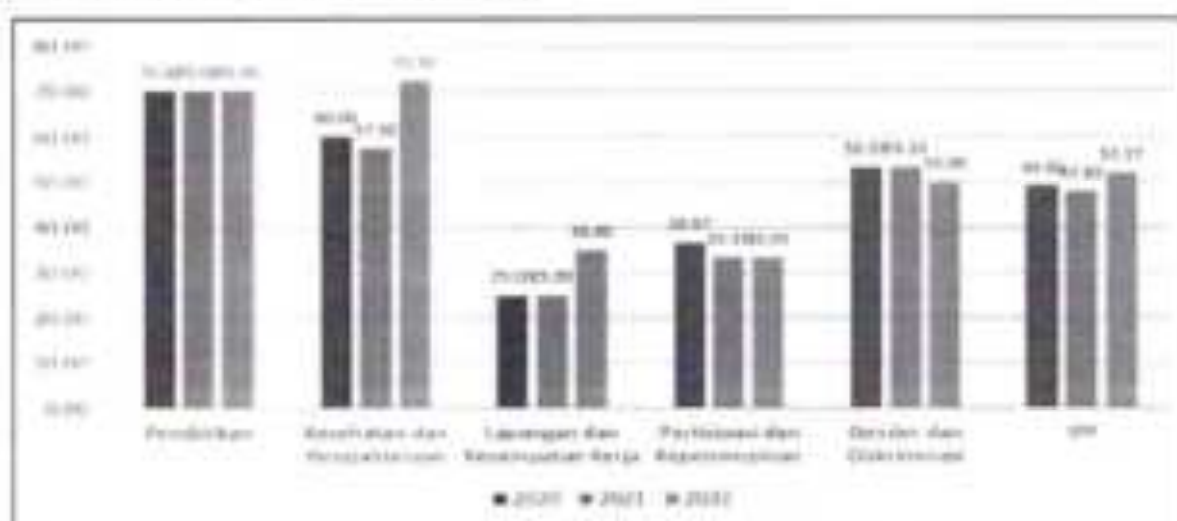
2.2.2.5 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) DAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA (IPO)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan kehidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di

dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda, yaitu sebagai berikut: 1) Domain Pendidikan (3 indikator); 2) Domain Kesehatan dan kesejahteraan (4 indikator); 3) Domain Lapangan dan kesempatan kerja (2 indikator); 4) Domain Partisipasi dan kepemimpinan (3 indikator); 5) Domain Gender dan Diskriminasi (3 indikator).

Sport Development Index (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga adalah metode untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Ia harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna. Menurut Cholik dan Maksom (2007), *Sport Development Index* adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar: (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga; (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga; (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur; dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

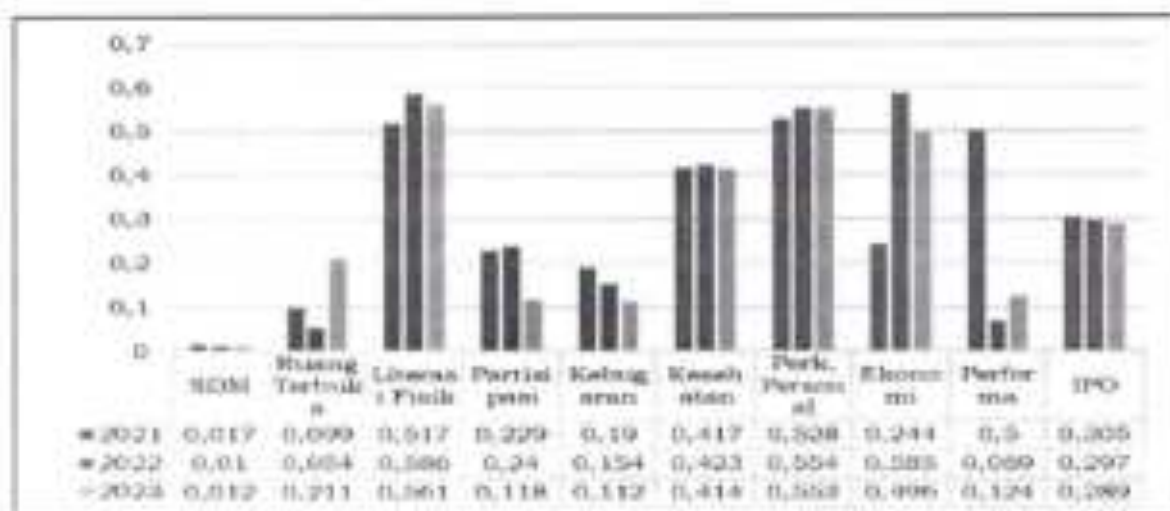
IPP di Provinsi Banten mengalami kenaikan dari 47,83 pada 2021 menjadi 52,17 pada 2022. Terjadi kenaikan sebesar 4,34 poin. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional capaian IPP di Provinsi Banten berada di bawah nasional (55,33).



Gambar II.34
Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Banten Tahun 2020-2022
 (Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023; Diolah oleh Bappenas)

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2023 sebesar 0,289 dari skala 0-1. Capaian tersebut menurun 0,008 poin dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 0,297. Dimensi yang masuk dalam

kategori rendah adalah SDM, Performa, Kebugaran Jasmani, Ruang Terbuka, Partisipasi, dan Kesehatan. Sedangkan dimensi yang masuk dalam kategori menengah adalah Ekonomi, Perkembangan Personal, dan Literasi Fisik. Capaian bidang pembudayaan olahraga yang indikator utamanya berupa tingkat Partisipasi dan Tingkat Kebugaran masyarakat mengalami penurunan. Indeks partisipasi pada Tahun 2023 sebesar 0,118, menurun 0,122 poin dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 0,24. Sementara itu, indeks kebugaran jasmani pada Tahun 2023 sebesar 0,112, menurun 0,042 poin dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 0,154.



Gambar II.35
Nilai Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Banten Tahun 2021-2023
 (Sumber: Kemendpora, 2024; Data oleh Bappeda)

Penurunan tingkat partisipasi tidak hanya berdampak pada kebugaran jasmani, tetapi juga perputaran uang akibat aktivitas olahraga. Laporan ini menyatakan bahwa capaian ekonomi olahraga yang diukur dengan indeks ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,089 poin, dari 0,585 pada Tahun 2022 menjadi 0,496 pada Tahun 2023. Penurunan indeks ekonomi merupakan konsekuensi logis dari tingkat partisipasi berolahraga yang juga menurun.

2.2.3 SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.2.3.1 INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK)

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Banten ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Untuk mengukur pembangunan kebudayaan, pemerintah telah

mengeluarkan kebijakan penilaian berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen penilaian capaian kinerja pembangunan kebudayaan baik ditingkat nasional maupun daerah. Pengukuran Indeks Kebudayaan mulai dilakukan Tahun 2018 berdasarkan pada 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi yaitu:

- a. Dimensi Ekonomi Budaya;
- b. Dimensi Pendidikan;
- c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya;
- d. Dimensi Warisan Budaya;
- e. Dimensi Ekspresi Budaya;
- f. Dimensi Budaya Literasi; dan
- g. Dimensi Kesetaraan Gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan data pada tabel di bawah terlihat bahwa capaian IPK Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 51,41 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 47,47. Meskipun demikian upaya percepatan peningkatan nilai IPK sangat diperlukan mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional capaian IPK Provinsi berada di bawah nasional (55,13). Hasil pengukuran Indeks Pembangunan kebudayaan Provinsi Tahun 2018 sampai 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Provinsi Banten
Tahun 2018-2022 (nilai)

NO	DIMENSI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ekonomi Budaya	11,10	11,71	1,01	12,34	18,83
2.	Pendidikan	68,38	71,65	69,79	65,78	70,20
3.	Ketahanan Sosial Budaya	64,35	64,92	65,26	53,73	56,92
4.	Warisan Budaya	44,07	45,02	40,6	47,34	51,77
5.	Ekspresi Budaya	29,00	29,53	29,19	22,03	25,35
6.	Budaya Literasi	54,93	60,27	61,30	56,58	59,01
7.	Kesetaraan Gender	52,44	54,25	52,84	52,97	54,73
IPK		49,69	51,43	48,93	47,47	51,41

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (diolah oleh Bappeda)

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Provinsi Banten memiliki jumlah sanggar hingga mencapai 1.382 sanggar yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Banten memiliki beberapa gedung kesenian seperti Gedung Kesenian Ranggajati, Gedung Kesenian Kabupaten Tangerang, Gedung Kesenian Kota Cilegon, Balai

Pertunjukan Seni Rakyat (BPSR) Banten, dan Gedung Kesenian Kabupaten Lebak. Banten memiliki sejumlah klub olahraga yang aktif di berbagai cabang olahraga, seperti Banten United FC (sepak bola), BC Banten (bulu tangkis), Banten Sharks (basket), Banten runners, Banten Chess Club (catur), dan lain sebagainya.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prasyarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya adalah adanya diantaranya dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel berikut ini merangkum informasi mengenai akuntabilitas pemerintah Provinsi Banten dari Kementerian PANRB selama lima tahun terakhir. Statistik menunjukkan bahwa Provinsi Banten menempati urutan terakhir jika dibandingkan dengan pemerintah provinsi di Pulau Jawa.

Tabel II.24
AKIP Provinsi se-Pulau Jawa 2017-2023

NO	PROVINSI	TAHUN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banten	CC	B	B	B	B	B	B
2	DKI Jakarta	B	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Jawa Barat	A	A	A	A	A	A	A
4	DI Yogyakarta	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
5	Jawa Tengah	BB	A	A	A	A	A	A
6	Jawa Timur	A	A	A	A	A	A	A

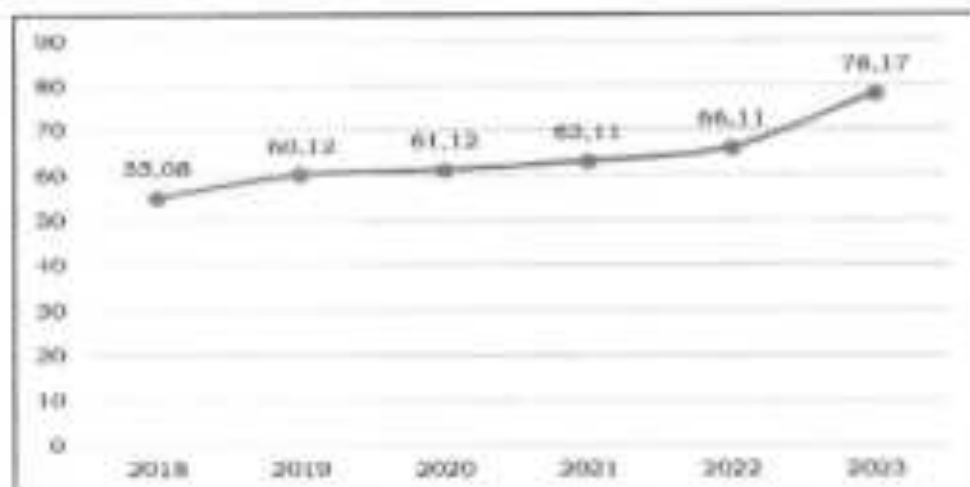
Sumber: Ditnah oia (Agenda, 2024)

2.3.2 INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) terdiri dari dua komponen yaitu pengungkit dan komponen hasil. Hasil evaluasi RB selama 5 tahun menunjukkan Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area

pemenuhan, hasil antara dan reform, namun belum diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.



Gambar II.36
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Provinsi Banten Tahun 2018-2023
(Sumber: Data oleh Anggrita, 2024)

2.3.3 OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

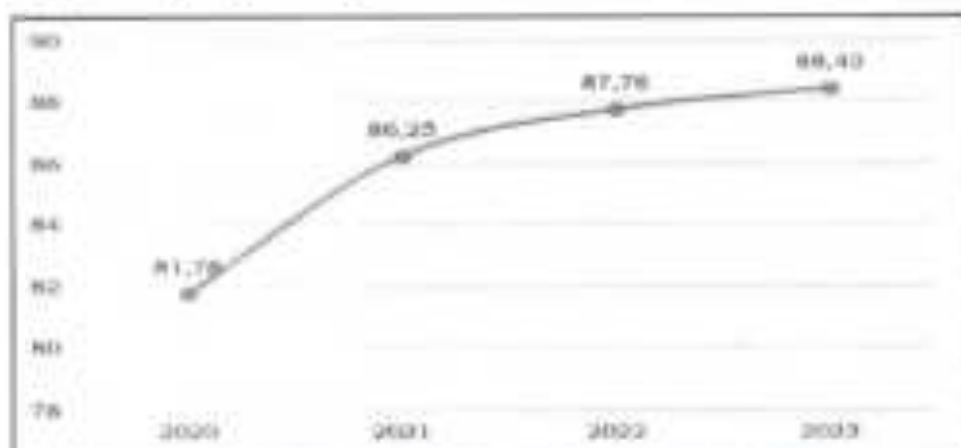
Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di kementerian/lembaga maupun di level pemerintah daerah. Dari Tahun 2017-2023, Pemerintah Provinsi Banten selalu meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.4 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu parameter yang memperlihatkan seberapa baik pemerintah daerah memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. Survei dilakukan secara periodik yang disajikan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

SKM dilakukan terhadap 12 perangkat daerah, dengan nilai SKM rata-rata 88,43, hal ini menunjukkan pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Banten secara umum mencerminkan kualitas

yang sangat baik dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2020-2023.



Gambar II.37
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Provinsi Banten Tahun 2020-2023
(Sumber: Data oleh Bappeda, 2024)

2.3.5 INDEKS INOVASI DAERAH (IID)

Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, indeks ini mencakup dalam hal pengukuran inovasi dalam bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah. Pengukuran ini dilakukan setiap tahun melalui program *binovattise Government Award (IGA)*, bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang secara aktif menjadikan inovasi sebagai kunci pemajuan daerahnya.

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak Tahun 2019. Tercatat pada Tahun 2019-2023 nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Banten cukup berfluktuatif.

Tabel II.25
Peringkat dan Nilai Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Banten Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peringkat Inovasi Daerah	6	5	7	18	11
2	Nilai Indeks Inovasi Daerah	14,230	8,191	60,52	50,41	56,92
3	Jumlah Inovasi yang diajukan	70	173	182	149	103

Sumber: BPD Provinsi Banten, 2024 (Data oleh Bappeda)

Keterangan: Tahun 2020 ke atas adanya perubahan metode perhitungan daripada tahun sebelumnya

2.3.6 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Capaian SPBE Banten dari Tahun 2018-2023 selalu meningkat, pada Tahun 2023 Banten menduduki predikat baik (nilai 3,39).

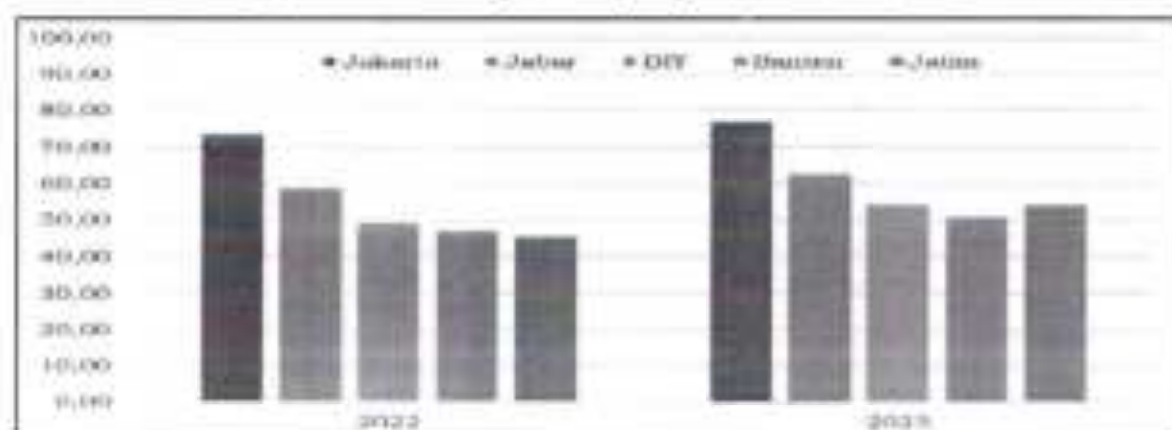
Tabel II.26
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Banten
Tahun 2018-2023

TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	2,01 (Cukup)	1,83 (Cukup)	0	3,15 (Baik)	3,03 (Baik)	3,39 (Baik)

Sumber: SPDI Provinsi Banten, 2024 (Disalah oleh Bappenda)

Keterangan: Tahun 2020, Kemayoran RI tidak melakukan pengukuran di Provinsi Banten

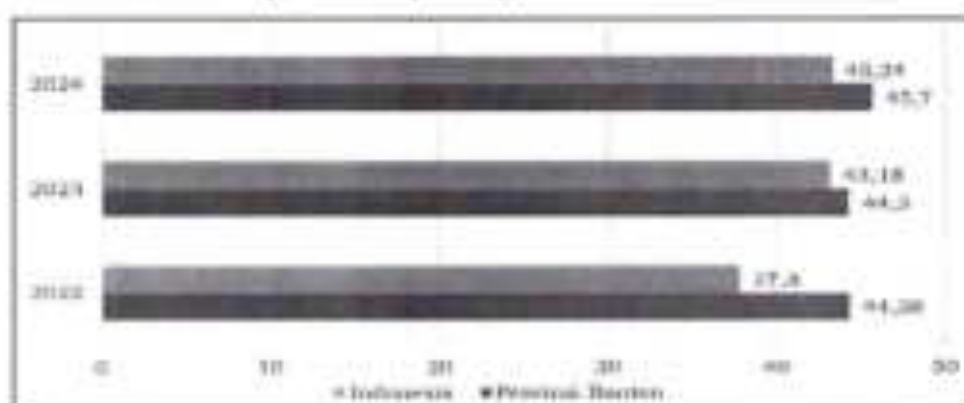
Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Perusahaan modal ventura East Ventures dengan lembaga riset Katadata Insight Center (KIC) dan PricewaterhouseCoopers (PwC) mengeluarkan laporan *East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023* untuk mengukur dan memetakan daya saing digital di seluruh wilayah Indonesia. EV-DCI mengukur daya saing digital wilayah berdasarkan sembilan pilar indikator besar, yaitu kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengeluaran TIK, kondisi perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, ketenagakerjaan, infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah. Hasilnya kemudian dirumuskan dengan sistem skor 0-100, dengan semakin tinggi skor maka mengindikasikan daya saing digital suatu wilayah semakin baik.



Gambar II.38
Daya Saing Digital Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2023 (nilai)
Sumber: Laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index, 2024 (Disalah oleh Bappenda)

Hal lainnya terkait digital, terdapat pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi RI, yang mana indikator ini untuk mengetahui tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI menggunakan perhitungan *Multistage Principal Component Analysis* (PCA) untuk menentukan bobot sub pilar dan pilar pembentuk IMDI.

IMDI terdiri dari beberapa pilar yaitu: 1) pilar infrastruktur dan ekosistem, infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital dengan tujuan bahwa pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital (terbentuk dari 3 (tiga) sub pilar mencakup akses dan adopsi teknologi digital, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah); 2) pilar keterampilan digital, suatu rangkaian kemampuan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi (terbentuk dari 3 (tiga) sub pilar mencakup komplementaritas, pengenalan TIK, dan keamanan); 3) pilar pemberdayaan, kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang menghasilkan pendapatan yang merepresentasikan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas digital (tebentuk dari 2 (dua) sub pilar mencakup pengguna/konsumen dan penyedia/penjual); dan 4) pilar pekerjaan, yang berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan guna menciptakan pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru (terdiri dari 2 (dua) sub pilar mencakup permintaan dan penawaran). Hasil pengukuran IMDI sebagaimana pada gambar di bawah.

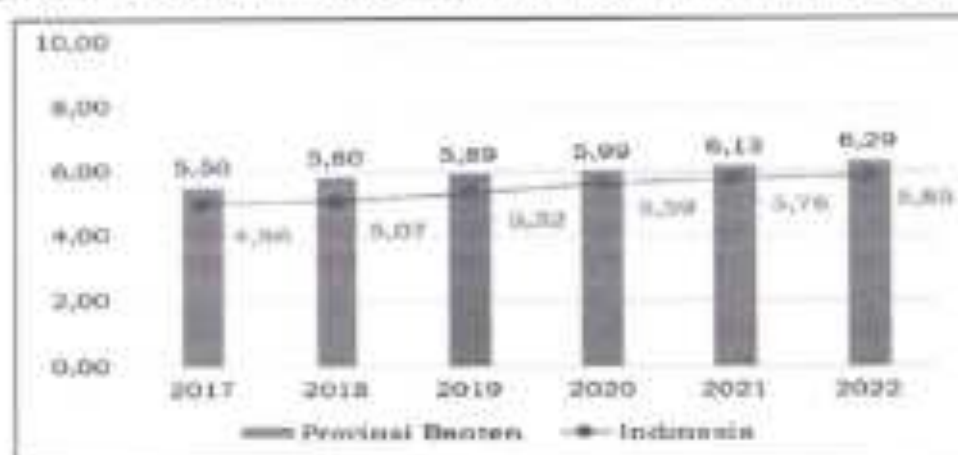


Gambar II.39
Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Provinsi Banten
Dengan Indonesia Tahun 2022-2024

(Sumber: <https://imdi.afindigital.id/home>, 2024; Diakses 12 September 2024, Diolah oleh Bappenas)

Sementara itu, Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Banten mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menggambarkan adanya

perbaikan pembangunan TIK, namun demikian posisi Provinsi Banten masih pada kategori sedang. Sebagai informasi bahwa nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51-10,00), sedang (5,01-7,50), rendah (2,51-5,00), dan sangat rendah (0-2,50).



Gambar II.40
Perbandingan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2017-2022
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023; Diolah oleh Bappeta)

2.3.7 KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

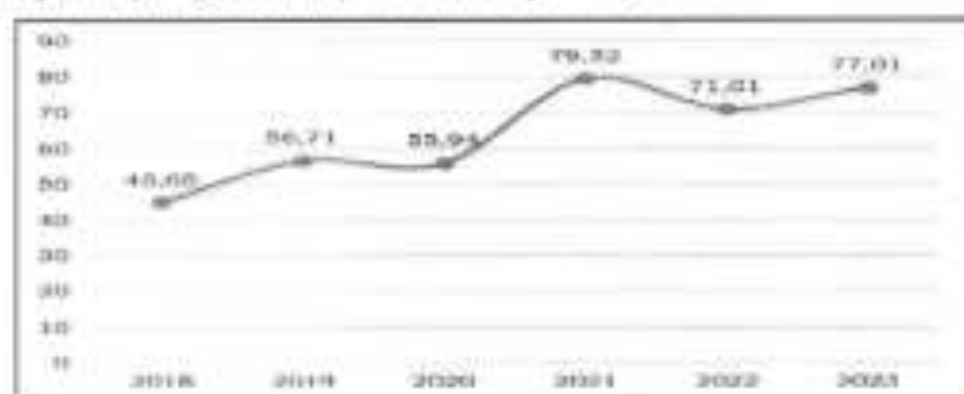
Ombudsman Republik Indonesia secara periodik melakukan pengukuran terhadap pemerintah daerah khususnya terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengukuran ini melalui kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan ini dilakukan terhadap aspek pelayanan publik, seperti perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan pertanahan.

Penilaian lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat diukur melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Lebih lanjut PEKPPP merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur dan menilai kinerja unit kerja dalam memberikan pelayanan publik, mencakup terhadap aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan.

Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2023 terhadap Pemerintahan Provinsi Banten memperoleh nilai 91,16 (zona hijau) dengan kategori A (kualitas tertinggi), sedangkan hasil nilai pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2023 diperoleh hasil berikut: Samsat Cikande 3,9 (B), Dinas Sosial 2,83 (C), dan RSUD Banten 4,50 (A-), sehingga hasil rerata pelayanan publik Tahun 2023 untuk Provinsi Banten sebesar 3,74 (predikat baik).

2.3.8 INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Selain itu juga tujuan dari pengukuran ini untuk dapat mendorong penciptaan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, menciptakan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan daerah yang hilirnya dapat meningkatkan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan yang berdampak terhadap masyarakat.



Gambar II.41
Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Banten
Tahun 2018-2023

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappenas)

Pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Hasil penilaian IPKD Provinsi Banten sebagaimana gambar di atas.

2.3.9 INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Untuk mengukur tingkat kemajuan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai tahun 2014 melakukan Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam penelitian ini data awal yang digunakan adalah data IDM mulai Tahun 2018 yang

merupakan hasil pendataan mandiri oleh Kementerian PPDT. Jumlah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami penurunan.

Tabel II.27
Perkembangan Status Desa di Provinsi Banten Tahun 2018-2023 (desa)

NO	SUB KOMPONEN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Sangat Tertinggal	71	27	15	8	7	2
2	Desa Tertinggal	399	360	388	227	146	100
3	Desa Berkembang	514	719	794	841	813	731
4	Desa Maju	82	128	138	137	262	353
5	Desa Mandiri	2	4	8	5	10	52
Jumlah		1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238

Sumber: SDPD Provinsi Banten, 2024 (Diolah oleh Bappoda)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan desa mandiri di wilayah Provinsi Banten sangatlah lambat, namun meningkat cepat pada Tahun 2023. Selain itu, masih banyak desa tertinggal dan sangat tertinggal, capaian nilai IDM di Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 0,6626 menempatkan pada peringkat 23 dari 33 provinsi yang dilakukan penilaian. Hal ini menunjukkan capaian IDM di Provinsi Banten berada di bawah rata-rata nasional dan terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali.

Tabel II.28
Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Banten Tahun 2021-2023 (nilai)

NO	PROVINSI	2021		2022		2023		SELISIH
		NILAI	PERINGKAT	NILAI	PERINGKAT	NILAI	PERINGKAT	
1	Bali	0,8037	1	0,8269	1	0,8560	1	0,0281
2	Yogyakarta	0,7837	2	0,8128	2	0,8322	2	0,0194
3	Jatim	0,7217	3	0,7517	4	0,7807	4	0,0290
4	Jabar	0,7202	4	0,7529	3	0,7798	5	0,0269
5	Jateng	0,6930	10	0,7118	11	0,7300	14	0,0182
6	Banten	0,6445	23	0,6626	23	0,6803	23	0,0177

Sumber: SDPD Provinsi Banten, 2024 (Diolah oleh Bappoda)

Gambaran peringkat nilai IDM di Provinsi Banten secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel di atas seiring dengan rendahnya peningkatan nilai IDM Tahun 2022 dibandingkan nilai IDM Tahun 2021. Perubahan nilai IDM di Provinsi Banten hanya mencapai 0,0181 jauh lebih rendah dibandingkan perubahan capaian IDM provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali. Kondisi ini tentu saja sangat perlu segera diantisipasi agar gap antara capaian IDM di Provinsi Banten dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali tidak semakin membesar.

2.3.10 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Untuk mengukur perilaku antikorupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK mengukur

tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuity*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai antikorupsi. Pada Tahun 2017-2020 dilakukan pengukuran terhadap survey eksternal persepsi korupsi, capaian pada tahun tersebut menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan adanya penurunan angka dari 5,76 pada Tahun 2017 menjadi 3,41 pada Tahun 2020. Capaian IPAK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari Tahun 2021-2023 berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) eksternal oleh KPK, dari sebesar 64,18 pada Tahun 2021 menjadi 85,50 pada Tahun 2023.

2.3.11 TINGKAT KEMATANGAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah dengan cakupan penilaian meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

Pada Tahun 2023, Provinsi Banten meraih peringkat 6 se-Indonesia untuk level Provinsi dengan poin 2,76, indeks skor 1,1 artinya bahwa Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Banten sudah mencapai predikat Baik. Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten sudah baik. Sudah ada kebijakan yang mengatur tata kelola data yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk. Penerapan aspek perencanaan data terkait proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, dan penyiapan instrumen sudah dilakukan oleh seluruh produsen

data, namun belum terdapat prosedur baku untuk seluruh unit kerja produsen data.

2.3.12 INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN

Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - i. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - ii. E-Tendering/E-Seleksi;
 - iii. E-Purchasing;
 - iv. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan
 - v. E-Kontrak.
- b. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
- c. Tingkat Kematangan UKPBJ

Pada Tahun 2023, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerbitkan Indeks tata kelola pengadaan dengan skor untuk Banten 88,59 (predikat baik).

2.3.13 INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum (IRH). Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas dan akuntabel pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, berdasarkan LKE Kemenpanrb Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengukuran terhadap Indeks Reformasi Hukum di Provinsi Banten yang mendapatkan skor 97,64 dengan predikat sangat baik oleh sebab itu hal ini perlu dipertahankan.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah Provinsi Banten bertujuan untuk melihat dinamika kemampuan Provinsi Banten di antara provinsi lain di tingkat nasional. Aspek daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 EKONOMI DAERAH

2.4.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran penting yang dapat menggambarkan kondisi suatu perekonomian. Nilai pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) di satu waktu dibandingkan dengan waktu sebelumnya dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan yang telah berlangsung disuatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten menunjukkan tren cenderung tidak banyak berubah sebelum sedikit menurun di Tahun 2019 dan turun signifikan pada Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, Provinsi Banten berkontraksi hingga 3,39 persen pada Tahun 2020 dan mengalami perbaikan ditahun selanjutnya seperti pada tabel di bawah.

Tabel II.39
PDRB ADHK di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2018-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Pandeglang	5,30	4,43	-0,67	3,10	3,47	2,53
2	Kabupaten Lebak	5,63	5,44	-0,91	3,18	3,80	2,80
3	Kabupaten Tangerang	5,80	5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18
4	Kabupaten Serang	5,29	5,01	-2,73	3,74	5,04	4,80
5	Kota Tangerang	4,95	4,02	-7,35	3,90	5,95	5,57
6	Kota Cilegon	6,11	5,29	-1,23	5,24	4,51	4,82
7	Kota Serang	6,55	5,20	-1,29	3,88	4,71	4,74
8	Kota Tangerang Selatan	7,40	7,39	-1,01	4,81	5,82	5,36
Jumlah		5,77	5,26	-3,39	4,40	5,03	4,81

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Data oleh Supriadi)

Beberapa kabupaten/kota tercatat masih mengalami tren fluktuatif, aktivitas perekonomian di Provinsi Banten dapat tercerminkan didalam komponen PDRB. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat komposisi perekonomian berdasarkan jenis kegiatan yang mendukungnya. Berdasarkan lapangan usahanya, sektor industri pengolahan, perdagangan

besar dan eceran, serta sektor konstruksi merupakan ketiga sektor terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Provinsi Banten.

Tabel II.30
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2018-2023
(miliar rupiah)

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA (TAHUN)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.574	37.022	39.029	40,20	44,05	46,61
Pertambangan dan Penggalian	4.272	4.377	4.275	4,66	4,14	3,50
Industri Pengolahan	191.863	203.360	195.499	209,81	227,67	246,27
Pengadaan Listrik dan Gas	12.770	12.073	10.811	12,14	13,02	12,79
Pengadaan Air	482	511	553	0,89	0,61	0,65
Konstruksi	65.453	73.327	71.587	82,10	91,18	95,67
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparat Mobil dan Sepeda Motor	76.561	84.325	83.513	85,90	93,55	101,01
Transportasi dan Perhubungan	67.325	71.343	40.455	41,68	71,16	90,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.633	15.849	15.158	15,89	17,45	19,15
Informasi dan Komunikasi	21.696	23.278	25.201	26,57	28,22	30,60
Jasa Keuangan	18.930	19.714	20.300	22,32	25,31	25,72
Real Estate	86.679	92.186	84.278	56,40	60,29	64,18
Jasa Perusahaan	6.574	7.493	7.325	7,33	7,92	8,52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.301	13.657	14.210	14,46	15,23	16,12
Jasa Pendidikan	21.130	23.716	24.503	24,35	24,58	26,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.444	8.269	9.183	10,30	10,69	11,84
Jasa lainnya	10.018	11.150	10.862	11,16	12,16	13,97
Jumlah PDRB	613.804	661.652	626.437	565,87	747,22	814,12

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Data oleh Bappeda)

Sementara PDRB ADHK seperti pada tabel di bawah utamanya dapat digunakan untuk melihat laju perkembangan dari masing-masing kegiatan di dalam perekonomian dari waktu ke waktu melalui nilai pertumbuhannya.

Tabel II.31
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2018-2023
(miliar rupiah)

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHK MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.881	24.408	25.275	25,417	26,486	26,524
Pertambangan dan Penggalian	2.871	2.882	2.641	3,657	3,208	1,845
Industri Pengolahan	149.425	154.761	147.538	155,028	160,616	169,556
Pengadaan Listrik dan Gas	4.480	4.318	3.832	4,319	4,640	4,570
Pengadaan Air	416	438	471	494	513	540
Konstruksi	42.363	46.048	44.727	49,562	51,944	52,697
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparat Mobil dan Sepeda Motor	58.614	62.297	60.482	61,595	64,031	66,577

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transportasi dan Pengudangan	29.064	29.264	20.869	22.058	27.948	31.425
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.664	11.446	10.863	11.333	12.250	13.282
Informasi dan Komunikasi	24.98	27.244	29.736	31.371	33.162	35.733
Jasa Keuangan	12.874	13.134	13.492	14.249	14.912	16.810
Jasa Katata	37.261	40.521	41.392	42.635	44.509	46.070
Jasa Perumahan	4.459	4.841	4.627	4.565	4.735	5.080
Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.518	8.109	8.007	7.990	8.129	8.287
Jasa Pendidikan	13.104	14.112	14.299	14.154	13.993	14.801
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.249	5.698	6.120	6.735	6.858	7.256
Jasa lainnya	6.536	7.102	6.717	6.812	7.198	7.874
Jumlah PDRB	433.783	456.62	441.139	460.739	484.131	507.427

Sumber: DPS Provinsi Banten, 2024 (Data oleh Rappedia)

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha dan perekonomian, PDRB juga dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi Provinsi Banten dari sisi pengeluaran. Berdasarkan PDRB ADHB menurut pengeluaran, seperti pada tabel di atas. Dari tahun ke tahun, nilai dari komponen pengeluaran PDRB mengalami tren kenaikan sebelum berkontraksi Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif menjadi 814,12 angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan di Tahun 2022.

Tabel II.32
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten Tahun 2018-2023
(miliar rupiah)

PENGELUARAN	PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN (TAHUN)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	321.788	348.161	345.861	360.302	399.346	427.15
Pengeluaran konsumsi lembaga swasata nasional	2.803	3.064	2.923	3.016	3.193	3.45
Pengeluaran konsumsi pemerintah	27.876	29.745	27.388	29.187	30.624	33.17
Pembentukan modal tetap bruto	192.970	215.058	219.704	235.748	256.963	279.58
Perubahan Inventur	101,16	88,6	13,88	8,39	46,89	30,19
Net Ekspor Barang dan Jasa	68.566	68.207	30.005	37.683	57.102	70.74
Jumlah PDRB	613.804	661.321	625.895	666.888	747.250	814,12

Sumber: DPS Provinsi Banten, 2024 (Data oleh Rappedia)

Salah satu komponen pengeluaran yang paling menurun adalah perubahan inventori. Namun sektor lainnya mengalami peningkatan pada total ekspor setelah sebelumnya menurun tahun 2023 kembali berada pada tren positif. Jumlah PDRB tercatat 507,43 miliar rupiah, hal ini sejalan dengan tren peningkatan kembali ekspor dan impor nasional menuju pemulihan pandemi COVID-19.

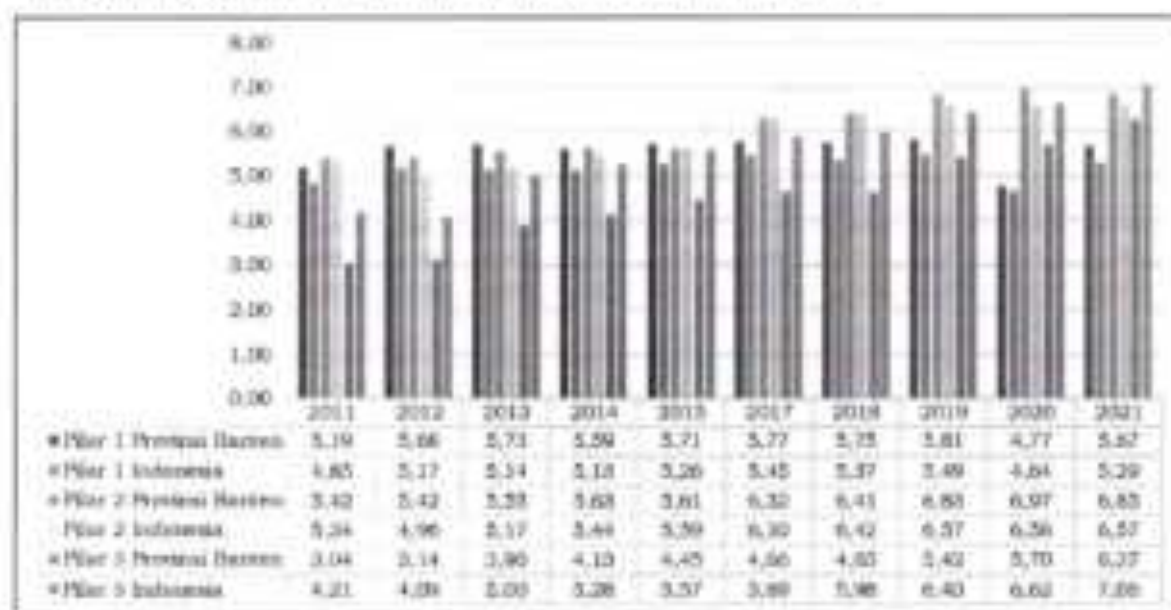
Tabel II.33
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten Tahun 2018-2023
 (miliar rupiah)

PENGELUARAN	PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN (TAHUN)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	247.892	260.151	254.841	260.957	271,68	282,43
Pengeluaran konsumsi lembaga swasata nir laba	2.148	2.309	2.118	2.081	2,12	2,20
Pengeluaran konsumsi pemerintah	18.504	19.624	17.759	17.935	17,97	17,99
Pembentukan modal tetap bruto	135.049	143.682	142.617	148.446	155,43	160,77
Perubahan inventori	105,31	79,73	13,36	6,87	36,38	21,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	50.084	30.896	23.498	31.319	38,88	44,02
Jumlah PDRB	433.763	456.620	441.139	460.739	484,13	507,43

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Dilak oleh Rappenda)

2.4.1.2 INDEKS EKONOMI INKLUSIF

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.



Gambar II.42
Perbandingan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2011-2021

(Sumber: Rappenda, 2023; Dilak oleh Rappenda)

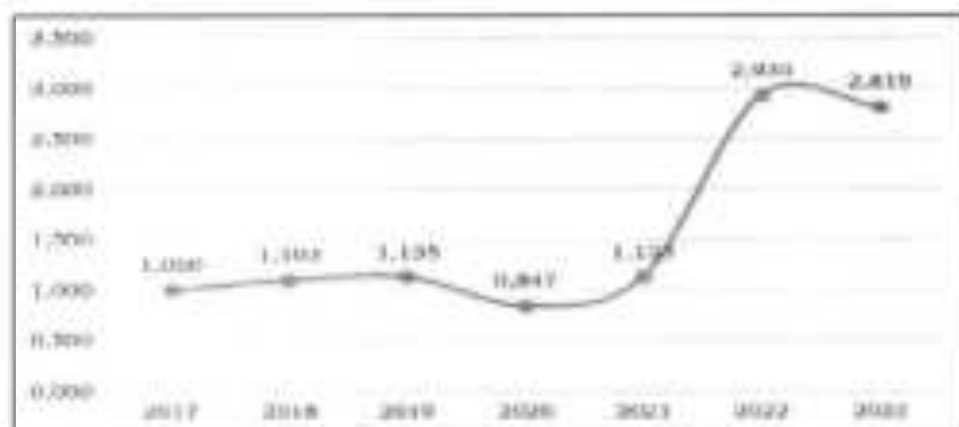
Indeks ekonomi inklusif di Provinsi Banten mengalami tren positif sejak Tahun 2011-2021 dengan rentang indeks 5,8-6,6 dan berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Banten Tahun 2021 berada di angka 5,67 berada di atas nasional 5,29, di pilar 2 terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 6,85 berada di atas

nasional yang mencapai 6,57, namun di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan di Provinsi Banten hanya sebesar 6,27 masih di bawah rerata nasional yang mencapai 7,06, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan perekonomian daerah lebih berdampak bagi masyarakat secara menyeluruh dan inklusif.

2.4.1.3 KAPASITAS FISKAL DAERAH (KFD)

Kapasitas fiskal daerah (KFD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, merujuk pada pasal 1 angka 1 PMK 116/2021, KFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

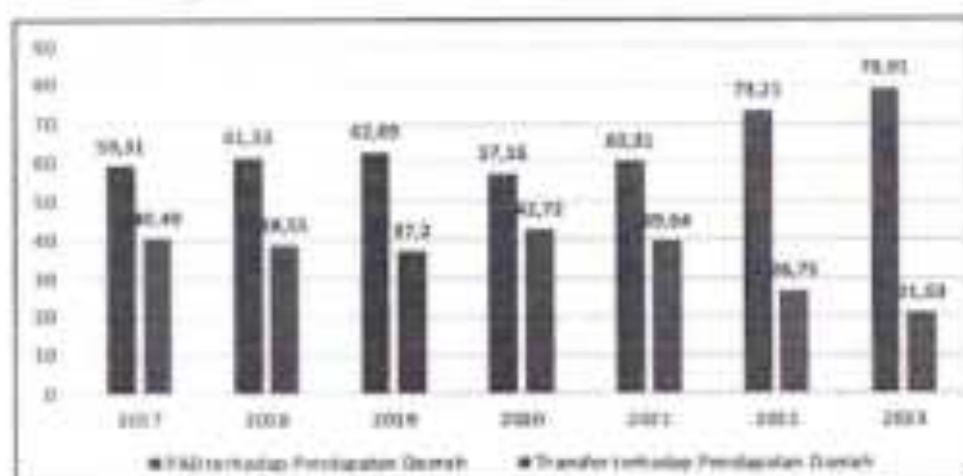
Ruang fiskal merupakan rasio yang mencerminkan pendapatan yang masih bebas digunakan untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan daerah. Besaran nilai ruang fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Selama periode 2017-2023, perhitungan ruang fiskal Banten masih relatif rendah, nilainya di bawah 10 persen. Capaian ruang fiskal tertinggi sebesar 2,934 persen terjadi Tahun 2022 dan terendah sebesar 0,847 persen Tahun 2020.



Gambar 11.43
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi Banten Tahun 2017-2023
(Sumber: APBD Provinsi Banten, 2024; Ditolah oleh Supandi)

Perkembangan rasio kemandirian yang ditunjukkan oleh rasio PAD dan transfer terhadap pendapatan memberikan informasi bahwa tingkat kemandirian Banten relatif tinggi. Rasio PAD lebih tinggi dibandingkan Rasio Transfer terhadap pendapatan. Pada Tahun 2023, rasio

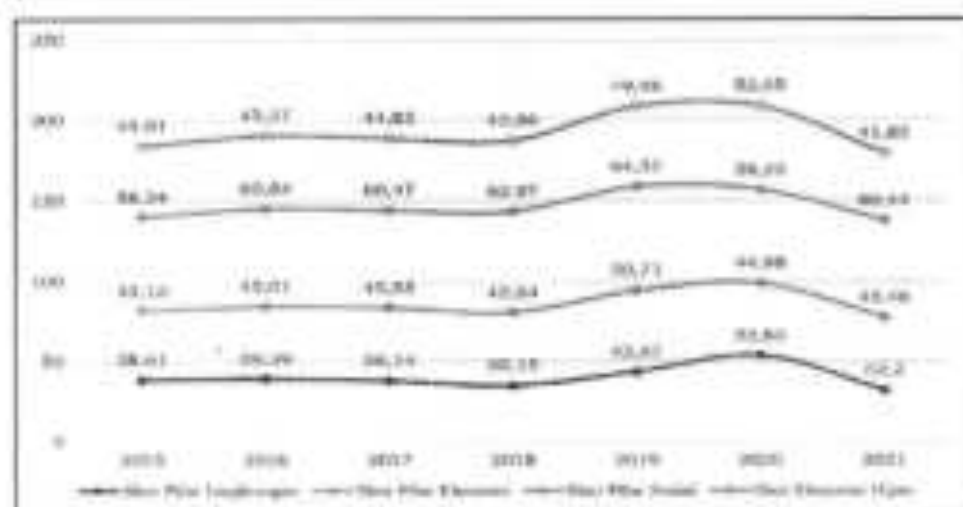
PAD dan rasio transfer terhadap pendapatan berturut-turut sebesar 78,91 persen dan 21,03 persen.



Gambar II.44
Rasio Kemandirian di Provinsi Banten Tahun 2017-2023
(Sumber: DPS Provinsi Banten 2023; Diolah oleh Bappenas)

2.4.1.4 INDEKS EKONOMI HIJAU

Ekonomi hijau menjadi bagian target pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui penerapan ekonomi sirkular sebagai salah satu strateginya. Ekonomi sirkular merupakan pendekatan sistemik dalam meminimalisir terhadap akses penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai dengan berprinsip 9R (*refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover*).



Gambar II.45
Nilai Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Banten Tahun 2015-2021
(Sumber: Bappenas, 2023; Diolah oleh Bappenas)

Implementasi ekonomi hijau bertujuan untuk mendukung promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur

berkelanjutan, serta lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

Semua pilar penyusun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Banten sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di bawah mengalami kecenderungan meningkat, walaupun pilar ekonomi dan sosial mengalami kontraksi pada Tahun 2020 dan 2021 karena dampak pandemi yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan kembali meningkatnya tingkat kemiskinan. Selain itu, yang perlu menjadi catatan dalam indikator Indeks Ekonomi Hijau adalah masih rendahnya produktivitas padi di tengah tantangan alih fungsi lahan pertanian dan perubahan iklim. Di sisi lain, pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan yang belum optimal juga menjadi catatan.

2.4.1.5 INDEKS EKONOMI BIRU

Ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan lapangan kerja, serta kesehatan ekosistem laut. Pendekatan ekonomi biru bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan yang tepat dan mengelola kepentingan yang saling bersaing dalam ruang laut tanpa menempatkan prioritas ekonomi dalam persaingan dengan kebutuhan ekologis atau sosial. Ekonomi biru menjadi salah satu strategi untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dan Target SDGs.

Indonesia Blue Economy Index (IBEI) adalah sebuah indikator komposit yang menunjukkan penguasaan dan perkembangan sektor ekonomi biru di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 pilar, 11 sub pilar, dan 44 indikator. Pilar tersebut antara lain: lingkungan, ekonomi dan sosial dengan 2 (dua) *enabler* yaitu: teknologi dan tata kelola. Pada Tahun 2023 nilai IBEI Provinsi Banten termasuk rendah yaitu 22,62, namun diperkirakan potensi pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Banten kedepannya sangat besar antara lain:

a. Pilar lingkungan

Kualitas sumber daya dan konservasi laut di Provinsi Banten didukung kawasan yang berkualitas baik, yaitu: kawasan terumbu karang berkualitas baik sebesar 50 persen, kawasan lamun berkualitas baik sebesar 90 persen, dan kawasan hutan mangrove berkualitas baik sebesar 49,80 persen. Penanaman/rehabilitasi hutan mangrove, rawa,

dan lahan gambut sebesar 24 Ha dan luas kawasan konservasi perairan sebesar 99,94 Ha.

b. Pilar Ekonomi

Sub pilar perikanan tangkap dan budidaya, peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2023 sebesar 0,28 persen, berpotensi meningkat dengan adanya peningkatan produksi akuakultur, budidaya tambak, perikanan, budidaya rumput laut, ekspor ikan olahan, garam.

Sub pilar industri berbasis kelautan, semakin besar dengan ketersediaan jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebesar 13.219 unit.

Sub pilar perdagangan, transport dan logistik, volume ekspor perikanan dan akuakultur Tahun 2023 mencapai 36.366,19 ton, dengan peran ekspor produk perikanan terhadap total ekspor sebesar 0,30 persen.

Sub pilar pariwisata berbasis kelautan didukung jumlah wisata bahari sebanyak 125 titik destinasi.

c. Pilar Sosial

Pada pilar sosial yang ada di Provinsi Banten yaitu lebih kurang terdapat sejumlah 1.111 orang perempuan yang berkaitan erat pada sektor perikanan dan jumlah nelayan dan pembudidaya di Provinsi Banten mencapai 67.988 orang

d. Enabler: Teknologi dan Tata Kelola

Kondisi IBEI pada komponen penggerak (*enabler*) di Provinsi Banten memiliki kondisi berupa terdapat kapal perikanan tangkap laut-kapal motor dengan kapasitas lebih dari 30 GT sebanyak 481 unit dengan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 20 pelabuhan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel II.34
Lokasi Pelabuhan Perikanan di Provinsi Banten

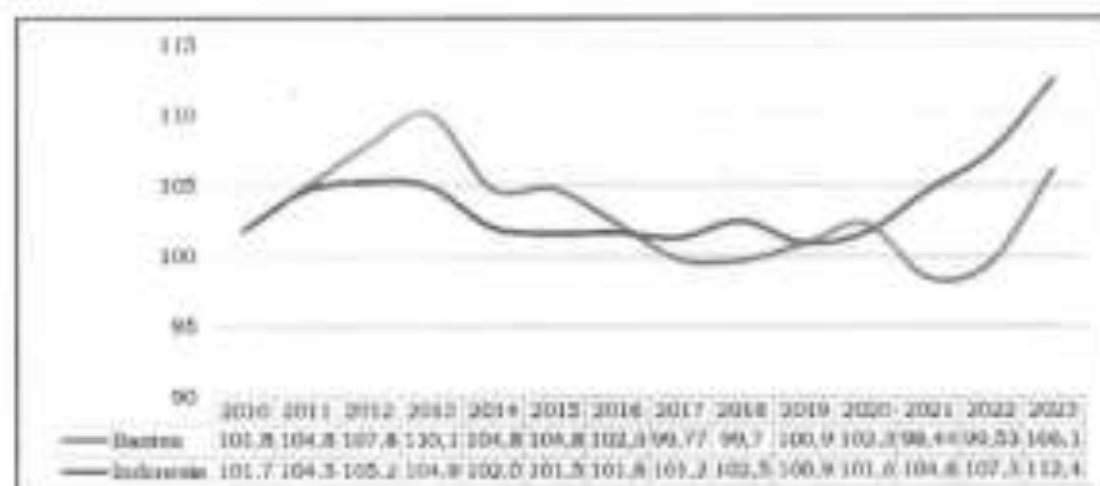
NO	KODE PELABUHAN PERIKANAN	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI PELABUHAN PERIKANAN		POSISI PELABUHAN PERIKANAN (PESISIR/SUNGAI)
			KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	
1	712.36.01	Tanjung Pasir	Kab Tangerang	Teluk Naga	Pesisir
2	712.36.02	Citra	Kab Tangerang	Paku Haji	Pesisir
3	712.36.03	Kronjo	Kab Tangerang	Kronjo	Pesisir
4	712.36.04	Limar	Kab Serang	Tirtayasa	Pesisir
5	712.36.05	Karangantu	Kab Serang	Kasamen	sungai
6	712.36.06	Terate	Kab Serang	Kramatayu	sungai
7	712.36.07	Welas	Kab Serang	Bojonegara	Pesisir
8	712.36.08	Pekelali	Kab Serang	Pekelampayan	Pesisir
9	572.36.09	Anzer	Kab Serang	Anzer	Pesisir
10	572.36.10	Pasauran	Kab Serang	Cinangka	sungai
11	572.36.11	Sukaregara	Kab Pandeglang	Carita	sungai
12	572.36.12	Labuhan	Kab Pandeglang	Labuan	Pesisir
13	572.36.13	Sidamukti	Kab Pandeglang	Sukaremas	sungai

NO	KODE PELABUHAN PERIKANAN	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI PELABUHAN PERIKANAN		POSISI PELABUHAN PERIKANAN (PESISIR/SUNGAI)
			KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	
14	572.36.14	panimbang	Kab Pandeglang	Panimbang	sungai
15	572.36.15	Sumur	Kab Pandeglang	Sumur	Pesisir
16	572.36.16	tanjungsari	Kab Pandeglang	Sumur	sungai
17	573.36.17	cikrusia	Kab Pandeglang	Cikrusia	sungai
18	573.36.18	Binuangreun	Kab Lebak	Wanasalam	sungai
19	573.36.19	Banten Selatan	Kab Pandeglang dan Lebak	Cikrusia dan wanasalam	Pesisir
20	573.36.20	Cirundeu	Kab Lebak	Cigugur	Pesisir

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (Diolah oleh Bappeda)

2.4.1.6 NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Secara umum Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan menurun dimana kondisi ini berbanding terbalik dengan NTP nasional yang meningkat utamanya dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini perlu disikapi serius dalam pembangunan Banten untuk lebih memperhatikan dalam peningkatan kesejahteraan petani dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.



Gambar II.46
Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2010-2022

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023; Diolah oleh Bappeda)

Pada Bulan Januari 2024, dari 38 provinsi di Indonesia sebanyak 36 provinsi yang NTP-nya berada di atas angka 100. NTP tertinggi dicapai oleh Provinsi Bengkulu dengan nilai indeks sebesar 160,12 yang diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 156,59. Sedangkan Nilai Tukar Petani, terendah terjadi di Provinsi NTT sebesar 97,73. NTP nasional sebesar 118,27 yang mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 117,77.

2.4.1.7 PRODUKTIVITAS EKONOMI

Sumber pertumbuhan dan sehatnya perekonomian suatu wilayah dilihat dari tingkat pertumbuhan produktivitas ekonomi, yang secara luas didefinisikan sebagai tingkat output ekonomi secara keseluruhan per unit input. *Total Factor Productivity* (TFP) adalah bagian output tidak dijelaskan oleh jumlah input yang digunakan dalam produksi. Sehingga nilainya tergantung pada seberapa efisien dan intensifnya input yang digunakan dalam proses produksi. Untuk merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dapat digunakan. ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Tabel II.35
Capaian Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Pandeglang	2,36	2,11	2,98
2	Kabupaten Lebak	1,67	1,41	1,90
3	Kabupaten Tangerang	5,37	4,55	4,95
4	Kabupaten Serang	10,40	7,60	7,80
5	Kota Tangerang	9,82	6,40	6,67
6	Kota Cilegon	7,84	8,97	8,54
7	Kota Serang	10,30	8,41	8,17
8	Kota Tangerang	8,75	7,19	7,48
Provinsi Banten		7,57	6,71	6,90

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (dikolah oleh Supriyanto)

Semakin tinggi ICOR mengidentifikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi di Provinsi Banten masih cukup fluktuatif dan belum dalam kondisi ideal yang menurut para ekonom berada pada kisaran 3-4. Pemerintah Provinsi Banten masih harus melakukan langkah-langkah strategis peningkatan efisiensi penekanan *high cost economy* melalui penurunan biaya logistik dan peningkatan kualitas kemudahan berusaha, sehingga produktivitas perekonomian di Provinsi Banten bisa terus mengalami peningkatan.

2.4.1.8 PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF

Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ini diarahkan kepada: 1) pengembangan riset, 2) pengembangan pendidikan, 3) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, 4) penyediaan infrastruktur, 5) pengembangan sistem pemasaran, 6) pemberian insentif, 7) fasilitasi kekayaan intelektual, dan 8) perlindungan hasil kreativitas.

Proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor ekonomi kreatif di Indonesia terus meningkat. Pada Tahun 2022, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 6,54 persen dari total PDB nasional, di Tahun 2023 kontribusi ini meningkat menjadi sekitar 7,8 persen. Kontribusi terbesar penyumbang peningkatan ekonomi kreatif yang pada sub sektor kuliner, fesyen, dan kriya yang secara keseluruhan dari sub sektor tersebut menyumbang 75 persen dari total PDB ekonomi kreatif.

Pada Tahun 2022 berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bahwa hampir 95 persen produk ekspor ekonomi kreatif di Indonesia berasal dari Jawa, dengan nilai lebih dari US\$ 1 miliar per tahun. 5 (lima) daerah terbesar di Jawa yang menyumbangkan proporsi PDRB ekonomi kreatif bagi Indonesia seperti: 1) Provinsi Jawa Barat sebesar 35,50 persen (US\$ 7 miliar), 2) Provinsi Jawa Tengah sebesar 22,94 persen (US\$ 4,5 miliar), 3) Provinsi Jawa Timur sebesar 15,38 persen (US\$ 3 miliar), 4) Provinsi Banten sebesar 14,16 persen (US\$ 2,8 miliar), dan 5) DKI Jakarta sebesar 5,09 persen (US\$ 1 miliar).

Berdasarkan data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf, bahwa kinerja positif sektor ekraf tercermin juga dari angka ekspor produknya. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat nilai ekspor mencapai US\$26,94 miliar, meningkat 12,81 persen dari Tahun 2021. Subsektor mode busana (fashion), kriya, dan kuliner masih menjadi penyumbang ekspor tertinggi dengan kontribusi 99,94 persen dari seluruh nilai ekspor produk ekraf pada 2022. Dari sisi penyuplai, Jawa Barat (33,64 persen) menjadi provinsi dengan angka kontribusi terbesar dalam penyediaan barang, diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta.

2.4.1.9 ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ)

Untuk melihat sektor-sektor unggulan di Provinsi Banten, analisis dapat dilakukan menggunakan perhitungan *Location Quotient* (LQ). LQ merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keunggulan dari masing-masing sektor ekonomi di suatu wilayah menggunakan data aktivitas ekonomi per sektor berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha. Rasio PDRB masing-masing sektor terhadap PDRB keseluruhan dibandingkan dengan rasio yang sama pada tingkat nasional untuk mendapatkan analisis tingkat spesifikasi dari setiap sektor terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hasil perhitungan LQ dapat mengelompokkan sektor unggulan dan sektor non-unggulan di suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai LQ yang lebih dari 1 (satu) menunjukkan bahwa sektor yang dianalisis memiliki keunggulan sementara sektor dengan nilai LQ kurang dari 1 (satu) tidak memiliki keunggulan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai LQ suatu sektor maka semakin unggul sektor tersebut di suatu wilayah dan periode tertentu.

Lebih lanjut, sektor unggulan yang dimaksud dari perhitungan LQ dapat diartikan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri serta dapat juga memenuhi kebutuhan daerah di luarnya atau dengan kata lain hasil produksi sektor tersebut dapat diekspor antar daerah. Di sisi lain, hasil output dari sektor tidak unggulan hanya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Tabel II.36
Perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Provinsi Banten Terhadap Nasional Tahun 2017-2023

LAPANGAN USAHA PDB	LQ TAHUN								RERATA
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,40	0,44	
Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06	0,03	0,08	
Industri Pengolahan	1,66	1,64	1,63	1,62	1,64	1,62	1,38	1,60	
Pengadaan Listrik dan Gas	0,99	1,01	0,93	0,86	0,91	0,92	1,43	1,01	
Pengadaan Air	1,20	1,19	1,17	1,21	1,20	1,22	1,12	1,19	
Konstruksi	0,96	0,97	1,00	1,01	1,08	1,12	1,02	1,02	
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,01	1,02	1,04	1,06	1,02	1,01	0,82	1,00	
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,60	1,51	1,29	1,31	1,39	0,87	1,37	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,80	0,81	0,82	0,88	0,88	0,85	0,78	0,83	
Informasi dan Komunikasi	1,11	1,12	1,13	1,11	1,09	1,07	0,77	1,05	
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,74	0,71	0,72	0,74	0,76	0,66	0,72	
Real Estate	2,88	2,99	3,07	3,10	3,09	3,18	2,87	3,03	
Jasa Perusahaan	0,59	0,57	0,56	0,57	0,56	0,53	0,49	0,55	

LAPANGAN USAHA PDB	LQ TAHUN							RERATA
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,53	0,52	0,53	0,54	0,53	0,53	0,60	0,54
Jasa Pendidikan	0,97	0,98	0,99	0,99	0,97	0,98	1,07	0,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,07	1,05	1,03	1,03	1,05	1,06
Jasa lainnya	0,86	0,85	0,83	0,83	0,82	0,79	0,71	0,81

Sumber: Diolah oleh Jhupendra, 2024

Menggunakan analisis LQ di Provinsi Banten, secara rata-rata sektor-sektor yang dapat dikatakan unggul diantaranya adalah sektor real estate, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara sektor-sektor lainnya memiliki nilai LQ rata-rata di bawah satu yang dapat diartikan bahwa sektor-sektor lainnya non-unggul yang hanya dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, nilai LQ masing-masing sektor tidak mengalami banyak perubahan dan memiliki tren yang beragam. Untuk sektor dengan rerata LQ yang masih kurang dari satu atau belum unggul seperti sektor konstruksi memiliki tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Nilai LQ sektor konstruksi yang lebih dari satu yang berarti mulai masuk sebagai sektor unggulan provinsi banten antara lain: industri pengolahan, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

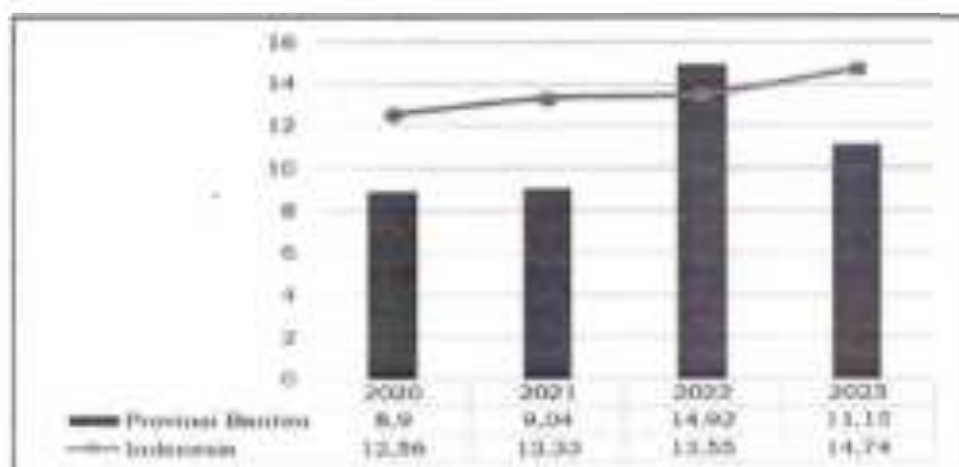
2.4.2 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

2.4.2.1 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Indikator ini dilakukan pengukuran oleh Perpustakaan Nasional dengan kategori nilai sebesar 0-29,9 (sangat rendah), nilai 30-49,9 (rendah), 50-79,9 (sedang), 80-89,9 (tinggi), dan 90-100 (sangat tinggi). Jika membandingkan capaian IPLM antara Provinsi Banten dan nasional dapat dilihat pada gambar di bawah, dimana capaian Provinsi Banten belum memberikan nilai yang baik dominan masih di bawah capaian nasional

yang hanya pada Tahun 2022 capaian IPLM Provinsi Banten dapat melebihi capaian nasional.



Gambar II.47
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Banten Dengan Indonesia Tahun 2020-2023

(Sumber: Perpusdatastat Nasional, 2024; Diolah oleh Bappenas)

Pencapaian nilai IPLM di Provinsi Banten sebesar 52,50, dan masuk dalam kategori sedang. 5 (lima) kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Cilegon sebesar 58,16, Kota Tangerang Selatan sebesar 54,69, Kota Tangerang sebesar 54,25, Kabupaten Pandeglang sebesar 51,77, dan Kabupaten Lebak sebesar 50,26. Sedangkan 3 (tiga) kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kota Serang 46,76, Kabupaten Serang 47,83, dan Kabupaten Tangerang 49,93, hasil IPLM per kabupaten/kota Tahun 2023 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar II.48
Peta Sebaran IPLM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

(Sumber: Perpusdatastat Nasional, 2023; Diolah oleh Bappenas)

2.4.2.2 INDEKS LITERASI DIGITAL

Urgensi peningkatan literasi menjadi krusial untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi di era globalisasi. Kolaborasi serta penguatan sinergi program literasi mesti dirancang secara menyeluruh dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Urgensi peningkatan literasi dengan program perluasan pengetahuan dan informasi serta perluasan layanan perpustakaan yang sanggup mengakibatkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 adalah sebesar 3,54. Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan skor indeks tertinggi (3,84), sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks terendah (3,12), sedangkan, skor Indeks Literasi Digital Banten mendapatkan skor indeks 3,48. Pilar *Digital Ethics* Tahun 2022 adalah sebesar (3,73), sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,02).

2.4.2.3 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 64,44 persen, turun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel II.37
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Banten pada Agustus 2021-Agustus 2023

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	AGUSTUS 2021	AGUSTUS 2022	AGUSTUS 2023
Penduduk Usia Kerja (Ribu Orang)	9.814,53	9.987,06	9.256,36
Angkatan Kerja (Ribu Orang)	6.260,65	6.463,63	5.965,09
a) Bekerja (Ribu Orang)	5.698,34	5.940,62	5.516,66
b) Pengangguran (Ribu Orang)	562,31	523,01	448,43
Bukan Angkatan Kerja (Ribu Orang)	3.553,68	3.523,43	3.291,27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	63,79	64,72	64,44
a) Laki-Laki (Persen)	80,16	81,69	82,16
b) Perempuan (Persen)	46,84	47,17	46,16

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (Diolah oleh Bappeda)

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 82,16 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 46,16 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami

peningkatan sebesar 0,47 persen poin sementara TPAK perempuan turun sebesar 1,01 persen poin.

Perkembangan TPAK Provinsi Banten selama Tahun 2012-2023 menurut jenis kelamin menunjukkan TPAK laki-laki memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki berfluktuasi pada kisaran 80-84 persen. Sementara, TPAK perempuan berfluktuasi pada kisaran 41-47 persen. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian cenderung lebih dominan dari perempuan.

Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin bersifat fluktuatif, Tahun 2020 sejumlah 308.483 orang, Tahun 2021 sejumlah 255.458 dan Tahun 2022 sejumlah 295.469 orang.

2.4.2.4 RASIO KETERGANTUNGAN

Dependency ratio adalah rasio yang menggambarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun) yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Pada Tahun 2023, angkatan kerja di Provinsi Banten sebanyak 63,79 persen dan hanya 36,21 persen penduduk bukan angkatan kerja. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Provinsi Banten sebesar 56,76 persen, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung lebih kurang 43 penduduk yang berusia tidak produktif.

Tabel II.38
Tingkat/Rasio Ketergantungan di Provinsi Banten Tahun 2019-2023 (persen)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (Laki)	8.879.282	8.331.538	8.443.389	8.575.240	8.631.064
2	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun (Laki)	3.580.803	3.091.764	3.095.308	3.109.220	3.070.836
3	Jumlah Penduduk Usia > 65 Tahun (Laki)	467.231	481.260	522.778	567.528	605.842
4	Tingkat/Rasio Ketergantungan Penduduk	43,59	42,89	42,83	42,88	42,60

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024 (Diolah oleh Bappeda)

2.4.3 FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

2.4.3.1 INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR

Kebijakan penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk perumahan dan permukiman meliputi layanan air minum layak, sanitasi

layak, serta penyediaan perumahan layak huni. Indikator pencapaian air minum layak adalah persentase penduduk berakses air minum, indikator pencapaian sanitasi layak adalah persentase penduduk berakses sanitasi dan indikator pencapaian penyediaan rumah layak huni adalah persentase penduduk dengan hunian layak. Capaian penyediaan infrastruktur layanan dasar diperoleh melalui perhitungan rerata persentase penduduk yang menempati rumah layak huni, sanitasi layak, dan air minum layak. Pada Tahun 2023 capaian penyediaan infrastruktur layanan dasar adalah sebesar 80,81 persen. Secara umum penyediaan infrastruktur layanan dasar di Provinsi Banten mengalami peningkatan di setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel II.39
Indeks Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar di Provinsi Banten
Tahun 2017-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Berakses Sanitasi (Persen)	71,68	70,65	81,01	82,00	82,89	85,12	86,41
2	Penduduk Berakses Air Minum (Persen)	66,11	72,83	91,54	92,87	93,51	92,71	92,95
3	Penduduk dengan hunian yang layak (Persen)	96,71	96,93	98,92	96,21	98,78	98,98	93,06
4	Nilai Indeks Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar (Persen)	78,17	80,14	76,52	77,03	79,06	79,60	80,81

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Dolah oleh Bappeda)

a. Permukiman

Berdasarkan data Susenas Tahun 2023 yang dikeluarkan BPS Provinsi Banten, tercatat bahwa 85,67 persen rumah tangga di Provinsi Banten telah menempati tempat tinggal milik sendiri dan sisanya masih belum memiliki tempat tinggal milik sendiri.

Tabel II.40
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kondisi di Provinsi Banten
Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (UNIT)
1	Kabupaten Pondégang	26.388
2	Kabupaten Lelaik	44.473
3	Kabupaten Serang	4.449
4	Kabupaten Tangerang	335.281
5	Kota Cilegon	13.739
6	Kota Serang	21.639
7	Kota Tangerang	908
8	Kota Tangerang Selatan	204.648
Total		651.425

Sumber: DPRKP Provinsi Banten, 2023, Dolah oleh Bappeda

Sementara untuk data *backlog* rumah di Provinsi Banten Tahun 2022 sebanyak 467.699 unit, secara singkat *backlog* perumahan adalah kondisi suatu kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah

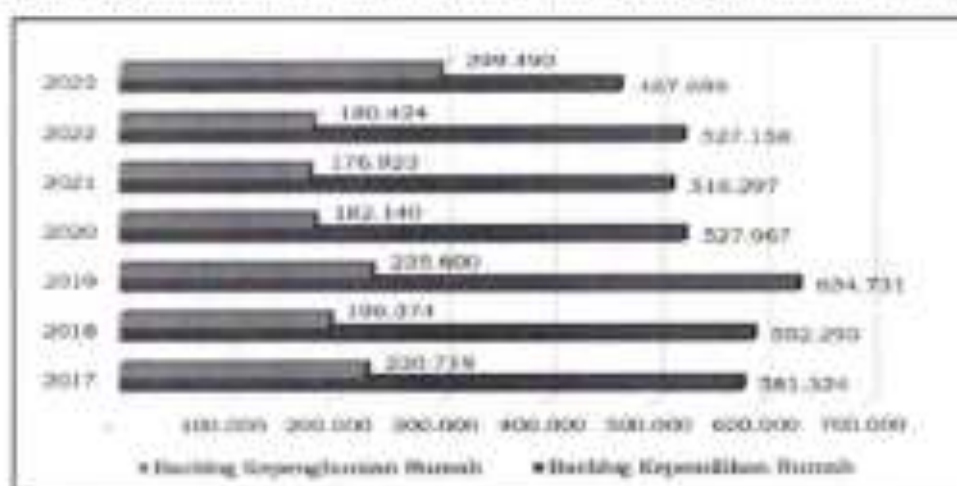
rumah yang dibutuhkan rakyat dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.41
Rekapitulasi Data Backlog Kepemilikan Rumah di Provinsi Banten Tahun 2022

NO	ITEM	SATUAN	NILAI
1	Jumlah Penduduk (2022)*	Jiwa	12.251.955
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (2022)*	Persen	1,56
3	Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Jiwa	203.383
4	Jumlah Penduduk (2023)	Jiwa	12.307.732
5	Jumlah Rumah Tangga	Kepala Keluarga	3.113.842
6	Persentase Rumah Milik Sendiri (2021)*	Persen	84,98
	Persentase Rumah Bukan Milik*		
7	Sewa/Kontrak	Persen	7,63
8	Lainnya	Persen	7,37
9	Jumlah	Persen	15,02
10	Jumlah Rumah Milik	Unit	2.646.143
11	Jumlah Rumah Sewa/Kontrak	Unit	238.209
12	Jumlah Rumah Lainnya	Unit	329.490
13	Jumlah Rumah Bukan Milik	Unit	467.699
14	Backlog Kepemilikan	Unit	467.699

Sumber: Diolah dari Berbagai sumber, 2023 (*SPPS, 2023)

Sementara itu terkait perbedaan backlog antara kepemilikan rumah dan kepemilikan rumah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.49
Backlog Antara Kepemilikan Rumah dengan Kepemilikan Rumah di Provinsi Banten Tahun 2017-2023

(Sumber: DPRKP Provinsi Banten, 2023; Diolah oleh Suppenda)

Hal ini masih belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk yang terus meningkat di Provinsi Banten sudah sewajarnya perlu ditunjang terhadap keperluan teknis infrastruktur permukiman yang memadai,

kondisi yang ada jumlah penduduk semakin bertambah pada kota penyangga DKI Jakarta dan diperparah dengan kondisi eksisting terhadap kebutuhan lahan yang semakin minim.

b. Pendidikan

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten Tahun 2023, ketersediaan fasilitas pendidikan berupa sekolah di Provinsi Banten tahun ajaran 2022/2023 adalah sebanyak 14.137 sekolah dengan 9.930 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan 4.207 sekolah di bawah Kementerian Agama.

Tabel II.42
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/SK di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	JUNJAH SISWA SEMESTER GANJIL 2023/2024*			UNIT SEKOLAH SEMESTER 2023/2024*		
		SMA	SMK	SLB/SKH	SMA NEGERI	SMK NEGERI	SLB/SKH NEGERI
1	Kabupaten Tangerang	63.993	73.425	1.470	32	13	1
2	Kabupaten Serang	30.896	27.447	349	27	11	0
3	Kota Tangerang	32.935	43.141	1.062	15	9	0
4	Kota Tangerang Selatan	33.223	32.946	945	13	7	1
5	Kabupaten Lebak	28.160	20.632	745	42	23	3
6	Kabupaten Pandeglang	19.041	25.324	1.097	20	17	1
7	Kota Serang	13.001	18.895	548	8	8	2
8	Kota Cilegon	7.521	11.133	363	5	4	1

Sumber: *Dapodik Kemendikbud, 2024 (Ditahun 23 Agustus 2024, Ditolah oleh Bappeda)*

Dari sebanyak 14.137 tersebut terdiri dari 2.373 Taman Kanak-Kanak (TK), 1.506 Raudhatul Athfal (RA), 4.634 Sekolah Dasar (SD), 1.115 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1.581 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1.118 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 603 Sekolah Menengah Atas (SMA), 739 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 468 Madrasah Aliyah (MA).

Tabel II.43
Kondisi Ketersediaan SMA/SMK/SK di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	JUNJAH KECAMATAN*	JUNJAH KECAMATAN BELUM MEMILIKI SMA NEGERI*	JUNJAH KECAMATAN BELUM MEMILIKI SMK NEGERI*	JUNJAH KECAMATAN BELUM MEMILIKI SLB/SKH NEGERI*
1	Kabupaten Tangerang	29	1	17	28
2	Kabupaten Serang	29	2	18	29
3	Kota Tangerang	13	1	7	13
4	Kota Tangerang Selatan	7	0	0	6
5	Kabupaten Lebak	28	1	8	26
6	Kabupaten Pandeglang	35	17	20	34
7	Kota Serang	6	0	0	4
8	Kota Cilegon	8	3	4	7

Sumber: *Ditolah oleh Bappeda, 2023*

c. Kesehatan

Pada Tahun 2023, fasilitas kesehatan yang tersedia di Provinsi Banten antara lain 126 unit rumah sakit pemerintah daerah maupun

swasta dan 252 puskesmas. Sementara itu, tenaga kesehatan yang tersedia di Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebanyak 14.601 tenaga medis, 17.636 tenaga keperawatan, 8.953 tenaga kebidanan, dan 744 tenaga gizi. Berdasarkan tabel di bawah diketahui bahwa jumlah Puskesmas yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Banten berjumlah 252 unit dengan sudah terakreditasi berjumlah 230 unit, dalam mendukung pelayanan kesehatan didukung pula oleh klinik swasta sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan jumlah sebanyak 1.703 unit.

Tabel II.44
Kondisi Puskesmas dan Klinik sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Provinsi Banten Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSKESMAS TERAKREDITASI	JUMLAH KLINIK
1	Kabupaten Serang	31	31	93
2	Kabupaten Lebak	43	36	71
3	Kabupaten Pandeglang	36	33	28
4	Kabupaten Tangerang	44	44	603
5	Kota Cilegon	9	8	49
6	Kota Tangerang	38	31	224
7	Kota Serang	16	16	116
8	Kota Tangerang Selatan	35	29	520
	Total	252	230	1.703

Sumber: *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2024* (Disalah oleh Bappeda)

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 dan Rasio Standar WHO Rasio Jumlah Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2023 belum tercapai baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan berdasarkan Rasio Standar Kemenkes kabupaten/kota yang belum tercapai Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, sedangkan angka provinsi sudah tercapai.

d. Air Bersih

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Banten (2021), perkiraan total penggunaan air tanah oleh masyarakat dan industri mencapai ± 382 juta m^3 /tahun (sebanding dengan $\pm 11,5$ persen dari total cadangan air tanah yang ada), akan tetapi hal inilah yang perlu diwaspadai karena lambat laun eksploitasi air tanah yang tidak terkendali akan menyebabkan semakin berkurangnya kapasitas air tanah dan diperparah oleh kondisi lingkungan akan perubahan iklim kian makin terjadi dan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sumber air minum bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari,

sementara keberadaan keduanya masih menjadi masalah karena belum 100 persen terakses sumber air minum layak.

Tabel II.45
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2023 (persen)

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pandeglang	45,96	75,83	82,01	77,27	78,11
2	Kab. Lebak	57,97	73,49	73,72	73,27	75,64
3	Kab. Tangerang	80,26	95,48	97,97	98,55	97,02
4	Kab. Serang	68,34	89,95	92,33	91,91	94,62
5	Kota Tangerang	89,60	98,37	98,00	95,88	97,12
6	Kota Cilegon	88,85	94,58	98,72	99,08	99,18
7	Kota Serang	80,96	99,10	98,38	97,61	96,72
8	Kota Tangerang Selatan	78,33	99,08	99,22	98,64	97,91
Provinsi Banten		66,11	73,17	92,87	93,51	92,95

Sumber: SVD Provinsi Banten, 2024 (Dilak oleh Bappeda)

Tercatat dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 terjadi kenaikan persentase rumah tangga dengan air minum layak dan sanitasi layak di setiap tahunnya. Secara rata-rata pada Tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak baru sebesar 66,11 persen, sementara pada Tahun 2022 sebesar 92,71 persen dan diakhir Tahun 2023 telah mencapai sebesar 92,95 persen.



Gambar II.50
Potensi Air Baku di Provinsi Banten
(Sumber: Kementerian PUPR, 2022; Dilak oleh Bappeda)

Sumber air minum utama masyarakat Provinsi Banten yang paling besar adalah dari air kemasan/air isi ulang. Sumber terbesar kedua adalah dari sumur bor/pompa. Pada Tahun 2023 sumber air minum dari

air kemasan/isi ulang sebesar 56,82 persen. Sedangkan dari sumber sumur bor atau pompa sebesar 23,21 persen dan sebanyak 4,36 persen menggunakan sumber air minum yang tidak terlindungi. Pada dasarnya di Provinsi Banten begitu banyak potensi air baku bagi menunjang pengembangan SPAM seperti pada gambar di atas, yang bisa untuk menunjang pencapaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, namun hal ini belum teroptimalkan secara menyeluruh.

e. Persampahan

Pelayanan persampahan di Provinsi Banten terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Jika sedikit mengulas terkait persampahan di wilayah kabupaten/kota se- Provinsi Banten, berikut di bawah ini adalah data timbulan sampah pada Tahun 2022 dan 2023 mengacu pada data yang disajikan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Tabel II.46
Jumlah Timbulan Sampah Harian dan Tahunan di Provinsi Banten
Tahun 2022-2023

NO	KABUPATEN/NOTA	2022		2023	
		TIMBULAN SAMPAH HARIAN (TON)	TIMBULAN SAMPAH TAHUNAN (TON)	TIMBULAN SAMPAH HARIAN (TON)	TIMBULAN SAMPAH TAHUNAN (TON)
1	Kabupaten Lebak	591,47	215.885,24	597,99	218.266,60
2	Kabupaten Pandeglang	509,7	186.040	509,07	185.812,30
3	Kabupaten Tangerang	2.305,47	841.497,68	2.347	856.656
4	Kabupaten Serang	1.135,84	414.581,97	1.175,24	428.962,78
5	Kota Tangerang	1.381,53	504.258,12	1.409,53	514.478,12
6	Kota Cilegon	227,86	83.169,08	278,83	101.772,80
7	Kota Serang	584,83	212.464,02	601,38	219.503,03
8	Kota Tangerang Selatan	972,63	355.009,43	1.011,45	369.177,50
Provinsi Banten		7.199,63	2.813.905,54	7.930,49	2.894.628,03

Sumber: SIPSN, 2023 (diolah oleh Disperinduk)

Kabupaten Tangerang sebagaimana tabel di atas memiliki jumlah timbulan sampah yang lebih tinggi daripada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten lainnya. Sementara itu dari jumlah timbulan sampah di Tahun 2023 tersebut ternyata sumber sampah terbesar dihasilkan di sektor Rumah Tangga sebesar 66,21 persen dengan komposisi terbesar yaitu 41,07 persen berupa plastik sebagaimana pada gambar di bawah.

Berdasarkan data sumber sampah tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya permasalahan penanganan sampah di hulu bagi setiap penghasil sampah (khususnya sektor rumah tangga di Provinsi Banten) yang belum maksimal, ini akan berdampak kepada jumlah timbulan yang perlu dilakukan pengelolaan di hilir atau pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Sementara itu, jika melihat pada Gambar di bawah juga terlihat bahwa komposisi sampah organik berupa

sisia makanan menjadi komposisi terbesar dibandingkan komposisi non organik. Hal ini menjadi landasan sebagai bentuk rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah, karena sampah yang tidak terkelola dapat menjadi sumber pencemaran udara, air, dan tanah. Sampah pun dapat menurunkan estetika suatu wilayah akibat bau menyengat yang tidak membuat nyaman, memicu pertumbuhan organisme yang menyebabkan timbulnya penyakit bawaan sampah, yang berakhir akan menghasilkan air lindi (*leachate*) yang dapat mencemari tanah dan air tanah.



Gambar II.51
Komposisi dan Sumber Sampah Tahun 2023 di Provinsi Banten
 (Sumber: SIPSN, 2023; Diolah oleh Ekspedisi)

Dengan informasi tersebut, masih kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengelola sampah ditambah dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, oleh sebab itu diperlukan adanya kolaborasi antar pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta atau pihak profesional lainnya untuk lebih proaktif dan responsif terhadap permasalahan pengelolaan sampah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih jauh daripada itu Sistem pengelolaan persampahan yang dimulai dari sejak sampah dihasilkan di sumber sampah dengan di tempat pengolahan akhir sampah perlu juga dikoordinasikan secara regional atau antar kabupaten/kota.

f. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011, menerangkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang disingkat LKS merupakan suatu organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

hukum. LKS ini berkedudukan baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang bersifat otonom dan mandiri yang berperan:

- Mencegah terjadinya masalah sosial;
- Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- Menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan data yang ada, terdapat berbagai jenis LKS di Provinsi Banten sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.47
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2022

NO	JENIS	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			
			2019	2020	2021	2022
1	Rumah Singgah	Kabupaten Pandeglang	1	1	1	1
		Kab. Lebak	2	2	2	2
		Kabupaten Tangerang	-	-	-	-
		Kabupaten Serang	-	-	-	-
		Kota Tangerang	1	1	1	1
		Kota Cilegon	1	1	1	1
		Kota Serang	1	1	1	1
		Kota Tangerang Selatan	-	-	-	1
2	Panti Sosial Asuhan Anak	Kabupaten Pandeglang	26	26	26	26
		Kab. Lebak	77	43	32	22
		Kabupaten Tangerang	37	55	55	34
		Kabupaten Serang	60	60	60	60
		Kota Tangerang	26	26	26	26
		Kota Cilegon	12	12	12	11
		Kota Serang	23	24	24	25
		Kota Tangerang Selatan	10	10	15	15
3	Panti Sosial Penyandang Cacat/Disabilitas	Kabupaten Pandeglang	-	-	2	2
		Kab. Lebak	-	-	-	-
		Kabupaten Tangerang	1	1	1	2
		Kabupaten Serang	-	-	-	-
		Kota Tangerang	1	1	3	3
		Kota Cilegon	-	-	-	-
		Kota Serang	1	1	1	2
		Kota Tangerang Selatan	-	1	1	1
4	Panti Sosial Tresna Werdha	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-
		Kab. Lebak	-	-	-	-
		Kabupaten Tangerang	2	2	2	2
		Kabupaten Serang	-	-	-	-
		Kota Tangerang	-	-	-	-
		Kota Cilegon	2	2	2	2
		Kota Serang	1	1	1	1
		Kota Tangerang Selatan	-	2	2	2
5	Bina Mental	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-
		Kab. Lebak	-	-	-	-
		Kabupaten Tangerang	2	2	2	2
		Kabupaten Serang	-	-	-	-
		Kota Tangerang	1	1	1	1
		Kota Cilegon	-	-	-	-
		Kota Serang	1	1	2	2
		Kota Tangerang Selatan	-	-	1	1
6	Rehabilitasi	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-
		Kab. Lebak	-	-	-	-
		Kabupaten Tangerang	3	3	3	3
		Kabupaten Serang	4	4	4	4
		Kota Tangerang	-	-	1	1
		Kota Cilegon	-	-	-	-

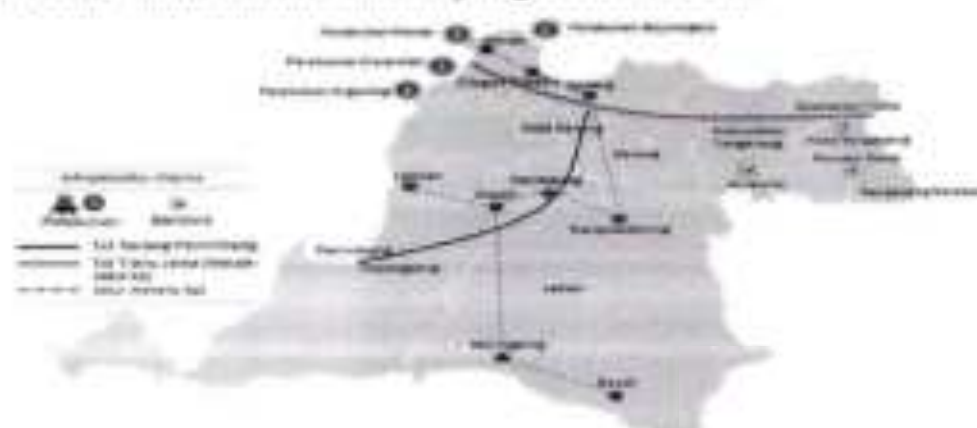
NO	JENIS	KABUPATEN/KOTA	JUNJAH			
			2019	2020	2021	2022
7	Balai/Panti Lainnya	Kota Serang	2	2	2	2
		Kota Tangerang Selatan	-	1	1	2
		Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-
		Kab. Lebak	-	-	-	-
		Kabupaten Tangerang	-	-	-	-
		Kabupaten Serang	-	-	-	-
		Kota Tangerang	30	33	37	42
		Kota Cilegon	5	5	5	9
		Kota Serang	3	3	3	3
		Kota Tangerang Selatan	10	20	20	17

Sumber: Data oleh Bappeda, 2023

2.4.3.2 INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

Rasio konektivitas merupakan parameter yang digunakan dalam mengukur tingkat aksesibilitas antara wilayah-wilayah dalam skala nasional, dihitung berdasarkan perbandingan jarak yang ditempuh dengan jarak optimal yang dapat dicapai, hasil pengukuran dari rasio ini jika semakin tinggi menunjukkan akses yang baik sementara jika semakin rendah menandakan banyaknya hambatan dalam aksesibilitas regional. Oleh sebab itu dengan pengukuran ini diharapkan dapat memberikan rancangan strategi konkrit untuk meningkatkan konektivitas dan distribusi manfaat sektor transportasi yang lebih merata sehingga dapat memberikan layanan kebermanfaatan bagi pengguna transportasi yang lebih aman, nyaman, inklusif, terjangkau, dan cepat bagi seluruh komponen masyarakat.

Rasio konektivitas provinsi menunjukkan semakin tinggi rasio konektivitas angkutan jalan, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi seperti pusat kota, pusat perdagangan, dan wilayah lainnya. Rasio konektivitas provinsi pada Tahun 2023 mencapai 69,14 (tinggi), walaupun demikian masih perlu adanya peningkatan terhadap keterjangkauan dan aksesibilitas terhadap wilayah Banten Utara dan Banten Selatan yang lebih inklusif.



Gambar II.52
Infrastruktur Transportasi di Provinsi Banten
(Data oleh Bappeda, 2023)

a. Transportasi Laut

Provinsi Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa di dekat Selat Sunda yang berada pada posisi geostrategis bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Namun dalam hal ini Provinsi Banten masih terus berupaya secara optimal memanfaatkan potensi geograstrategis ini untuk menjadi daya ungkit besar bagi kemajuannya, serta tantangan dalam penyeberangan jalur laut yaitu terhadap ketahanan kondisi cuaca alam dan bencana alam yang dimungkinkan dapat terjadi.

Provinsi Banten memiliki beberapa pelabuhan penting yang memainkan peran vital dalam kegiatan transportasi laut, pariwisata, perikanan, perdagangan, distribusi logistik, dan industri. Terlebih di bagian barat Provinsi Banten merupakan tempat tumbuhnya industri-industri potensi sebagai penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional. Berikut beberapa pelabuhan utama di Provinsi Banten beserta kapasitas dan fungsinya.

Tabel II.48
Pelabuhan di Provinsi Banten

NO	PELABUHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Merak	Kota Cilegm	- Merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia yang melayani rute lintas Selat Sunda penghubung Pulau Jawa dan Sumatera (Merak-Bakauheni); - Berfungsi untuk penyeberangan orang dan logistik barang; - Kapasitas penumpang lebih dari 20 juta per tahun; - Mampu melayani lebih dari 500 kendaraan per hari; - Terdapat lebih kurang 30 unit kapal feri dengan proyeksi lebih kurang 124 trip per hari.
2	Ciwandan	Kota Cilegm	- Sejarah menyatakan bahwa kala itu menjadi pintu gerbang utama bagi Kerajaan Banten dalam melakukan perdagangan dengan berbagai negara; - Bagian dari pengembangan Pelabuhan Merak; - Berfungsi untuk penyeberangan orang yang diayahi oleh kapal feri dengan 12 unit kapal <i>Roll On-Roll Off (Ro-Ro)</i> pada lintasan Ciwandan-Bakauheni dan 3 kapal tambahan melayani lintasan Ciwandan-Pengang; - Menjadi titik transit bagi berbagai komoditas barang dan jasa yang juga melayani kapal <i>Landing Craft Mechanised (LCM)</i> dan memiliki terminal barang untuk melayani bongkar muat.
3	Cigading	Kota Cilegm	- Kapasitas pelabuhan mencapai lebih kurang 20 juta ton per tahun khususnya untuk bahan baku industri seperti bijih besi dan batu bara; - Merupakan pelabuhan curah terbesar di Indonesia; - Dikelola oleh PT. Krakatau Steel dan digunakan untuk melayani kebutuhan industri baja dan industri lainnya; - Berperan penting dalam ekspor dan impor barang curah kering dan cair.
4	Bojonegara	Kabupaten Serang	- Pelabuhan ini diharapkan mampu menangani lebih dari 5 juta TEUs (<i>twenty foot equivalent unit</i>) kargo per tahun setelah pengembangan penuh; - Berfungsi sebagai pelabuhan peti kemas internasional yang dapat menjadi bagian dari rencana alternatif pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok.

NO	PELABUHAN	LOKASI	KETERANGAN
			• Digunakan sebagai bongkar muat barang industri, logistik, dan alternatif penyeberangan penumpang selain Pelabuhan Merak.

Sumber: Ditahub oleh Bappenas, 2023

b. Transportasi Darat

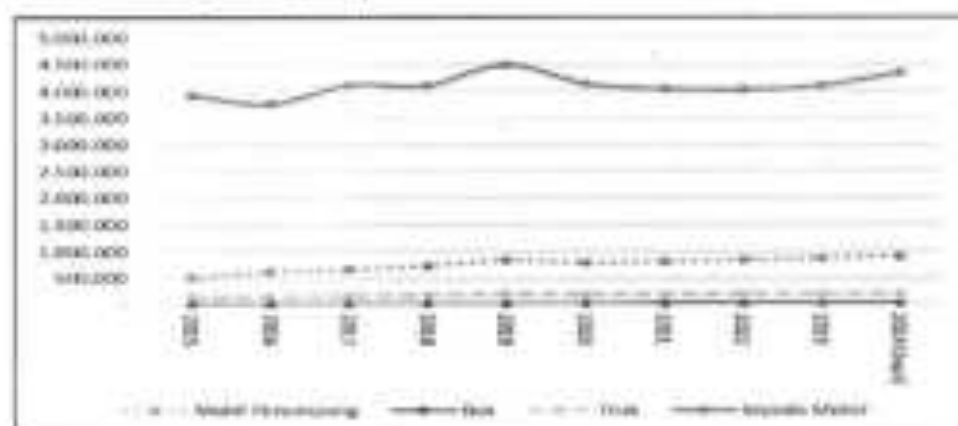
Dalam usaha untuk pelayanan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu didukung oleh sistem infrastruktur yang tepat terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang/jasa dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Baik itu nantinya dengan peningkatan kapasitas dan struktur prasarana jalan yang ada atau dengan pembangunan jalan baru. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan, semi terisolir untuk mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut.

Tabel II.49
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Provinsi Banten Tahun 2021-2023

NO	KONDISI JALAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Mantap (km)	746,83	754,67	787,78
2	Rusak ringan (km)	6,14	3,55	19,31
3	Rusak berat (km)	9,06	3,71	49,90
4	Jumlah (km)	762,03	762,03	856,99

Sumber: BPD Provinsi Banten, 2024 (Ditahub oleh Bappenas)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 Tahun 2023, jalan mantap Provinsi Banten pada Tahun 2022 telah mencapai 99,03 persen. Seiring dengan penambahan ruas jalan yang semula menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi Banten, maka persentase jalan mantap Provinsi Banten pada Januari 2024 menjadi 92,23 persen.



Gambar II.53
Jumlah Kendaraan di Provinsi Banten Tahun 2015-2022
(Sumber: Bappenas Provinsi Banten, 2023; Ditahub oleh Bappenas)

Seperti pada gambar di atas seiring berjalannya waktu dominasi pertumbuhan jumlah kendaraan selalu menunjukkan tren yang meningkat, dengan kendaraan roda dua menjadi jenis kendaraan terbanyak di Provinsi Banten. Sebagaimana diketahui rasio pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan (PKB dan BBNKB) merupakan sumber APBD di Provinsi Banten paling tinggi, di Tahun 2023 lebih kurang sekitar 51,02 persen, hal ini memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Namun dilain sisi dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan ini, timbul permasalahan baru yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam hal penanganan kemacetan, terlebih adanya kewajiban daerah untuk dapat menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, ramah lingkungan, ramah disabilitas, efisien, dan murah yang hilirnya dapat menekan dan mengurangi emisi kendaraan khususnya yang bersumber dari bahan bakar fosil.

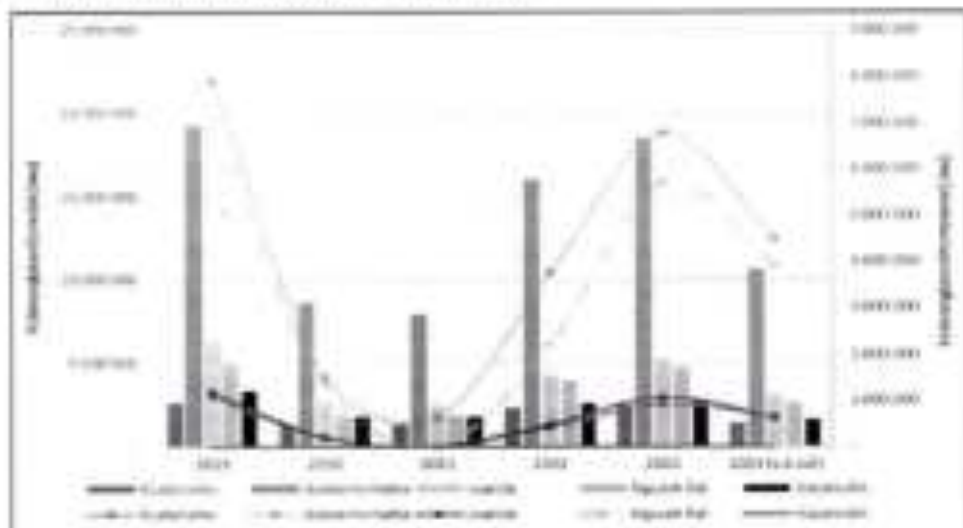
c. Transportasi Udara

Daya saing antar daerah yang semakin kompetitif memberikan tantangan tersendiri bagi setiap daerah untuk mengambil peran serta menempatkan cara pandang dan bereaksi terhadap kompetisi yang ada, bagi daerah yang memiliki infrastruktur transportasi yang memadai (salah satunya transportasi udara) memberikan potensi dan keunggulan untuk menjadi modal dasar dalam bersaing, namun juga dapat menjadi tantangan jika daerah lambat dan tidak sama sekali memanfaatkan potensi yang ada. Adanya sarana dan prasarana transportasi udara memberikan kemudahan dan kecepatan dalam perpindahan orang dan barang antar wilayah dalam satu negara bahkan ke luar negeri.

Seperti yang disajikan pada gambar di atas terkait infrastruktur transportasi di Provinsi Banten, dalam hal transportasi udara cukup kuat dan potensial, di Provinsi Banten terdapat bandar udara yang baik di Kota Tangerang (Bandar Udara Soekarno-Hatta), di Kabupaten Tangerang (Bandar Udara Budiarto), dan Kota Tangerang Selatan (Bandar Udara Pondok Cabe). Potensi besar ini perlu diraih untuk membawa pembangunan Provinsi Banten yang lebih maju yang hilirnya memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di Provinsi Banten.

Sebagaimana gambar di bawah, terlihat bahwa baik keberangkatan domestik maupun internasional, Bandar Udara Soekarno-Hatta menjadi pilihan utama bagi penumpang, sehingga benar adanya bahwa bandara ini merupakan paling sibuk arus penerbangannya di Indonesia dan termasuk salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan

transportasi udara yang potensial di Provinsi Banten seharusnya dapat memberikan dorongan bagi daerah dalam kemajuan perekonomiannya selain terhadap potensi dari penumpang, juga memberikan potensi besar bagi Provinsi Banten khususnya terhadap sektor perdagangan, dengan adanya bandar udara akan mempermudah dalam aktivitas ekspor dan impor untuk mengambil peluang terhadap perdagangan internasional terlebih Provinsi Banten memiliki berbagai jenis industri sebagai penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional.



Gambar II.54
Jumlah Keberangkatan Domestik dan Internasional Tahun 2019-Juli 2024
(Sumber: Bapenda Provinsi Banten, 2024) (Dilolah oleh Bapenda)

2.4.3.3 INFRASTRUKTUR ENERGI

Berbicara energi di wilayah Provinsi Banten belum seluruhnya merata antara wilayah utara dan selatan, dimana masih adanya wilayah selatan yang belum merasakan pemenuhan energi, hal demikian ini merupakan salah satu isu permasalahan energi di Provinsi Banten sebagaimana gambar dan lebih detail pada tabel di bawah.

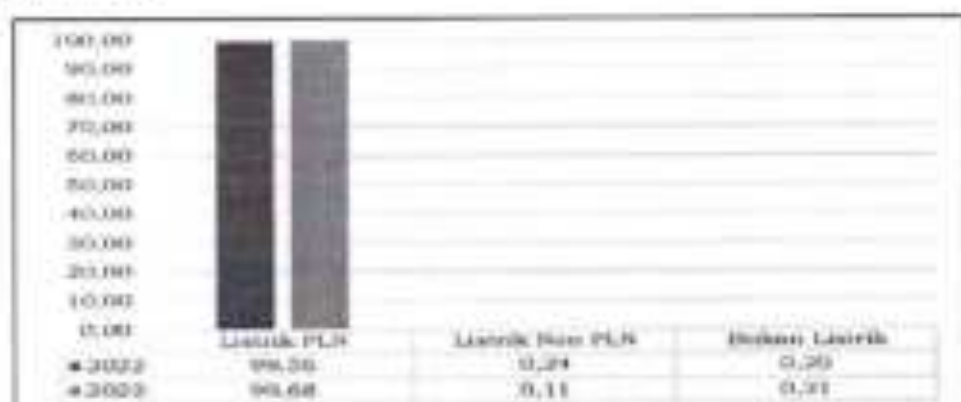
Tabel II.50
Sumber Penerangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	SUMBER PENERANGAN UTAMA			JUMLAH
		LISTRIK PLN	LISTRIK NON PLN	BUKAN LISTRIK	
1	Kabupaten Pandeglang	99,82	0,18	0,00	100,00
2	Kabupaten Lebak	98,45	0,10	1,45	100,00
3	Kabupaten Tangerang	99,76	0,02	0,22	100,00
4	Kabupaten Serang	99,95	0,05	0,00	100,00
5	Kota Tangerang	99,90	0,10	0,00	100,00
6	Kota Cilegon	98,91	1,09	0,00	100,00
7	Kota Serang	100,00	0,00	0,00	100,00
8	Kota Tangerang Selatan	99,87	0,13	0,00	100,00
Provinsi Banten		99,68	0,11	0,21	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Dilolah oleh Bapenda)

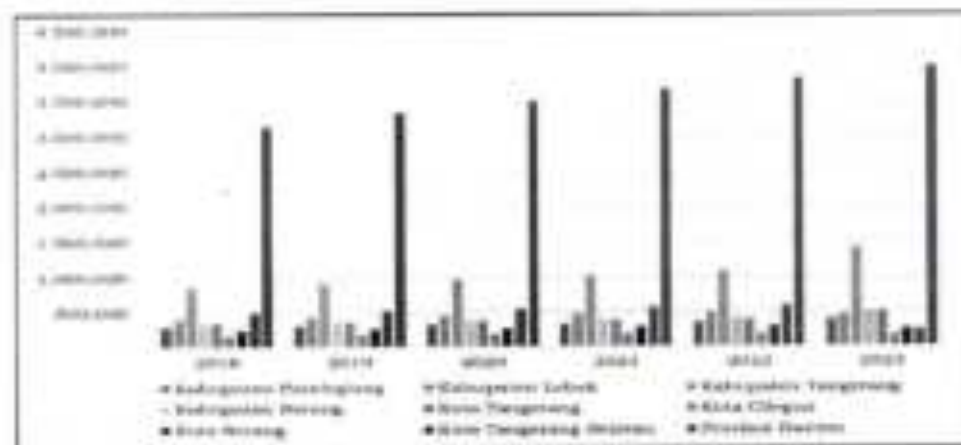
Berdasarkan data Susenas Tahun 2023 lebih kurang sekitar 99,68 persen yang meningkat 0,12 persen dari Tahun 2022 yang hanya

sebesar 99,56 persen. Lebih lanjut, terdapat 0,11 persen rumah tangga memiliki sumber penerangan non-PLN dan 0,21 persen lainnya bukan pengguna listrik.



Gambar II.55
Sumber Penerangan (persen) di Provinsi Banten
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappeda)

Sesuai BPS Provinsi Banten (2024) di Tahun 2023 jumlah pelanggan listrik sebesar ±3,99 juta pelanggan dengan daya tersambung ±13,47 juta kVA dan energi listrik yang terjual sebesar ±26,97 juta MWh dan mencapai 1,609 miliar m³ terhadap gas kota yang terjual. Untuk lebih jelasnya terkait kondisi energi listrik di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.56
Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappeda)

2.4.3.4 INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun Indeks Pembangunan TIK yang terbagi menjadi 3 sub indeks yaitu sub indeks akses dan infrastruktur TIK, subindeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian TIK. Data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan TIK bersumber dari BPS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sumber data terkait indikator TIK rumah tangga

diperoleh dari survei rumah tangga BPS yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 sedangkan data terkait indikator telekomunikasi diperoleh dari data administrasi Kementerian Kominfo.

Tabel II.51
Nilai Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK, Penggunaan TIK, Keahlian TIK, dan Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Banten Tahun 2021-2022

URAIAN	SUB INDEKS AKSES DAN INFRASTRUKTUR TIK		SUBINDEKS PENGUNAAN TIK		SUBINDEKS KEAHLIAN TIK		INDEKS PEMBANGUNAN TIK	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nilai	6,47	6,70	5,87	6,01	5,96	6,02	6,13	6,29

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (Ditolah oleh Bhyendia)

Pada Tahun 2023, BPS melakukan penghitungan Indeks Pembangunan TIK 2022 baik tingkat nasional maupun provinsi. Selanjutnya, untuk melihat posisi pembangunan TIK antar provinsi, nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51-10,00), sedang (5,01-7,50), rendah (2,51-5,00), dan sangat rendah (0-2,50). Pada Tahun 2021-2022, seluruh provinsi menempati kategori tinggi, sedang, dan rendah. Sebagian besar provinsi berada pada kelompok subindeks sedang, baik pada Tahun 2021 maupun 2022, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

- Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK tinggi pada Tahun 2021-2022;
- Provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang selama kurun waktu dua tahun berturut-turut yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Maluku, Sumatera Selatan, Gorontalo, Lampung, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Lebih lanjut hal lainnya terkait infrastruktur telekomunikasi dapat dilihat pada penggunaan internet. Pada Tahun 2023 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan survei terhadap penetrasi internet di Indonesia baik pada klasifikasi perkotaan serta perdesaan dan daerah tertinggal. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia tertinggi yaitu di Provinsi Banten dengan nilai sebesar 89,10 persen dilanjutkan secara berturut-

turut oleh daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 86,96 persen, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 82,73 persen. Namun demikian dengan penetrasi tertinggi tersebut belum memberikan dampak positif sebagai pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Sementara itu walaupun Provinsi Banten di Tahun 2023 berada pada posisi pertama terhadap penetrasi internet, masih ada sebagian wilayah di Provinsi Banten yang tidak tersentuh sinyal komunikasi digital sebagaimana pada tabel di bawah.

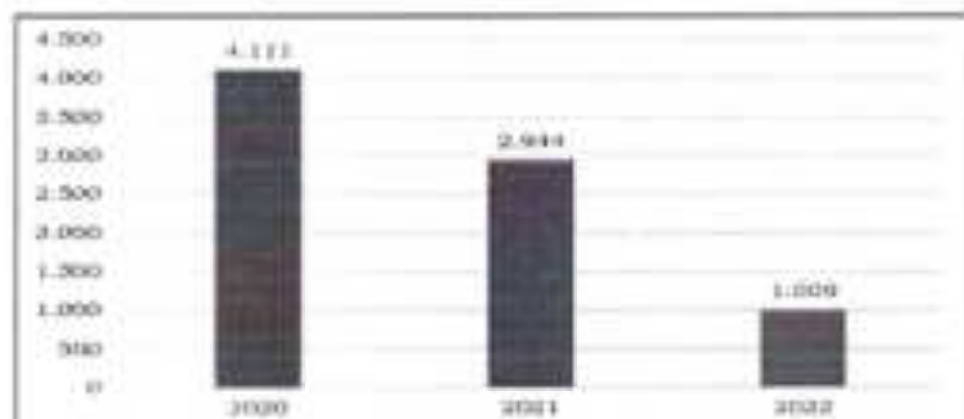
Tabel II.52
Blankspot Jaringan di Provinsi Banten (lokasi) Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	BLANKSPOT JARINGAN (LOKASI)		
		4G	3G	2G
1	Kabupaten Pandeglang	156	166	170
2	Kabupaten Lebak	159	177	178
3	Kabupaten Serang	102	113	120
4	Kabupaten Tangerang	36	47	31
5	Kota Serang	5	8	8
6	Kota Cilegon	1	1	1

Sumber: DKSP Provinsi Banten, 2024 (Dilak oleh Bappeda)

2.4.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Pada Tahun 2021, angka kriminalitas (risiko penduduk terkena tindak pidana) di Provinsi Banten adalah 27 tindak pidana per 100.000 penduduk. Angka kriminalitas Provinsi Banten dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya tergolong rendah. Selama Tahun 2016 sampai Tahun 2022 angka kriminalitas (risiko penduduk terkena tindak pidana) berada di urutan 1 terbawah (diurutkan dari risiko terbesar). Artinya tingkat keamanan di Provinsi Banten lebih tinggi dari tingkat keamanan di provinsi-provinsi lainnya.



Gambar II.57
Jumlah Kriminalitas di Provinsi Banten Tahun 2020-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2023; Dilak oleh Bappeda)

Penurunan angka kriminalitas yang melihat bahwa salah satu keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana terjadi penurunan yang signifikan angka kriminalitas di Tahun 2022 dimana angka penurunannya hampir 67,43 persen, seperti disajikan pada gambar di atas.

Tabel II.53
Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (per 100.000 penduduk) di Provinsi Banten Tahun 2016-2022

DAERAH	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banten	92	55	54	48	63	27	42
Indonesia	140	129	113	103	94	90	137
Peringkat Banten*	31	33	31	31	29	32	34

*Menurut dari risiko terbesar
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (Diolah oleh Bappeda)

Pada Tahun 2022, dari banyaknya kasus tindak pidana di Provinsi Banten, 51,15 persen diantaranya sudah dapat diselesaikan. Selama Tahun 2016 sampai Tahun 2022, persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan. Terjadi kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, Provinsi Banten sudah peringkat ke-6 dari 34 provinsi.

Tabel II.54
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Banten Tahun 2016-2022

DAERAH	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banten	59,41	61,32	61,36	63,01	73,58	76,09	51,15
Indonesia	58,74	62,99	64,94	68,17	71,49	71,85	38,12
Peringkat Banten*	16	21	20	21	15	34	6

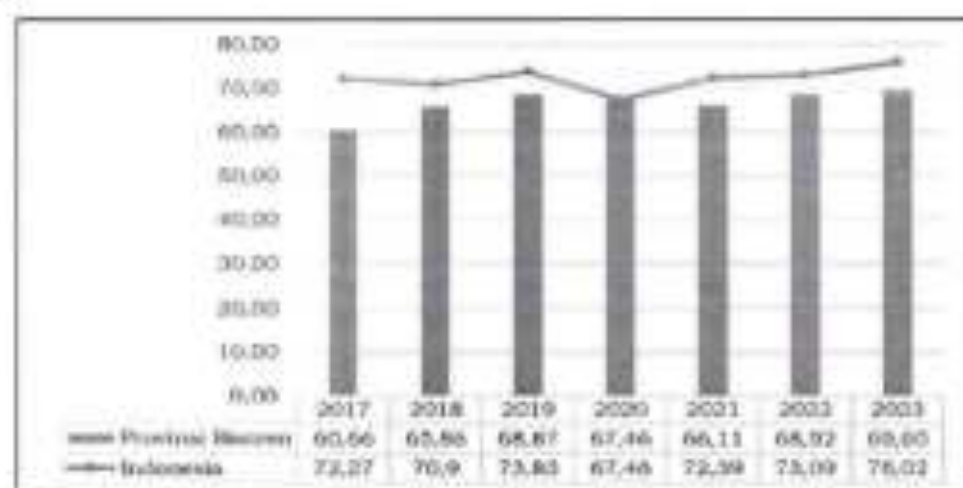
*Menurut dari persentase penyelesaian terbesar
Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, 2023 (Diolah oleh Bappeda)

2.4.4.1 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Agama RI untuk menilai tingkat kerukuan antarumat beragama, dimana pengukuran ini memiliki tiga aspek yakni toleransi (mengukur tingkat sejauh mana masyarakat dapat menerima dan menghormati perbedaan agama), kesetaraan (mengukur tingkat sejauh mana kerja sama antarumat beragama dapat tercipta dalam berbagai kegiatan sosial), dan kerja sama (mengukur tingkat sejauh mana hak-hak dan adanya kesempatan yang sama terhadap semua umat beragama).

Skor IKUB di Provinsi Banten menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan masih perlunya pembedahan dalam hal

toleransi seperti masih terjadinya penolakan pendirian rumah ibadah yang berbeda agama, penolakan kepala daerah atau pejabat daerah yang tidak satu keyakinan, dan masih ada penolakan terkait perayaan hari besar keagamaan. Diperlukan peran pemerintah daerah, masyarakat, dan FKUB di Provinsi Banten serta kabupaten/kota untuk bersinergi dalam menjaga kerukunan. Tabel di bawah menyajikan data capaian IKUB di Provinsi Banten.

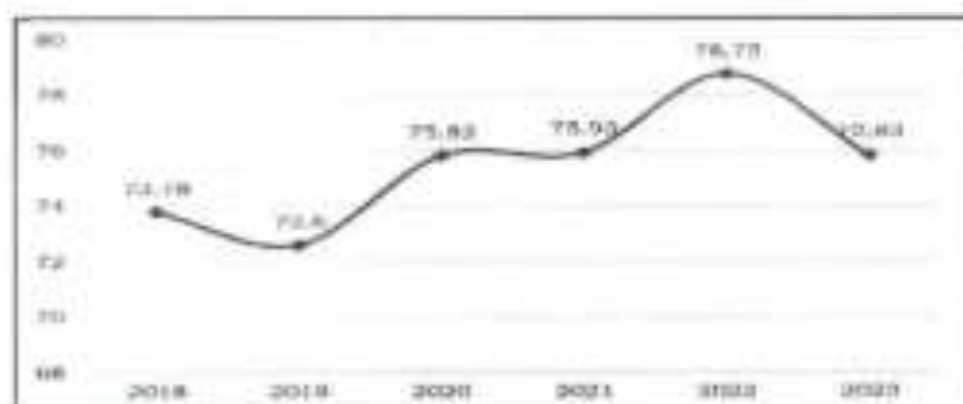


Gambar II.58
Perbandingan Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Banten
Dengan Indonesia Tahun 2017-2023
(Sumber: Diolah oleh Rappedia, 2024)

2.4.4.2 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur untuk menilai perkembangan demokrasi yang terjadi, indikator ini digagas oleh BPS yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam), Kemendagri, Bappenas serta pemerintah daerah, kerja sama ini bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin fenomena penting terkait demokrasi yang terjadi dalam suatu daerah sehingga diharapkan dengan penilaian IDI ini dapat memberikan cerminan kondisi yang sebenarnya terjadi. IDI mencakup terhadap berbagai indikator yang dapat mengukur aspek penting dari demokrasi seperti kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi.

Capaian IDI di Provinsi Banten dari Tahun 2018 hingga 2020 mengalami fluktuasi, Tahun 2022 mencapai angka 78,75 namun mengalami penurunan menjadi 75,83 di Tahun 2023 yang menggambarkan kategori "sedang", namun capaian IDI di Provinsi Banten ini jauh di bawah capaian nasional sebesar 80,14 (Tahun 2022) dan 79,51 (Tahun 2023), untuk lebih lengkapnya terhadap capaian IDI di Provinsi Banten dari Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.59

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Suppeda)

2.4.4.3 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

Delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jumlah ini bertambah dibanding tahun sebelumnya, dimana hanya ada 5 daerah yang menerima penghargaan pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 itu. Program KKP HAM sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran HAM dan pentingnya melindungi hak dasar individu dan motivasi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

Selain 8 kabupaten/kota, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Banten yang telah berhasil membina dan membangun sebagian besar atau seluruh kabupaten/kota Peduli HAM. Pemerintah Provinsi Banten meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award Tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten meraih Terbaik Ke-4 pada kategori provinsi.

2.4.4.4 PERDA YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA

Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi koperasi dan usaha kecil yang tangguh dan mandiri. Dalam perda ini juga dijabarkan bentuk pemberdayaan, perlindungan, dan kemitraan bagi koperasi dan usaha kecil. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Provinsi Banten diperlihatkan pada tabel di bawah.

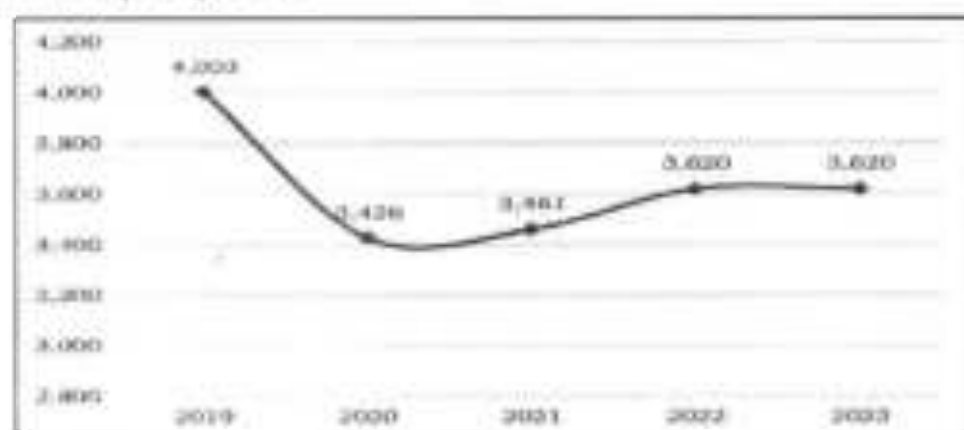
Tabel II.55
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Provinsi Banten

NO	SEKTOR	JUMLAH PERDA
1	Investasi dan Penanaman Modal	31
2	BUMD	17
3	Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan	21

Sumber: Website *DNH DPR Republik Indonesia* <https://peraturan.lprk.go.id/>. (Diolah oleh Bappeda)

2.4.4.5 INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan instrumen berupa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengadopsi terhadap penilaian di tingkat Global seperti *Global Competitiveness Index* (GCI) dari World Economic Forum. Perhitungan IDSD didasarkan pada 4 (empat) komponen utama, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, keempat komponen ini dielaborasi ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing. Pengukuran IDSD ini bertujuan untuk memperoleh ukuran yang komprehensif terhadap daya saing pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenai produktivitas daerah sebagai wujud refleksi kemampuan setiap daerah untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.



Gambar II.60
Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Provinsi Banten Tahun 2019-2023

(Sumber: SPD Provinsi Banten, 2024; Diolah oleh Bappeda)

IDSD di Provinsi Banten sebesar 3,62 yang berada di atas nasional dengan peringkat ke-5 tertinggi di menurut provinsi, walaupun demikian nilai ini mengalami penurunan yang cukup tajam di Tahun 2019 ke Tahun 2020, yang kemudian berangsur secara perlahan meningkat di setiap tahunnya.

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

2.5.1 PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO SELAMA PERIODE RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan SE Menteri Dalam Negeri RI Nomor 600.2.1/1570/SJ mengamanatkan dalam evaluasi RPJPD, daerah agar menyajikan realisasi terhadap indikator makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran per kapita, ketimpangan pendapatan dan PDRB perkapita. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan perwujudan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai dimensi. Ukuran kesejahteraan tersebut selanjutnya dinilai dan dibandingkan dengan cukup komprehensif. Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator makro yang dicapai berstatus progresif, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.56
Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2007-2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA AWAL PERIODE PERENCANAAN (2007)	CAPAIAN PADA TAHUN BERJALAN (2023)	PERTUMBUHAN/ PENURUNAN	KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	61,14	75,77	14,63	Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia, PDRB ADHK dan PDRB ADHB
2	Persentase Penduduk Miskin	9,07	6,17	-2,9	menggunakan capaian awal periode perencanaan Tahun 2010, karena tidak tersedia data Tahun 2007
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	15,75	7,32	-8,23	Komponen pendentuk IPM mengalami perubahan dari Angka Melek Huruf menjadi Harapan Lama Sekolah
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,00	4,81	-1,19	
5	Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)	0,370	0,368	-0,002	
6	PDRB perkapita	13.036.096	66.180.000	53.113.901	
7	PDRB ADHB	271.465.283,23	814.120.000,00	542.654.717	
8	PDRB ADHK	271.465.283,23	507.430.000,00	235.964.716,77	

Sumber Data : BPS Provinsi Banten, 2022 (Data oleh Bappeda)

2.5.2 HASIL EVALUASI RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten untuk periode Tahun 2005-2025 adalah **BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA**

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. Dalam kalimat visi tersebut, terdapat 4 unsur pokok yang menjadi cita-cita dan harapan dalam pembangunan Banten, yaitu: (a) Mandiri, (b) Maju, (c) Sejahtera, dan (d) Iman dan Taqwa. Dari keempat unsur tersebut dijabarkan ke dalam berbagai indikator yang kemudian dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama untuk melihat keberhasilan visi.

Tabel II.57
Indikator Visi Provinsi Banten dan Daerah Sekitarnya di Tahun 2022

NO	INDIKATOR VISI	INDIKATOR KINERJA	BANTEN	LAMPUNG	JAWA BARAT
1	Mandiri	Kapasitas Fisikal Daerah	2.934 (sangat tinggi)	1.580 (rendah)	2.546 (sangat tinggi)
2	Maju	IPM	73,32	70,45	73,12
3	Sejahtera	LPE	5,03	4,28	5,43
4	Berlandaskan Iman dan Taqwa	Indeks Kerukunan Umat Beragama	88,90	72,44	72,70

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022 (Diolah oleh Bappenas)

Berdasarkan tabel perbandingan capaian visi antara Banten dengan Provinsi perbatasan Lampung dan Jawa Barat karena dengan karakteristik yang sama, terdapat 2 indikator yang unggul dari indikator yang dibandingkan dengan daerah lain, yaitu komponen visi "Mandiri dan Maju". Pada RPJPD periode berikutnya perlu mempertimbangkan prioritas terhadap pada hal-hal yang belum tercapai seperti indeks kerukunan umat beragama dan capaian pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 merupakan upaya penyelarasan pembangunan antara pemerintah Provinsi Banten dengan pembangunan nasional selama 20 (dua puluh) tahun. Hasil evaluasi menunjukkan adanya berbagai capaian positif maupun kendala yang ditemukan akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan jangka panjang ke depan. Oleh karena itu, perlu adanya kesimpulan dalam pelaksanaan pembangunan dari seluruh tahapan dalam satu cakupan kesimpulan. Adapun dari kesimpulan yang didapatkan, maka akan dirumuskan rekomendasi yang harus dilaksanakan ke depan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera di Provinsi Banten berbasis pembangunan berkelanjutan. Beberapa kesimpulan umum pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Banten merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten melalui 4 tahapan periode yaitu 2007-2012, 2012-2017 dan

2017-2022 dan saat ini sedang berada pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026;

- b. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten yang ditetapkan meliputi indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial selama periode RPJPD diperoleh hasil yang sangat baik atau dengan kategori sangat tinggi, yang menunjukkan kinerja yang cukup progresif untuk indikator peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan persentase penduduk miskin, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan PDRB perkapita serta PDRB ADHK dan PDRB ADHB. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada Tahun 2020-2021 dan ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena aktivitas ekonomi yang terhenti selama masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bahkan Indonesia tanpa terkecuali Provinsi Banten. Namun, peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio mulai menunjukkan kinerja positif seiring dengan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19;
- c. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD selama periodisasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, rata-rata capaian kinerja selama 3 periode RPJMD adalah 87,87 persen, selanjutnya dapat digambarkan capaian kinerja sebagai berikut:
 - i. Pada periode RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 secara rata-rata, kinerja pembangunan untuk pencapaian visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 mencatatkan kinerja sangat tinggi dengan predikat kinerja sebesar 93,33 persen. Namun, masih ada beberapa kinerja yang capaiannya masih rendah yaitu:
 - 1. Indikator IPM yang mengalami penurunan sebesar 0,61, terjadi karena komponen angka harapan hidup rendah karena tingginya angka kematian ibu dan bayi serta belum meratanya pelayanan kesehatan terutama wilayah Banten Selatan. Rendahnya pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah pelosok perdesaan terjadi salah satunya karena kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama kondisi jalan banyak yang rusak sehingga menyebabkan masih rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - 2. Menurunnya IPK di Provinsi Banten pada Tahun 2018 sebesar 49,69 menjadi 47,47 pada Tahun 2021. Selain semakin

menurun tingkat capaiannya juga lebih rendah jika dibandingkan nasional di Tahun 2021 sebesar 51,90;

3. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, terjadi karena industri besar dan sedang berada hanya di wilayah Banten Utara, sedangkan wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang belum banyak industrialisasi.
- ii. Pada periode RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 secara rata-rata, kinerja pembangunan untuk pencapaian visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 mencatatkan kinerja dengan predikat sedang yaitu sebesar 72,25 persen. Capaian kinerja yang masih rendah diantaranya:
 1. Akibat bencana alam membuat kerusakan jembatan dan jalan yang telah dibangun, karena belum optimalnya realisasi kinerja perangkat daerah terutama terkait pencegahan bencana alam, banjir dan abrasi, penyediaan pengelolaan sampah, dan penyelenggaraan bangunan di Kawasan Strategis Provinsi Banten;
 2. LPE mengalami penurunan sebesar 1,08 persen, terjadi karena belum sepenuhnya BUMD yang didirikan mampu mengakselerasi perekonomian di Provinsi Banten dan peran pemerintah dengan pihak swasta (investor) tidak berjalan baik;
 3. Penurunan pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 3,18 persen dan penurunan sektor industri sebesar 1,05 persen karena belum meratanya perkembangan sektor perdagangan dan industri di wilayah Banten Selatan, sehingga hanya tumbuh di wilayah Banten Utara;
 4. Menurunnya IPM sebesar 1,05 persen, terjadi karena perlambatan angka harapan hidup yang mengalami penurunan sebesar 0,72, terjadi karena ketimpangan aksesibilitas kesehatan dan jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang belum merata antar wilayah.
- iii. Pada periode RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 secara rata-rata, kinerja pembangunan untuk pencapaian visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 mencatatkan kinerja dengan predikat sangat tinggi yaitu sebesar 100,11 persen. Namun, masih terdapat capaian kinerja yang masih rendah diantaranya:

1. Capaian angka pengangguran semakin membaik, dan menunjukkan tren penurunan selama periode RPJPD, pada Tahun 2007 sebesar 15,75 persen menjadi 7,97 persen pada Tahun 2023. Namun, pencapaian tersebut jika dibandingkan capaian secara nasional tingkat pengangguran di Provinsi Banten sangat tinggi bahkan tertinggi di Indonesia pada Tahun 2023. Kondisi tersebut terjadi karena kendala penyerapan tenaga kerja yang sulit, belum adanya kesinambungan antara stakeholder ketenagakerjaan seperti dunia pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja dengan dunia industri sebagai penyerap tenaga kerja;
 2. Terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,82 persen dan penurunan LPE sebesar 0,72 persen akibat tingginya pengangguran. Hal ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19 dengan adanya pembatasan sosial, terutama pada kurun waktu 2020-2022 yang menyebabkan perekonomian terhambat dikarenakan aktivitas ekonomi dan sosial yang sangat terbatas. Lebih lanjut pada Tahun 2022 ketika kondisi pandemi cenderung terkendali, sektor ekonomi mulai mengalami peningkatan kembali terutama di sektor ekspor impor dan perdagangan serta konsumsi masyarakat sudah mulai meningkat;
 3. Terjadinya peningkatan inflasi sebesar 2,14 persen akibat situasi global dan dampak pandemi COVID-19;
 4. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1,45 persen karena belum optimalnya implementasi dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 5. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 0,1 persen karena kendala perizinan yang berkelanjutan. Akibat berlanjutnya ketidakpastian geopolitik sehingga mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan menurunnya kapasitas utilisasi industri pengolahan.
- d. Masih terdapat beberapa indikator capaian kinerja yang tidak bisa dievaluasi arah kebijakannya akibat minimnya data dukung salah satunya berupa cakupan penyediaan pengelolaan sampah dimana kondisi TPS regional yang belum selesai dibangun karena terkendala lahan.

Tabel II.58
Ringkasan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Banten
Tahun 2007-2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA AWAL PERIODE PERENCANAAN (2007)	CAPAIAN PADA TAHUN BERJALAN (2022)	PERTUMBUHAN/ PENURUNAN	KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	61,14	73,32	12,18	• Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia, PDRB ADHK dan PDRB ADHB menggunakan capaian awal periode perencanaan Tahun 2010, karena tidak tersedia data Tahun 2007
2	Persentase Penduduk Miskin	8,07	5,24	2,83	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	15,75	8,09	7,66	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,00	5,03	Anihan Kemendagri tidak perlu diisi	
5	Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)	0,370	0,377	Anihan Kemendagri tidak perlu diisi	• Komponen pembentuk IPM mengalami perubahan dari Angka Melekat Huruf menjadi Harapan Lama Sekolah
6	PDRB perkapita	13.036.099	60.990.141	47.954.042	
7	PDRB ADHB	271.465.283,23	749.463.927,68	749.463.927,68	
8	PDRB ADHK	271.465.283,23	487.663.413,44	216.198.133,21	

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (Data diolah Bappeda)

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, rekomendasi bagi stakeholder dalam penyusunan perencanaan jangka panjang ke depan di Provinsi Banten lebih diarahkan pada beberapa pencapaian yang belum optimal dikarenakan berbagai kendala seperti:

- Pelaksanaan capaian kinerja kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja yang belum baik, diharapkan Provinsi Banten semakin mampu merancang dan merencanakan berbagai program dan kegiatan yang pro dan menyentuh kehidupan rakyat kecil, seperti menciptakan atau menyediakan lapangan kerja yang luas pada berbagai sektor ekonomi dan memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mampu meningkatkan kembali kualitas SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan distribusi tenaga pendidik;
- Pembangunan ekonomi yang ditunjukkan dengan indikator makro ekonomi dengan capaian kinerja yang belum baik, diharapkan Provinsi Banten semakin mampu merancang dan merencanakan berbagai program dan kegiatan yang mendorong pemulihan dan peningkatan

pertumbuhan ekonomi terutama fokus pada prioritas ketenagakerjaan, kemandirian ekonomi untuk meningkatkan usaha mikro (industri rumahan), dan perbaikan pada kemudahan untuk berusaha terutama untuk kewirausahaan muda. Selain itu, meningkatkan investasi juga sebagai cara efektif lawan dampak inflasi;

- c. Perhatian khusus terhadap kinerja penurunan kesenjangan pendapatan antar penduduk dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin untuk memastikan asas keadilan dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, perlunya perhatian khusus terhadap kinerja urusan sosial, terutama dalam hal peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan terutama pada wilayah-wilayah yang terpelosok dan jauh dari jangkauan, terutama dalam perbaikan jalan yang rusak dan infrastruktur yang memadai, dan penurunan tingkat kemiskinan dan ketepatan sasaran pemberian layanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, terhadap kinerja sektor tenaga kerja, sektor UMKM, kesehatan dan ekonomi kreatif sehingga dapat berdaya saing dan berkontribusi memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Sehingga Provinsi Banten diharapkan melalui belanja daerah dapat menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dalam mendorong pemulihan ekonomi dengan meningkatkan peran APBD agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan serta mampu untuk mengatasi pemerataan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar;
- e. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten, dan meningkatkan sinergitas arah kebijakan yang telah ditentukan sesuai dengan visi dan misi RPJPD Provinsi Banten. Seperti: meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana, penguatan dan fokus terhadap kesehatan dan capaian pembangunan kebudayaan, mendorong pembangunan secara inklusif dengan penguatan kebijakan pengentasan *stunting*, kemiskinan ekstrem, dan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan;
- f. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang telah ditentukan sesuai dengan visi

dan misi RPJPD Provinsi Banten. Seperti: (1) perubahan nilai target indikator kinerja sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah yang tidak sesuai dengan hasil dari sumber data Lembaga/Kementerian pada dokumen perencanaan berikutnya; (2) penyesuaian dan percepatan pada pelaksanaan sub kegiatan dan program dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah terutama target yang belum tercapai; (3) pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan oleh OPD terkait dengan kondisi riil di lapangan; (4) evaluasi terhadap belanja yang dianggarkan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian program dan sasaran perangkat daerah; dan (5) penguatan pengawasan kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kinerja. Perlunya penguatan pola kolaborasi dan kerjasama dengan akademisi dan praktisi pembangunan untuk mendapatkan masukan inovatif dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah;

- g. Perlunya keselarasan visi, misi, arah kebijakan/sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD Provinsi Banten dengan visi, misi, arah kebijakan/sasaran pokok dan indikator kinerja pembangunan jangka panjang nasional. Selain itu diperlukan juga keselarasan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD Provinsi Banten dengan dan sasaran dan indikator kinerja SDGs/TPB sehingga ukuran capaian kinerja dapat lebih akuntabel.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 TREN DEMOGRAFI PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

Era saat ini paradigma pembangunan nasional memposisikan manusia sebagai objek sekaligus subjek, pengetahuan terhadap perubahan dan perkembangan demografi (besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan) dibutuhkan sebagai basis data perencanaan hingga implementasi kebijakan dari suatu perencanaan pembangunan.

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin dinamis diseluruh wilayah Indonesia yang kian bertambah, termasuk Provinsi Banten di dalamnya. Namun demikian hal tersebut berbanding terbalik dengan semakin melambatnya laju pertumbuhan sebagai hasil dari menurunnya tingkat fertilitas. Fenomena ini mengakibatkan bergesernya piramida penduduk, yang mana sejak beberapa tahun kebelakang, tepatnya di

Tahun 2020, penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk dengan usia produktif, yang sering digaungkan oleh kebanyakan orang dengan istilah "Bonus Demografi". Dilain sisi terdapat fenomena dari menurunnya tingkat fertilitas tersebut dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH).

Lebih jauh daripada itu dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka perlu perencanaan yang matang guna memanfaatkan Bonus Demografi tersebut. Tidak hanya sebatas kuantitasnya yang bertambah, namun juga perlu dibarengi dengan kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan sebagai aktor kunci keberlanjutan pembangunan. Dampak dari perubahan struktur penduduk ini pada akhirnya tidak terlepas dari kebutuhan sarana dan prasarannya, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga kepada kebutuhan pangan/nutrisi yang perlu dipersiapkan guna menunjang peningkatan kualitas penduduk.

Dilain sisi, selain tertuju pada generasi produktif, maka generasi lansia (*ageing population*) pun jangan sampai terlewatkan. Perlu perumusan yang matang untuk dapat menyiapkan generasi lansia yang sehat dan produktif di masa mendatang melalui berbagai pendekatan kebijakan (dikutip dalam buku penduduk berkualitas menuju Indonesia Emas, beberapa hal pendekatan dapat melalui perluasan jaminan sosial, pengembangan program *Long-Term Care/LTC*, memperpanjang usia pensiun, mempromosikan jaminan hari tua serta pengembangan skema lapangan pekerjaan ramah lansia).

Di bawah ini akan dijabarkan data dan informasi kependudukan di Provinsi Banten hingga Tahun 2045, merujuk terhadap hasil Publikasi Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2050 berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2020. Pendekatan publikasi ini menerapkan metode komponen kohort melalui pendekatan deterministik dan probalistik yang menghasilkan estimasi titik dan dihitung menggunakan aplikasi *Rural Urban Projection (RUP)*, lebih lanjut terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam metode ini yaitu: 1) asumsi kelahiran menggunakan indikator *Total Fertility Rate (TFR)*, 2) asumsi kematian menggunakan indikator *Infant Mortality Rate (IMR)* dan *Umur Harapan Hidup (UHH)* saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR)*.

2.6.1.1 JUMLAH PENDUDUK TOTAL

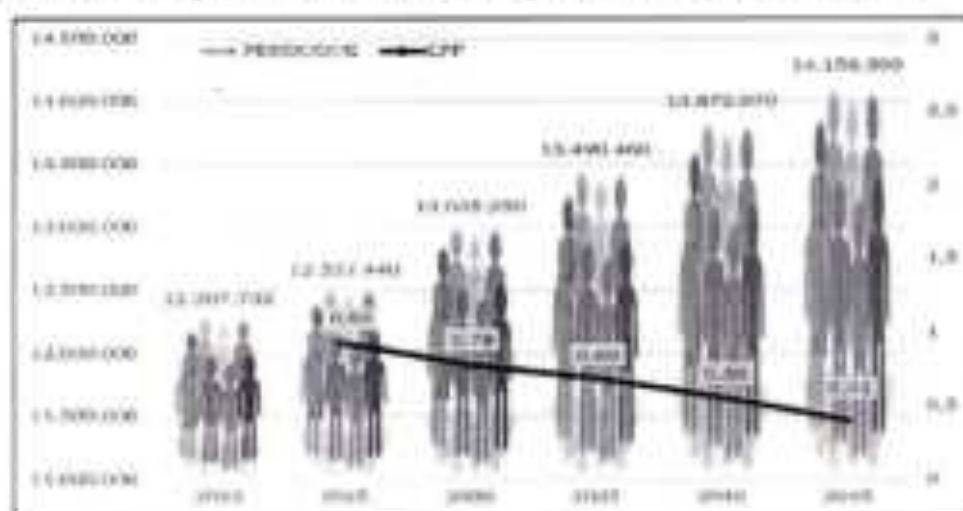
Proyeksi penduduk di bawah menggambarkan bahwa Provinsi Banten akan mengalami pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu hingga Tahun 2045. Hal ini diindikasikan terjadi karena adanya faktor migrasi akibat adanya pemindahan ibukota, faktor migrasi pun menjadi bagian variabel yang menjadi pertimbangan terhadap proyeksi jumlah penduduk tersebut.

Tabel II.59
Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2025-2045

PENDUDUK TAHUN 2023 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
	2025	2030	2035	2040	2045
12.307.732	12.537.440	13.035.250	13.490.460	13.872.070	14.156.300

Sumber: *) Pusat Statistik Banten Dalam Angka 2024 **) Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050

Lebih lanjut berbanding terbalik dengan proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang semakin menurun, hal ini mengindikasikan bahwa adanya pelambatan pertambahan penduduk tiap tahunnya pun demikian seperti LPP Indonesia yang juga mengalami perlambatan baik pada skenario tren, optimis maupun moderat.



Gambar II.61
Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten (persen)**
(Sumber: Diolah oleh Rappenda, 2024)

Perkiraan besaran, komposisi dan sebaran populasi penduduk dimasa mendatang dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pemerintahan. Misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia. Dari fenomena-fenomena di atas ditambah dengan pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, mengindikasikan adanya perubahan migrasi penduduk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

2.6.1.2 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

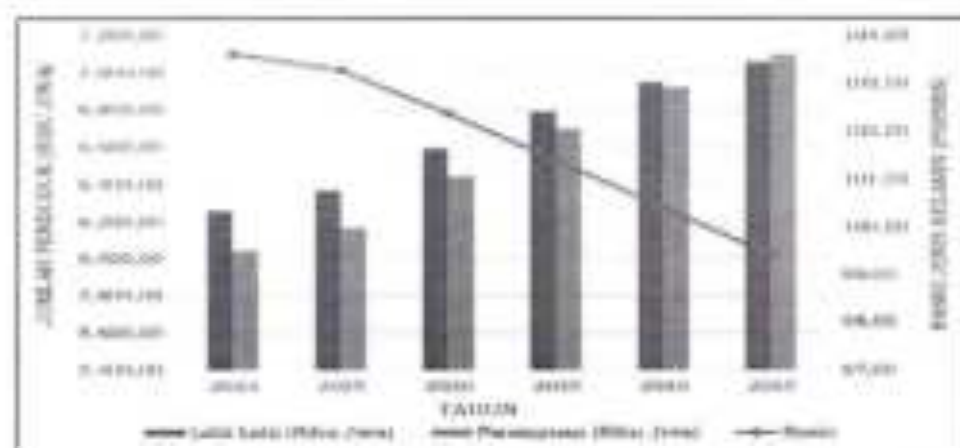
Memperhatikan pada gambar di bawah menginformasikan terkait rasio jenis kelamin di Provinsi Banten, hingga Tahun 2045 menunjukkan nilai sebesar 99,42 yang mengartikan bahwa 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan sehingga terlihat bahwa pertambahan jumlah perempuan lambat laun semakin lebih tinggi daripada jenis kelamin laki-laki.

Tabel II.60
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Beserta Rasionya di Provinsi Banten

JENIS KELAMIN	PENDUDUK TAHUN 2023*	PROYEKSI PENDUDUK**				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki (ribu jiwa)	6.262,73	6.369,70	6.594,09	6.792,11	6.949,77	7.087,69
Perempuan (ribu jiwa)	6.045,01	6.167,74	6.441,17	6.698,35	6.923,31	7.098,61
Rasio (persen)	103,60	103,27	102,37	101,40	100,40	99,42

Sumber: *) Provinsi Banten Dalam Angka 2024 **) Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050

Data ini akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan yang inklusif menyikapi gender agar diperolehnya kesetaraan secara adil atas hak dan kewajibannya, khususnya terhadap perumusan kebijakan keluarga berencana.

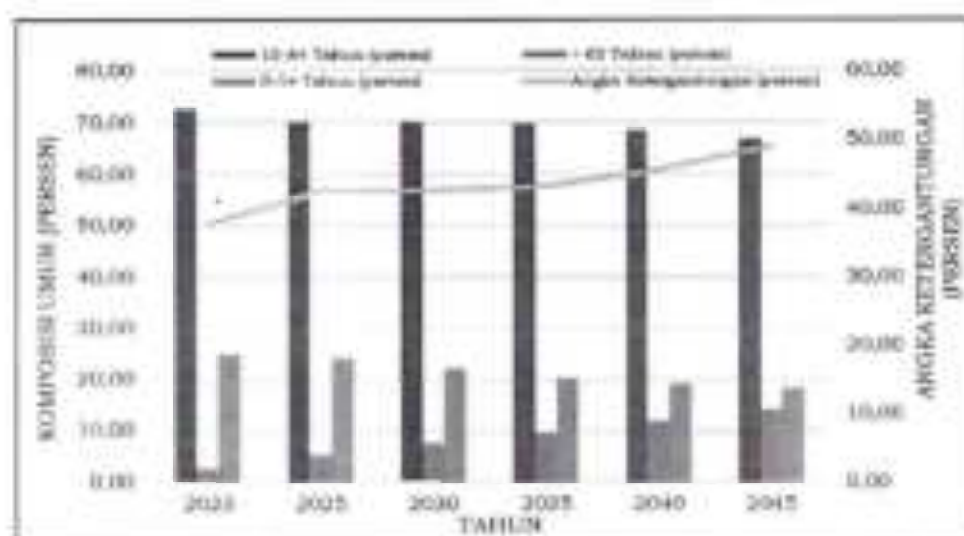


Gambar II.62
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Beserta Rasionya di Provinsi Banten

(Sumber: Ditah oleh Bappeda, 2024)

2.6.1.3 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Hasil proyeksi di bawah memperlihatkan perkembangan kependudukan per jenis kelamin, terlihat bahwa kelompok umur yang semakin bertambah dari kelompok umur 15-64 tahun dan kelompok umur lebih dari 65 tahun, sementara berlain hal untuk kelompok umur 0-14 tahun yang semakin berkurang hingga Tahun 2045.



Gambar II.63
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungannya di Provinsi Banten
(Sumber: Ditah oleh Supenda, 2024)

Pada tabel di bawah diperoleh informasi bahwa rasio ketergantungan yang semakin bertambah besar hingga Tahun 2045, hal ini menjelaskan bahwa jika semakin tinggi nilai persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh usia produktif guna membiayai hidup penduduk dengan usia yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif.

Tabel II.61
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Banten

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK TAHUN 2023*	PROYEKSI PENDUDUK**				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun (persen)	24,95	24,27	22,31	20,44	19,23	18,55
15-64 Tahun (persen)	72,38	70,13	70,09	69,78	68,66	67,07
> 65 Tahun (persen)	2,47	5,60	7,60	9,78	12,11	14,38
Angka Ketergantungan (persen)	37,79	42,60	42,67	43,31	45,65	49,10

Sumber: *) Provinsi Banten Dalam Angka 2024 **) Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2035

2.6.2 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

Kesenjangan antar wilayah menjadi suatu tantangan di Provinsi Banten yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang dipengaruhi oleh persebaran penduduk dan sarana dan prasarana yang belum menyeluruh. Kondisi yang terjadi saat ini yaitu masih adanya ketimpangan antara wilayah Banten bagian Utara dan Banten Selatan. Jika dilihat dari capaian rasio gini (indikator yang menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan) Tahun 2022 yaitu sebesar 0,36 di bawah nilai capaian nasional, sementara jika dilihat dari indeks williamson (indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah di suatu wilayah dalam periode

waktu tertentu) pada Tahun 2023 sebesar 0,770 yang menggambarkan wilayah Provinsi Banten berada dalam kategori tinggi.

Sebelum merumuskan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana layanan dasar bagi masyarakat, proyeksi jumlah penduduk menjadi peran krusial dalam perencanaan wilayah dan penentuan strategi serta kebijakan pembangunan, hal ini karena jumlah penduduk menjadi dasar perhitungan dan pertimbangan.

2.6.2.1 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA TEMPAT TINGGAL

Bertambahnya jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan yang juga akan meningkat. Hal ini akan berdampak diikuti dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dari kawasan hijau menjadi kawasan terbangun guna memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar seperti permukiman bagi masyarakat.

Bila dikaitkan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang Provinsi Banten yang diamanatkan dalam RTRWP, maka terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perwujudan pusat-pusat permukiman sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.62
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Terkait Perwujudan Pusat-Pusat Permukiman di Provinsi Banten

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam daerah	a. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat permukiman; b. Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat permukiman yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya; c. Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di daerah dengan sistem pusat pelayanan wilayah dan nasional; dan d. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergi sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
2	Peningkatan akses pusat-pusat pelayanan dalam pusat-pusat permukiman wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar daerah	a. Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya; b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum melayani salah satu pusat pertumbuhan; c. Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai; d. Mengembangkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
		efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
		e. Mengembangkan Pelabuhan Bojonegara dan Cileng sebagai pusat penyebaran primer yang didukung oleh kawasan strategis provinsi, jaringan jalan tol, non tol dan kereta api; dan
		f. Mengembangkan jalan nasional di daerah;
3	Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya yang berada di daerah	a. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; b. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal; c. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan penyediaan energi/kelektirikan antara darat dan laut; d. Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah; e. Meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air melalui kuantitas dan kualitas jaringan prasarana dan sarana air baku, irigasi dan air bersih; f. Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur yang aman melalui penataan sistem jaringan energi, sistem jaringan minyak dan gas bumi serta pengendalian ruang Kawasan Bandara Soekarno-Hatta; g. Meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir dan pertahanan banjir di daerah; h. Mengembangkan infrastruktur jaringan transportasi massal dan simpul transportasi antar moda yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota; i. Mengembangkan pemanfaatan ruang kawasan Selat Sunda serta Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan; dan j. Mengembangkan sarana dan prasarana mitigasi bencana untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim global dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH).

Sumber: RTW Provinsi Banten 2023-2043 (Disah oleh Bappenas)

Berdasarkan perhitungan akan kebutuhan tempat tinggal selama 4 (empat) periode atau 5 (lima) tahunan sampai kepada Tahun 2045 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel II.63
Indikasi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Provinsi Banten

URAIAN	KONDISI TAHUN	PROYEKSI KEBUTUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Juta)	12.307.732	12.837.440	13.035.250	13.490.460	13.872.070	14.156.300
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Juta)	462.155	470.781	489.474	506.567	520.896	531.569

Sumber: Disah oleh Bappenas, 2024

Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan dalam aspek perumahan yang perlu ditanggulangi secara cermat melalui dokumen perencanaan. Indikasi strategi penanganan sebagaimana tabel di atas tidak dapat tercapai atau terlaksana tanpa adanya penguatan atau dukungan berupa:

- a. Penguatan data RTLH dari pemerintah kabupaten/kota sampai dengan *By Name By Address* (BNBA) yang riil;
- b. Penguatan sinergi antar pemerintahan, yang berujung terhadap pembagian penanganan target beserta skema-skema pembiayaan atau kebijakan anggaran yang tepat;
- c. Melihat kondisi yang terjadi sudah sangat jelas bahwa kemampuan pemerintah masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, oleh karena itu diperlukan adanya kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholder* lainnya (non pemerintahan, seperti pengembang perumahan).

Dari asumsi-asumsi di atas, tidak sepenuhnya dapat menjamin penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, namun setidaknya diharapkan dapat mengatasi secara bertahap. Pembahasan kebutuhan daripada sarana perumahan sebagaimana yang disampaikan di atas, tidak terlepas dari perlunya pembahasan *backlog* perumahan. Untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud maka ada beberapa asumsi yang perlu dipertimbangkan mencakup terhadap beberapa hal: (1) faktor penambah adalah pertumbuhan jumlah penduduk 1 persen/tahun; dan (2) faktor pengurang yaitu rumah warisan dan adanya trend keengganan memiliki rumah. Dengan indikasi strategi penanganan berupa:

- a. Kemudahan aksesibilitas perbankan bagi masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap;
- b. Penyediaan rumah subsidi; dan
- c. Kemudahan perizinan Rusunawa dan Rumah Khusus.

2.6.2.2 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA AIR BERSIH

Jumlah penduduk yang semakin meningkat akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan, termasuk didalamnya kebutuhan air bersih guna mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Terutama pada wilayah perkotaan maupun wilayah-wilayah dengan kawasan industri yang tinggi.

Pemakaian air oleh masyarakat tidak terbatas untuk keperluan domestik saja namun juga untuk keperluan industri dan keperluan perkotaan. Besarnya pemakaian atau kebutuhan air bersih masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti taraf hidup, pendidikan, tingkat ekonomi, dan kondisi sosial. Besarnya kebutuhan air yang digunakan dalam perencanaan diperkirakan berdasarkan standar yang ada dan dengan mempertimbangkan kondisi yang melingkupinya, baik itu keadaan kota, penduduk, dan perkembangannya.

Tabel II.64
Standar Perhitungan Kebutuhan Air Domestik

URAIAN	KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH JIWA				
	>1.000.000	500.000 - 1.000.000	100.000 - 500.000	20.000 - 100.000	<20.000
	METRO	BESAR	SEDANG	KECIL	DESA
Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (L/O/Hari)	190	170	150	130	30
Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) (L/O/Hari)	30	30	30	30	30
Konsumsi Unit Non Domestik L/O/Hari (Persen)	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
Kehilangan Air (Persen)	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
Faktor Hari Maksimum	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Faktor Jam Puncak	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Jumlah Jiwa Per SR	5	5	6	6	10
Jumlah Jiwa Per HU	100	100	100	100-200	200
Sisa Tekan Di Penyediaan Distribusi (Mka)	10	10	10	10	10
Jam Operasi	24	24	24	24	24
Volume Reservoir (Persen Maks Day Demand)	20	20	20	20	20
Sr:Hu	50:50 S/D 80:20	50:50 S/D 80:20	80:20	70:30	70:30
Cakupan Pelayanan (Persen)	90 (60 pipa)	90 (60 pipa)	90 (60 pipa)	90 (60 pipa)	70 (25 pipa)

Sumber: Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000.

Standar perhitungan kebutuhan air pada tabel di atas, digunakan sebagai salah pendekatan dalam penentuan kebutuhan air dalam dokumen perencanaan. Sebagaimana hasil proyeksi pada kebutuhan air minum dalam dokumen RISPAM sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 51

Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042 terlihat bahwa kebutuhan air semakin meningkat dengan berbanding lurus dengan proyeksi jumlah penduduk yang juga semakin meningkat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel II.65
Indikasi Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Banten

URAIAN	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM (LITER/DETIK)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jrwaj)	12.537.440	13.035.250	13.490.460	13.872.070	14.156.300
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter/Detik)	10.891,25	25.381,13	30.555,18	40.321,39	58.213,87

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2023

2.6.2.3 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA ENERGI ATAU LISTRIK

Kebijakan Energi Nasional yang dikenal dengan singkatan KEN merupakan suatu acuan pedoman untuk memberikan arah pengelolaan energi nasional untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, KEN ini bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran yang berisi hasil pemodelan kebutuhan pasokan energi hingga tahun 2050. KEN ini menjadi dasar penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi telah menurunkan kebijakan pelaksanaan melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah ditetapkan pada 2 Maret 2017 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari RUEN tersebut, maka Provinsi Banten melakukan penyusunan kebijakan turunan untuk menyikapi hal tersebut melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Banten Tahun 2022-2050. Dalam aspek perencanaan, RUEN di tingkat nasional menjadi rujukan pada dokumen perencanaan RPJPN, maka dalam penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 juga perlu merujuk terhadap kebijakan RUED Provinsi Banten Tahun 2022-2050 yang berlaku.

Perhitungan proyeksi terhadap kebutuhan listrik di Provinsi Banten sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Banten Tahun 2022-2050, sebagai informasi bahwa

proyeksi dibawah ini dengan beberapa pertimbangan seperti: 1) penyusunan RUED Provinsi Banten mengacu kepada target KEN yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan energi daerah dan 2) pemodelan menggunakan asumsi kebutuhan dan penyediaan energi di Provinsi Banten menggunakan software *The Low Emission Analysis Platform (LEAP)*.

Tabel II.66
Indikasi Kondisi Kebutuhan Listrik di Provinsi Banten Tahun 2025-2045

URAIAN	SATUAN	KONDISI TAHUN	PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK DI PROVINSI BANTEN				
		2023*	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	12.307.732	12.537.440	13.035.250	13.490.460	13.872.070	14.156.300
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persen	0,46	0,85	0,74	0,65	0,50	0,34
Persentase Penduduk Perkotaan	Persen	72,18	73,70	78,80	84,90	90,10	93,80
Jumlah Rumah Tangga	KK	3.021.043	3.080.452	3.210.652	3.330.977	3.433.680	3.512.729
Jumlah Anggota per Rumah Tangga	Jiwa	4,07	4,07	4,06	4,05	4,04	4,03
Persentase Rumah Tangga Perkotaan	Persen	72,18	73,70	78,80	84,90	90,10	93,80
Jumlah Rumah Tangga Perkotaan	KK	2.180.589	2.270.293	2.529.994	2.828.000	3.093.746	3.294.940
Jumlah Rumah Tangga Perdesaan	KK	840.454	810.159	680.658	502.977	339.934	217.789
Rasio Elektrifikasi (Rumah Tangga)	Persen	98,45	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Elektrifikasi Perkotaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Rumah Tangga Kota Terlistrik	KK	2.180.589	2.270.293	2.529.994	2.828.000	3.093.746	3.294.940
Jumlah Rumah Tangga Kota Belum Terlistrik	KK	-	-	-	-	-	-
Rasio Elektrifikasi Perdesaan	Persen	94,41	98,03	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Rumah Tangga Perdesaan Terlistrik	KK	793.506	794.202	680.658	502.977	339.934	217.789
Jumlah Rumah Tangga Perdesaan Belum Terlistrik	KK	46.948	15.957	-	-	-	-
Jumlah Rumah Tangga Kota Belum Terlistrik *	KK	840.454	810.159	680.658	502.977	339.934	217.789
Jumlah Rumah Tangga Perdesaan Belum Terlistrik							

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Banten Tahun 2022-2050 (Disalah oleh Bappeda)

Tabel II.67
Indikasi Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Banten

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	TAHUN				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	12.307.732	12.537.440	13.035.250	13.490.460	13.872.070	14.156.300
Jumlah Rumah	3.021.043	3.080.452	3.210.652	3.330.977	3.433.680	3.512.729
Proyeksi Kebutuhan Listrik (MWt)	6.429.444	7.099.936	8.867.243	12.035.089	13.722.456	20.274.184

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Banten Tahun 2022-2050 (Disalah oleh Bappeda)

2.6.2.4 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Bertambahnya jumlah penduduk ini akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan yang akan meningkat. Hal krusial dari fenomena tersebut salah satu yang akan timbul menjadi isu permasalahan yaitu terkait persampahan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan jumlah timbunan sampah yang akan dihasilkan setiap harinya, hipotesa ini dengan asumsi kondisi di lapangan belum maksimalnya bahkan belum berjalannya reduksi/minimasi/pengelolaan sampah dari tingkat sumber penghasil sebagaimana yang telah wajirkan dalam peraturan yang berlaku.

Untuk menghitung jumlah timbunan sampah di Provinsi Banten hingga Tahun 2045, standar yang digunakan dalam perhitungan mengutip pada Dokumen Pedoman Penyusunan Data Aktivitas IGRK (Inventarisasi Gas Rumah Kaca) Pemerintah Daerah pada Sektor Limbah (2020) sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II.68
Standar Laju Pembentukan Sampah Domestik

NO	TIPE KOTA	LAJU PEMBENTUKAN SAMPAH DOMESTIK (TGS/KAPITA/TAHUN)
Kota		
1	Kota Metropolitan (penduduk di atas 1.000.000 jiwa)	0,28
2	Kota Besar (penduduk antara 500.000-1.000.000 jiwa)	0,22
3	Kota Sedang (penduduk antara 100.000-500.000 jiwa)	0,20
4	Kota Kecil (penduduk antara 20.000-100.000 jiwa)	0,19
	Rata-rata	0,22
Kabupaten		
1	Kabupaten	0,20

Sumber: KLHK, 2020

Jika mengacu pada tabel di atas, maka dilakukan perhitungan terhadap timbunan sampah yang diindikasikan akan dihasilkan hingga Tahun 2045 di Provinsi Banten dengan asumsi (tanpa ada pengelolaan dari sumber penghasil sampah) yaitu sebagai tabel di bawah ini. Pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya timbunan sampah

yang tidak dikendalikan penanganannya secara baik di bagian hulu (penghasil sampah), maka konsekuensi buruk yang harus diterima oleh pemerintah daerah yaitu berupa kebutuhan lahan yang semakin besar untuk melakukan pemrosesan dan pengolahan akhir sampah di bagian hilir.

Tabel II.69
Indikasi Proyeksi Timbulan Sampah di Provinsi Banten

URAIAN	KONDISI TAHUN	PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH (TON/TAHUN)				
	2023*	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Uraian	13.307.732	13.537.440	13.635.230	13.690.460	13.872.070	14.155.300
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	1.894.628,03	3.428.917,60	3.563.511,40	3.686.696,60	3.805.218,60	3.878.440,40

Banten: Ditah oleh Bapenda, 2024 (ket: timbulan sampah Tahun 2023 berdasarkan SPSPN, 2023)

2.6.2.5 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA KESEHATAN

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, untuk mencapainya diperlukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Proyeksi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan khususnya Rumah Sakit di Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2045 dihitung melalui beberapa pendekatan asumsi diantaranya:

- Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, penambahan rumah sakit setiap 5 (lima) tahun sebanyak 5 (lima) rumah sakit;
- Pembangunan rumah sakit provinsi diutamakan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, mengingat investasi RS Swasta pada daerah tersebut belum memadai;
- Dalam pemenuhan pelayanan selain pembangunan rumah sakit, dapat melalui penambahan tempat tidur (kenaikan kelas) pada rumah sakit yang sudah ada saat ini, contoh: RS provinsi diupayakan tiap 5 tahun menaikkan kelas Rumah Sakit (RSUD Malingping menjadi Kelas B);
- RSUD Labuan dan RSUD Ciligrang dapat beroperasi;
- Diperlukan RS Jiwa provinsi dan RSGM (Rumah Sakit Gigi dan Mulut);
- Membangun satu Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi;
- Terbangunnya *hospital tourism* pada wilayah yang memiliki potensi pariwisata sebagai upaya pemenuhan aspek pariwisata berupa

amenities (fasilitas pendukung) yang merupakan salah satu komponen pengembangan pariwisata;

- h. Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus kesehatan mental. Berdasarkan data Kemenko PMK Provinsi Banten merupakan salah satu dari 5 (lima) provinsi lainnya (Kepri, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat) yang belum memiliki fasilitas Rumah Sakit Jiwa, sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti dengan membangun Rumah Sakit Jiwa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU. Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 52 ayat (2); dan
- i. Terbangunnya Rumah Sakit Kelas A di Provinsi Banten.

Tabel II.70
Kondisi Rumah Sakit di Provinsi Banten Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TEMPAT TIDUR	NILAI CAPAIAN* <1000 = 2,75; >1.000 <= 5.000 = 1,75; >5.000 = 0	RASIO STANDAR PERMEN KUMHAM NOMOR 34 TAHUN 2016 (TEMPAT TIDUR PER 1.000 PENDUDUK)	RASIO STANDAR KEMENKES	RASIO STANDAR WHO (TEMPAT TIDUR PER 1.000 PENDUDUK)	RASIO TEMPAT TIDUR /1000 PENDUDUK
1	Kabupaten Pandeglang	1.307.090	471	2,775	1,75	1	5	0,36
2	Kabupaten Lebak	1.433.853	732	1,959	1,75	1	5	0,51
3	Kabupaten Serang	1.678.915	933	1,769	1,75	1	5	0,56
4	Kota Cilegon	450.271	806	559	2,75	1	5	1,79
5	Kota Serang	720.362	1267	569	2,75	1	5	1,76
6	Kabupaten Tangerang	3.352.472	3322	1.009	1,75	1	5	0,99
7	Kota Tangerang	1.930.856	4680	413	2,75	1	5	2,42
8	Kota Tangerang Selatan	1.378.466	3213	429	2,75	1	5	2,33
	Total	12.251.983	15.426	794	2,75	1	5	1,26

Sumber: Ditah oleh Bappesda, 2023

Berdasarkan asumsi di atas, maka hasil perhitungan indikasi proyeksi menggunakan rasio antara jumlah tempat tidur dengan 1000 penduduk dengan proyeksi pertumbuhan penduduk 1 (satu) persen setiap tahun, seperti pada tabel di bawah.

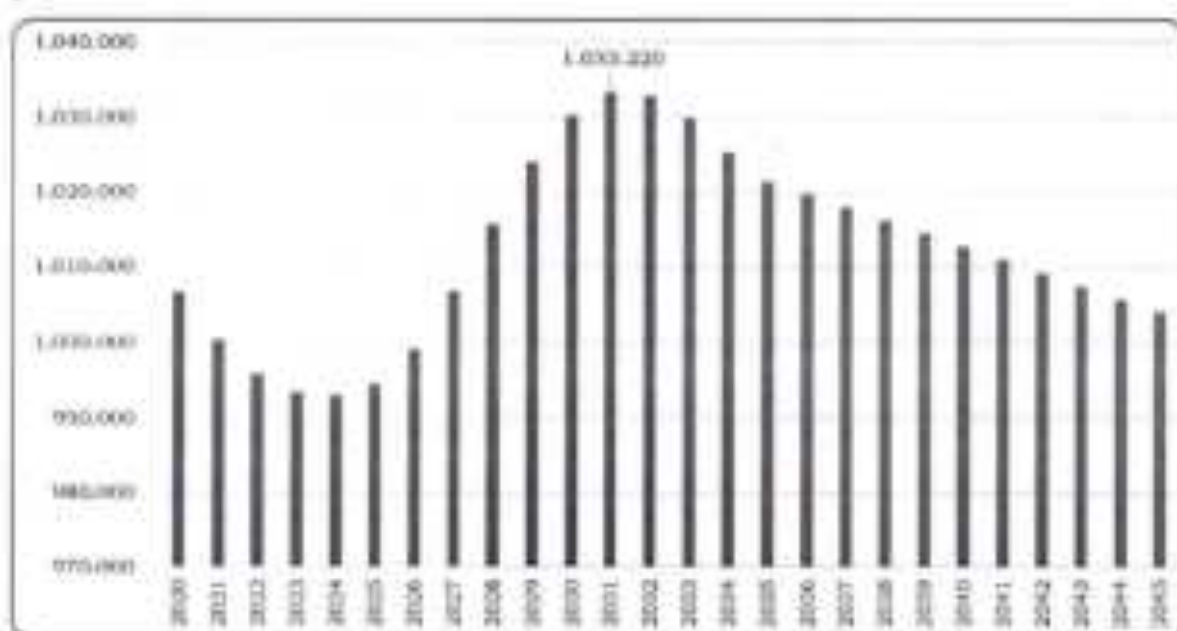
Tabel II.71
Indikasi Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TEMPAT TIDUR						
		2022	2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kabupaten Pandeglang	471	446	1.347	1.413	1.488	1.563	1.643
2	Kabupaten Lebak	732	732	1.472	1.353	1.632	1.715	1.803
3	Kabupaten Tangerang	3.322	3.352	3.454	3.630	3.815	4.010	4.215
4	Kabupaten Serang	933	938	1.730	1.818	1.911	2.008	2.111
5	Kota Tangerang	4.680	4.328	5.470	5.749	6.042	6.350	6.674
6	Kota Cilegon	806	825	1.276	1.341	1.409	1.481	1.557
7	Kota Serang	1.267	1.321	2.041	2.145	2.255	2.370	2.490
8	Kota Tangerang Selatan	3.213	3.134	3.906	4.100	4.314	4.534	4.766
	Total	15.426	15.076	20.700	21.796	22.866	24.032	25.258

Sumber: Ditah oleh Bappesda, 2023

2.6.2.6 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan *gender*. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai dengan kondisi dan lingkungannya, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan menciptakan masyarakat yang madani dan modern dengan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut dalam peraturan yang sama bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.



Gambar II.64
Tren Pertumbuhan Jumlah Penduduk Usia 15-19 di Provinsi Banten
(Sumber: Ditah oleh Bappeda, 2024)

Pertimbangan terhadap perhitungan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan khususnya SMA/SMK dan SKh perlu mencermati terhadap dinamika pertumbuhan penduduk diusia sekitar 15-19 bahwa jumlah tertinggi yaitu pada Tahun 2031 dengan jumlah lebih kurang sebesar 1.033.220 jiwa. Sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan terhadap penentuan proyeksi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

Pertimbangan lainnya terhadap proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan khususnya SMA/SMK dan SKh di Provinsi Banten

sampai dengan Tahun 2045 dihitung melalui beberapa pendekatan asumsi diantaranya:

- a. Minimal terdapat 2 unit SKh di setiap kabupaten;
- b. Minimal terdapat 2 unit SKh di setiap kota;
- c. Pemerataan distribusi jumlah SMA dan SMK dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk usia 15-19 tahun pada setiap kabupaten/kota serta kondisi eksisting jumlah sekolah yang sudah tersedia sampai dengan Tahun 2023;
- d. Penguatan terhadap metode pembelajaran pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi dengan dukungan ketersediaan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Minimal terdapat 1 unit *science park* di level provinsi dan 3 unit *technopark* di masing-masing WKP;
- f. Minimal diproyeksikan agar ada sarana dan prasarana bertaraf internasional;
- g. Adanya politeknik baru dengan beberapa jurusan potensial di Provinsi Banten seperti pariwisata, besi dan baja, pertekstilan, perkapalan, pertanian, dsb; dan
- h. Adanya pusat riset kemaritiman (Samudera Hindia).

Berdasarkan asumsi di atas, maka hasil perhitungan indikasi proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan khususnya SMA/SMK dan SKh di Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2045 yaitu berdasarkan data pada tabel di bawah. Diketahui bahwa dengan mempertimbangkan asumsi yang ada sebagaimana disinggung di awal, indikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan kewenangan Provinsi Banten seperti pada tabel di bawah.

Tabel II.72
Indikasi Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/SKb di Provinsi Banten

NO	WILAYAH	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 15-19 TAHUN 2031							
		PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK USIA 15-19	KEBUTUHAN SMA	KEBUTUHAN SMK	KEBUTUHAN SEKOLAH (PROYEKSI PENDUDUK 15-19)	EKSISTING SMA	EKSISTING SMK	EKSISTING JUMLAH SEKOLAH	LEBIH/ (KURANG)
1	Kabupaten Tangerang	289.080	1	17	413	182	202	384	(29)
2	Kabupaten Serang	141.510	2	18	202	84	94	178	(24)
3	Kota Tangerang	153.350	1	7	219	88	123	211	(8)
4	Kota Tangerang Selatan	106.990	1	1	153	100	78	178	25
5	Kabupaten Lebak	123.620	16	36	177	66	69	135	(42)
6	Kabupaten Pandeglang	112.810	17	20	161	44	101	145	(16)
7	Kota Serang	66.950	6	8	96	32	45	77	(19)
8	Kota Cilegon	38.910	3	4	56	22	26	48	(8)
Total		1.033.220	47	111	1.476	618	738	1.356	

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2023

Tabel II.73
Indikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Provinsi Banten

NO	SARANA DAN PRASARANA NEGERI	KONDISI SEMESTER 2023/2024 GENAP*	TAHUN			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2049
1	SMA	161	15	15	10	3
2	SMK	96	25	25	35	26
3	SKb	10	3	2	2	1
Total		267	43	42	47	30

Sumber: *) Depdik Kemdikbud (<https://daps.kemdikbud.go.id/np/1/200000>), 2023 (Disaknas 13 Agustus 2024, Diolah oleh Bappeda)

2.6.2.7 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA LAINNYA

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Semakin heterogenya permasalahan sosial yang cukup kompleks di masyarakat, baik permasalahan kemiskinan, ketclantaran, kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), serta kejahatan lainnya sehingga hal ini perlu dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang ada ini perlunya penyediaan LKS untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat.

Diindikasikan diperlukan adanya kebutuhan LKS rumah singgah, panti sosial tresa werdha, panti sosial asuhan anak, panti sosial penyandang cacat/disabilitas, bina mental, dan bina rehabilitasi yang diindikasikan diarahkan tersedia di masing-masing WKP di Provinsi Banten dan kebijakan lainnya.

b. Balai Latihan Kerja (BLK)

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal yang manusiawi, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan hilirnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan dimaksud tersebut maka perlu dilakukan perencanaan secara matang guna menghasilkan para pekerja yang produktif, berdaya saing dan berinovasi melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, salah satunya melalui penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK). BLK merupakan tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan untuk dibekali suatu keterampilan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu sebagai bekal dalam memasuki pasar kerja untuk bersaing dalam era *blue economic* maupun *green economic* dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Selain itu, sasaran dari pelatihan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang terampil, disiplin, dan memiliki etos kerja produktif sehingga mampu mengisi kesempatan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri.

Jika ditelisik terdapat 2 (dua) fenomena yang menggambarkan ketenagakerjaan saat ini di Provinsi Banten, yaitu:

- i. Fenomena ke-1 dalam kurun waktu Februari 2023-Februari 2024 adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 28,03 ribu di Provinsi Banten sehingga jumlah pengangguran di Provinsi Banten menjadi sebanyak 425 ribu orang, dengan demikian Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten berada di posisi 7,02 persen yang sebanding dengan penurunan sebesar 0,95 persen (Februari 2024). Di Provinsi Banten kondisi pekerja paling banyak berpendidikan rendah sebesar 35,83 persen (SD kebawah), SMP sebesar 17,11 persen, dan SMA sebesar 20,51 persen. Data Sakernas (2023) menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja sebagian besar adalah lulusan SMA sebanyak 2.048.298 orang (37,13 persen), sedangkan lulusan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 769.733 orang (13,95 persen). Jika ditelaah dari sektor lapangan pekerjaan utamanya, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan jumlah pekerja terbanyak yaitu 1.186.369 orang (21,51 persen), diikuti oleh industri pengolahan dengan pekerja sebanyak 1.158.479 orang (21 persen) dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 662.474 orang (12,01 persen); dan
- ii. Fenomena ke-2 yaitu Provinsi Banten memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari pariwisata, budaya, hingga zona industri. Zona industri merupakan salah satu zona yang mempengaruhi pengembangan ekonomi di Provinsi Banten atau dapat dikatakan sebagai jantung pengembangan ekonomi di Provinsi Banten. Selain itu, zona industri di Provinsi Banten memiliki kebutuhan tenaga kerja yang banyak, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak juga.

Dari 2 (dua) fenomena di atas adanya permasalahan yang perlu dituntaskan, melalui pendekatan berupa masing-masing Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) di Provinsi Banten memiliki 1 (satu) Balai Latihan Kerja untuk menyasar 2 target yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap BLK dan menyediakan transformasi kompetensi-kompetensi pada BLK yang dibutuhkan dalam dunia kerja sehingga tidak ada lagi kesenjangan terhadap *link and match*.

c. Sarana dan Prasarana Kebugaran

Kebugaran jasmani merupakan kebutuhan mendasar setiap individu sebagai penunjang dalam beraktivitas, seseorang dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik saat dapat melakukan aktivitas atau

tugas-tugas tertentu dengan lancar. Rendahnya budaya dan prestasi olahraga dimungkinkan salah satu penyebabnya karena masih minimnya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk olahraga untuk memwadah aktivitas olahraga masyarakat maupun minimnya terhadap agenda/perlombaan/event olahraga bagi masyarakat.

Selain dengan penyediaan fasilitas olahraga baik berupa ruang publik terbuka/lapangan (*outdoor*) maupun bersifat tertutup (*indoor*) hingga konsep *sport city* ataupun *sport science* pada hilirnya akan memberikan efek turunan berupa pertumbuhan ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat (misal: *foodcourt*, souvenir olahraga, dsb).

Untuk menunjang dihasilkannya masyarakat Banten yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka diperlukan adanya dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana kebugaran sebagai penunjang kesehatannya. Ada beberapa sarana dan prasarana yang diindikasikan diperlukan untuk dibangun dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, yaitu:

- i. Diperlukan keberlanjutan pembangunan terhadap 1 (satu) stadion di Provinsi Banten yang bertaraf internasional dengan dikonsepkan menjadi *sport city* ataupun *sport science*, yang didalamnya ditunjang dari berbagai pendukung venue-venue cabang olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional, pusat pelatihan atlet, pertokoan olahraga, dsb; dan
- ii. Diperlukan pembangunan stadion di masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten bertaraf nasional.

d. Sarana dan Prasarana Kreativitas, Kepariwisatahan dan Kebudayaan

Jika suatu daerah masih memiliki kesenjangan sosial, infrastruktur, maupun perekonomian, maka akselerasi pengembangan wilayah menjadi agenda wajib yang perlu dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dengan memanfaatkan berbagai potensi unggulan dari masing-masing sektor secara menyeluruh, terarah dan berkelanjutan untuk dapat memacu pemerataan pembangunan dan mendiversifikasi ekonomi di wilayah Provinsi Banten. Dalam kepentingan upaya pembangunan yang berkelanjutan, perhatian terhadap aspek daya dukung, mitigasi bencana, dan kearifan lokal juga menjadi perhatian penting yang tidak boleh dilupakan.

Provinsi Banten sebagai gerbang barat Pulau Jawa memiliki potensi pariwisata yang tidak terbantahkan. Berbagai obyek dan daya tarik wisata yang tersebar hampir diseluruh wilayah kabupaten dan kota sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan penggerak roda perekonomian daerah yang memiliki nilai tambah tinggi. Sebagai salah satu pendorong laju pembangunan, kepariwisataan diarahkan pada dua sasaran yaitu sasaran sosio ekonomi (berfungsi sebagai sumber penerimaan devisa, sumber peningkatan atau pemerataan ekonomi masyarakat, dan juga sumber perluasan lapangan pekerjaan) serta sasaran sosio budaya (berfungsi sebagai pendorong terpeliharanya kearifan lokal yang terdapat di suatu destinasi wisata baik yang bersifat material maupun non material sehingga terdapat kaitan yang erat antara usaha pengembangan kepariwisataan.

Tidak hanya sektor pariwisata/kepariwisataan saja, sektor kebudayaan menjadi bagian yang perlu juga diperhatikan karena Provinsi Banten memiliki kebudayaan yang cukup melimpah, salah satunya berdasarkan hasil inventarisasi maupun penelitian sejak abad ke-19 oleh J.W.G.J Prive. Komponen yang penting dalam pembangunan kebudayaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kebudayaan merupakan salah satu aspek yang akan mendukung kemajuan pembangunan bangsa. SDM Kebudayaan harus diutamakan pada penguasaan kompetensi yang fokus pada suatu bidang tertentu yang akan mampu berdaya saing tinggi baik pada level nasional maupun internasional

Indikasi pengembangan wilayah dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kreativitas, rekreasi dan kebudayaan bagi masyarakat Banten, meliputi:

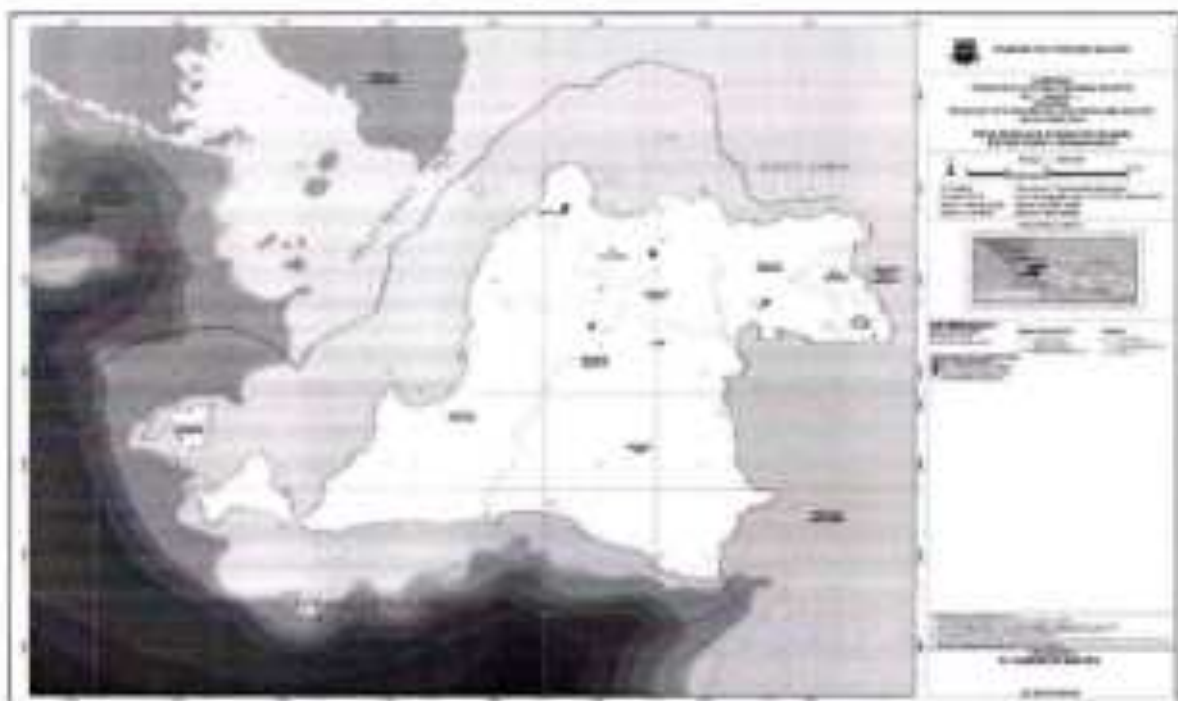
- i. Pengembangan potensi unggulan baru terhadap sektor pariwisata/pusat rekreasi masyarakat memanfaatkan potensial daya tarik sumber daya alam yang ada;
- ii. Pengembangan, perlindungan dan pelestarian unsur kebudayaan (cagar budaya, permuseuman, kesenian, kesejarahan, dsb);
- iii. *Cultural Hub and Creative* (CCI) melalui penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang kompetitif berstandar internasional; dan
- iv. Pusat kreatif (*creative hub*) sebagai ruang terbuka publik mewadahi masyarakat Banten dalam berkreativitas dan berinovasi yang lebih jauh daripada itu juga diproyeksikan sebagai simpul ekonomi kreatif;

- v. Serta hiburan dan rekreasi lainnya yang adaptif dan kompetitif.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. RPJPD Provinsi Banten Tahun 2023-2043 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang mempertimbangkan terhadap berbagai kebijakan khususnya dokumen perencanaan nasional maupun perencanaan sektoral lainnya.

Pusat pertumbuhan (growth pole) adalah kawasan perkembangan yang cukup pesat sehingga dijadikan pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah di sekitarnya. Kemajuan dari pusat pertumbuhan akan menyebar dan mendorong perkembangan wilayah di sekelilingnya/spread effect. Pusat pertumbuhan juga dapat dirumuskan sebagai wilayah dengan pertumbuhan yang sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Pusat pertumbuhan biasanya mengambil peran sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitar.



Gambar II.65
Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pertumbuhan (PKN, PKW, PKL dan Kawasan Strategis) di Provinsi Banten
(Sumber: RTRW Provinsi Banten 2023-2043)

Pusat pertumbuhan secara fungsional merupakan suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang memiliki sifat hubungan berupa unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu mendorong kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar wilayah.

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Banten telah dirancang dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2023-2043 dimana pengertian rencana struktur adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif provinsi adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah provinsi. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah provinsi.

Struktur pusat permukiman perkotaan yang menjadi bagian dari perwilayahan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Banten dibedakan atas struktur pusat permukiman perkotaan di Metropolitan Jabodetabekpunjur serta di luar metropolitan. Struktur pusat permukiman perkotaan wilayah Metropolitan merupakan upaya untuk memecah sentralisasi pusat pelayanan, dan orientasi pelayanan serta kegiatan yang monosentris ke arah Tangerang dan sekitarnya. Istilah Metropolitan Jabodetabekpunjur pada RPJPN diterjemahkan sebagai Wilayah Metropolitan Jakarta.

2.7.1 PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DI PROVINSI BANTEN

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi perkotaan di Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, sebagai bagian dari kawasan perkotaan Jabodetabek untuk pengembangan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan;
- b. Kawasan Perkotaan Serang dan Kabupaten Serang, sebagai fungsi pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan, pertanian, kelautan dan perikanan, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, pertambangan, energi, permukiman dan transportasi laut;
- c. Kota Cilegon dengan fungsi pelayanan untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, industri, jasa, perdagangan, energi, permukiman dan transportasi laut.

Kawasan perkotaan tersebut merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

2.7.2 PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) DI PROVINSI BANTEN

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional. PKW tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung sesuai jenjangnya diperlukan dalam rangka penguatan fungsi kota-kota tersebut.

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi perkotaan di Provinsi Banten:

- a. Perkotaan Pandeglang dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, permukiman, jasa, perdagangan, dan pariwisata; dan
- b. Perkotaan Rangkasbitung dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, jasa, perdagangan, transportasi, permukiman dan pariwisata.

2.7.3 PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) DI PROVINSI BANTEN

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1

Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan di Provinsi Banten meliputi beberapa wilayah mencakup:

- Kabupaten Lebak, meliputi: Perkotaan Bayah, Perkotaan Cipanas, Perkotaan Maja dan Perkotaan Malingping;
- Kabupaten Pandeglang, meliputi: Perkotaan Panimbang, Perkotaan Labuan, Perkotaan Cibaliung dan Perkotaan Cikiruh Wetan;
- Kabupaten Serang, meliputi: Perkotaan Anyar, Perkotaan Baros, Perkotaan Ciruas dan Perkotaan Pontang;
- Kabupaten Tangerang, meliputi: Perkotaan Kramjo, Perkotaan Tigaraksa dan Perkotaan Pagedangan.

2.7.4 KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI BANTEN

Dalam RPJPN 2025-2045, wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah megalopolis yang unggul, inovatif inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui 5 (lima) prioritas salah satunya adalah pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.

Kawasan strategis sebagaimana yang tercantum dalam Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 terdiri atas:

- Kawasan Strategis Nasional (KSN);

Tabel II.74
Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Banten

SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN	NAMA KSN
Pengembangan	KSN pulau terbelah dan terluar	i) KSN Perbatasan Negara
Pertumbuhan ekonomi	Kawasan sekitar Selat Sunda	ii) KSN Selat Sunda
Pungsi dan daya dukung lingkungan	Kawasan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Kawasan sekitar Teluk Banten, Kawasan Tanjung Lesung	iii) KSN Taman Nasional Ujung Kulon iv) KSN Teluk Banten v) KSN Tanjung Lesung
Pertumbuhan Ekonomi Jabodetabek-punjab	Kawasan sebagian perkotaan di Rafi, Tangerang dan Kota Tangerang	vi) KSN Jabodetabek

Sumber: RTRW Provinsi Banten 2023-2043 (diolah oleh Gappoda)

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) berlokasi di wilayah Tanjung Lesung dan Teluk Banten yang terkait dengan arah

pengembangan pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan karbon biru;

- c. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,

Tabel II.75
Kawasan Strategis di Provinsi Banten

SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN	NAMA KSP
Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Metropolitan	a) KSP Serang - Cilegon (Seragom). Tujuan: Mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kawasan yang berkelanjutan. Arahan pengembangan: i) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam kawasan dan antar kawasan; ii) Menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan untuk setiap pembangunan gedung; dan iii) Penetapan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien dasar hijau (KDH), dan koefisien lantai bangunan (KLB), berdasarkan pertimbangan ketentuan rencana tata ruang kabupaten/kota.
	Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)	b) KSP KP3B di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang, dan sekitarnya. Tujuan: Mewujudkan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sebagai kawasan pemerintahan, pendidikan, permukiman, perdagangan, jasa, sarana olahraga skala regional (sport center) dan sarana prasarana pendukung lainnya guna menjadikan kawasan cepat tumbuh yang berkelanjutan. Arahan Pengembangan: i) Penataan dan kawasan pusat pemerintahan provinsi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; ii) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; iii) Penataan dan pengembangan Kawasan KP3B dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan iv) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat

SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN	NAMA KSP
		mematu perkembangan kegiatan budidaya.
	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Serang Utara)	c) KSP Kawasan Serang Utara Terpadu (Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang). Tujuan: Mewujudkan kawasan strategis Serang Utara sebagai pusat kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antar bagian kawasan yang berkelanjutan. Arahan pengembangan: - Pengembangan sektor industri sebagai pusat industri Provinsi Banten khususnya industri manufaktur dan industri pangan sebagai kawasan cepat tumbuh dan penciptaan iklim investasi; - Peningkatan daya saing kawasan dengan pembentukan Kawasan Peruntukan Industri dan pengembangan konektivitas tinggi antar kawasan; - Pengembangan dan peningkatan kinerjanya dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam kawasan dan antar kawasan; - Membenahi wilayah perkotaan sesuai karakteristik dan potensi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang terdiri dari kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan industri, selaras dengan pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; dan - Menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sampah dan pantai dan pengendalian pemanfaatan ruang di pesisir.
	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Pantai Selatan)	d) KSP Kawasan Pantai Selatan Terpadu (wilayah selatan dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Labak). Tujuan: Mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan. Arahan pengembangan: - Pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan berupa peningkatan teknologi sarana perikanan dan pengembangan pelabuhan perikanan; - Pembagian peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu; - Pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam; - Mempertahankan keberadaan kawasan lindung geologi;

SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN	RAMA KSP
		v) Pengembangan peruntukan industri berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; vi) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; vii) Menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai, penanganan rawan tsunami, pengendalian pemanfaatan ruang di pesisir; dan viii) Peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu.
	Kawasan Pengembangan Ekowisata Terpadu (Pantai Barat)	a) KSP Kawasan Pantai Barat Terpadu (wilayah Barat Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang). Tujuan: Mewujudkan optimasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir Barat Banten berbasis mitigasi bencana. Arahan pengembangan: i) Penataan dan pengembangan kawasan lindung idaya secara terkontrol sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; ii) Pengembangan peruntukan industri, pariwisata dan transportasi berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan iii) Peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana di kawasan strategis koridor pantai barat Banten.
	Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota	b) Kawasan antar kabupaten/kota. Tujuan: Mewujudkan dan sinkronisasi pemanfaatan ruang melalui integrasi wilayah perbatasan. Arahan pengembangan: i) Perwujudan struktur ruang yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; ii) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan iii) Membentuk kawasan sesuai karakteristik dan potensi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.
Sosial dan Budaya	Kawasan Situs Banten Lama	a) KSP Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Tujuan: Mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan Banten Lama dan penyangga adat buday sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan. Arahan pengembangan: i) Pengamanan, pelestarian, pengembangan dan perluasan Kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah Banten Lama, ilmu pengetahuan, pendidikan

BUDUT KEPEMINTINGAN	KAWASAN	NAMA KSP
		dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
		ii) Pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pariwisata yang merupakan basis perekonomian di Kawasan Banten Lama pada masa yang akan datang;
		iii) Pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder secara adil dalam pengelolaan kawasan Banten Lama sebagai kawasan pariwisata sejarah; dan
		iv) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan kawasan.
	Kawasan Penyangga Adat Baduy	b) KSP Penyangga Adat Baduy di arahkan di Kabupaten Lebak. Tujuan: Mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan penyangga adat baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan. Arahan pengembangan: i) Mempertahankan dan melestarikan keberadaan budaya adat baduy sebagai kearifan lokal; ii) Pengembangan ekonomi lokal sebagai pendukung kegiatan sosial budaya pada masa yang akan datang; dan iii) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan kawasan.
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Bendungan Karian	a) KSP Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Tujuan: Mewujudkan penataan ruang kawasan strategis Bendungan Karian sebagai pusat pemanfaatan sumber daya air dan pusat pelayanan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Arahan pengembangan: i) Optimalisasi pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi pada kawasan Bendungan Karian; ii) Pengembangan kawasan bendungan karian sebagai objek utama pariwisata; iii) Pengembangan kawasan sekitar sebagai kawasan yang memiliki pengaruh, peladang, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti; dan iv) Pengembangan infrastruktur penghubung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta	a) KSP Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang

SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN	NAMA KSP
	Kawasan Rawa Danau	1) KSP Rawa Danau di Kabupaten Serang dan di Kabupaten Pandeglang Tujuan: Mewujudkan penataan kawasan strategis provinsi Rawa Danau dalam rangka menjamin pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan. Arahan pengembangan : i) Perwujudan kawasan lindung untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga makro climate, serta mencegah dan/atau mengurangi risiko bencana; ii) Menjaga kreasi lingkungan berupa pengendalian dan pemanfaatan ruang; iii) Mempertahankan keberadaan kawasan rawa danau.

Sumber: RTRW Provinsi Banten 2023-2043 (Ditulis oleh Ekyandita)

2.7.5 WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yaitu pembangunan berbasis kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Provinsi Banten.

Pengembangan wilayah di Provinsi Banten guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, terbagi dalam tiga wilayah kerja pembangunan, terdiri atas:

- WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dengan arahan fungsi dan peranan sebagai penyangga kawasan perkotaan Jabodetabek serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
- WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, kelautan, perikanan, jasa, perdagangan, pertambangan; dan
- WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.



Gambar II.66
Peta Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) di Provinsi Banten
(Sumber: RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043)

Tabel II.76
Kebijakan Pengembangan Kewilayahan di Provinsi Banten

WILAYAH	TEMA PENGEMBANGAN	ARAH PENGEMBANGAN	FOKUS PENGEMBANGAN	SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL WILAYAH
WKP I : a. Kabupaten Tangerang b. Kota Tangerang c. Kota Tangerang Selatan	mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan mega urban	Pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;	1. Pembangunan Rumah Sakit Tipe A 2. Pembangunan Pelayanan Air Bersih 3. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A 4. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan industry 5. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Tol antar Kota di Daerah dan Jalan Tol dalam kota di Daerah 6. MRT East - West dan MRT South - North 7. Pembangunan Sarana Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Ekonomi, Infrastruktur dan Transportasi dasar	1. Pertanian (Kabupaten Tangerang) 2. Perkebunan (Kab. Tangerang) 3. Hortikultura (Kab. Tangerang) 4. Perikanan tangkap (Kab. Tangerang) 5. Perikanan budidaya (Kab. Tangerang) 6. Pertambangan dan Energi (Kab. Tangerang) 7. Perumahan Industri 8. Pariwisata (Kab. Tangerang)
WKP II : a. Kabupaten Serang b. Kota Serang c. Kota Cilegon	menyempatkan perkembangan kawasan lain di wilayah Banten dan mengoptimalkan perkembangan kawasan terhitung di perkotaan sesuai daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan	Pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan;	1. Pembangunan Rumah Sakit Tipe A 2. Pembangunan Pelayanan Air Bersih 3. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A 4. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan barang Jembatan Selat Sunda 5. Pengembangan Sistem Bus Rapid Transporation (BRT) Angkutan Umum massal berbasis jalan 6. Pembangunan Perguruan Tinggi dan Universitas 7. Pembangunan Sarana Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Ekonomi, Infrastruktur dan Transportasi dasar	1. Hutan produksi 2. Pertanian 3. Perkebunan (Kab. Serang dan Kota Cilegon) 4. Hortikultura (Kab. Serang) 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Pertambangan dan Energi (Kab. Serang, dan Kota Cilegon) 8. Perumahan Industri 9. Pariwisata

WILAYAH	TEMA PENGEMBANGAN	ARAH PENGEMBANGAN	FOKUS PENGEMBANGAN	SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL WILAYAH
WKP III : a. Kabupaten Pondreng b. Kabupaten Lebak	mendorong perkembangan perkotaan yang setara dengan kawasan perdesaan secara optimal dan berkelanjutan	Pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan	1. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 2. Pembangunan Rumah Sakit Tipe B 3. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi 4. Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 6. Pengembangan Wilayah Afirmasi Cibitung-Musa Benteng- Cikuruk 7. Pengembangan Kawasan Akusari 8. Pengembangan Kawasan Bayah Dome 9. Pembangunan Sarana Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Ekonomi, Infrastruktur dan Transportasi dasar	1. Hutan produksi 2. Pertanian 3. Perkebunan 4. Hortikultura (Pondreng) 5. Perikanan tangkap 6. Pertambangan dan Energi (Kab. Pondreng) 7. Peruntukan Industri 8. Pariwisata

Sumber: RTRW Provinsi Banten 2023-2043 (Ditulis oleh Happono)

2.7.6 PROGRAM DAN ARAHAN STRATEGIS PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten 2023-2043, dalam peraturan tersebut telah diterangkan terhadap tujuan dan arahan pengembangan terhadap pusat-pusat kegiatan maupun sektor-sektor pengembangan pertumbuhan di wilayah Provinsi Banten, mencakup beberapa hal diantaranya:

- a. Sistem pusat permukiman yang termasuk kedalam rencana struktur ruang, yang terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki tujuan dan arah pengembangan meliputi:
 - i. Pengembangan PKN berupa program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - ii. Pengembangan PKW berupa: a). program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); b). program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berupa pengembangan fasilitas bisnis pariwisata; dan c). program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berupa pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan
 - iii. Pengembangan PKL berupa program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
- b. Pengembangan kawasan strategis provinsi, yang terdiri dari:
 - i. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi berupa: a). pengembangan kawasan strategis ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional berupa program penataan bangunan dan lingkungan yaitu: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan; b). pengembangan kawasan strategis ekonomi di kawasan strategis provinsi berupa program penataan bangunan dan lingkungan, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan program perencanaan dan pembangunan industri;
 - ii. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya berupa: a). program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; dan b). program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, lingkungan hidup untuk masyarakat;

- iii. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan;
- iv. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa: a). program pengelolaan keanekaragaman hayati; dan b). program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- v. Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertahanan dan keamanan (KSNT) berupa program pengelolaan pelayaran.

Tabel II.77
Indikasi Proyek Strategis Pusat Pertumbuhan Perkotaan di Provinsi Banten
Tahun 2025-2045

PUSAT PERKOTAAN	KEGIATAN PERKOTAAN	WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM STRATEGIS
Serang dan Cillegon	PKN	WKP II	a) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A
Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan	PKN	WKP I	b) Pembangunan Pelayanan Air Bersih c) Pembangunan Terminal Tipe A d) Angkutan Barang Regional (Jembatan Selat Sunda) e) Pembangunan Pusat perdagangan, Industri, Transportasi (BRT Trans Banten Cillegon-Cikande, Terendol-Kota Serang, Banten Lama-Batras, Tal Serpong-Balaraja, Kamal-Teluknaga-Balaraja, Semanan-Balaraja, Pakuhaji-Bandara Soetta, Balaraja-Jakarta-East-West (Renas) dan Angkutan Umum (MRT Busline Tangerang-Jakarta dan f) Pembangunan Perguruan Tinggi dan Universitas
Kabupaten Pandeglang	PKW	WKP III	a) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B
Kabupaten Lebak (Bangkashitung)	PKW	WKP III	b) Pembangunan Terminal Tipe B c) Pembangunan pusat distribusi d) Pengembangan Pelatihan Perikanan e) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian f) Pengembangan Wilayah Afirmasi Cibaliung-Memasangun-Cikemah g) Pengembangan Kaw. Almarari h) Pengembangan Kawasan Bayah Dume
Kabupaten Lebak (Bayah, Cipanas)	PKL	WKP III	a) Pembangunan Sarana Pendidikan

PUSAT PERKOTAAN	KEGIATAN PERKOTAAN	WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM STRATEGIS
Maja dan Malingping	PKL	WKP III	b) Sarana Kesehatan
Kabupaten Pandeglang (Panimbang, Labuan, Cimahiung, dan Cikarah Wetan)			c) Sarana Pelayanan Ekonomi
Kabupaten Serang (Ambar, Baros, Ciruas, dan Pontang)			d) Sarana Infrastruktur dan Transportasi dasar
Kabupaten Tangerang (Krejo, Tigaraksa, Pogadangan)	PKL	WKP I	

Sumber: RTRW Provinsi Banten 2023-2043 (Dolah oleh Bappeda)

Sementara itu indikasi program strategis sebagai upaya dalam perwujudan pusat pertumbuhan di Provinsi Banten dalam dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.78
Indikasi Proyek Strategis Pusat Pertumbuhan Kawasan Strategis di Provinsi Banten Tahun 2025-2045

KAWASAN STRATEGIS	PRIORITAS PERTUMBUHAN	WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM STRATEGIS
KSP, Perkotaan Serang-Cidegon (Serang)	Kepentingan Ekonomi	WKP II	a) Pengembangan Perkotaan;
KSP, Serang Utara Terpadu		WKP II	b) Pengembangan Permukiman;
KSP, Sekitar Kawasan KPM		WKP II	c) Pengembangan Industri;
KSP, Koridor Pantai Barat Banten		WKP II, III	d) Pusat Pemerintahan dan Permukiman; dan
KSP, Paman Selatan Terpadu		WKP III	e) Pariwisata;
KSP, Perbatasan antar Provinsi dan Kab/Kota di Daerah		WKP I, III	f) Pengembangan Jembatan Selat Sunda
KSN Selat Sunda		WKP II, III	g) Tol Merak-Industri Cilegon
KSN Jabodetabek		WKP I	h) Perluasan pelabuhan Cilegon
KSP, Kawasan Banten Lama		WKP II	i) SPAM Air Minum
KSP, Kawasan Penyangga Adat Baduy		WKP III	j) Industri pelayanan ALKI
KSP, Bendungan Rarian	Teknologi dan Riset	WKP III	k) Industri Pariwisata
KSP, kawasan Rawa Danau dan sekitarnya		WKP II	l) Pengendali banjir
KSN Taman Nasional Ijung Ruan		WKP III	m) Pemataan situ, embung dan waduk
	Sosial Budaya		a) Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya, Hukum Adat, dan Kearifan Lokal
			b) Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
			c) Peningkatan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Teknologi dan Riset		a) Pembangunan SPAM Regional
			b) Pengembangan Irigasi
			c) Pengembangan Energi Alternatif
	Daya Dukung Lingkungan Hidup		a) Penghijauan, Perlindungan tutupan lahan
			b) Pengelolaan Kearifanragaman Hayati
			c) Industri pariwisata
			d) Industri Perikanan

KAWASAN STRATEGIS	PRIORITAS PERTUMBUHAN	WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN	INDEKSI PROGRAM STRATEGIS
KSNT Teluk Banten	Hankam	WKP II	
KSNT Tanjung Lingsung			
KSN Pulau Terisol dan Terluar		WKP III	a) Pengembangan pelayaran; b) Industri perikanan; c) Industri pariwisata.

Sumber: RTM Provinsi Banten 2023-2043 (Disalah oleh Bappenas)

2.7.7 ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN PROVINSI BANTEN DALAM RPJPN TAHUN 2025-2045

Wilayah Jawa termasuk di dalamnya Provinsi Banten diarahkan menjadi wilayah untuk mendukung **“Megalopolis yang Unggul, Inovatif dan Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”**, melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan SDM berdaya saing global, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T;
- Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis riset dan inovasi, serta kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan;
- Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan *geopark* termasuk Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berkelanjutan;
- Pengembangan multi infrastruktur dan *maritime backbone* dan *global/major port* guna menurunkan *logistic* dan *production cost*, menginterkoneksi antar kawasan strategis, pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar; dan
- Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Ada beberapa poin isu dan potensi yang menjadi fokus untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan, beberapa potensi pengembangan Jawa termasuk di dalamnya Provinsi Banten yang memiliki keunggulan yaitu:

- Berbatasan langsung dengan Ahir Luar Kepulauan Indonesia (ALKI) I;
- Telah menerapkan rintisan *smart city*, *creative financing*, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif; dan
- Banyak perguruan tinggi negeri berkualitas baik.

Adapun beberapa isu wilayah Jawa termasuk di dalamnya Provinsi Banten pada sarana dan prasarana adalah:

- Produktivitas di perkotaan rendah akibat desain dan tata kelola;
- Pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif;
- Masih tingginya permasalahan pertanahan dan masih sangat terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- Tingginya risiko bencana dan masih lemahnya tata kelola kebencanaan;
- Desentralisasi dan otonomi daerah dengan tata kelola yang lemah dan ketergantungan kepada dana transfer pusat; dan
- Belum optimalnya integrasi konektivitas domestik dan global dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan Analisis *Growth Diagnostics* per provinsi di Wilayah Jawa, hambatan utama pertumbuhan ekonomi (*the most binding constraints*) di tiap provinsi di Wilayah Jawa termasuk di dalamnya Provinsi Banten sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.79
Kinerja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2023

NO	INDIKATOR	NASIONAL	BANTEN	DKI JKT	JABAR	JATENG	DIY	JATIM
Bidang Ekonomi								
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,06	4,81	4,98	5,00	4,98	5,07	4,95
Bidang Sosial								
2	TPT	5,32	7,52	6,33	7,44	5,13	3,60	4,88
Bidang Kesehatan								
3	Umrat Harapan Hidup (UHH)	73,93	74,77	75,81	74,91	74,69	75,18	74,87
Bidang Pendidikan								
4	Harapan Lama Sekolah	13,15	13,09	13,33	12,68	12,85	15,66	13,38
	Angka Partisipasi Murni	62,53	60,42	60,81	59,01	61,46	76,37	62,59
Bidang Sarana dan Prasarana								
5	Tampungan Per kapita (m ³ /kapita)	57,53	0,81	0,00	133,3	39,49	0,00	18,43

NO	INDIKATOR	NASIONAL	BANTEN	DKI JKT	JABAR	JATENG	DIY	JATIM
6	Air minum jaringan perpipaan	19,47	8,35	35,01	11,85	30,77	17,03	19,62
7	Poral kapasitas pembiayngk listrik terburukan (satrik)	15,47	0,16	0,22	34,06	5,60	0,00	4,53
Bidang Tata Kriola								
8	Indeks Integrinas	70,97	69,09	79,96	69,60	77,91	77,33	75,33
Bidang Lingkungan Hidup								
9	Indeks Risiko Bencana	132,25	132,31	61,31	123,16	109,61	108,15	118,61

Sumber: SPD Provinsi Banten, 2024 (Dolah oleh Bappeda)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan dapat dilihat dari gap antara target dalam dokumen perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Pembangunan akan dinilai mengalami permasalahan ketika realisasi capaian tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dalam dokumen perencanaan jangka panjang, target pembangunan lebih diarahkan kepada ukuran nilai yang bersifat makro sebagai proksi mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat seperti halnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, dan Derajat Ketimpangan (Rasio Gini).

Penentuan permasalahan pembangunan juga dapat dilakukan berdasarkan komparasi capaian dengan daerah lainnya sebagai bagian dari instrumen pengukuran kinerja. Dengan instrumen ini, kinerja pemerintahan tidak sebatas dinilai dari pencapaian target indikator pembangunan namun lebih jauh dilakukan dengan membandingkannya dengan daerah lainnya atau pun rata-rata capaian di tingkat nasional.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA YANG BELUM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

3.1.1.1 KUALITAS PENDIDIKAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat memberikan gambaran terhadap kualitas pendidikan di suatu daerah. Pada Tahun 2023 capaian IPM di Provinsi Banten sebesar 73,87 (berdasarkan SP UHH 2010) atau 75,77 (berdasarkan long form SP UHH 2020) merupakan termasuk 10 (sepuluh) besar tertinggi secara nasional dengan rata-rata sebesar 73,55, namun demikian capaian Provinsi Banten masih di bawah capaian rata-rata provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 76,43, yaitu peringkat keempat di bawah DKI Jakarta sebesar 82,46.

Tahun 2023 umur 25 tahun ke atas nilai rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten masih rendah sebesar 9,15 tahun, pada kelompok penduduk umur 15 tahun ke atas nilai rata-rata lama sekolah sebesar 9,48, lebih tinggi daripada nilai rata-rata nasional sebesar 9,13 tahun. Namun jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 9,56 masih

lebih rendah, berada di urutan keempat di bawah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 10,16, DKI Jakarta sebesar 11,42 dan Bali sebesar 9,74.

Capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum dapat terwujud walaupun setiap tahunnya nilai harapan lama sekolah di masing-masing kabupaten/kota sudah melebihi 12 tahun yaitu sebesar 13,09 tahun. Lebih jauh daripada itu nilai ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 13,15 tahun dan nilai provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 13,51 tahun. Capaian Provinsi Banten merupakan capaian kinerja terendah ketiga setelah Jawa Barat sebesar 12,68 tahun dan Jawa Tengah sebesar 12,85 tahun, sementara tertinggi yaitu Provinsi Bali sebesar 13,58 tahun dan Provinsi Jawa Timur sebesar 13,38 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan faktor ekonomi (Ustama, 2009). Tahun 2023 sejalan masih adanya pekerja di Provinsi Banten yang berusia 10-17 tahun sebanyak 1,85 persen serta rendahnya angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/ sederajat menjadi yang terendah kesembilan di nasional.

Pada Tahun 2023, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan utama di bidang keahlian menurut pendidikan menengah dan tinggi yang ditamatkan di Provinsi Banten masih rendah sebesar 51,08 persen dari jumlah angkatan kerja golongan tersebut sebanyak 5,51 juta penduduk.

Berdasarkan data Kemendikbudristek RI terkait pengukuran indikator kinerja urusan pendidikan, bahwa hasil pengukuran kualitas pendidikan di Provinsi Banten sejak Tahun 2021-2023 terhadap indikator persentase satuan pendidikan maupun peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional baik literasi dan numerasi mengalami peningkatan.

Pada indikator satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca Tahun 2023 sebesar 29,68 persen, yang mana meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 15,83 persen dan Tahun 2022 sebesar 21,35 persen. Lebih jauh daripada itu untuk indikator yang sama pada aspek numerasi Tahun 2023 sebesar 21,02 persen, yang juga meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 2,90 persen dan Tahun 2022 sebesar 8,03 persen.

Hasil pembelajaran peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Tahun 2023 sebesar 52,16 persen, meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 27,69 persen dan Tahun 2022 sebesar 36,47 persen. Untuk indikator yang sama pada aspek literasi membaca Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 58,56 persen meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 45,81 persen dan Tahun 2022 sebesar 50,88 persen. Peningkatan kualitas hasil pembelajaran numerasi dan literasi membaca pada tingkatan satuan pendidikan dan capaian peserta didik masih dalam kategori belum cakap dan belum mencapai kompetensi minimum tingkat nasional.

Pada aspek literasi jika dilihat dari nilai rerata capaian pendidikan menengah umum SMA/SMK di Provinsi Banten yaitu sebesar 14,22 di Tahun 2023, sedangkan aspek numerasi sebesar 19,21. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembelajaran masih berkategori sangat rendah dan angka melek huruf yang belum mencapai 100 persen. Permasalahan pendidikan lainnya adalah angka lulusan di jenjang SMA/SMK mengalami penurunan dari Tahun 2018 hingga 2021.

Selain permasalahan terjadi pada peserta didik, juga menysasar pada tenaga pendidik. Kondisi yang terjadi yaitu persentase guru yang tersertifikasi di Provinsi Banten masih belum mencapai 50 persen pada semua jenjang pendidikan dan di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, guru di Provinsi Banten yang memenuhi kualifikasi akademik (minimal S1 maupun diploma IV) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen belum mencapai 100 persen pada semua jenjang pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

3.1.1.2. DERAJAT KESEHATAN

Sektor kesehatan yang mendukung IPM yaitu pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH), usia harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Capaian Tahun 2022 terhadap UHH di Provinsi Banten yaitu sebesar 70,39, nilai ini merupakan paling kecil di Pulau Jawa. Kemudian pada Tahun 2023, UHH di Provinsi Banten naik sebesar 74,77 dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPM sebesar 0,69 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian nilai ini masih di bawah Provinsi DKI Jakarta sebesar 75,81 dan DI Yogyakarta sebesar 75,18.

Faktor rendahnya AHH di Provinsi Banten ini tidak terlepas dari masih tingginya kejadian kematian ibu dan bayi, berdasarkan data profil

kesehatan Indonesia pada Tahun 2019-2023 jumlah kematian ibu di Provinsi Banten merupakan terbanyak keempat secara nasional. Tahun 2023 kematian ibu di Provinsi Banten paling banyak disebabkan perdarahan (12 kasus), hipertensi dalam kehamilan (20 kasus), dan lainnya (144 kasus), kondisi ini terjadi karena cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin belum mencapai 100 persen. Untuk aspek angka kematian bayi menduduki peringkat 4 tertinggi secara nasional, kematian bayi paling banyak terjadi pada rentang usia 0-28 hari (neonatal). Penyebab kematian neonatal (0-28 hari) dengan temuan akibat BBLR (Berat Badan Lahir Rendah kurang dari 2.500 gram) sebanyak 3, asfiksia 10, belum diketahui 179, dan lainnya 1.123 kasus.

Banyaknya kasus BBLR yang dapat menyebabkan kematian pada bayi adalah kondisi ibu hamil yang menderita anemia. Selain menyebabkan kematian pada bayi, permasalahan BBLR akibat kondisi gizi buruk dan gizi kurang yang menyebabkan bayi mengalami kondisi stunting. Permasalahan balita gizi buruk di Provinsi Banten berdasarkan data profil kesehatan Indonesia Tahun 2021 merupakan tertinggi keempat secara nasional dan pada Tahun 2022 termasuk dalam 10 besar provinsi dengan persentase balita gizi buruk. Status gizi buruk di Provinsi Banten pada Tahun 2023 sebesar 0,7 persen, turun dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 0,9 persen, namun demikian status tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 0,5 persen dan merupakan nilai tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur yaitu sebesar 0,9 persen.

Prevalensi *stunting* di Provinsi Banten pada Tahun 2022 lebih rendah dari nasional, namun pada Tahun 2023 mengalami kenaikan melebihi nilai prevalensi secara nasional (terkecuali di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon). Permasalahan *stunting* merupakan permasalahan multidimensi, dimulai dari pemenuhan gizi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan penting untuk diperhatikan karena mempengaruhi terjadinya *stunting* pada anak usia 2-5 tahun (Sulistianingsih dan Sari, 2018). Sejak Tahun 2017-2020, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Banten masih rendah, cenderung di bawah capaian nasional.

Selain itu Provinsi Banten juga masih menghadapi beberapa masalah penyakit menular, diantaranya angka notifikasi semua kasus tuberkulosis (TBC) cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2014-2021. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang menyebar melalui udara, cakupan

penemuan kasus TBC lebih tinggi dibandingkan angka secara nasional berdasarkan data profil kesehatan Indonesia Tahun 2021-2023. Tahun 2023, cakupan penemuan kasus TBC yang terjangkau oleh program secara nasional sebesar 77,5 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,7 persen. Cakupan penemuan di Provinsi Banten sebesar 107 persen lebih tinggi secara nasional dan bersama DKI Jakarta menjadi tertinggi ketiga di Pulau Jawa-Bali setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 116 persen dan Jawa Tengah sebesar 112 persen.

Jumlah penduduk untuk semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan diantara 100.000 penduduk di Provinsi Banten sejak Tahun 2017-2022 cenderung meningkat. Pada Tahun 2022 angka notifikasi di Provinsi Banten sebesar 317,9 lebih tinggi dari nasional sebesar 263,5. Pada Tahun 2023 angka notifikasi di Provinsi Banten sebesar 380, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan masih lebih besar dari nasional sebesar 298,8. Hal ini menjadikan Provinsi Banten berada pada posisi tertinggi ketiga di Pulau Jawa-Bali setelah DKI Jakarta sebesar 538 dan Jawa Barat sebesar 403.

Permasalahan jaminan kesehatan untuk mempertahankan kondisi kesehatan masih perlu ditingkatkan, walaupun sejak Tahun 2021-2023 berdasarkan data profil kesehatan Banten, cakupan kepemilikan jaminan kesehatan di Provinsi Banten cenderung meningkat. Rata-rata kepemilikan jaminan di Provinsi Banten di Tahun 2021 sebesar 66,3 persen, pada Tahun 2022 sebesar 70,14 persen, dan pada Tahun 2023 sebesar 72,46 persen (dengan kepemilikan jaminan yang masih rendah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak).

3.1.1.3 PERLINDUNGAN SOSIAL

Komponen lainnya terhadap peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Banten adalah standar hidup layak yang diukur dengan nilai pengeluaran per kapita yang disetarakan, tingkat kemiskinan, kepesertaan jaminan sosial, dan angkatan kerja bagi penyandang disabilitas. Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Tahun 2023 sebesar 72,45 persen, menunjukkan peranan garis kemiskinan makanan memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan.

Proporsi penduduk miskin yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) rata-rata lebih dari 48 persen, bahkan pada Tahun 2021 lebih dari 50 persen. Pada periode ini juga

persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, Tahun 2017 sebesar 17,10 persen dan 4 tahun setelahnya tepatnya pada Tahun 2021 menjadi sebesar 13,97 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peralihan pekerjaan penduduk miskin dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.

Salah satu upaya untuk menekan jumlah kemiskinan yaitu melalui akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penduduk usia angkatan kerja. Tahun 2021 di Indonesia jumlah penduduk usia angkatan kerja yang memiliki kepesertaan aktif jaminan sosial tenaga kerja sebesar 30,6 juta mengalami peningkatan sebesar 41,5 juta atau sebesar 28,1 persen dari 147,7 juta angkatan kerja di Tahun 2023. Di Tahun 2021 jumlah kepemilikan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten yaitu sebesar 29,4 persen dan meningkat menjadi 44,1 persen di Tahun 2023, angka tersebut tertinggi kedua di Indonesia di bawah DKI Jakarta dengan jumlah penduduk usia angkatan kerja yang memiliki kepesertaan aktif jaminan sosial tenaga kerja sebesar 138,2 persen.

Pada sektor tenaga kerja untuk penyandang disabilitas di Provinsi Banten masih terdapat permasalahan, sebanyak 22.027 orang penyandang disabilitas atau 0,18 persen dari total penduduk di Provinsi Banten (BPS, 2024) hanya 1.230 orang atau setara dengan 5,6 persen penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (786 orang pria dan 444 orang wanita) berdasarkan data sejak Tahun 2018-2024 yang melapor di aplikasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP), sementara itu sisanya 94,4 persen tidak bekerja di sektor formal.

3.1.2 PEREKONOMIAN YANG MELAMBAT DAN BELUM MERATA

3.1.2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara umum ekonomi di Provinsi Banten pada Tahun 2023 terus membaik, hanya saja angka pertumbuhan ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten biasanya selalu di atas rata-rata nasional, namun pada 2 tahun terakhir terus berada di bawah rata-rata nasional. Pada Tahun 2023 ekonomi di Provinsi Banten hanya tumbuh 4,81 persen, sementara nasional tumbuh 5,01 persen. Kondisi terakhir, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten masih di bawah rata-rata pertumbuhan se-Pulau Jawa dan pertumbuhan nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh komponen permintaan ekspor luar negeri di Provinsi Banten mengalami penurunan akibat adanya pelemahan ekonomi global.

Adapun impor luar negeri juga menurun meskipun dengan besaran yang lebih rendah dari penurunan ekspor.

Sementara itu meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta, serta naiknya permintaan nasional dari sisi *supply* direspon oleh berbagai perusahaan atau unit usaha yang ada. Respon yang diberikan adalah dengan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkannya.

Aktivitas ekonomi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, yakni dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), selama Tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi seiring dengan naiknya mobilitas penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan produksi usaha berskala menengah besar.

Struktur ekonomi di Provinsi Banten pada Tahun 2023 masih tetap ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan komponen pembentukan modal tetap bruto. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto, dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi pendorong sumber utama pertumbuhan ekonomi. Sementara komponen pengeluaran konsumsi LNPKRT sangat kecil sekali, sehingga menjadi terabaikan.

Berdasarkan data BPS (2024) bahwa struktur PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Banten pada Tahun 2023 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,25 persen, disusul oleh reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,41 persen, dan kemudian konstruksi sebesar 11,75 persen.

Pertumbuhan PDRB pada Tahun 2023 terjadi pada sektor jasa lainnya sebesar 9,38 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 12,44 persen yang didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan di Provinsi Banten. Laporan kunjungan wisatawan mancanegara menurut data dari Kemenparekraf RI yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2020-2022 cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 jumlahnya sebesar 119.063 jiwa atau 7,64 persen, secara nasional urutan pertama di Pulau Jawa-Bali, namun pada Tahun 2022 sebesar 124.803 jiwa atau 2,12 persen urutan kedua dan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Bali sebesar 2.154.000 jiwa atau 36,58 persen.

Sektor ekonomi kreatif di Provinsi Banten terus mengalami perkembangan pesat. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten pada Tahun 2020, kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) di Provinsi Banten mencapai 5,8 persen pada 2014 dan meningkat menjadi 10 persen pada 2019. Artinya dalam kurung waktu 5 tahun terjadi pertumbuhan hingga 100 persen. Total pendapatan di Provinsi Banten yang bersumber dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif pada Tahun 2019 mencapai Rp58 triliun sehingga secara aktivitas per provinsi menduduki peringkat tiga setelah Jawa Barat (Rp85,9 triliun) dan DKI Jakarta (Rp80,5 triliun). Kondisi ini belum seluruhnya teroptimalkan karena Pemerintah Provinsi Banten belum memetakan dan memanfaatkan secara strategis potensi dan prioritas industri kreatif skala mikro, kecil dan menengah khususnya tiga sektor dominan ekonomi kreatif yaitu (kriya, fesyen, dan kuliner) untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas perekonomian di Provinsi Banten.

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian di Provinsi Banten belum optimal, karena masih di dominasi oleh usaha mikro. Usaha Kecil dan Menengah diharapkan akan lebih mudah mengakses pembiayaan keuangan. Pada sektor perkembangan proporsi industri kecil berdasarkan data BPS sejak Tahun 2017-2022 di Provinsi Banten relatif stabil namun memiliki kecenderungan menurun. Pada Tahun 2017, proporsi industri kecil terhadap seluruh industri yang ada di Provinsi Banten baik skala besar maupun sedang sebesar 2,65 persen dan mengalami kenaikan pada Tahun 2018 sebesar 3,1 persen. Di Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,04 persen yang disebabkan adanya potensi deindustrialisasi akibat kenaikan upah minimum regional.

Berdasarkan analisis dari data BPS, rasio kewirausahaan di Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 2,01 persen meningkat pada Tahun 2023 sebesar 2,5 persen, namun masih paling kecil jika dibandingkan provinsi di Pulau Jawa dan di bawah rata-rata nasional sebesar 3,04 persen. Nilai rasio tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,43 persen, disusul Di Yogyakarta dan Jawa Timur berturut-turut sebesar 3,23 persen dan 3,06 persen.

Pada sektor usaha koperasi di Provinsi Banten berdasarkan analisis data BPS pada Tahun 2023 terdapat sebanyak 4.449 unit koperasi aktif dengan volume usaha mencapai Rp8,160 triliun, hal ini meningkat dibandingkan pada Tahun 2022 sebanyak 4.462 unit koperasi aktif dengan volume usaha sebesar Rp2,917 triliun. Perkembangannya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Provinsi Banten sejak Tahun 2019-2023 cenderung stabil, namun pada Tahun 2023 sebesar 1,00 persen mengalami

kenaikan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 0,39 persen, Tahun 2021 sebesar 0,01 persen dan Tahun 2020 sebesar 0,77 persen.

Return on Asset (ROA) BUMD di Provinsi Banten belum optimal, ROA ini dijadikan dasar indikator kinerja BUMD dimasa depan. ROA atau secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. ROA yang baik berada pada kisaran 5-10 persen. Sebagai gambaran umum kondisi ROA BUMD di Provinsi Banten bisa dilihat dari ROA Bank Banten pada Tahun 2022 bahkan minus -3,31 persen, yang artinya Bank Banten belum memiliki kemampuan yang baik dalam memperoleh laba melalui aset yang dimiliki.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten selama 5 tahun terakhir sejak Tahun 2017-2023 pun demikian pada Tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan. Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran di Provinsi Banten sebesar 7,52 persen turun dibandingkan Tahun 2022 sebesar 8,53 persen, namun masih lebih besar jika dibandingkan secara nasional di Tahun 2023 sebesar 5,32 persen dan data terakhir berada pada posisi 7,02 persen di Februari 2024. Pada kondisi ketenagakerjaan perempuan dan laki-laki di Provinsi Banten sejak Tahun 2018-2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung terus meningkat. Tahun 2023 nilai TPAK perempuan sebesar 46,16 persen, meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 44,30 persen. Namun demikian nilai TPAK di Provinsi Banten masih di bawah nilai rata-rata secara nasional sebesar 54,52 persen dan paling kecil di Pulau Jawa-Bali setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 47,98 persen.

Di Provinsi Banten kondisi pekerja paling banyak berpendidikan rendah sebesar 35,83 persen (SD kebawah), SMP sebesar 17,11 persen, dan SMA sebesar 20,51 persen. Data Sakernas (2023) menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja sebagian besar adalah lulusan SMA sebanyak 2.048.298 orang (37,13 persen), sedangkan lulusan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 769.733 orang (13,95 persen). Jika ditelaah dari sektor lapangan pekerjaan utamanya, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan jumlah pekerja terbanyak yaitu 1.186.369 orang (21,51 persen), diikuti oleh industri pengolahan dengan pekerja sebanyak 1.158.479 orang (21 persen) dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 662.474 orang (12,01 persen).

Kondisi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Provinsi Banten berdasarkan pada Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Riset Nasional sebesar 3,62, yang mana lebih besar dari nilai secara nasional sebesar 3,26 dan menempatkan Provinsi Banten pada posisi 5 (lima) besar secara nasional setelah DKI Jakarta. Indeks ekosistem pada pilar pasar produk, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, dan sistem keuangan yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pembangunan di Provinsi Banten.

Perubahan iklim terhadap pembangunan ekonomi banyak terabaikan sehingga berakhir pada kerusakan lingkungan. Berdasarkan data Bappenas, perkembangan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim Tahun 2020 sebesar 26 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 27,4 persen periode *Nationally Determined Contribution* (NDC) sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, prinsip perhitungan skenario *net zero emission* (NZE) diantaranya tetap mengejar penurunan emisi GRK hingga Tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri (target NDC). Komitmen dan kolaborasi pembangunan NZE diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari krisis perubahan iklim.

Berdasarkan data pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Banten Tahun 2022-2050, dukungan pada penurunan bahan bakar fosil dan menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca. Pemerintah Indonesia telah menargetkan peningkatan porsi EBT (energi baru terbarukan) dalam bauran energi primer menjadi 23 persen pada Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total primer di Provinsi Banten pada Tahun 2021 terhadap jenis energi dari minyak bumi sebesar 50,1 persen, gas bumi 19 persen, batubara 24,9 persen, dan energi baru terbarukan sebesar 5,9 persen.

Pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung dan membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi tata kelola pemerintahan, operasional bisnis, serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. Berdasarkan data BPS, capaian nilai Indeks Pembangunan TIK pada Tahun 2022 di Provinsi Banten sebesar 6,29 (kategori sedang). Kategori sub indeks akses dan infrastruktur TIK sebesar 6,7, penggunaan TIK 6,01, dan keahlian TIK 6,02. Perlu adanya peningkatan pada sub indeks

penggunaan TIK yaitu persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan *fixed broadband* internet per 100 penduduk, dan pelanggan *mobile broadband* internet aktif per 100 penduduk, serta sub indeks keahlian yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder (SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat), serta angka partisipasi kasar tersier (D1 sampai dengan S1).

3.1.2.2 PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perdagangan luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian di Provinsi Banten yang banyak dipengaruhi oleh perekonomian global. Kondisi terakhir perekonomian global masih mengalami pelemahan. Kondisi yang demikian setidaknya terlihat dalam *World Economic Outlook Update* di Juli 2023, dimana ekonomi global Tahun 2023 oleh IMF diproyeksikan hanya tumbuh mencapai 3,0 persen. Berarti, lebih rendah dibandingkan angka proyeksi Tahun 2022 yang mencapai 3,5 persen (IMF-*World Economic Outlook*-Juli 2023, www.imf.org). Kondisi ini berdampak pada permintaan luar negeri terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan di Provinsi Banten juga mengalami penurunan.

Menurut data BPS Provinsi Banten, ekspor barang dan jasa di Provinsi Banten sejak 4 tahun terakhir sejak Tahun 2020-2023 kontribusinya didominasi oleh sektor non migas yang cenderung stabil dengan nilai diatas 98-99,97 persen, sementara sisanya dari sektor migas. Proporsi nilai ekspor di Provinsi Banten terhadap PDRB berfluktuatif, pada Tahun 2023 sebesar 23,45 persen turun dari Tahun 2022 sebesar 29,59 persen, Tahun 2021 sebesar 31,86 persen, dan Tahun 2020 sebesar 26,8 persen.

Menurunnya ekspor di Provinsi Banten disebabkan oleh turunnya ekspor ke negara-negara mitra dagang utama, khususnya ASEAN dan Australia. Dengan penurunannya itu, setidaknya dapat diketahui dari ekspor non migas untuk kedua negara mitra tersebut, yang masing-masing turun sebanyak US\$33,15 juta dan US\$25,70 juta. Sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa bertambah US\$32,31 juta hingga menjadi US\$422,24 juta. Begitu juga ekspor ke India meningkat sebesar US\$47,13 juta hingga menjadi US\$185,68 juta.

Sejalan dengan penurunan ekspor, impor luar negeri juga mengalami penurunan. Adapun penurunannya mencapai 8,44 persen, yaitu dari US\$8,95 miliar menjadi US\$8,19 miliar, disebabkan oleh turunnya impor non migas, yang turun 10,86 persen dari US\$7,46 miliar

menjadi US\$6,65 miliar. Jika dilihat menurut penggunaan barang, menurunnya impor hanya terjadi pada impor barang untuk keperluan bahan baku/penolong dan barang modal. Sementara itu selama Tahun 2023 impor terbesar pada barang konsumsi yang berasal dari golongan bahan baku/penolong. Pelemahan impor bahan baku dan barang modal yang berimbas pada penurunan ekspor mengindikasikan pelemahan kinerja industri di Provinsi Banten, khususnya industri yang berhubungan langsung dengan mata rantai industri global.

3.1.2.3 DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah ialah *Gini Ratio* (Rasio Gini). Hasil perhitungan rasio gini berkisar antara nol dan satu. Meskipun banyak indikator yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19, pada Tahun 2023 rasio gini di Provinsi Banten mencapai 0,368 masih lebih baik dibandingkan ketimpangan nasional yang mencapai 0,389. Kinerja ketimpangan yang membaik dapat disebabkan oleh kenaikan pesat pengeluaran per kapita kelompok menengah bawah dan menengah di Provinsi Banten di tengah pandemi COVID-19. Ketimpangan di Provinsi Banten yang membaik di tengah pandemi merupakan kondisi di atas rata-rata karena secara nasional ketimpangan justru meningkat.

Kontribusi PDRB di wilayah metropolitan diharapkan dapat mendukung pembangunan untuk memacu sektor perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia. Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten sebagai bagian wilayah metropolitan Jabodetabekjur telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Sejak Tahun 2016-2023 proporsi PDRB wilayah Tangerang Raya di Provinsi Banten cenderung menurun, proporsi terhadap PDB nasional Tahun 2016 sebesar 2,47 persen stabil sampai Tahun 2019 sebesar 2,49 persen. Namun pada periode Tahun 2023 menurun dengan proporsi sebesar 2,32 persen, wilayah yang memberikan proporsi paling besar yaitu Kota Tangerang sebesar 0,99 persen dan Kabupaten Tangerang sebesar 0,83 persen, sementara yang terkecil adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 0,5 persen.

Rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat, untuk membangun sumber daya manusia kebutuhan akan rumah yang layak huni sangat diperlukan. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak

dan terjangkau di Provinsi Banten sebesar 63,06 persen naik mulai dari Tahun 2018 sebesar 53,3 persen dan Tahun 2022 sebesar 60,98 persen. Nilai tersebut masih sedikit di bawah rata-rata hunian layak huni secara nasional sebesar 63,15 persen dan rata-rata di Pulau Jawa-Bali sebesar 66,52 persen. Berdasarkan hal tersebut pada tahun mendatang kebutuhan rumah tangga terhadap penyediaan dan akses terhadap rumah layak huni masih sangat besar dalam rangka mendukung perekonomian dan sumber daya manusia yang unggul.

Sementara itu perkembangan desa mandiri yang ada di Provinsi Banten cenderung fluktuatif, menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Tahun 2019 memiliki nilai 1,16 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebesar 1,87 persen, namun mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 1,87 persen menjadi 1,68 persen di Tahun 2021.

3.1.3 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BELUM OPTIMAL

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Tata kelola pemerintah diukur dengan capaian skor Indeks Reformasi Birokrasi, dimana era saat ini tidak hanya berfokus pada hal administratif saja namun lebih diarahkan pada kepuasan masyarakat melalui berbagai kolaborasi pelayanan publik, birokrasi dinamis, adaptif, hingga akselerasi terhadap pelaksanaan birokrasi berdampak berbasis digital sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia.

Selain Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), indikator yang lain adalah Indeks Reformasi Hukum (IRH). Pada Tahun 2023 IRH Pemerintah Provinsi Banten mencapai nilai sebesar 97,64 poin, meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2022 yang hanya sebesar 77,2. Hasil penilaian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menduduki urutan ke-2 di bawah Jawa Barat, sedangkan ke-3 diduduki Provinsi Bali, artinya semua regulasi yang diproduksi oleh Pemerintah Provinsi Banten telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi Indeks Reformasi Hukum. Perlu peningkatan terutama dalam aspek area pemenuhan, hasil antara dan reform serta peningkatan pada komponen nilai. Upaya untuk meningkatkan reformasi birokrasi bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik berkualitas *good and clean governance* serta layanan berbasis *e-government*.

Pada kategori nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sejak Tahun 2021 sebesar 3,15 naik lambat pada Tahun 2022 sebesar 3,33, kemudian pada Tahun 2023 predikat SPBE di Provinsi Banten berkategori baik dengan nilai sebesar 3,39. Perlu kerja keras untuk menaikkan peringkat menjadi sangat baik (di atas 3,39). Pada aspek PEKPPP rerata Tahun 2023 sebesar 3,74 berpredikat baik yang merupakan penilaian dari perangkat daerah Samsat Cikande, Dinas Sosial, dan RSUD Banten. Masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan nilai sangat baik.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 (enam) aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Berdasarkan data dari Kementerian PAN dan RB, IPP Provinsi Banten Tahun 2021 nilainya kategori B, sama dengan nilai rata-rata IPP nasional yaitu 3,79 atau masih dalam kategori B. Pada aspek sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN Tahun 2021 mendapatkan predikat Baik, kemudian aspek Indeks Integritas, pada Tahun 2023 sebesar 69,09 yang merupakan nilai yang paling kecil di Pulau Jawa dengan Provinsi DI. Yogyakarta sebagai provinsi dengan nilai tertinggi sebesar 77,33, dan secara nasional masih lebih kecil dengan nilai sebesar 70,97.

Pada Tahun 2022 nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Banten sebesar 71,01 naik pada Tahun 2023 menjadi sebesar 77,01. Pada Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) berdasarkan Survei Penilaian Integritas eksternal oleh KPK Tahun 2021 sebesar 64,18 naik pada Tahun 2023 menjadi sebesar 85,50, kemudian dilihat dari capaian AKIP pada 5 (lima) tahun terakhir sejak Tahun 2018-2023 berkategori "B" masih di bawah rata-rata nilai AKIP provinsi lain di Pulau Jawa. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut dapat terlihat perlunya perbaikan dan peningkatan tata kelola Pemerintah Provinsi Banten.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan disebabkan oleh masih perlunya adaptasi dalam merespon terhadap dinamika perubahan global dan terhadap harapan-harapan masyarakat yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga diperlukan peningkatan integritas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.1.4 KEAMANAN WILAYAH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO YANG BELUM OPTIMAL

Iklim investasi yang baik akan mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Faktor keamanan, ketertiban, dan

demokrasi yang baik menciptakan stabilitas daerah dan menciptakan kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya. Kesadaran pemerintah dan masyarakat menciptakan stabilitas keamanan dan kehidupan berdemokrasi yang sesuai etika dan ketentuan yang berlaku masih menjadi permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Kondisi ini juga dipicu oleh belum optimalnya kebijakan dan kapasitas fiskal pemerintah yang terlihat dari rasio pajak, kemandirian keuangan, pengendalian inflasi, dan kebijakan lainnya terkait intermediasi sektor dan inklusi keuangan. Kondisi lainnya untuk menunjang stabilitas ekonomi makro di Provinsi Banten adalah kondisi ketahanan daerah dan kerja sama berbagai pihak berkepentingan masih lemah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

3.1.4.1 KEAMANAN WILAYAH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Kondisi keamanan dan ketertiban jika dilihat dari angka kriminalitas di Provinsi Banten pada Tahun 2022 sebesar 1.009 kasus turun sebesar 67,04 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 2.944. Kemudian persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 51,15 persen lebih kecil dibandingkan Tahun 2021 sebesar 76,09 persen, diantara banyak kasus tindak pidana di Provinsi Banten. Namun demikian risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 penduduk) pada Tahun 2021 sebesar 27, naik jika dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar 42.

Permasalahan demokrasi di Provinsi Banten adalah masih belum idealnya kondisi demokrasi yang terlihat dari masih berfluktuasinya nilai Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 78,75, trennya meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,93, namun demikian tren IDI di Provinsi Banten sejak Tahun 2018-2022 relatif berfluktuatif. Pada Tahun 2019 sebesar 72,6 turun dibandingkan Tahun 2018 sebesar 73,78, kemudian naik pada Tahun 2020 sebesar 75,82. Tahun 2022 mencapai angka 78,75 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,93, yang masih termasuk dalam kategori "sedang".

Pada aspek pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022 dari 419 kabupaten/kota sebanyak 170 kategori peduli HAM, 89 cukup peduli, 85 mulai peduli, 75 nilai tidak memenuhi kriteria, dan 95 tidak mengirim data. Angka ini berfluktuasi dibanding pada Tahun 2020 angka peduli HAM

sebesar 259 dan pada Tahun 2019 sebesar 272. Terdapat rekomendasi pembangunan HAM secara umum meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan sehat dan baik. Pada Tahun 2023, 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten telah memenuhi kriteria peduli terhadap HAM dan menerima penghargaan kabupaten/kota peduli HAM (KKP HAM) di Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM naik dari Tahun 2022 sebanyak 5 kabupaten/kota.

3.1.4.2 STABILITAS EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten relatif stabil, terindikasi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade berada dalam kisaran 4-6 persen, kecuali saat terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian di Provinsi Banten berkontraksi sebesar 3,39 persen. Namun demikian, fenomena penurunan kontribusi sektor industri ke PDRB menuju 30 persen, ini menjadi sinyal untuk melakukan langkah-langkah antisipatif khususnya untuk meningkatkan daya saing sektor industri di Provinsi Banten terlebih dengan semakin kompetitifnya sektor industri di China, negara asia tenggara, dan bahkan Provinsi Jawa Tengah menjadi kompetitor dalam level nasional. Kondisi perekonomian global yang tidak menentu juga menjadi ancaman untuk menyiapkan pasar baru bagi produk ekspor dari industri di Provinsi Banten.

Stabilitas ekonomi juga ditopang oleh stabilitas inflasi, dilihat dari aspek inflasi masih diperlukan upaya dalam menstabilkan komponen pengeluaran dan permintaan dalam rangka menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Tingkat inflasi relatif stabil di Provinsi Banten, yang pernah menyentuh dua digit pada era Tahun 2000-an, namun pada periode pasca COVID-19 inflasi relatif terkendali pada kisaran 3 persen.

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Kanwil Perbendaharaan Provinsi Banten, rasio pajak di Provinsi Banten terhadap PDRB yang merupakan kinerja penerimaan pajak daerah untuk membiayai keperluan daerah melalui sumber dayanya sendiri terus mengalami peningkatan. Tahun 2017-2022 mengalami kenaikan pada Tahun 2021 sebesar 1,95 persen dan terus naik menjadi 2,11 persen pada Tahun 2022, walaupun tidak signifikan menunjukkan kinerja pajak yang cukup baik di Provinsi Banten.

Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Banten Bulan Februari, Agustus dan November 2023

secara nominal, penyaluran kredit pada Tahun 2022 menjadikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten sampai dengan 2022 sebesar Rp253,77 triliun atau tumbuh sebesar 4,61 persen (y-on-y). Aset perbankan di Provinsi Banten pada Tahun 2022 tercatat sebesar Rp287,10 triliun atau tumbuh sebesar 4,92 persen (y-on-y). Penyaluran kredit pada Triwulan II-2023 secara nominal menjadikan DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten sampai dengan Triwulan II-2023 sebesar Rp252,15 triliun atau tumbuh sebesar 0,24 persen (y-on-y), sedangkan aset perbankan di Provinsi Banten pada Triwulan II-2023 tercatat sebesar Rp288,91 triliun atau tumbuh sebesar 1,82 persen (y-on-y).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten, inklusi keuangan di Provinsi Banten Tahun 2019 sebesar 78,27 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inklusi keuangan secara nasional sebesar 75,64 persen, dan lebih kecil dari DKI Jakarta sebesar 92,67. Sementara Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 85,71 lebih besar dibanding nasional sebesar 84,97 persen, namun lebih kecil jika dibandingkan dengan DKI Jakarta sebesar 96,62 persen dan posisi tersebut menempatkan Provinsi Banten berada di posisi ke-17 secara nasional.

Kemudian dari sisi pengelolaan dana pensiun, berdasarkan Buku Statistik Dana Pensiun OJK, sejak Tahun 2020-2022 rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB di Provinsi Banten terus mengalami penurunan, di Tahun 2020 sebesar 0,89 persen turun menjadi 0,75 persen pada Tahun 2022. Penurunan disebabkan rasio total aset terhadap peserta program dana pensiun semakin berkurang dan dilain sisi kondisi PDRB di Provinsi Banten setiap tahunnya semakin meningkat.

Berdasarkan data OJK nilai transaksi saham tahunan di Provinsi Banten pada Tahun 2022 sebesar 22.395 miliar meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 21.377 miliar, nilai tersebut masih di bawah transaksi tahunan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 249.768 miliar yang merupakan tertinggi di Indonesia, kemudian disusul Provinsi Jawa Barat sebesar 37.206 miliar dan Jawa Timur sebesar 30.173 miliar. Kontribusi transaksi di Provinsi Banten merupakan tertinggi keempat dari seluruh provinsi dari total nilai transaksi tahunan di Indonesia sebesar 404.608 miliar.

3.1.4.3 KETAHANAN WILAYAH DAN KERJA SAMA DAERAH

Penguatan ketahanan wilayah di Provinsi Banten dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, hukum, pertahanan dan

keamanan menjadi landasan untuk memperkuat kesiapan menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan pembangunan. Peningkatan ketahanan daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan merupakan upaya membentuk landasan kehidupan sosial masyarakat dalam menjaga pembangunan yang berkelanjutan. Banyak hal yang menjadi tantangan bersama untuk disinergikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan wilayah seperti permasalahan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan perekonomian, sosial, pelestarian lingkungan, keamanan, ketertiban, kerukunan serta berbagai aspek lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun Pemerintah Provinsi Banten masih belum mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri, pihak donor, pihak swasta, maupun antar pemerintah.

Kerja sama amat strategis yang dapat menjadi contoh adalah MoU kerjasama pengendalian Kawasan Jabodetabekpunjur dalam rangka pengendalian dan penanggulangan banjir yang melibatkan berbagai pihak antara Pemerintah dan pemerintah daerah di perbatasan pada Kawasan Jabodetabekpunjur untuk mencapai efektivitas dan efisiensi koordinasi pelaksanaan pengendalian banjir yang sistematis dan terintegrasi. Dalam jangka pendek kerja sama yang dapat mewujudkan ketahanan wilayah terkait dengan pengoptimalan kerja sama dalam kerangka aglomerasi Jabodetabekpunjur pasca pemindahan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Lemhanas, Indeks Agregat Ketahanan Nasional periode November 2023 adalah 2,89 dengan kategori cukup tangguh. Nilai tersebut merupakan agregat dari indeks ketahanan 8 (delapan) gatra yang terdiri dari geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Gatra sosial budaya memiliki nilai terendah dengan kategori kurang tangguh, disamping isu transformasi digital, infrastruktur digital, keamanan siber, dan pertahanan siber dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan siber menuju ekosistem digital Indonesia. Indeks ketahanan wilayah di Provinsi Banten diharapkan mendekati angka 2,98 dengan status tangguh. Berbagai masalah hukum, kemanan dan ketertiban daerah khususnya keamanan wilayah perbatasan wilayah laut, demokrasi, stabilitas ekonomi daerah serta kerja sama daerah masih menjadi pekerjaan untuk diselesaikan berbagai permasalahannya ke depan untuk mencapai keamanan wilayah

yang tangguh dengan kondisi demokrasi yang substansial didukung stabilitas perekonomian.

3.1.5 INKLUSIVITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG BELUM OPTIMAL

Penanganan permasalahan sosial dan budaya merupakan faktor penting dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat untuk menjaga pembangunan ekonomi, melalui peningkatan toleransi kerukunan, pembangunan kebudayaan, kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender menjadi landasan kuat pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Permasalahan pembangunan kualitas keluarga dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Banten Tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Jika menggunakan metadata yang lama sebesar 76,38, meningkat sebesar 3,89 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 72,49. Namun demikian lebih kecil jika dibandingkan kondisi nasional (76,53), mencakup dimensi kualitas legalitas-struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Kemudian jika dilihat menurut provinsi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) di Provinsi Banten lebih tinggi dari Jawa Barat, namun masih lebih kecil dari provinsi lainnya. Jika menggunakan metadata yang baru, Provinsi Banten memiliki capaian sebesar 76,13 (Tahun 2022) dan masih lebih kecil dari angka nasional sebesar 77,38 dan menempati posisi paling rendah dibandingkan nilai rata-rata di Pulau Jawa-Bali sebesar 79,12.

Permasalahan kesetaraan gender di Provinsi Banten berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dilihat dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 0,478 meningkat 0,003 poin dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar 0,475. Meningkatnya IKG dipengaruhi oleh peningkatan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Peningkatan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh meningkatnya indikator perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan indikator perempuan melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF meningkat dari 0,132 menjadi 0,137 di Tahun 2022, sedangkan MHPK20 meningkat dari 0,254 menjadi 0,261 pada Tahun 2022. Peningkatan dimensi tenaga kerja dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki yang meningkat lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Pada Tahun 2022 TPAK laki-laki meningkat dari 80,16 persen menjadi 81,69 persen, sedangkan TPAK perempuan meningkat dari 46,84 persen menjadi 47,17 persen. Se jauh ini Kota Tangerang nilainya sebesar 0,324 dan Kota Tangerang Selatan sebesar 0,170 nilainya paling kecil di Provinsi Banten, hal ini menunjukkan semakin berhasil dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Permasalahan kerukunan umat beragama dapat terlihat berdasarkan data dari Kementerian Agama RI, pada Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Banten pada Tahun 2021 mendapatkan skor 66,11 (berkategori tinggi), namun lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata secara nasional pada tahun yang sama sebesar 72,39 (berkategori tinggi). Provinsi Banten masih berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan nilai sebesar masing-masing 72,20 dan 72,70 dan berada pada posisi diluar 10 besar skor IKUB terbaik. Kerukunan umat beragama harus terus dijaga keutuhannya karena menjadi bagian fondasi penting bagi stabilitas sosial daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan bermaslahat.

Permasalahan kebudayaan terlihat dari Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Banten dari Kemendikbudristek RI sejak Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 nilai IPK sebesar 51,41 lebih kecil jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar 51,43 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai secara nasional pada Tahun 2022 sebesar 55,13. Aspek warisan budaya dan budaya literasi mendapatkan nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nasional, namun dari aspek ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya serta gender masih lebih kecil dari nasional.

3.1.6 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN YANG BELUM BERKELANJUTAN

3.1.6.1 LINGKUNGAN HIDUP

Gambaran kondisi permasalahan dalam bidang lingkungan berupa belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan, penanganan ketahanan iklim dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Saat ini kondisi penggunaan lahan di Provinsi Banten banyak terjadi alih fungsi, perambahan, kebakaran hutan dan belum optimalnya pengelolaan hutan rakyat. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pembangunan dan pengelolaan hutan

kemasyarakatan (HKm, Hutan Desa, Hutan Kota, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat), serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan, maupun *illegal logging*).

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Banten menunjukkan adanya perbaikan disetiap tahunnya, dimana pada Tahun 2023 nilai IKLH mencapai 62,52 yang masuk dalam kategori sedang. Aspek kualitas air dan aspek kualitas tutupan lahan perlu menjadi bahan perhatian, dimana kedua aspek tersebut memiliki nilai yang kecil. Pada Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Banten sebesar 58,93 (berkategori sedang), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 43,13 (berkategori kurang).

Menurut Bappenas, keanekaragaman hayati Indonesia sangat melimpah diantaranya yang telah diidentifikasi di Indonesia hingga Tahun 2022 yaitu 22 jenis ekosistem, 7 ekoregion, 31.902 spesies flora, 81.260 spesies fauna terrestrial, dan 7.841 spesies fauna laut. Diperlukan koordinasi antar seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang telah menjadi bagian penting keterkaitan dengan berbagai isu pembangunan dari segi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.

Rendahnya kualitas air di Provinsi Banten tidak terlepas dari adanya pencemaran air yang bersumber dari berbagai aktivitas ekonomi dan rumah tangga, berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan dampak secara langsung terhadap pencemaran lingkungan diantaranya seperti tumpahan HCL, tumpahan *xylene* dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Pencemaran air juga berdampak pada jumlah air baku yang tersedia, ketersediaan air baku di Provinsi Banten saat ini selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya. Disisi lain, kebutuhan akan air baku terus meningkat akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas industri di Provinsi Banten.

Persoalan sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Provinsi Banten, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dimana jumlah timbulan sampah pada Tahun 2023 mencapai 2.894.628,03 ton/tahun. Jumlah timbulan sampah tersebut akan semakin bertambah disetiap tahunnya seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk dan tanpa adanya upaya-upaya minimasi di Provinsi Banten, pada Tahun 2045 jumlah timbulan sampah diprediksi akan mencapai 3.878.440,40 ton/tahun. Potensi timbulan sampah di

Provinsi Banten paling banyak berada di Wilayah Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang.

Berdasarkan data BPS RI, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Banten, sejak Tahun 2019-2023 kecenderungannya semakin baik dan meningkat. Pada Tahun 2019 rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 81,01 persen dan terus meningkat menjadi 86,41 persen pada Tahun 2023. Namun demikian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berada pada kondisi yang masih rendah dan di bawah rata-rata provinsi. Berdasarkan data Susenas (2024) sejak Tahun 2019-2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Banten kecenderungannya stabil. Pada Tahun 2019 rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 91,64 persen terus meningkat sebesar 92,95 persen pada Tahun 2023.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita secara nasional dari Tahun 2021-2023 trennya meningkat terhadap kebutuhan energi. Berdasarkan data BPS konsumsi listrik nasional 1,084 kWh/kapita pada Tahun 2021 menjadi 1,285 kWh/kapita pada Tahun 2023, konsumsi listrik per kapita di Provinsi Banten lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1,200 kWh/kapita pada Tahun 2021 yang meningkat menjadi 1,300 kWh/kapita pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan perkembangan dalam penggunaan energi yang kemungkinan didorong oleh urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Dimasa mendatang, peningkatan konsumsi listrik menuntut peningkatan kapasitas infrastruktur energi, diversifikasi sumber energi, dan peningkatan efisiensi energi.

Intensitas energi primer nasional dan Provinsi Banten menunjukkan dinamika yang berbeda dari Tahun 2021-2023. Menurut data BPS RI, Pada tingkat nasional intensitas energi primer mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan kenaikan pada Tahun 2022 mencapai 160,50 BOE/miliar rupiah, sebelum kembali menurun pada Tahun 2023 menjadi 132,60 BOE/miliar rupiah. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam mengelola efisiensi energi ditengah pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur industri. Sementara itu di Provinsi Banten menunjukkan stabilitas dengan intensitas energi primer yang relatif konsisten sekitar 34 TOE/miliar rupiah, meskipun ada sedikit peningkatan pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi

Banten mungkin telah mencapai tingkat efisiensi energi yang lebih stabil, namun tetap harus waspada terhadap kenaikan yang terjadi.

Pada sektor pangan, prevalensi ketidakecukupan konsumsi pangan menurut data susenas BPS sejak Tahun 2017-2023 angka prevalensi ketidakecukupan konsumsi pangan di Provinsi Banten stabil pada kisaran di bawah 3,0. Hal ini menunjukkan angka situasi pangan dan gizi terhadap prevalensi ketidak tercukupan pangan di Provinsi Banten adalah rendah/kecil. Jika dibandingkan secara nasional pada Tahun 2023 angka prevalensi ketidakecukupan konsumsi pangan di Provinsi Banten sebesar 2,87, yang merupakan peringkat ketiga terbaik secara nasional setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,17 dan DKI Jakarta sebesar 2,57. Sementara rata-rata nasional menunjukkan angka yang masih cukup besar yaitu 8,53, yang mengindikasikan bahwa pembangunan pangan belum berjalan dengan optimal. Kedepan diperlukan penguatan revitalisasi pembangunan pertanian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik.

Berdasarkan laporan akhir RISPAM Provinsi Banten pada Tahun 2021 sumber air baku di Provinsi Banten berasal dari air permukaan wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Ciliwung-Cisadane, Ciliman-Cibungur, dan Cibaliung-Cisawarna sebesar 541,72 m³/tahun. Selanjutnya juga berasal dari potensi air tanah di wilayah Serang-Tangerang, Rawadano, Labuan, dan Malingping sebesar 2.535 juta m³/tahun. Potensi air baku SPAM alternatif sumber air baku dari air permukaan berdasarkan RISPAM kabupaten/kota di Provinsi Banten sebesar 7.990 l/detik dan SPAM Regional sebesar 21.951 l/detik, saat ini potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat. Sementara air baku yang berasal dari potensi air tanah tidak direkomendasikan untuk pemenuhan SPAM mengingat ketersediaannya yang semakin menurun, yang diindikasikan dengan penurunan muka tanah di beberapa wilayah Provinsi Banten.

3.1.6.2 KEBENCANAAN

Provinsi Banten merupakan wilayah yang rentan dan memiliki potensi bencana yang beragam dan cukup tinggi. Berdasarkan data BNPB Tahun 2024, pada Tahun 2023 nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) di Provinsi Banten mencapai 132,21 (berkategori sedang). Kecenderungan nilai IRB di Provinsi Banten memiliki tren yang baik dengan selalu menurun, disebabkan tren peningkatan kapasitas bencana di kabupaten/kota melalui

pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Namun demikian masih menyisakan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang memiliki kategori IRB dalam kategori tinggi dengan masing-masing nilai secara berurutan sebesar 169,21 dan 172,98. Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, nilai IRB di Provinsi Banten berada pada rangking paling akhir di Pulau Jawa, dengan IRB di Provinsi DKI Jakarta sebesar 61,31, DI. Yogyakarta nilai sebesar 108,15, Jawa Tengah nilai sebesar 109,01, Jawa Timur nilai sebesar 118,61, dan Jawa Barat nilai sebesar 123,16. Namun IRB di Provinsi Banten tidak menempatkan posisi yang kurang baik secara nasional, karena Provinsi Banten berada pada posisi 16 dari 38 provinsi, dengan DKI Jakarta paling rendah dan Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi dengan nilai sebesar 160,08.

Menurut data Bappenas RI, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional mengalami penurunan sejak Tahun 2019 hingga 2021 dengan kenaikan persentase kumulatif dari 24,92 persen menjadi 27,07 persen. Di tingkat provinsi, pada periode tersebut mengalami penurunan emisi GRK yang fluktuatif, yakni 86 persen, 89 persen, dan 81,9 persen. Kategori ini masih tergolong tinggi, namun demikian Pemerintah Provinsi Banten perlu memperkuat kerja sama dari seluruh *stakeholder* untuk mengimplementasi kebijakan transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk meningkatkan mitigasi emisi GRK.

3.1.6.3 PENATAAN RUANG

Pembangunan dan pengembangan interkoneksi sistem jaringan infrastruktur simpul-simpul kawasan dengan berbagai fungsi dan daya dukungnya menjadi sudut perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pusat perkotaan Tangerang-Serang-Cilegon dan pusat pertumbuhan kawasan strategis di Pandeglang dan Lebak tumbuh dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan pusat perekonomian nasional dan Internasional dengan berbagai permasalahan pembangunan.

Pada Tahun 2021, jumlah industri di Provinsi Banten sebanyak 3.429 perusahaan, paling banyak di Kabupaten Tangerang berjumlah 1.860 perusahaan sedangkan paling sedikit di Kabupaten Pandeglang 6 perusahaan. Pertambahan jumlah industri ini juga dapat mengindikasikan terhadap meningkatnya nilai pencemaran air di sungai yaitu Tahun 2018 sebesar 21 lokasi kemudian pada Tahun 2022 sebesar 22 lokasi.

Aktivitas perekonomian lainnya di Provinsi Banten seperti kebutuhan perumahan dan permukiman yang terus meningkat, air minum

dan timbunan sampah, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan sebagai akibat perkembangan wilayah dan demografi telah menimbulkan dampak ikutan lainnya pada daya dukung dan daya tampung air, pencemaran lingkungan, kerawanan pangan, persoalan sanitasi, dan bahkan pada persoalan kesehatan.

Sinergitas dan pengendalian pemanfaatan ruang, pola ruang kawasan, dan struktur ruang dalam sistem penataan ruang di Provinsi Banten sebagai dampak kelangsungan pertumbuhan dan pengembangan simpul strategis pada kawasan pusat pertumbuhan harus dijaga secara berkelanjutan untuk mendukung kemajuan dan kelestarian lingkungan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Tabel III.1
Kondisi Daerah Tahun 2022-2023 dan Permasalahan Pembangunan

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL BANTEN		HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
Kesejahteraan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)	5,06	4,81	Penumbuhan kawasan-kawasan strategis ekonomi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan pada sektor unggulan daerah tertinggal dan dapat bersaing dengan perekonomian wilayah lainnya, menciptakan smart city dan akselerasi industri, pembangunan infrastruktur, sinergi UMKM, pariwisata, pasar tradisional, dan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten meningkat sejak pulihnya pandemi COVID-19 pada Tahun 2021, namun secara umum pertumbuhan ekonomi trennya turun akibat ekspor barang/jasa, investasi dan konsumsi rumah tangga menurun sejak 10 tahun terakhir akibat fenomena deindustrialisasi diri
Daya Saing Daerah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	9,36	6,17	Belum optimalnya penanganan keluarga pra sejahtera, jaminan sosial, PMSK, serta penanganan gelandangan dan anak terlantar. Peningkatan Program Pelayanan Lansia, Disabilitas dan Pembangunan Rumah Sederit Geriatri serta Pusat Studi Gerontologi	Persentase penduduk miskin relatif lebih baik secara nasional namun masih lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,44 persen dan Provinsi Bali sebesar 4,35 persen. Penyebab semakin tingginya tingkat pengangguran

ASPER	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL BANTEN		HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
					terbuka, lapangan pekerjaan menurun akibat deindustrialisasi, sektor koperasi dan usaha kecil masih belum optimal, pendapatan petani dan nelayan masih rendah
Kesejahteraan Masyarakat	Basis Gini	0,388	0,368	Pemerataan kesempatan usaha dan akses permodalan, dan pemerataan pembangunan antara wilayah Banten utara dan wilayah Banten selatan agar makin berimbang	Pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpenghasilan tertinggi mengalami penurunan 0,81 persen
Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) (2022)	6,00	6,09	Pemerintah Provinsi Banten mampu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Capaian IPEI di Provinsi Banten sedikit lebih baik daripada angka nasional, namun demikian masih perlu adanya peningkatan terhadap kualitas SDM, peningkatan infrastruktur dasar, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan ekonomi guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru
Daya Saing Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,55	73,67	Peningkatan IPM dalam upaya mengurangi GAP IPM di Provinsi Banten, denganitik berat mendorong komponen kesehatan dan daya beli masyarakat	Capaian Provinsi Banten masih di bawah rata-rata provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 76,43, yaitu peringkat keempat di bawah DKI Jakarta sebesar 82,46, DI Yogyakarta sebesar 81,07, dan Bali sebesar 77,1 hal ini disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata lama sekolah turun, tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita dan umur harapan hidup

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL	BANTEN	HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
					masih belum optimal
Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	5,32	7,52	Tersedianya SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (vokasi). Membangun Sekolah untuk berkebutuhan khusus, lulusan perguruan tinggi diperbanyak sekolah vokasi, dan politeknik kelautan, perikanan dan agro industri masyarakatnya diberi pelatihan-pelatihan yang bersertifikat yg dibutuhkan dilapangan kerja industri	Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten tertinggi secara nasional, hal ini disebabkan oleh deindustrialisasi dini, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha
Daya Saing Daerah	Ums Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,93	74,77	Peningkatan akses kesehatan dan pelayanan sosial memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan pelayanan sosial dasar untuk semua penduduk Provinsi Banten. Ini melibatkan peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, serta promosi kesehatan masyarakat	Tahun 2023 UHH di Provinsi Banten sebesar 74,77 dibandingkan provinsi di Pulau Jawa-Bali masih di bawah Provinsi DKI Jakarta sebesar 75,81, DI Yogyakarta sebesar 75,18 dan Bali sebesar 74,88. Hal ini disebabkan jumlah kematian ibu di Provinsi terbanyak keempat di Indonesia yang disebabkan cakupan pelayanan nifas di beberapa kabupaten/kota belum mencapai 100 persen
Kesejahteraan Masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	21,5	24	Peningkatan derajat kesehatan dengan fokus penurunan stunting, gizi buruk melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur kesehatan. Dan peningkatan derajat kesehatan di segala usia	Pada Tahun 2023 prevalensinya naik dan melebihi nilai prevalensi secara nasional, akibat status gizi buruk dan persentase bayi <6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih rendah, cenderung di bawah capaian nasional, kemudian Factor lainnya seperti edukasi ibu.

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL	BANTEN	HASIL PEJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
					ventilasi, kenyamanan, serta kondisi air bersih dan lingkungan yang masih kurang layak
Pelayanan Umum	Jumlah kab/kota belum tereliminasi Malaria (Kab/Kota 2022)	195	2	Tersedianya fasilitas kesehatan di Provinsi Banten untuk penyakit kronis dan berat	Masih terjadinya penyakit tidak menular malaria di Provinsi Banten dapat menjadi faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia
Pelayanan Umum	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	9,13	9,48	Terapainya Peningkatan Lama Harapan Sekolah minimal 12 tahun	Capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum dapat terwujud walaupun setiap tahunnya nilai harapan lama sekolah di masing-masing kabupaten/kota sudah melebihi 12 tahun yaitu sebesar 13,09 tahun
Pelayanan Umum	Harapan Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	13,15	13,09	Peningkatan derajat kesehatan dengan fokus kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur kesehatan	Pada Tahun 2023 harapan lama sekolah di Provinsi Banten sebesar 13,09 di bawah rata-rata nasional sebesar 13,15 dan di Pulau Jawa-Bali sebesar 13,51
Pelayanan Umum	Angka Partisipasi Murni (APM)			Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan baik formal atau informal	Akses pendidikan pada daerah terpencil dan sulit dijangkau masih terbatas
	SD/ sederajat (persen)	97,89	97,97		APM SD/ sederajat di Provinsi Banten kecenderungannya naik dan diatas nilai rata-rata nasional namun di Pulau Jawa-Bali masih di bawah Provinsi Bali sebesar 97,77
	SMP/ sederajat (persen)	81,35	85,43		APM SMP/ Sederajat di Provinsi Banten naik dari tahun sebelumnya dan di posisi ketiga secara nasional setelah DI Yogyakarta

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL BANTEN		HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
	SMA/ sederajat (persen)	62,53	62,42		sebesar 85,62 dan Riau sebesar 86,78 APM SMA/ sederajat di Provinsi Banten kecenderungan stabil dari tahun sebelumnya namun nilainya di bawah nasional dan di urutan kedua paling rendah di Provinsi Pulau Jawa-Bali setelah Jawa Barat sebesar 59,01
Pelayanan Umum	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (persen)	93,77	96,54	Pencapaian UHC 100 persen dan Stunting di bawah 2 persen	Perlu penyadaran lebih giat agar jumlah kepesertaan jaminan kesehatan di Provinsi Banten meningkat 100 persen
Pelayanan Umum	Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (2022)			Peningkatan akses kesehatan dan pelayanan sosial yang merata berkualitas dan pelayanan sosial dasar untuk semua penduduk di Provinsi Banten	Tahun 2023 jumlah kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten kecenderungan meningkat. Namun demikian para pekerja informal perlu ditingkatkan
	Pekerja Formal (persen)*	56,19	56,53		
	Pekerja Informal (persen)*	13,06	13,23		
Pelayanan Umum	Tampungan air per kapita (m ³ /kapita) (2022)	57,53	0,81	Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan, konservasi sumber daya air	Penyediaan infrastruktur tampungan air masih terbatas, penyediaan air baku sebagian besar masih bergantung pada air permukaan yang memiliki karakteristik variabilitas tinggi
Pelayanan Umum	Air Minum Jaringan Perpipaan (persen) (2022)	19,47	8,35	Facilitasi dukungan Pembangunan pelayanan pemenuhan air minum, peneraan penampungan air hujan dengan ground tank dan antisipasi banjir bila hujan intensitas tinggi dan kekeringan saat musim kemarau	Akses air minum aman melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas. Akses air minum layak Tahun 2022 mencapai 92,55 persen, akses perpipaan Tahun 2022 hanya 8,35 persen dan akses bukan jaringan perpipaan mendominasi sebesar 84,20

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL	BANTEN	HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
					persen. Sedangkan akses air secara nasional (standar TPB/SDGs 2030) baru mencapai 11,8 persen (Kemendes, 2020)
Pelayanan Umum	Sanitasi Aman (persen) (2022)	10,16	15,25	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Baru sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman, baik pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari kakus (blackwater), non-kakus (greywater), ataupun lumpur tinja
Pelayanan Umum	Penanganan persampahan (persen) (2022)	33,27	46,53	Pembangunan pengelolaan sampah terpadu (TPA regional, IPLT dan TPST) dan peningkatan tempat pembuangan akhir sampah menjadi TPST di kab/kota	Pertumbuhan penduduk telah meningkatkan timbulnya sampah namun belum dibarengi infrastruktur dan manajemen pengelolaan persampahan
Pelayanan Umum	Rumah Layak Huni (persen)	63,13	63,06	Pemberian subsidi untuk program bedah rumah, perizinan perumahan harusnya bisa di akses tanpa adanya pertemuan dengan dinas-dinas terkait	Akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau masih sangat terbatas, keterbatasan ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan serta dominasi hunian tapak terutama di perkotaan, harga lahan dan hunian semakin tidak terjangkau, meningkatnya permukiman kumuh dan ilegal
Pelayanan Umum	Pemenuhan kebutuhan listrik per Kapita (kWh)	1.285,00	1.300,00	Pengembangan jaringan dan sarana infrastruktur pengembangan penyaluran tenaga listrik dan komunikasi	Pelayanan tenaga listrik didominasi oleh rumah tangga dan industri dengan tingkat konsumsi listrik per kapita yang relatif baik
Pelayanan Umum	Porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan (persen) (2022)	15,47	0,16	Perluanya perencanaan pemanfaatan tenaga surya melalui tubular skylight untuk	Tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL	BANTEN	HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
				penerangan dalam ruangan, sehingga tidak lagi menggunakan PLN dalam rangka penghematan anggaran dan ramah lingkungan.	terbarukan relatif rendah
Pelayanan Umum	Jangkauan 4G di kawasan permukiman (Proven) (2022)	96,97	90,98	Peningkatan sumbuhan iptek terhadap pembangunan daerah	Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif, namun sudah merata pada kawasan permukiman
Pelayanan Umum	Kemantapan Jalan (2022)				
	a. Nasional (persen)	92,55	92,57	Pemerintah Provinsi Banten mampu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan, dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Konektivitas antar Kabupaten/ Kota belum optimal kemudian dari sisi kewenangan Provinsi jaringan jalan dihadapkan pada tantangan terutama konektivitas di kawasan daerah afirmasi Banten Selatan yang masih belum optimal
	b. provinsi (persen)	74,46	89,22		
	c. kabupaten/ kota (persen)	62,26	78,1		
Pelayanan Umum	Indeks Pelayanan Publik (indeks) (2022)	-	Belum	Inovasi pelayanan publik. Meningkatnya akselerasi pencapaian reformasi birokrasi secara menyeluruh, dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik	Tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat pemahaman Masyarakat
Pelayanan Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (indeks) (2022)	74,43	73,25	Peningkatan dan inovasi pelayanan publik yang adaptif, cepat, efektif, dan efisien	Masih dibutuhkan peningkatan prinsip transparansi tata kelola dalam rangka peningkatan akuntabilitas pemerintahan
Pelayanan Umum	Indeks Integritas (indeks)	70,97	69,09	Memperkuat stabilitas politik/hukum	Aspek indeks integritas di Provinsi Banten

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL	BANTEN	HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
				dan transformasi pelayanan publik	secara nasional masih lebih kecil dan paling kecil di pulau Jawa terutama penegakan hukum masih menjadi isu penting seperti masalah korupsi, pelanggaran pemanfaatan ruang, dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika
Daya Saing Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,21	132,21	Pengelolaan lingkungan dan tata ruang dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan termasuk pelestarian ekosistem alam, pengendalian polusi, dan pembangunan yang ramah lingkungan. Perlu ada mengintegrasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan, dan pembangunan <i>Tsunami Early Warning System (TEWS), Shelter Point dan Assembly Point</i>	Tingkat risiko bencana di Provinsi Banten termasuk dalam kategori tinggi hal ini disebabkan kondisi geografi patahan Sumatera dan cincin api (terdekat Gunung Anak Krakatau) dan posisi geologi rawan gempa di Selat Sunda
Pelayanan Umum	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) (2022)	60,2	73,78	Adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap DDTLH penyediaan pangan dan air yang memerlukan pelayanan infrastruktur	Ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta rendahnya kesejahteraan pemilik tanah juga menyebabkan kemampuan memanfaatkan tanah yang dimiliki menjadi rendah
Pelayanan Umum	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	8,53	2,87	Mengantisipasi ancaman kekurangan (stok) pangan nasional dan dunia perlu internalisasi dan eksensifikasi di Banten Selatan	Tahun 2023 situasi pangan dan gizi di Provinsi Banten berjalan dengan baik, kedepan diperlukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

ASPEK	INDIKATOR PEMBANGUNAN	NASIONAL BANTEN	HASIL PENJARINGAN ASPIRASI	PERMASALAHAN
				perindungan DSTLH dan infrastruktur berkelanjutan di sektor pertanian

Sumber: Diolah oleh Skippedu, 2024

3.2 ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis dilakukan melalui beberapa tahap penelaahan yang meliputi: i) rumusan kebijakan yang telah dihasilkan sebelumnya pada setiap periodisasi RPJMD Provinsi Banten; ii) penelaahan data dan analisis yang dilakukan; iii) pengidentifikasian permasalahan yang terjadi; dan iv) penjaringan aspirasi yang dilakukan baik kepada sektor pemerintahan, sektor organisasi masyarakat dan aspirasi masyarakat, sektor akademisi, serta sektor dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Banten. Pendekatan perumusan isu strategis dilakukan dengan merangkum seluruh isu termasuk didalamnya perhatian terhadap pengembangan sektor-sektor unggulan dan potensial yang ada di Provinsi Banten.

3.2.1 ISU GLOBAL

Kondisi tren global yang terjadi beberapa dekade kebelakang menjadi landasan bagi beberapa ilmuwan atau lembaga dunia memproyeksikan kondisi yang dapat terjadi pada rentang waktu yang lama. Secara garis besar, dalam rancangan dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 yang sejalan dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, untuk mewujudkan Provinsi Banten menuju Indonesia Emas 2045 disusun respon terhadap kecenderungan perkembangan di tingkat global (*global megatrends*) menuju pertengahan abad ke 21, yaitu:

a. Demografi Dunia

Pada Tahun 2045 penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar (bertambah 2,1 miliar dari Tahun 2015). Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika dan penduduk Asia masih terbesar (55 persen). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut. Proyeksi sebaran penduduk dunia perlu diantisipasi sebagai peluang bagi perluasan pasar komoditas yang dihasilkan oleh industri atau sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Banten.

Pada Tahun 2045, skenario tren dengan laju pertumbuhan sebesar 0,43 persen/tahun jumlah penduduk Indonesia akan meningkat sebesar 324,05 juta jiwa, sementara di Provinsi Banten meningkat sebesar 14,23 juta dengan dengan rasio ketergantungan sebesar 49,10, penduduk usia diatas 65 tahun sebesar 14,38 persen mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 10 persen, dan penduduk usia produktif berkurang sebesar 2 persen.

Penduduk Indonesia dan Provinsi Banten saat ini hampir setengahnya berada di daerah perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat sehingga menyebabkan pola migrasi penduduk mencari penghidupan yang lebih layak di wilayah perkotaan. Oleh karenanya terjadi pola urbanisasi di Provinsi Banten yang menciptakan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pemerataan pendapatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yaitu menyebabkan PDRB Banten Utara lebih tinggi dari Banten Selatan.

b. Urbanisasi Global

Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, namun di sisi lain menyisakan ketertinggalan pembangunan di wilayah perdesaan sehingga menyebabkan pola migrasi penduduk desa untuk mencari penghidupan yang lebih layak di wilayah perkotaan. Terjadinya konflik antar negara juga mendorong terjadinya migrasi antar negara yang dipicu oleh motif utama mencari kehidupan yang layak. Kondisi Indonesia dan Provinsi Banten yang relatif aman memungkinkan untuk menjadi tujuan para migran antar negara. Kondisi ini memungkinkan terjadinya konflik antar migran dengan penduduk lokal seperti yang telah terjadi di Provinsi Aceh. Demikian juga keterbatasan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten, menjadi faktor pendorong warga Banten untuk mencari pekerjaan ke negara lain yang menjanjikan kehidupan yang lebih layak.

c. Peranan *Emerging Economies*

Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi *emerging economies*, *emerging economies* merupakan suatu negara dengan ekonomi yang sedang berkembang dan mulai terlibat dalam pasar global, negara ini berada dalam transisi dari ekonomi yang berfokus pada agrikultur menuju industri yang lebih modern.

Output negara berkembang Tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen. Investasi SDM dan infrastruktur serta reformasi

struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan. Karakteristik utama dari *emerging economies* meliputi: 1) reformasi pasar, adanya kebijakan liberalisasi pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; 2) pertumbuhan ekonomi yang cepat, ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan; dan ciri selanjutnya 3) investasi strategis yang meningkatkan kapasitas produksi.

Reputasi ekonomi Indonesia cukup terpandang di mata global, saat ini Indonesia telah menjadi kekuatan ekonomi global terbesar ke-16 di dunia, serta satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G-20 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US\$1,3 triliun pada Tahun 2022. Namun kehadiran *emerging economies* khususnya di ASIA, seperti melesatnya sektor industri Vietnam, bergairahnya industri tekstil dan alas kaki di Myanmar dan Bangladesh, memberikan cukup tekanan bagi industri di Provinsi Banten untuk merelokasikan industrinya ke negara yang memiliki keunggulan kompetitif lebih dalam hal rendahnya upah buruh dan kemudahan investasi. Hal ini harus menjadi perhatian bagi iklim industri dan investasi di Provinsi Banten untuk lebih produktif dan lebih *investment friendly* baik untuk PMA maupun PMDN.

d. Perdagangan Internasional

Sampai Tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut. Perdagangan internasional juga perlu diarahkan kepada perluasan pangsa pasar sebagai bentuk optimalisasi peningkatan pertumbuhan penduduk di tingkat global.

Perdagangan internasional memberikan dampak yang baik bagi Provinsi Banten dengan semakin meningkatnya investasi asing terutama bagi sektor industri dan manufaktur, yang dampaknya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan semakin terbukanya akses ke pasar global yang memungkinkan produk lokal untuk dapat bersaing dan diekspor guna meningkatkan pendapatan daerah. Lebih daripada itu akan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, pergudangan dan fasilitas logistik guna mendukung aktivitas ekspor dan impor.

Berdasarkan data laporan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, negara tujuan ekspor dari Provinsi Banten masih

didominasi oleh negara Amerika Serikat, China, Eropa, Jepang dan ASEAN. Untuk itu di masa mendatang diperlukan ekspansi ekspor ke negara-negara Afrika sebagai pasar komoditas atau pun barang yang dihasilkan dari industri yang ada di Provinsi Banten. Bentuk antisipasi lainnya adalah diversifikasi produk yang dihasilkan untuk dapat menangkap peluang dari pertumbuhan populasi global. Selama ini, produk ekspor di Provinsi Banten masih didominasi oleh komoditas alas kaki dan bahan kimia lainnya.

e. Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi *multi currencies*. Aset keuangan *emerging economies* Tahun 2050 diperkirakan melebihi negara maju. Cina berkembang sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang.

Ketergantungan terhadap mata uang dolar juga dihadapi oleh pelaku industri di Provinsi Banten khususnya industri petrokimia dan alas kaki, sehingga cukup mengganggu neraca perdagangan di Provinsi Banten dan cadangan devisa. Keinginan menuju *multi currencies* sepertinya menjadi sentimen positif bagi perkembangan perekonomian di Provinsi Banten.

f. Kelas Pendapatan Menengah

Pada Tahun 2050, jumlah *middle* dan *upper income class* diperkirakan lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar. Kondisi ini juga berimplikasi cukup serius di Provinsi Banten, terkait antisipasi suprastruktur dan infrastruktur perekonomian yang harus disiapkan sebagai *safety net* agar kelas menengah bisa didorong menjadi *upper income class* dan tidak terjerumus pada *lower income class*.

Jumlah penduduk di Provinsi Banten dengan pertumbuhan yang terus meningkat telah diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sampai dengan Tahun 2045, oleh karenanya dalam rangka bersaing dan menopang Indonesia dalam perekonomian global menuju *upper income class* maka perlu dipersiapkan peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kemampuan menengah dan tinggi untuk mempersiapkan Provinsi Banten dapat bersaing secara nasional maupun global.

g. Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ketersediaan

SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA.

Persaingan pemanfaatan sumber daya alam perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mengoptimalkan nilai tambah. Prinsip eksplorasi perlu diimbangi dengan pendekatan konservasi sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kehadiran kebijakan *carbon trade* dan kelembagaan pengelolaan dana lingkungan hidup menjadi peluang bagi Provinsi Banten Menghadapi dilema kebutuhan pembiayaan.

h. Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa usaha menurunkan emisi, rata-rata suhu global akan meningkat 3-3,5 derajat celsius pada akhir abad ini.

Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim, jika tidak ada intervensi kebijakan. Total potensi kerugian tersebut dapat terjadi pada empat sektor prioritas yakni pesisir dan laut yang diproyeksikan dapat mencapai Rp408 triliun, sektor Pertanian yang diperkirakan dapat mengalami kerugian sampai Rp78 triliun karena adanya penurunan produksi beras, sektor kesehatan seperti peningkatan kasus demam berdarah dengan total kerugian disisi ekonomi mencapai Rp31 triliun. Serta sektor perairan berupa penurunan ketersediaan air hingga mencapai Rp28 triliun.

Besarnya kerugian yang ditimbulkan tentu saja memerlukan antisipasi dalam bentuk kebijakan pembangunan yang tidak saja melahirkan pertumbuhan ekonomi yang optimal tetapi juga dapat menghasilkan ekonomi yang berketahanan iklim. Terlebih di Provinsi Banten masih memiliki wilayah yang memiliki ketergantungan cukup tinggi khususnya terhadap sektor pertanian. Selain itu upaya untuk menggantikan pembangkit listrik fosil ke non fosil kedepan juga harus menjadi fokus Pemerintah, terlebih 39 persen sumber listrik di transmisi Jawa-Bali berada di Provinsi Banten.

i. Kemajuan Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetika, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik, serta *artificial intelligence*. Adaptasi dan adopsi

terhadap pembaharuan teknologi yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dikenal dengan istilah inovasi.

Kapasitas inovasi disuatu negara diyakini memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan melalui pendapatan per kapita masyarakatnya. Data *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menunjukkan bahwa ada hubungan yang berbanding lurus antara skor GII dengan pendapatan per kapita masyarakat. Berdasarkan hal tersebut sangatlah penting bagi negara untuk meningkatkan kapasitas inovasi (ditujukan dengan peningkatan score GII) yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai langkah kebijakan harus dilakukan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkat kapasitas inovasi. Analisis indikator faktor penyebab masih rendahnya score GII Indonesia dibandingkan negara lainnya di dunia mengerucut kepada kurangnya capaian pilar *Human capital and research, business sophistication, knowledge and technology output, creative output* dan *institutions*. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan indikator pendukung pilar tersebut.

J. Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu. Kondisi geopolitik internasional ini memiliki korelasi langsung dengan kondisi perdagangan internasional, yang dampaknya terhadap stabilitas perekonomian di Provinsi Banten.

Persoalan geopolitik ini juga memiliki keterkaitan dengan kondisi sara yang rentan menimbulkan gejolak bagi ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

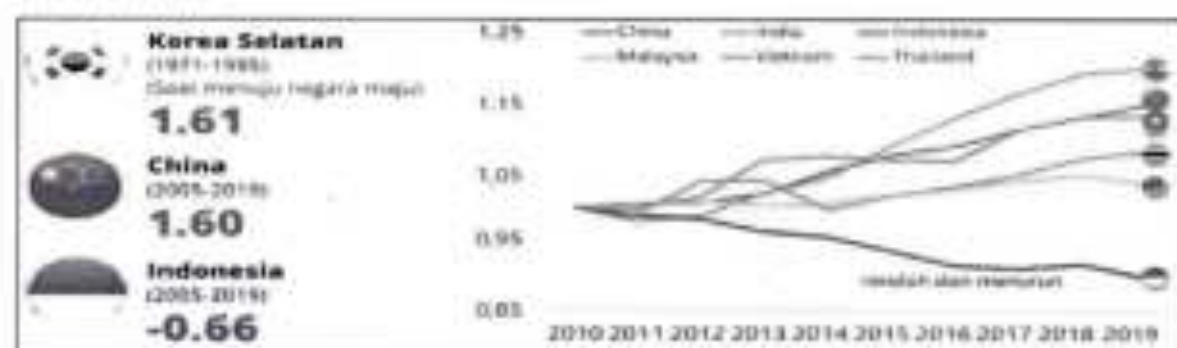
3.2.2 ISU NASIONAL

Dua dekade pembangunan di Indonesia melalui pelaksanaan RPJPN Tahun 2005-2025 telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 diantaranya:

- Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas;
- Kualitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi;
- Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi;
- Tata Kelola Pemerintahan;
- Transformasi Digital; dan
- Infrastruktur yang Belum Merata;

3.2.2.1 ISU DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

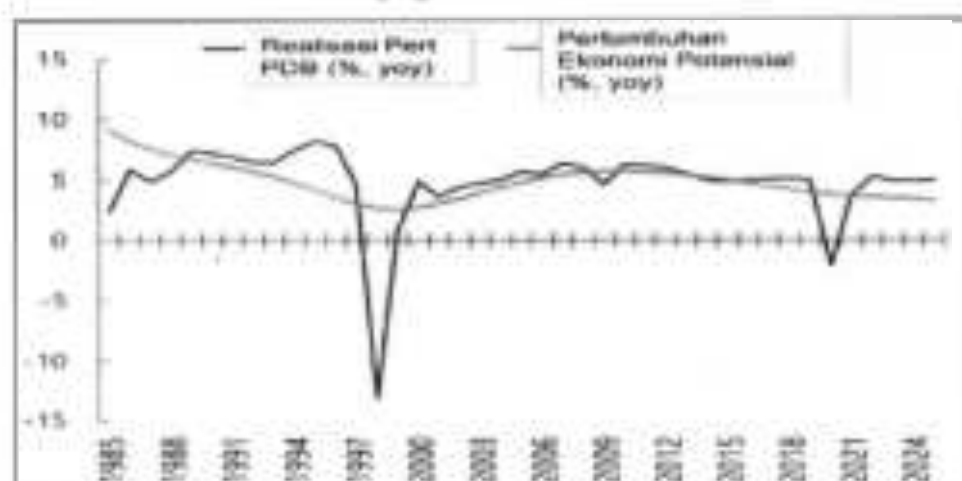
Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama Tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61, ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode Tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.



Gambar III.1
Rata-Rata Total Factor Productivity (kiri) dan Total Factor Productivity Index (kanan) di Dunia
(Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045)

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama Tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama Tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai

rata-rata 5,0 persen selama Tahun 2015-2019 dan mencapai 5,3 persen pada Tahun 2022. Kondisi ini juga tercermin di Provinsi Banten.

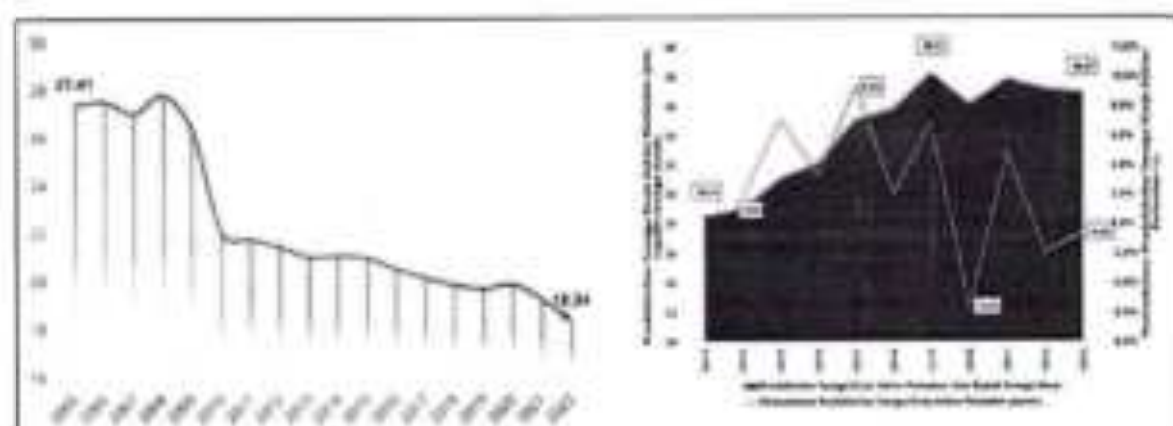


Gambar III.2
Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia Tahun 1985-2024
 (Sumber: RPLPN Tahun 2025-2045)

Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN). Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada Tahun 2020.

Selanjutnya, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) pada Tahun 2019. Ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

Penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.



Gambar III.3
Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (Persen PDB) (kiri) dan Produktivitas Pertanian
(juta rupiah/pekerja) (kanan)
 (Sumber: RPLPN Tahun 2025-2045)

Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan dengan angka tertinggi di Tahun 2019 sebesar 38,21 juta rupiah per tenaga kerja, peningkatan disebabkan oleh pertumbuhan PDB sektor pertanian yang cukup konstan pada rentang 3,6-4,2 persen tiap tahun, yang diiringi dengan penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dengan rata-rata 1,1 persen per tahun. Sistem pangan dan pertanian Indonesia masih belum cukup tahan guncangan dan tekanan, disebabkan: 1) lambatnya regenerasi petani dan nelayan; 2) kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan; 3) terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan; 4) belum adanya standar proses; 5) lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum; dan 6) berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

Kinerja pariwisata masih berada dibawah potensinya disebabkan terutama terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Selain itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupted terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan.

Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional masih terbatas.

Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang tinggi, dengan kondisi sumber daya laut yang begitu potensial tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru di Indonesia masih menghadapi tantangan pada:

1) rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60 persen; 2) belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan; 3) belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi; 4) terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan; 5) rendahnya penanganan sampah plastik; 6) tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF); dan 7) belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi diantaranya adalah: 1) sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; 2) rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha; 3) rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; dan 4) rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, yaitu sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas diantaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

Selanjutnya, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya, yaitu: 1) penggunaan energi fosil yang masih tinggi; 2) peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah; 3)

masih rendahnya penggunaan energi terbarukan; dan 4) masih rendahnya efisiensi energi.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau, pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*). Timbulan limbah B3 yang tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada Tahun 2022. Pada limbah domestik, hanya satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum dan regulasi termasuk pengaturan sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau yang masih lemah.

Ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet. Sementara itu, kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi, riset dan inovasi, dan keamanan siber belum memadai. Dalam hal produk digital, Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri.

Ketimpangan penetrasi pengguna internet antar wilayah berpotensi memperlebar perbedaan kualitas layanan publik di setiap wilayah. Selanjutnya, penggunaan internet masih terbatas pada sektor tertentu dan kurang produktif seperti media dan hiburan, keuangan, dan

perdagangan. Penggunaan internet paling banyak digunakan untuk akses kepada media sosial. Pola penggunaan internet yang tidak produktif, tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi agar dapat mencetak bibit talenta digital yang mampu berkompetisi di pasar global.

Isu dan tantangan selanjutnya adalah belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

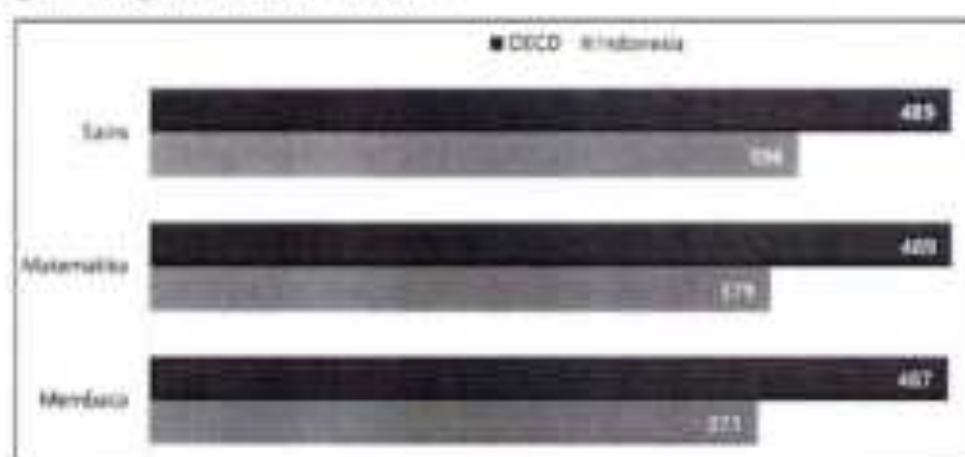
Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.

Pada bidang sosial, untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga Tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan berkualitas yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan alat kesehatan, tenaga medis dan

tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi, tidak tersedianya SMP/MTs di 302 kecamatan dan tidak tersedianya SMA/SMK/MA di 727 kecamatan, kualitas pendidikan yang masih rendah sebagaimana terlihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) 382,00, yang jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara OECD 488,33.



Gambar III.4
Nilai PISA Indonesia dan Rata-Rata OECD
(Sumber: BPUPN Tahun 2023-2045)

Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan, serta pendidikan non formal yang berkualitas belum memadai dimana 42 persen lembaga pendidikan nonformal terakreditasi C atau belum terakreditasi.

Kualitas, produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Tercatat baru lima perguruan tinggi yang berhasil masuk dalam peringkat top 500 dunia. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi, kuantitas publikasi belum diimbangi dengan kualitas, kualifikasi

pendidikan penduduk masih rendah yang berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Kualifikasi pendidikan penduduk yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 40,49 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk, serta peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan inklusif di sepanjang siklus kehidupan. Beberapa tantangan seperti: 1) belum meratanya akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, layanan kesehatan seperti ketersediaan tenaga medis spesialis dan alat kesehatan belum merata di seluruh wilayah Indonesia; 2) rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial terutama pada sektor informal yang menyebabkan cakupan kepesertaan tidak optimal; dan 3) tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah yang menyebabkan terhambatnya masyarakat mendapatkan manfaat jaminan sosial dan menurunkan ketahanan dana jaminan sosial. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan tata kelola perlu diterapkan guna menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, proses pembentukan regulasi belum cukup responsif dan adaptif untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.



Gambar III.5
Kondisi Hiper Regulasi
(Sumber: RUPN Tahun 2015-2015)

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.

Belum meratanya kualitas pelayanan publik, standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan, tingkat kematangan

sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata, tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

Permasalahan yang dihadapi oleh partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran dan fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyaluran aspirasi masyarakat antara lain kaderisasi akibat pendanaan negara yang belum memadai, berimplikasi pada kemandirian dan modernisasi partai politik. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal, disebabkan oleh kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, untuk melakukan perubahan secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah diperlukan landasan kokoh meliputi penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.

Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa aspek kebebasan, kesetaraan dan terutama kapasitas lembaga demokrasi masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut untuk mewujudkan demokrasi substansial.

Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan. Sementara itu, kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan belum terbangun dan ketergantungan terhadap alpaiahankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) luar negeri masih sangat tinggi. Tantangan lainnya adalah tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional

masih perlu diperkuat, meningkatnya jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi, masih lemahnya keamanan siber, serta masih tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.

Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. Tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi di antaranya yaitu masih rendahnya penerimaan negara terutama perpajakan, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Selanjutnya, di sisi kebijakan moneter menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas di pasar global, terutama pangan dan energi serta risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global.

Terkait dengan diplomasi, untuk menghadapi tantangan perubahan geopolitik dan geoeкономи ke depan serta untuk memperkuat peranan dan posisi Indonesia di tingkat global, Indonesia memerlukan diplomasi total yang tangguh dan dapat mengadvokasi kepentingan nasional. Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan belum optimalnya partisipasi dalam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur dan kelembagaan diplomasi, belum sinerginya antara modalitas diplomasi, pelaku diplomasi, dan kebijakan masing-masing bidang diplomasi.

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, diantaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal, dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Budaya literasi, kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga belum optimal serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum

optimal. Selain itu, ketimpangan gender masih tinggi, dengan Indeks Ketimpangan Gender mencapai 0,458 pada Tahun 2022.

Berikutnya, terkait keagamaan, kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan, serta penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah.

Selanjutnya, ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, tingginya tingkat bencana hidrometeorologi, serta kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana. Disisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa (*Java centris*), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada Tahun 2022 adalah 57,8 persen. Tingginya ketimpangan antarwilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian Timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif.

Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya. Pembangunan infrastruktur terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi nasional. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur masih terdapat beberapa masalah yang perlu

diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.

Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia.

Selanjutnya, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal. Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler, terutama di pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia.

Kesinambungan pembangunan penting dalam menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. Instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan juga belum efektif, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik.

Sementara itu, kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas. Dalam hal pembiayaan pembangunan, terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi antara lain belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan, tingginya *cost of fund*, dangkalnya sektor keuangan (terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non bank, utamanya dana pensiun, asuransi, dan pasar modal), serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan.

3.2.2.2 ISU PROVINSI BANTEN DALAM PERSPEKTIF NASIONAL

Berdasarkan analisis *growth diagnostics* per provinsi di Wilayah Jawa, hambatan utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten adalah SDM Pendidikan dan SDM Ketenagakerjaan. Isu utama ekonomi di Provinsi Banten adalah padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di pesisir utara wilayah Banten. Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup.



Gambar III.6
Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa
(Sumber: RPJPD Tahun 2025-2045)

Disisi lain, terdapat faktor penghambat pengembangan industri di Provinsi Banten, yaitu rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri. Selanjutnya wilayah metropolitan (WM) di Jawa seperti WM Jakarta yang meliputi Tangerang Raya masih menghadapi berbagai

masalah, seperti banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh. Permasalahan perkotaan ini berdampak pada kerugian ekonomi. Contohnya di Jakarta, isu kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan sebesar 65 triliun pada Tahun 2020. Selama masa pandemi Tahun 2020 dan pemulihan Tahun 2021, tingkat inflasi tercatat terjaga dibandingkan pada masa sebelum pandemi Tahun 2019. Namun, tingkat inflasi masih rentan terhadap gejolak harga BBM seperti pada Tahun 2022 ketika terjadi Geopolitik Rusia-Ukraina.

Beberapa faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia di Provinsi Banten diantaranya: 1) masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; 2) tingginya PTM (Penyakit Tidak Menular) dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami *stunting* dan insidensi TBC; 3) pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan tingginya penduduk lansia; dan 4) masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Tidak signifikannya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten disebabkan oleh kurangnya pengelolaan potensi wilayah khususnya di selatan, produktivitas UMKM terpusat di wilayah perkotaan, belum sesuainya kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pada Tahun 2023 Provinsi Banten masuk dalam 5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional, tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh ketatnya persaingan pencari kerja di perkotaan, kualifikasi lulusan sekolah kejuruan dan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan industri, kondisi dan kualitas balai pelatihan keterampilan kerja belum mampu mengimbangi perkembangan IPTEK dan industri, serta masih rendahnya pelayanan dasar pendidikan di pedesaan.

Ketersediaan sarana-prasarana dan kemudahan akses dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan kualitas distribusi logistik. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya peningkatan efektivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, meningkatnya investasi industri, dan meningkatnya perkembangan daerah.

Produksi tenaga listrik di Provinsi Banten masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah. Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Banten sudah terinterkoneksi secara menyeluruh termasuk dengan Sistem Bali (membentuk Sistem Jamali/Jawa-Madura-Bali). Pola operasi pembangkitan di sistem Jamali

akan sangat menentukan produksi emisi karbon CO₂ yang dihasilkan. Sementara itu, pelayanan ketenagalistrikan didominasi oleh rumah tangga dan industri dengan tingkat konsumsi listrik per kapita yang relatif baik.

Pemanfaatan infrastruktur TIK di wilayah Jawa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif. Pembangunan infrastruktur TIK di Provinsi Banten sudah merata dan menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan infrastruktur TIK sudah mulai dimanfaatkan di sektor-sektor selain telekomunikasi seperti sistem pembayaran, kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, sebagai contoh gambaran adopsi dari digitalisasi dapat dilihat pada kepemilikan kartu elektronik.

Masalah lainnya di Provinsi Banten yaitu kelangkaan air dan potensi banjir di berbagai wilayah. Kebutuhan untuk air baku dan irigasi masih terbatas. Sementara itu, masih tingginya tingkat ekstraksi air tanah berdampak pada tingginya laju penurunan muka air tanah. Penurunan permukaan tanah ini dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim berpotensi menyebabkan banjir di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Kebutuhan rumah tangga di Provinsi Banten terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan serta dominasi hunian tapak, terutama di perkotaan. Harga lahan dan hunian di pusat kota semakin tidak terjangkau sehingga memicu terjadinya *urban sprawl*, permukiman kumuh, serta permukiman ilegal. Selain itu, sebagian besar hunian masih belum memenuhi standar air minum dan sanitasi aman.

Isu yang terkait desentralisasi dan otonomi daerah adalah penegakan hukum, pengelolaan eksternalitas antarwilayah, dan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum masih menjadi isu penting, seperti masalah korupsi, pelanggaran pemanfaatan ruang, dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Tingkat kompleksitas di Wilayah Metropolitan (WM) seperti Jakarta dengan Tangerang Raya sebagai penyangga memerlukan tata kelola yang lebih andal. Tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Jawa semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat. Ruang untuk mengekspresikan aspirasi dan ide masyarakat perlu terus dibuka.

Kapasitas fiskal di Provinsi Banten sudah tinggi, terutama di wilayah Tangerang Raya. Kemandirian fiskal di Provinsi Banten lebih baik dibandingkan provinsi lain di Jawa kecuali DKI Jakarta. Disisi lain, kualitas belanja daerah masih rendah. Berdasarkan data APBD Tahun 2022, rata-

rata porsi belanja pegawai masih melebihi 30 persen, sedangkan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan aset dikisaran 12 persen terhadap total belanja daerah.

Provinsi Banten memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 47,47 di bawah angka nasional (51,9) pada Tahun 2021. Indeks tersebut menggambarkan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung) dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang saksama.

Di samping itu, belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia juga perlu diperhatikan dalam pembangunan 20 tahun mendatang.

Permasalahan lingkungan utamanya meliputi banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Provinsi Banten serta pencemaran udara dan air. Banjir rob terjadi karena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan terutama untuk kegiatan industri di kawasan pesisir yang berdampak antara lain menurunnya daya dukung air. Hal ini berpotensi menyebabkan kekeringan. Di samping itu, terjadi juga penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang disebabkan pembangunan secara masif di bagian utara Provinsi Banten. Pesatnya pertumbuhan industri, yang dibarengi dengan tingginya mobilitas barang dan penumpang menyebabkan peningkatan polusi udara dan air yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Selain itu sebagian besar wilayah perkotaan juga rentan terhadap bencana banjir. Kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana menjadi isu yang perlu mendapat perhatian yang lebih besar.

3.2.3 ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN

Analisis terhadap kondisi permasalahan serta lingkungan strategis di tingkat global dan nasional sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelumnya, melahirkan formulasi isu strategis di tingkat daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan jangka panjang 20 tahun mendatang.

3.2.3.1 ISU STRATEGIS BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025

Tahun 2005-2025 merupakan era RPJPD pertama Provinsi Banten semenjak berdiri pada Tahun 2000 dan mulai berlakunya UU SPPN. Pada rentang waktu tersebut Provinsi Banten berkembang cukup signifikan yang digambarkan dengan kenaikan IPM sebanyak 14,63 poin, PDRB ADHB yang tumbuh sebesar Rp706,69 triliun, kenaikan pendapatan per kapita sebesar Rp53,11 juta, kemiskinan yang walaupun sempat terdistorsi oleh wabah COVID-19 masih bisa turun sebesar 2,9 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun 8,23 persen, serta rasio gini yang juga menunjukkan indikasi perbaikan.



Gambar III.7
Perkembangan Indikator Makro di Provinsi Banten Tahun 2007 dan Tahun 2023

(Sumber: Ditah oleh Bappenas, 2024)

Meskipun berbagai indikator menunjukkan indikasi perbaikan, tantangan utama bagi Pemerintah Provinsi Banten adalah bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat bersaing secara nasional maupun Global ditengah dinamika perkembangan dunia yang begitu pesat, terlebih tantangan yang tidak mudah yaitu kondisi TPT di Provinsi Banten pada Tahun 2023 masih menempatkan daerah yang tertinggi secara nasional, pun demikian pada variabel Usia Harapan Hidup.

Kondisi ini selaras dengan faktor utama penghambat pembangunan di Provinsi Banten yaitu SDM Ketenagakerjaan dan SDM Kesehatan.



Gambar III.8
Tantangan Pemajuan Provinsi Banten

(Sumber: Analisis Kedepan Bidang Ekonomi Bappenas, 2023; Ditulis oleh Bappenas)

3.2.3.2 ISU STRATEGIS BERDASARKAN KLHS RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

Selain menelaah terhadap isu strategis yang berkembang ditataran global, nasional dan juga perlunya menganalisis dilevel regional yang dapat berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Banten, juga diperlukan adanya mempertimbangan terhadap muatan-muatan isu yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, dimana dalam dokumen perencanaan KLHS tersebut dari 10 (sepuluh) isu yang berkembang yaitu:

- Peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan dan pendidikan;
- Penduduk miskin di daerah tertinggal;
- Kesenjangan perekonomian antar wilayah di Provinsi Banten;
- Strategi daya saing daerah dan tata kelola pemerintah;
- Alih fungsi lahan kawasan pesisir dan kawasan perbatasan wilayah perkotaan;
- Pembukaan kawasan hutan yang merupakan *catchment* area pertambangan;

- g. Ketersediaan fasilitas TPA regional, TPS, Limbah B3 di kawasan industri dan kawasan peruntukan industri serta permukiman;
- h. Ancaman meningkatnya kerawanan pangan;
- i. Kebutuhan air bersih, air baku dan sumber daya air; dan
- j. Aturan dan penegakan hukum tentang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan.

Beberapa isu terkait dengan lingkungan strategis tersebut terdapat 3 (tiga) isu terpilih yang paling krusial dan memiliki dampak paling strategis yang berpengaruh terhadap pengembangan suatu wilayah yang perlu mendapatkan prioritas dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, yaitu: 1) isu alih fungsi lahan kawasan pesisir dan kawasan perbatasan wilayah perkotaan; 2) isu kebutuhan air bersih, air baku dan sumber daya air; dan 3) isu ancaman meningkatnya kerawanan pangan. Sebagaimana 3 (tiga) isu prioritas tersebut maka dibutuhkan upaya tambahan dikarenakan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap pengembangan suatu wilayah khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), upaya tambahan tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Upaya Tambahan Terhadap Isu Strategis Terpilih

NO	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR DENGAN UPAYA TAMBAHAN (DUT)
1	Alih fungsi lahan kawasan pesisir, dan kawasan perbatasan wilayah perkotaan	Peningkatan reliabilitas kawasan pada Lahan Kritis, dan terpulihkannya kawasan konservasi serta penguatan dan penerapan sanksi hukum terkait alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan; Adanya proyeksi peningkatan secara linier terutama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan proporsi mencapai 20,37 persen dengan selisih peningkatan pendana tambahan Rp333.032.373.131,00 atau Rp333,03 M dalam 20 tahun mendatang.
2	Kebutuhan air bersih, air baku dan sumber daya air	Menyediakan infrastruktur terpadu, sanitasi yang memadai, layak, dan tepat guna di seluruh wilayah; Adanya penambahan upaya dalam pendanaan daerah diproyeksikan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencapai Rp333,03 Miliar (20,37 persen) selain itu bidang lainnya pada perumahan dan permukiman rakyat dapat mencapai Rp117,48 M (7,19 persen) dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.
3	Ancaman meningkatnya kerawanan pangan	Peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan Menyediakan kebutuhan bahan pokok penyediaan pangan memadai, terjangkau, serta berkelanjutan; Dalam keterlibatan beberapa bidang dengan proporsi besar dalam penanganan isu ancaman kerawanan pangan, diproyeksikan adanya peningkatan pendanaan 20 tahun mendatang diantaranya pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selisih di Tahun 2022 mencapai Rp333,03 M dengan proporsi 20,37 persen, kemudian di bidang pertanian adanya potensi peningkatan pendanaan

NO	ISU STRATEGIS PENGANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR DENGAN UPAYA TAMBAHAN (DUT)
		mencapai Rp77,76 M (1,29 persen), Kesehatan Rp12,02 M (0,2 persen), Perikanan dan Kelautan mencapai Rp26,58 M (0,44 persen). Sementara untuk Lingkungan Hidup mencapai Rp24,31 M (0,4 persen).

Sumber: *KLAS APBD Provinsi Banten Tahun 2025-2043*

3.2.3.3 SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING

Kualitas sumber daya manusia dibentuk dari berbagai aspek, beberapa diantaranya adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek perlindungan sosial.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2050 dari BPS, piramida penduduk di Provinsi Banten mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda menjadi piramida penduduk stasioner. Pada Tahun 2025-2035 menjadi momentum bonus demografi di Provinsi Banten dengan *dependency ratio* sebesar 43,31 persen. Kemudian pada tahun 2040-2055 terjadi pergeseran dimana penduduk usia 65+ mengalami peningkatan signifikan dengan angka *dependency ratio* diproyeksikan sebesar 49,10 persen pada Tahun 2045. Maka dari itu diperlukan strategi dalam memanfaatkan momentum bonus demografi angkatan tenaga kerja produktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten, aspek pendidikan memiliki kualitas yang belum merata, aspek kesehatan masih belum menyentuh derajat kesehatan yang tinggi, dan aspek perlindungan sosial masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

a. Pendidikan Berkualitas yang Belum Merata

Dari aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten bagian Selatan masih jauh berada di bawah Provinsi Banten bagian Utara, bahkan belum berhasil mencapai wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Meskipun begitu, kedua bagian tersebut perlu didorong untuk dapat mencapai program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Di sebagian daerah Kabupaten Pandeglang, jarak untuk mencapai SLTA mencapai 6-12 kilometer. Data lainnya dapat dilihat dari jumlah desa yang menjadi konsen Kementerian Desa untuk meningkatkan akses pendidikannya. Selain itu, kualitas ruang kelas di beberapa sekolah juga masih belum memadai, sarana dan prasarana gedung SMA/SMK/SLTA berdasarkan proyeksi masih belum cukup memadai sehingga perlu

ditingkatkan pada seluruh kewenangan baik negeri, swasta maupun diluar Kemendikbudristek.

Jenjang pendidikan yang ditempuh juga terdapat masalah. Angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/ sederajat berada di urutan kedua terendah di Indonesia. Angka melanjutkan SMA/ sederajat berada di urutan kelima terendah di Indonesia. Faktor untuk melanjutkan pendidikan perlu menjadi perhatian bagi semua pihak.

b. Derajat Kesehatan yang Masih Rendah

Modal manusia lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan (Todaro, 2003). Namun, kesehatan di Provinsi Banten masih menghadapi masalah diantaranya mortalitas ibu, bayi dan balita, permasalahan gizi buruk dan *stunting*, penyakit menular dan tidak menular, serta akses dan pelayanan fasilitas kesehatan. Melalui perbaikan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, termasuk pada masyarakat miskin (Lincoln, 1999).

Di Provinsi Banten bagian selatan akses terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan juga perlu menjadi prioritas. Akses terhadap rumah sakit berdasarkan hasil proyeksi yang telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pada setiap 5 (lima) tahun memerlukan 5 (lima) rumah sakit dan pemenuhan jumlah tempat tidur pada rumah sakit yang sudah ada untuk memenuhi standar yang dibutuhkan dalam pelayanan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat, kemudian peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan di tingkat yang lebih rendah seperti puskesmas, puskesmas pembantu, ataupun klinik.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tenaga kesehatan (dokter umum dan spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan lainnya) juga semakin meningkat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian lantaran kekurangan sumber daya tenaga kesehatan dapat meningkatkan beban kerja dan mempengaruhi kualitas pelayanan. Pada Tahun 2045 jumlah penduduk di Provinsi Banten diproyeksikan sebanyak 14.156.300 jiwa. Untuk dapat menyediakan layanan kesehatan yang ideal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO, maka Provinsi Banten membutuhkan 14.156 dokter di Tahun 2045. Selain peningkatan kebutuhan dokter, pemerataan dokter di Provinsi Banten juga perlu diperhatikan, terutama bagi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, serta Kabupaten Serang karena hingga Tahun 2022 rasio dokter per 1.000 penduduk di ketiga kabupaten tersebut masih jauh dari standar.

Permasalahan *stunting* tidak hanya disebabkan oleh gizi buruk dan pola asuh ibu hamil namun dapat diakibatkan kondisi lingkungan yang kurang baik, pencemaran air, polusi serta masih terbatasnya sumber air yang aman bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten perlu mengembangkan akses layanan air minum aman untuk kesehatan masyarakat yang amat dibutuhkan dan potensi air baku untuk pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) yang aman terutama melalui sistem jaringan perpipaan masih belum dimanfaatkan secara optimal.

c. Perlindungan Sosial yang Belum Optimal

Perlindungan sosial menjadi salah satu aspek penting pada kualitas sumber daya manusia. Melalui perlindungan sosial, sumber daya manusia berkembang tanpa harus khawatir dengan masalah-masalah sosial. Di Provinsi Banten, perlindungan sosial yang ada dapat dinilai masih belum optimal karena masih banyaknya PMKS. Cakupan pelayanan perlu ditingkatkan dalam rangka menurunkan jumlah PMKS di Provinsi Banten yang setiap tahunnya cenderung meningkat sejak Tahun 2021.

Selain itu jumlah penduduk miskin 6,17 persen dari total jumlah penduduk juga perlu diperhatikan. Masyarakat tersebut adalah masyarakat rentan yang perlu dilindungi melalui perlindungan sosial (*bansos*) yang diadakan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Provinsi Banten dapat berperan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran dan merata.

Perlindungan sosial dapat dilihat juga pada ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten masih di angka 44,1 persen (2023). Pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan angka tersebut. Tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial akan memiliki motivasi lebih untuk bekerja dan menambah produktivitas.

3.2.3.4 PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH DAN INKLUSIF

Perekonomian yang baik dapat dilihat dari meratanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merata terbentuk dari optimalnya pengelolaan sektor-sektor unggulan serta inovasi dan investasi yang kuat. Di Provinsi Banten, hal-hal tersebut dinilai belum optimal karena pertumbuhan ekonomi daerah utara dan selatan masih belum sama, sektor-sektor unggulan belum dikelola secara maksimal, dan inovasi

yang mendorong investasi masih perlu ditingkatkan. Faktor krusial yang perlu mendapatkan perhatian terkait pembangunan ekonomi adalah:

a. Pengembangan Sektor Potensial dan Unggulan yang Belum Optimal

i. Sektor Pertanian dan Perikanan

Isu strategis sektor pertanian berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan daya saing daerah. Pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan terutama dalam pengembangan wilayah bagian tengah dan selatan di Provinsi Banten meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, bagian selatan Kabupaten Serang dan bagian selatan Kabupaten Tangerang. Bagian tengah dan selatan di Provinsi Banten memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadikan aktivitas perekonomiannya berbasis pada sektor primer. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, wilayah Banten Selatan yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki kontribusi sektor primer di atas 25 persen. Analisis Tipologi Klassen menggunakan data PDRB ADHK memperlihatkan bahwa kedua daerah tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dan intervensi pembangunan yang terfokus pada potensi daerahnya dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah dengan daerah lainnya di Provinsi Banten.

Sektor pertanian dan perkebunan sangat diharapkan menjadi sektor yang dapat mendorong pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Secara geografis berada di posisi ALKI, Provinsi Banten menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk di dalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, dan lain sebagainya. Namun, masih terdapat isu strategis pada sektor tersebut, yaitu masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan. Isu tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi aktual yang terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Kondisi aktual tersebut antara lain alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan untuk peruntukan lainnya, rendahnya nilai tambah dan sumber daya

manusia pertanian dan perikanan, serta kelembagaan dan mekanisasi agribisnis belum terhubung secara baik.

Perbaikan dari sisi produktivitas perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan sektor pertanian dan perikanan ke depan. Peningkatan mutu dan kualitas hasil pertanian dan perikanan adalah salah satu cara dalam meningkatkan produk-produk hasil pertanian dan perikanan. Permasalahan dari sektor pertanian dan perikanan perlu cepat dibenahi dalam mendorong pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta menjaga sinergi antar lembaga harus tercipta dengan baik.

Sarana dan prasarana penunjang yang berpengaruh terhadap penyediaan air di sektor pertanian perlu ditingkatkan mencakup pengembangan infrastruktur sumber daya air dalam hal pengelolaan saluran irigasi, waduk, dan embung sebagai penyimpan cadangan air untuk peningkatan produktivitas pertanian.

Pendampingan pelatihan bagi para petani dan nelayan dalam menciptakan sumber daya petani yang lebih kompetitif dalam bidang pertanian dan perikanan. Alih fungsi lahan pertanian semakin pesat menuju non-pertanian menyebabkan lahan yang ditanami semakin kecil. Input sarana produksi menjadi sangat diperlukan guna meningkatkan produksi pertanian.

ii. Sektor Industri

Lapangan usaha industri pengolahan menjadi *leading sector* perekonomian di Provinsi Banten yang menyumbang 30-35 persen dari PDRB di Provinsi Banten dengan rata-rata laju pertumbuhan 3,4 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan industri sedang-besar yaitu 6,88 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir dan meningkat pesat dalam lima tahun terakhir (kecuali pandemi). Peningkatan ini didorong karena pengembangan infrastruktur perhubungan serta proyek strategis nasional yang beriringan dengan peningkatan investasi dan penanaman modal. Namun, tantangan ke depan adalah akselerasi daya saing industri, hilirisasi industri di internal, dan menekan eksternalitas dari industri terhadap daya dukung lingkungan di Provinsi Banten.

Penurunan laju nilai tambah sektor industri disebabkan oleh penurunan nilai *output* industri, pelambatan pertumbuhan

industri, dan ketersediaan air bersih untuk keperluan industri. Maka dari itu diperlukan strategi untuk sistem penyediaan air bersih untuk industri dengan meningkatkan suplai air baku, efisiensi penggunaan air, konservasi lahan dengan fungsi resapan air, dan berbagai strategi lainnya. Strategi arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang menjadi sangat penting untuk menjaga suplai air bersih untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun industri.

Berdasarkan nilai dan jenis impor di Provinsi Banten pada Tahun 2021 yaitu sekitar 97 persen merupakan jenis bahan baku penolong. Bahan baku penolong ini menjadi input untuk kegiatan industri di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketergantungan bahan impor dari luar provinsi dan luar negeri untuk input kegiatan industri. Maka dari itu diperlukan strategi untuk hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan mineral) serta usaha kecil-menengah. Dengan hilirisasi industri tentunya meningkatkan nilai tambah produk olahan sumber daya alam dan UMKM.

Salah satu isu strategis lainnya adalah menjamin kegiatan industri dengan prinsip berkelanjutan, daya dukung lingkungan, dan adaptasi-mitigasi krisis iklim. Dengan berkembangnya industri juga turut menimbulkan eksternalitas seperti emisi, limbah, alih fungsi lahan, serta menurunnya daya dukung air dan lahan. Berbagai komitmen target Internasional dan Nasional seperti transisi menuju energi terbarukan, efisiensi sumber daya produksi, hasil produk yang berdaya guna selama mungkin, pengelolaan limbah yang berkelanjutan termasuk sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai, *waste to energy*, *net zero emission*, dan prinsip industri hijau lainnya harus menjadi landasan pengembangan industri berkelanjutan di Provinsi Banten. Lebih daripada itu diharapkan agar dapat terwujudnya ekonomi sirkular sebagai salah satu strategi dalam mencapai ekonomi hijau khususnya pada 5 (lima) industri prioritas nasional (pangan, retail yang berfokus pada kemasan plastik, konstruksi, elektronik, dan tekstil) yang berada di wilayah Provinsi Banten untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus pembangunan.

iii. Sektor Pariwisata

Dengan potensi pariwisata yang besar, Provinsi Banten berpeluang untuk memajukan perekonomian melalui pengembangan pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Provinsi Banten. Namun dengan melihat jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan pariwisata di Provinsi Banten dinilai belum optimal dan jauh dari kata ideal dikarenakan jumlah wisatawan selama 14 tahun terakhir belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Melihat ke belakang dan ke depan, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten meliputi:

1. Lingkungan fisik dan sumber daya alam

Karakteristik lingkungan fisik di Provinsi Banten, khususnya aspek lingkungan fisik geologi yang unik dan spesifik dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata dan sebagai sumber daya alam untuk mendukung aktivitas pariwisata. Lingkungan fisik dapat menjadi peluang namun juga tantangan bagi pengembangan pariwisata. Posisi Provinsi Banten yang memiliki garis pantai yang panjang semestinya dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata pantai yang potensial, namun demikian penetapan kawasan pariwisata perlu memperhatikan risiko bencana tsunami, perlindungan terhadap lingkungan budidaya, dan kelestarian budaya.

2. Ketimpangan pembangunan pariwisata di Provinsi Banten bagian selatan dan utara

Dalam konteks kewilayahan, ketimpangan wilayah terjadi antara bagian selatan dan bagian utara di Provinsi Banten, yang juga dialami oleh provinsi lainnya seperti yang terdekat Provinsi Jawa Barat. Jumlah daya tarik wisata pun berbeda antara bagian selatan dan bagian utara, dikarenakan potensi alam yang cukup heterogen. Namun jika dilihat dari sisi banyaknya lokasi wisata antara bagian selatan dan bagian utara tidaklah jauh berbeda. Bagian utara di Provinsi Banten yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah destinasi wisata sebanyak 289 destinasi dan pada bagian selatan di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan

Kabupaten Lebak memiliki jumlah destinasi wisata sebanyak 330 destinasi.

Keberadaan daya tarik dan destinasi wisata ini juga mempengaruhi keberadaan sarana akomodasi dan pendukung. Bagian utara memiliki 247 akomodasi dan bagian selatan sebesar 206 akomodasi. Jika dibandingkan antara jumlah destinasi dengan jumlah akomodasinya terlihat adanya ketidakseimbangan. Bagian utara yang memiliki jumlah destinasi wisata yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bagian selatan justru memiliki jumlah akomodasi yang lebih banyak dari bagian selatan.

3. Adanya rencana strategis nasional untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur

Saat ini Jakarta memberikan andil bagi struktur demografis wisatawan dan asal tinggal wisatawan yang dapat ke Provinsi Banten. Akan ada dampak ikutan dalam pariwisata akibat adanya perpindahan sejumlah penduduk ke Kalimantan Timur. Kendati demikian, masih diperlukan penelitian mendalam tentang besarnya pengaruh tersebut. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menutup kekurangan dari sumber *market* wisatawan yang lainnya, misalnya dari Jawa Barat.

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata

Saat ini Provinsi Banten belum menjadikan pariwisata sebagai strategi utama dalam pengembangan wilayah, hal ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata di masing-masing kabupaten. Sarana dan prasarana khusus untuk kegiatan pariwisata belum optimal, misalnya fasilitas MICE (*Meeting, Incentives, Conference, Exhibition*), rumah makan dan restoran untuk wisatawan, sekolah khusus vokasi pariwisata, *integrated-tourism information system*, *integrated transportation system* untuk wisatawan dan sebagainya.

Kondisi saat ini pelayanan transportasi masih belum optimal melayani antar daerah terutama pelayanan terhadap kawasan di selatan Provinsi Banten sebagai pusat pengembangan pariwisata. Moda transportasi antar daerah dan pusat

pertumbuhan ekonomi masih kurang memadai, pengaturan dan pengelolaan sistem transportasi dan sistem jaringan jalan kurang optimal, dan kualitas jalan dan jembatan di selatan Provinsi Banten masih banyak yang belum mantap yang mempengaruhi terhadap minat masyarakat yang ingin berwisata. Faktor tersebut mempengaruhi ketepatan dan kenyamanan berwisata sehingga mempengaruhi masyarakat untuk mengusahakan sendiri transportasi mereka secara pribadi.

Menurut UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) pengelolaan destinasi wisata merupakan suatu pengelolaan terkoordinasi antar elemen yang membentuk destinasi wisata, meliputi: atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, *ancillary* dan *available package* untuk dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.

b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Daerah Untuk Mendorong Produktivitas dan Investasi

Iklim investasi dan tata kelola pemerintah menjadi isu strategis dalam meningkatkan daya saing daerah yang akan mendorong produktivitas industri di Provinsi Banten. Dalam 10 tahun terakhir, investasi dan penanaman modal (PMDN dan PMA) cenderung fluktuatif dan meningkat rata-rata 12 persen per tahun. Selain itu, jika melihat neraca keuangan pemerintah daerah dikategorikan baik dengan rasio kemandirian sebesar 2,78 dan derajat desentralisasi fiskal sebesar 73,55 persen pada Tahun 2023. Daya saing daerah yang baik tentunya mendorong iklim usaha industri di Provinsi Banten.

Tantangan sektor industri saat ini yang tersebar di utara Provinsi Banten adalah biaya operasional yang mahal akibat pemanfaatan energi yang masih bergantung pada sumber energi fosil yang tinggi, kurangnya inovasi dan pemanfaatan energi terbarukan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung produktifitas. Pemerintah Provinsi Banten harus mengupayakan mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk sektor produktif dan rumah tangga.

Berdasarkan data BPS (2022), sebesar 66,6 persen (atau 71.715 usaha) mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar kesulitan tersebut disebabkan oleh kesulitan permodalan, pemasaran, persaingan, dan bahan baku. Tantangan UMKM dan koperasi adalah

tenaga kerja yang berkeahlian rendah dan bergerak di sektor nilai tambah rendah. Maka dari itu, inovasi juga diperlukan untuk pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi sebagai jembatan hilirisasi komoditas sumber daya unggulan di Provinsi Banten bagian selatan dan iklim usaha industri di Provinsi Banten. Dalam meningkatkan daya saing juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, keterampilan tenaga kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja.

c. Belum Optimalnya Perdagangan Luar Negeri

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten salah satunya dipengaruhi oleh kinerja perdagangan luar negeri (ekspor-impor), serta realisasi investasi dari sisi permintaan, sedangkan dari sisi penawaran dipengaruhi oleh pertumbuhan kinerja lapangan usaha utama di Provinsi Banten (industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pergudangan). Komponen permintaan ekspor luar negeri di Provinsi Banten mengalami penurunan akibat adanya pelemahan ekonomi global. Adapun impor luar negeri, juga menurun meskipun dengan besaran yang lebih rendah dari penurunan ekspor. Kondisi ini mengindikasikan pada penurunan peran Provinsi Banten dalam mata rantai industri Internasional yang berdampak pada ancaman fenomena de-industrialisasi.

Sektor perekonomian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur penunjang, pelemahan investasi, kondisi infrastruktur transportasi dan sistem jaringan jalan dan jembatan yang belum memadai, terbatasnya inovasi dan pemanfaatan energi terbarukan serta teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut diatas juga telah mempengaruhi daya tarik investasi di Provinsi Banten bagian selatan untuk pengembangan sektor industri, pariwisata, dan maupun pertanian.

d. Belum Meratanya Pertumbuhan Ekonomi

Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten tercermin dalam *gap* pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota menurut wilayah Banten Utara dan Banten Selatan. Ketimpangan antar wilayah yang menyebabkan perbedaan taraf kesejahteraan juga memicu kontraksi ekonomi karena penurunan kesejahteraan akan berimplikasi kepada penurunan permintaan barang dan jasa yang hilirnya akan berdampak terhadap penurunan permintaan secara agregat.

Banten Utara sebagai pusat industri padat modal menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Namun tantangan kedepannya adalah deindustrialisasi dini, kondisi deindustrialisasi muncul ketika terjadi penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor

industri manufaktur tidak lagi menjadi pangsa kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing komoditi dan sumber daya manusia serta ekosistem industri yang belum optimal.



Gambar III.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten Utara-Banten Selatan dan Nasional
Tahun 2011-2022

(Sumber: BPS, 2023; Diolah oleh Rappertaj)

Disisi lain di wilayah Banten Selatan dengan potensi ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil-menengah belum dioptimalkan secara inklusif sehingga hasil produksi komoditas tersebut masih pada taraf nilai tambah yang rendah. Beberapa hal ini dipicu oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, belum optimalnya pengelolaan perikanan dan pengembangan budidaya perikanan, akses terhadap infrastruktur penunjang yang jauh dari kata optimal, belum berkembangnya diversifikasi industri yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, daya dukung lahan yang semakin menurun, terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan, rendahnya penanganan sampah khususnya kemasan plastik serta tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), dan belum optimalnya tata kelola regulasi dan kelembagaan dalam pemanfaatan ruang laut.

3.2.3.5 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN BERINTEGRITAS

Tata kelola pemerintah di Provinsi Banten masih menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang transparan dan profesional sehingga berdampak terhadap menghambat kemajuan pembangunan. Hal ini dapat dirasakan pada sistem penyelenggaraan yang masih belum optimal terlihat dari Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang masih rendah yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik. Penyebab

utama penyelenggaraan pemerintah masih belum optimal seperti dalam aspek pengaturan regulasi dan hukum, digitalisasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan integritas, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Aspek regulasi dan hukum masih perlu adanya penguatan untuk meningkatkan asas keadilan dan kepastian hukum serta peningkatan aspek pengawasan seperti mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah.

Saat ini pada era digitalisasi diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Banten mampu mengoptimalkan teknologi serta meningkatkan pengetahuan teknologi informasi berbasis digital dalam mempercepat akses dan kemudahan pelayanan pembangunan secara aman, cepat, transparan, dan akuntabel. Hakikatnya penyelenggaraan pemerintah merupakan upaya menghasilkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Untuk itu pelayanan dan integritas pemerintah yang lincah, efektif, efisien, bersih, dan akuntabel akan mengurangi berbagai hambatan pembangunan.

3.2.3.6 KEAMANAN, KETAHANAN, DEMOKRASI, DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN, SERTA EKONOMI MAKRO YANG TANGGUH

a. Keamanan, Ketertiban, dan Kesadaran Berdemokrasi Masih Rendah

Kondisi keamanan, ketertiban, dan kehidupan berdemokrasi akan menjadi landasan utama mendorong pembangunan ekonomi. Keamanan, ketertiban, dan kehidupan demokrasi yang kuat akan mendorong berbagai investasi berkembang yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun jika kondisinya sangat rendah maka akan menciptakan ketidakpercayaan investasi dan berdampak pada pembangunan ekonomi.

Kemudian dilihat dari kehidupan berdemokrasi di Provinsi Banten masih dalam kategori “sedang” atau masih demokratis dengan nilai Tahun 2023 sebesar 75,83 turun dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 78,75 dan angka tersebut dibawah rata-rata nilai nasional, oleh karenanya maka diperlukan upaya lebih kuat untuk meningkatkan nilai Indeks Demokrasi guna mewujudkan demokrasi yang substansial dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Ketahanan Wilayah dan Kerjasama Daerah Belum Optimal

Ketahanan wilayah merupakan kondisi daerah yang memiliki kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan dan hambatan dalam pembangunan, sehingga ketahanan wilayah menjadi isu pembangunan yang memiliki nilai yang sangat strategis bagi terjaminnya kelangsungan hidup dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Secara nasional per November Tahun 2023 Indeks Ketahanan Nasional menghasilkan skor 2,98 dengan kategori cukup tangguh. Diantara 8 (delapan) gatra meliputi: geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Aspek sosial budaya memiliki nilai terendah dengan kategori kurang tangguh.

Isu lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah adalah kerja sama berbagai pihak berkepentingan yang sinergi menjadi landasan utama pembangunan, melihat berbagai potensi dan tantangan yang ada, Provinsi Banten secara geografis merupakan daerah yang dikelilingi dengan perbatasan antar daerah dan berada diantara jalur strategis kelautan dan kawasan hutan lindung maka kolaborasi di daerah perbatasan menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan. Selain itu kerja sama pengelolaan dan pengendalian rencana strategis kawasan Kota Metropolitan Jabodetabekpunjur sangat penting untuk dilaksanakan oleh Provinsi Banten karena telah menjadi *inner city* kawasan tersebut.

Berbagai bentuk kerja sama lainnya yang sangat penting untuk dilaksanakan adalah pengelolaan kawasan pesisir pantai di perbatasan, kerja sama pengelolaan kawasan lindung dan cagar budaya, pengelolaan kawasan strategis tertentu untuk kepentingan maritim dan kepentingan strategis ekonomi, perdagangan, pertanian, lintas batas, serta infrastruktur untuk pelayanan regional dan antar provinsi perlu menjadi perhatian berbagai *stakeholder* dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Potensi kerja sama yang lain yang belum teroptimalkan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Banten diantaranya kerja sama antar pemerintah, dengan pihak swasta, dengan pihak donor, dan dengan pihak luar negeri.

c. Kebijakan Ekonomi Makro Belum Stabil

Tantangan dalam menjaga stabilitas pembangunan perlu dilakukan melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, selama ini

kondisi perekonomian di Provinsi Banten relatif stabil dengan pertumbuhan dikisaran 5-7 persen per tahun selama satu dekade, kecuali pada saat terjadinya wabah COVID-19. Kestabilan ekonomi selain dapat dilihat dari stabilitas pertumbuhan ekonomi juga stabilitas harga-harga. Kondisi inflasi di Provinsi Banten relatif cukup terkendali sejalan dengan kondisi perekonomian masyarakat di Provinsi Banten.

Meskipun demikian untuk menciptakan ekonomi makro yang stabil, Pemerintah Provinsi Banten harus memiliki instrumen kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi siklus perekonomian yang era sekarang cenderung semakin sering menghadapi goncangan. Disisi kebijakan fiskal pemerintah daerah di Provinsi Banten memiliki tantangan dan keterbatasan, seperti kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah yang masih perlu perbaikan. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. DDF di Provinsi Banten berada dalam kategori "baik", tetapi dalam 10 tahun terakhir memiliki kondisi yang fluktuatif dan cenderung menurun. Selain itu, jika dilihat per kabupaten/kota masih dalam kategori "kurang" terutama Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak yang berada pada posisi "sangat kurang". Maka dari itu diperlukan strategi untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio pajak daerah terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami peningkatan signifikan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 0,97 persen meningkat jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 1,04 persen, namun jika dilihat dari rasio pajak Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap PDRB cukup mengalami peningkatan signifikan sebesar 2,66 persen dari Tahun 2017 sebesar 10,05 persen sampai dengan Tahun 2022 sebesar 12,71 persen. Namun jenis pajak saat ini tidak optimal terhadap PDRB di Provinsi Banten yang didominasi oleh industri pengolahan yang merupakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Disisi kondisi moneter, fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Banten pada Tahun 2023 berjalan baik dan mendukung pemulihan ekonomi meskipun pertumbuhan beberapa indikator perbankan pada Tahun 2021. Secara umum stabilitas keuangan yang terjaga walaupun

pada Tahun 2023 pertumbuhan beberapa indikator perbankan tidak setinggi pertumbuhan periode Tahun 2022.

3.2.3.7 PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG ARIF DAN LUHUR

a. Keaktifan Kehidupan Sosial Belum Optimal

Beberapa kegiatan sosial yang paling dapat dilihat dan dirasakan masyarakat adalah kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya, serta kehidupan beragama. Di Provinsi Banten, kegiatan-kegiatan di atas dapat dinilai belum optimal. Padahal keaktifan kehidupan bermasyarakat dapat mendukung terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pada Tahun 2021, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Provinsi Banten berada di posisi 5 (lima) terbawah nasional, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) berada jauh di bawah nasional. Dengan melihat indeks-indeks tersebut sebagai representasi dari keaktifan kehidupan sosial masyarakat, maka untuk kedepannya pembangunan juga perlu berfokus pada bagaimana menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang aktif dan kondusif.

b. Pembangunan Keluarga dan Gender Masih Lemah

Pembangunan keluarga di Provinsi Banten dengan menggunakan metadata baru menunjukkan nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) pada 17 provinsi yang berada di bawah rata-rata nilai nasional yaitu berada pada posisi 25 dari 35 provinsi di Indonesia. Beberapa dimensi yang perlu diperhatikan oleh Provinsi Banten yang kinerjanya sangat kurang yaitu: 1) dimensi kualitas ketahanan ekonomi yaitu persentase rumah tangga yang ada anak 7-17 tahun yang putus sekolah dan persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja; 2) dimensi kualitas ketahanan fisik yaitu persentase rumah tangga yang ada ART sakit dan persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok; 3) dimensi kualitas ketahanan sosial yaitu persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak, persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+, dan persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama mengakses internet.

Aspek kesetaraan gender secara keseluruhan nasional menempatkan Provinsi Banten pada posisi lebih besar dari nilai rata-rata secara nasional pada Tahun 2022. Peningkatan ketimpangan gender terjadi pada sebagian kabupaten/kota di Provinsi Banten. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi

tenaga kerja. Aspek ketimpangan gender harus menjadi perhatian karena nilai ini menunjukkan kurang berhasilnya dalam mewujudkan kehidupan yang berkesetaraan khususnya gender.

3.2.3.8 MANAJEMEN KEWILAYAHAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN

Kondisi Lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten dilihat dari aspek daya dukung dan aspek kualitasnya dinilai belum dikelola dengan optimal dan dari aspek kebencanaannya memiliki risiko bencana yang masih tinggi, walaupun Tahun 2023 IRB di Provinsi Banten (132,21) tidak menempatkan posisi yang terlalu buruk secara nasional, karena Provinsi Banten berada pada posisi 16 dari 38 provinsi, dengan DKI Jakarta (61,21) paling rendah dan Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi dengan nilai sebesar 160,08.

a. Daya Dukung Lingkungan yang Masih Rendah

Seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk, permintaan terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian terutama untuk industri dan permukiman terus meningkat di setiap tahunnya. Kondisi pertanian saat ini dihadapkan pada masalah penurunan luas lahan akibat konversi lahan ke penggunaan non pertanian. Pada Tahun 2018-2019, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Provinsi Banten mencapai 6.898 hektar.

Selain cukup tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, Provinsi Banten juga memiliki luas lahan kritis yang cukup banyak. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2020, Provinsi Banten memiliki lahan kritis seluas 229.840,73 hektar. Apabila lahan kritis dibiarkan secara terus menerus maka luasannya akan bertambah dan dapat berdampak pada produktivitas lahan.

Meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahunnya juga berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah di Provinsi Banten. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya, jumlah timbulan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Provinsi Banten pada Tahun 2021 sebanyak 117.433.280 m³/tahun. Jumlah tersebut sudah jauh melebihi kapasitas TPA yang tersedia yakni sebesar 50.855.108 m³/tahun. Untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Provinsi Banten secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan

yang dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang tersedia di Provinsi Banten.

b. Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Provinsi Banten berasal berbagai kegiatan seperti aktivitas rumah tangga, industri, transportasi, pertambangan, hingga pengelolaan sampah yang kurang baik yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. IKLH dinilai berdasarkan 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH di Provinsi Banten pada Tahun 2023 mencapai angka 62,52, berarti kondisi lingkungan hidup masuk dalam kategori sedang.

Secara keseluruhan Provinsi Banten memiliki kuantitas sumber daya air yang cukup tinggi, namun dari segi kualitas menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa wilayah. Pencemaran air di Provinsi Banten baik air tanah dan air permukaan dimungkinkan berasal dari limbah yang berupa limbah industri, limbah domestik/permukiman, dan limbah lainnya yang meliputi limbah pertanian, peternakan, persampahan, dan lain-lain. Pencemaran air yang terjadi di Provinsi Banten dapat berdampak pada penurunan kualitas air, dimana hal tersebut dapat berakibat pada penurunan ketersediaan atau kuantitas air bersih di setiap tahunnya.

Persentase layanan sanitasi dan air minum rumah tangga di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih lebih rendah dari kabupaten/kota yang ada di bagian utara. Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten merupakan isu utama dalam pembangunan daerah Provinsi Banten. Ketimpangan tersebut tercermin dari pembagian Banten Utara (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon) dan Banten Selatan (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang). Ketimpangan tersebut tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Provinsi Banten sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

c. Risiko Bencana yang Masih Tinggi

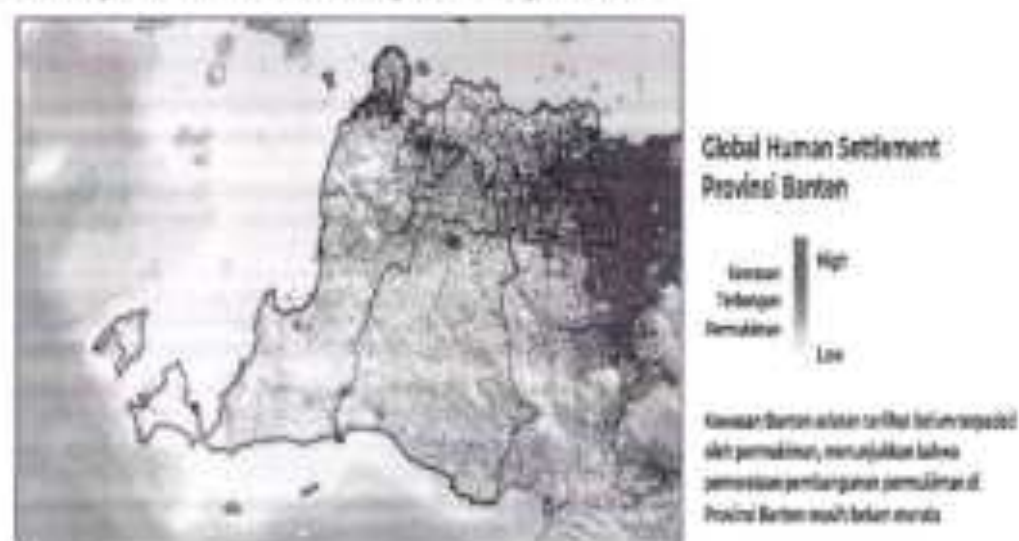
Provinsi Banten merupakan daerah dengan ancaman bencana dan IRB dan kapasitas daerah berkategori sedang. Daerah dengan nilai IRB tinggi dan kapasitas daerah yang rendah serta potensi kebencanaan yang tinggi seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang seperti banjir bandang, tsunami, gempa bumi, letusan gunungapi, dan lainnya sangat diperlukan perhatian semua pihak melalui

pembentukan desa tangguh bencana, dan pelestarian lingkungan, pelaksanaan program pembangunan harus mengedepankan mitigasi kebencanaan dan skenario berbasis bencana pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana kebencanaan.

Perubahan iklim yang terjadi akibat berbagai aktivitas manusia diyakini tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, namun secara lebih luas dapat berdampak pada kondisi perekonomian suatu daerah. Provinsi Banten menjadi salah satu daerah penyumbang emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor seperti sektor energi, sektor transportasi, sektor industri, sektor persampahan, sektor kehutanan, dan sektor pertanian. Kesadaran akan hal tersebut menuntut adanya implementasi kebijakan pembangunan daerah terkait mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan penerapan ekonomi hijau, menjaga hutan dan membuka ruang terbuka hijau yang semakin luas sebagai upaya mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Banten.

d. Kesesuaian Penataan dan Pemanfaatan Ruang yang Belum Optimal

Provinsi Banten saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan emisi gas rumah kaca, konversi lahan pertanian akibat tekanan jumlah penduduk di perkotaan, kepadatan bangunan di wilayah utara akibat industrialisasi, risiko bencana yang tinggi akibat aktivitas perekonomian dan sosial budaya yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, dan rendahnya pengelolaan sumber daya alam hayati telah berdampak terhadap menurunnya kualitas kehidupan masyarakat.



Gambar III.10
Peta Global Human Settlement Layer Provinsi Banten Tahun 2020
(Sumber: European Commission (hugo.eu), 2022)

Perkembangan kawasan perkotaan Banten Utara yang menjadi hunian padat serta aktifitas lainnya sebagaimana telah disebut di atas telah mendorong dampak negatif terhadap kesesuaian penataan ruang dan hal ini menunjukkan belum adanya sinergitas antara arah dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara pembangunan daerah dengan tujuan, kebijakan serta strategi penataan ruang Provinsi Banten.

Pada 20 (dua puluh) tahun mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui simpul pertumbuhan wilayah yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan diperlukan kerjasama seluruh pihak dapat bersinergi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan penataan ruang di Provinsi Banten.

Tabel III.3
Keterkaitan Isu Pembangunan Daerah

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS KLHS	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS RPJPD 2005-2025	ISU UTAMA PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS TAHUN 2025-2045
Peranan Energy Economics	1 Isu Ekonomi	1. Alih fungsi lahan kawasan pesisir, dan kawasan perbatasan wilayah perkotaan	1. Isu ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM dan kesejahteraan sosial	1. Pendidikan berkualitas yang belum merata	1. Sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berdaya saing
Perdagangan Internasional	Rendahnya daya saing, produktivitas, ketahanan perekonomian pedesaan dan penggunaan teknologi tinggi pada industri	2. Kebutuhan air bersih, air baku dan sumber daya air	2. Pengembangan ekonomi masyarakat berorientasi pasar global	2. Desajat kesehatan yang masih rendah	2. Pembangunan perekonomian yang tangguh dan inklusif
Demografi Dunia	Konektivitas jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai antar wilayah kurang optimal	3. Pembukaan kawasan hutan yang merupakan catchment area pertambangan	3. Pengembangan pelayanan kepelabuhan skala nasional dan internasional serta peningkatan prasarana dan sarana wilayah	3. Perlindungan sosial yang belum optimal	3. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas
Urbanisasi Global	Pusat-pusat pertumbuhan belum selaras dengan kebijakan pembangunan wilayah	4. Ketersediaan fasilitas TPA regional, TPA, Limbah B3 di kawasan industri dan kawasan peruntukan industri serta permukiman	4. Penataan ruang, pengalokasian sumberdaya dan lingkungan hidup	4. Pengembangan sektor pariwisata dan unggulan yang belum optimal	4. Keamanan, ketahanan, demokrasi dan kerjasama pembangunan, serta ekonomi makro yang tangguh
Ketangangan Internasional	Tingkat inflasi masih rentan terhadap gejolak harga BBM	5. Ancaman meningkatnya kerawanan pangan	5. Pemerintahan yang baik dan bersih	5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong produktivitas dan investasi	5. Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang arif dan luhur
Kelas Pendapatan Menengah	2 Isu Sosial	6. Kesenjangan perekonomian antar wilayah di Provinsi Banten		6. Belum optimalnya optimalnya penanganan luar negeri	6. Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan
Persaingan Sumber Daya Alam	Akses pendidikan daerah terpencil dan sulit dijangkau masih terbatas	7. Penduduk miskin di daerah tertinggal		7. Belum meratanya pertumbuhan ekonomi	

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS KLHS	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS RPJPD 2005-2025	ISU UTAMA PEMANGUNAN	ISU STRATEGIS TAHUN 2025-2045
Perubahan Iklim	Terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha	8. Peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan dan pendidikan		8. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	
Kemajuan Teknologi	Pelayanan kesehatan lanjut, jumlah stunting dan insidensi TB masih tinggi	9. Aturan dan pengakuan hukum tentang pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan		9. Keamanan, ketertihan dan keadilan berdemokrasi masih rendah	
Perubahan Geopolitik	Tingginya tingkat kemiskinan, produktivitas UMKM terbatas di perkotaan, kualifikasi tenaga kerja, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar masih belum optimal	10. Strategi daya saing daerah dan tata kelola pemerintah		10. Ketahanan wilayah dan kerja sama daerah belum optimal	
	3 Isu Barana dan Prasarana			11. Kebijakan ekonomi makro belum stabil	
	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar kesehatan dan pendidikan masih rendah			12. Keakutan kehidupan sosial belum optimal	
	Bauran pembangkit listrik terburukan relatif rendah			13. Pembangunan keluarga dan gender masih lemah	
	Pelayanan dan pemanfaatan ketenagalistrikan belum merata			14. Daya dukung lingkungan yang masih rendah	
	Ketersediaan air sebagian kecil yang telah dimanfaatkan akibat variasi spasial, antarpulau dan temporal, antarmusim			15. Kualitas lingkungan hidup yang belum optimal	
	Akses air minum aman melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas			16. Risiko bencana yang masih tinggi	
	Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan			17. Kewajiban penataan dan pemanfaatan ruang yang belum optimal	

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS KLHS	ANALISIS ISU ISU STRATEGIS RPJPD 2005-2025	ISU UTAMA PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS TAHUN 2025-2045
	Masalah perkotaan masih berdampak pada keragaman ekonomi				
	Tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional, Provinsi Banten (8,09 persen; peringkat 3)				
	Akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau terbatas				
	Akses terhadap pengelolaan sanitasi aman masih terbatas				
	Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana				
	4 Isu Desentralisasi dan Otonomi Daerah				
	Penegakan hukum masih menjadi isu penting				
	Peningkatan tata kelola pembangunan termasuk perkotaan Metropolitan belum mengimbangi kualitas pelayanannya				
	Peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi				
	Kesenjangan kapasitas lokal antar daerah di Pulau Jawa				
	5 Isu Sosial Budaya dan Ekologi				
	Tahun 2021 Provinsi Banten (47,47) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di bawah angka nasional (51,2)				
	Peran dan fungsi keluarga belum optimal dan ketimpangan gender masih tinggi				

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS KLHS	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS RPJPD 2005-2025	ISU UTAMA PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS TAHUN 2025-2045
	Penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) telah berdampak kualitas lingkungan hidup				
	Posisi geografis di cincin api pasifik, zona megathrust di perior selatan, dan erupsi gunung api aktif berpotensi bencana alam				
	Keseluruhan rencana tata ruang dan rencana pembangunan, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal				

Sumber: Ditulis oleh Dugpesda, 2024

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah dalam jangka panjang, yakni selama 20 (dua puluh) tahun mendatang, diarahkan untuk pencapaian suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini. Gambaran keadaan pada masa depan yang diinginkan tersebut disebut sebagai visi jangka panjang, visi merupakan kondisi yang menjadi cita-cita dan merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh lapisan masyarakat.

Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD. Dalam proses ini, tahap perumusan visi dan misi merupakan upaya keadaan yang menjadi muara dari berbagai penyelesaian berbagai isu strategis yang dirasakan sangat penting oleh masyarakat untuk diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

4.1 VISI

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi dirumuskan sebagai cita-cita kondisi yang jauh lebih baik dari kenyataan yang ada saat ini, bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan salah satu butir upaya dalam merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam melakukan pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan RPJMD yang dikembangkan pada tahap periode tersebut. Visi juga memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar dan kelemahan yang masih dirasakan, serta mempertimbangkan faktor eksternal (perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat

nasional, dan arah pembangunan di wilayah perbatasan provinsi) baik berupa peluang maupun tantangan.

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".

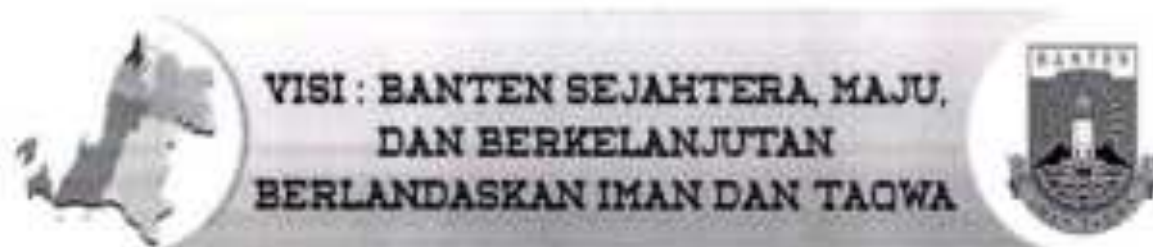
Perumusan pokok-pokok visi didasarkan pada masalah utama dan/atau isu strategis pembangunan Banten dan diselaraskan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Masalah utama dan Isu strategis yang sudah diidentifikasi terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1
Perumusan Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS	POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
1	Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas dan Bersaja Saing	Sumber Daya Manusia yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	Sejahtera	
2	Perekonomian yang Melambat dan Belum Merata	Pembangunan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif	Maju	
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Maju	Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan
4	Kestabilan Wilayah, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro yang Belum Optimal	Kecamatan, Ketahanan, Demokrasi, Kerjasama Pembangunan, Ekonomi Makro yang Tangguh	Maju	berlandaskan iman dan Taqwa
5	Inklusivitas Kehidupan Sosial dan Budaya yang Belum Optimal	Pengembangan Kehidupan Sosial dan Budaya yang Arif dan Luhur	Berkelanjutan	
6	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Belum Berkelanjutan	Manajemen Kewilayah yang Adaptif dan Berkelanjutan	Berkelanjutan	

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

Berlandaskan kondisi tersebut, dan berpedoman pada Visi Indonesia sebagai acuan pencapaian Indonesia Emas di Tahun 2045, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 adalah:



Gambar IV.1
Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024)

Penjelasan beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa adalah sebagai berikut:

a. SEJAHTERA

Makna sejahtera disini adalah dapat terjaminnya kebutuhan dasar seluruh masyarakat Banten yang meliputi kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan serta memiliki pendapatan yang mencukupi.

Peningkatan kualitas SDM didukung pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial menjadikan fondasi utama untuk menciptakan SDM Provinsi Banten sebagai aktor utama keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkeahlian tinggi sebagai modal dasar bersaing secara global. Dengan memaksimalkan potensi bonus demografi dimana jumlah penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten secara menyeluruh dan berkeadilan, *no one left behind*.

b. MAJU

Sebagai bentuk jawaban terhadap semakin kompetitifnya daya saing antar wilayah dan tantangan sebagai kontributor perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, Banten Maju yang dicita-citakan dicerminkan melalui basis-sektor unggulan yang kuat, berdaya saing yang berbasis riset, dan nilai tambah tinggi yang didorong dengan inovasi, dan adopsi penguasaan teknologi yang mendorong hilirisasi diberbagai sektor unggulan dan potensial, tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif.

Di abad 15 hingga 17 masehi, Banten di bawah Kesultanan Banten merupakan wilayah yang masyhur akan kemajuan peradabannya, Banten kala itu menjadi pusat pemerintahan, politik, penyebaran Agama Islam hingga perekonomian. Kemajuan Banten merupakan cerminan dari posisi geostrategis yang merepresentasikan keunggulannya atas akses yang mudah terhadap sumberdaya, pasar, dan juga pelayanan. Sejarah besar pada kala itu menjadi refleksi Provinsi Banten untuk dapat kembali menjadikan Banten yang maju dari segi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Selain itu juga majunya Provinsi Banten dicerminkan melalui kapasitas tata kelola pemerintah yang lebih efektif, transparan, berintegritas dan tentunya responsif dalam penyediaan layanan publik dan lincah dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan teknologi terkini. Tidak kalah pentingnya majunya Provinsi Banten dicerminkan melalui hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, demokrasi yang substansial, perekonomian yang stabil dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi dinamisnya gejolak perekonomian nasional maupun global sehingga dapat mewujudkan keamanan daerah yang berdaya gentar kawasan.

c. BERKELANJUTAN

Provinsi Banten berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena jika hanya berfokus pada orientasi ekonomi saja, dapat memberikan dampak negatif memperparah kondisi *triple planetary crises*.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan kearifan lokal, serta mempertimbangkan efek domino kerusakan lingkungan yang akan terjadi, serta dampaknya terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu pembangunan berkelanjutan menjadikan fokus utama untuk dapat menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial masyarakat Banten.

d. IMAN DAN TAQWA

"Iman dan Taqwa" merupakan nilai-nilai budaya Banten yang religius yang ditorehkan sejak zaman Kesultanan Banten, sehingga mampu menjadikan Banten sebagai pusat pertumbuhan penyebaran agama Islam. Iman dan Taqwa merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini serta menjadikan masyarakat yang pribadi yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama yang kokoh.

Iman dan Taqwa menjiwai keterwujudan sejahtera, maju, dan berkelanjutan pembangunan di Provinsi Banten. Segenap hal tersebut harus dilandaskan pada jati diri, yaitu "Iman dan Taqwa" seperti yang terdapat pada lambang Provinsi Banten. Peran iman dan taqwa sangat penting dalam membangun karakter generasi muda, sebagai kunci keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten dan berperan aktif

sebagai kekuatan moral serta agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

Tabel IV.2
Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

VISI RPJPN TAHUN 2025-2045	VISI RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa

Sumber: Diolah oleh Bappenas, 2024

4.1.1 SASARAN UTAMA VISI

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta terwujudnya Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa, maka hal tersebut tercermin dalam 5 (lima) Sasaran Utama beserta indikator dan targetnya sebagai berikut:



Gambar IV.2
Sasaran Utama Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Diolah oleh Bappenas, 2024)

Keselarasan antara sasaran visi RPJPN dengan visi RPJPD Provinsi Banten tergambarakan dalam tabel berikut:

Tabel IV.3
Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Utama Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045				RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASE LINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASE LINE 2025	TARGET 2045
1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Nisai	a. GHI per Kapita (USD)	3.500-3.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per Kapita (Rp. Juta)	72,21-72,43	348,94-413,51
		b. Kontribusi PDRB Maritim (%)	8,1	15,0		b. Indeks Ekonomi Baru Industri (DEI)	25,62	98,90
		c. Kontribusi PDRB Maritim di (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13
2	Kestabilan: Merutur dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kestabilan (%)	7,0-8,0	0,3-0,8	Pengurangan Kestabilan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kestabilan (%)	4,20-5,50	0,04-0,54
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,383	0,290-0,320		b. Rasio Gini (Indeks)	0,344-0,363	0,300-0,351
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,94	3,43
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 Desur	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyelenggara Industri Nasional	a. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,33	5,89-6,80
						b. Indeks Daya Saing Daerah (%)	3,70-3,90	4,50-4,80
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,54	0,71
5	Intensitas Emisi GRK Merutur Menuju Net Zero Emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,8	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,38	80,42
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	76,49	83,00		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	66,92	74,93

Sumber: BPS Provinsi Banten dan Menteri PTN/Bappenas RI Nomor 602.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (dikutip dari Bappenas, 2024)

Sedangkan keterkaitan antara pokok visi dengan sasaran utama visi tergambarkan sebagai berikut:

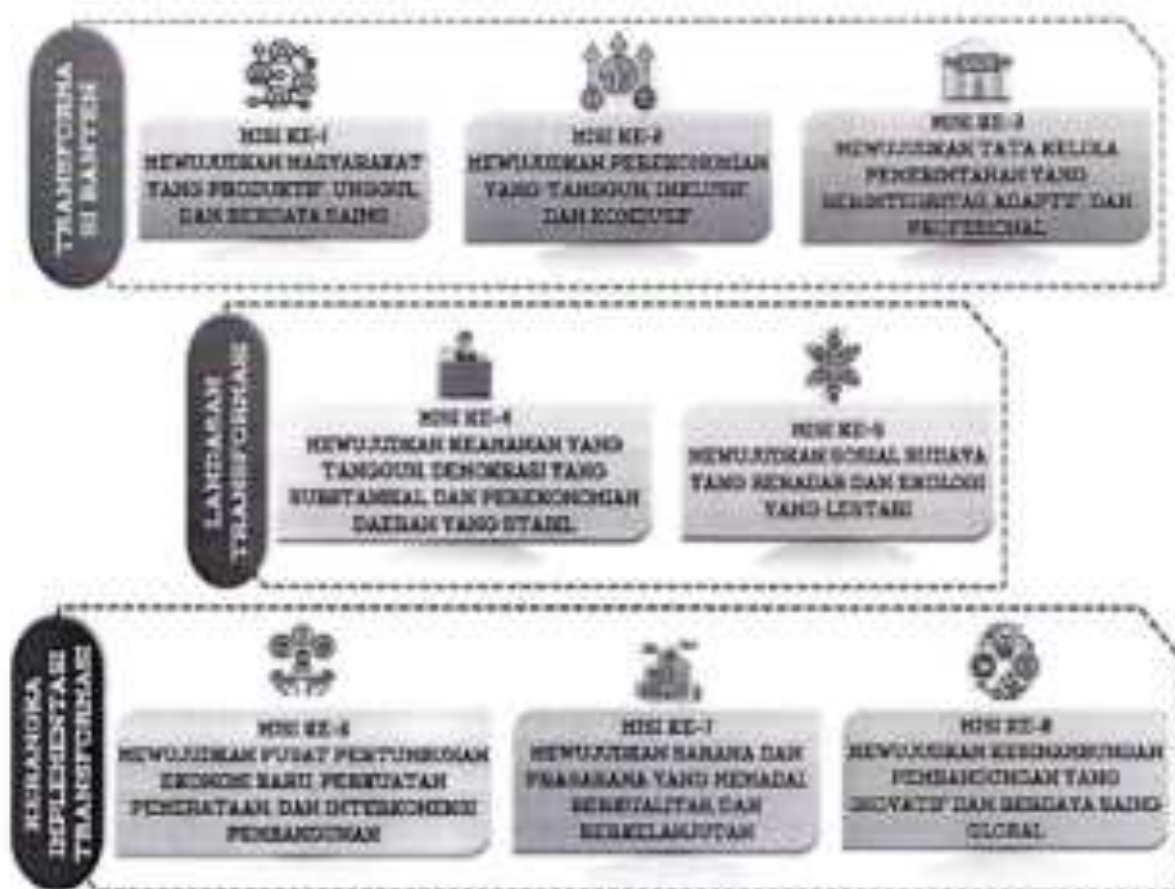


Gambar IV.3
Pemetaan Visi dengan Sasaran Utama Visi RPJPD Provinsi Banten
Tahun 2025-2045
(Sumber: Delah oleh Dapysda, 2024)

4.2 NISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJPD Provinsi Banten hingga Tahun 2045. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dijabarkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Perumusan misi pembangunan Provinsi Banten mengacu pada permasalahan utama dan isu strategis yang dirumuskan pada bab sebelumnya dan evaluasi (rekomendasi) dari RPJPD Provinsi Banten, serta yang tidak kalah penting dengan mempertimbangkan pewujudan Indonesia Emas 2045.

Sebagaimana Visi yang telah dijelaskan di awal, untuk dapat terwujudnya Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa, untuk dapat mencapai Indonesia Emas di 2045 maka disusunlah 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari:



Gambar IV.4
8 (Delapan) Misi (Agenda) Pembangunan RPJPD Provinsi Banten
Tahun 2025-2045
(Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024)

4.2.1 MISI KE-1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING

Misi ke-1 yaitu mewujudkan masyarakat yang produktif, unggul, dan berdaya saing merupakan agenda pembangunan Provinsi Banten dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan tinggi dengan berbagai inovasi untuk siap bersaing menghadapi tantangan perkembangan global yang semakin kompleks serta terwujudnya perlindungan sosial yang inklusif kepada seluruh masyarakat dengan berprinsip terhadap keadilan, misi ini merupakan wujud cerminan terhadap visi Provinsi Banten yang Sejahtera.

Misi ini, terdiri dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, serta optimalisasi perluasan dan cakupan perlindungan sosial. Kualitas kesehatan masyarakat penting ditingkatkan melalui pemenuhan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar dan optimalisasi proses pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Sementara itu upaya penting dalam memajukan tingkat pendidikan

masyarakat antara lain, melalui optimalisasi kebijakan pendidikan dasar beserta implementasinya dengan mengoptimalkan penanaman nilai-nilai lokal yang baik dan positif, serta peningkatan pemenuhan infrastruktur pendidikan dan penguatan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. Upaya dalam operimalisasi perluasan dan cakupan perlindungan sosial diwujudkan dalam sistem perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya terdiri dari program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari pesertanya. Dalam hal ini, perlindungan sosial merupakan rangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial, kesenjangan, dan kemiskinan.

4.2.2 MISI KE-2, MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH, INKLUSIF, DAN KONDUSIF

Misi ke-2 yaitu mewujudkan perekonomian yang tangguh, inklusif, dan kondusif merupakan agenda pembangunan Provinsi Banten dalam meningkatkan produktivitas melalui peningkatan sektor ekonomi unggulan dan potensial (pertanian, pariwisata, dan industri) untuk dapat menghasilkan mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak terhadap masyarakat, misi ini merupakan wujud cerminan terhadap visi Provinsi Banten yang Maju.

Misi kedua, terdiri dari upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan industri pengolahan; pengembangan pariwisata; pengembangan ekonomi kreatif; peningkatan produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD; penciptaan lapangan pekerjaan; peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan; peningkatan penguasaan iptek; penerapan ekonomi hijau; transformasi digital; penguatan integrasi ekonomi domestik dan global; serta penguatan peran kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

4.2.3 MISI KE-3, MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN PROFESIONAL

Misi ke-3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan profesional merupakan agenda pembangunan Provinsi Banten yang bertransformasi terhadap tata kelola yang lebih berdampak untuk menghasilkan birokrasi yang lincah, efektif, efisien, adaptif, dan transparan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan

dukungan teknologi mutakhir, misi ini merupakan wujud cerminan terhadap visi Provinsi Banten yang Maju.

Pada misi ini terdiri dari upaya untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem kelembagaan serta sarana prasarana pemerintahan; dan juga mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah; meningkatkan pengawasan terkait operasionalisasi sistem organisasi perangkat daerah; serta meningkatkan integrasi dan adaptasi regulasi dan tata kelola sehingga mampu mendorong berbagai inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan dinamika wilayah.

4.2.4 MISI KE-4, MEWUJUDKAN KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI YANG SUBSTANSIAL, DAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG STABIL

Misi ke-4 yaitu mewujudkan keamanan yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan perekonomian daerah yang stabil merupakan agenda pembangunan Provinsi Banten dalam mewujudkan daerah yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara menyeluruh. Misi ini merupakan wujud cerminan visi Provinsi Banten yang Maju.

Upaya yang ada dalam misi ini untuk mewujudkan keamanan yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan perekonomian daerah yang stabil dilakukan dengan penegakan hukum peraturan daerah; pelaksanaan aksi HAM; penguatan ketertiban dan keamanan; penguatan implementasi demokrasi secara substantif; peningkatan rasio pajak; stabilisasi inflasi; pendalaman intermediasi dan inklusi keuangan; serta penguatan dan pemanfaatan kerjasama untuk pembangunan daerah.

4.2.5 MISI KE-5, MEWUJUDKAN SOSIAL BUDAYA YANG BERADAB DAN EKOLOGI YANG LESTARI

Misi ke-5 yaitu mewujudkan sosial budaya yang beradab dan ekologi yang lestari merupakan agenda pembangunan Provinsi Banten untuk memperkuat karakter individu, keluarga, masyarakat agar lebih berbudaya. Lebih daripada itu, pembangunan tidak hanya difokuskan pada orientasi ekonomi saja yang dapat memberikan dampak buruk pada masa mendatang, sehingga perlunya keseimbangan dengan mempertimbangkan

kondisi lingkungan yang ada. Misi ini bertujuan untuk dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, menghasilkan kelestarian lingkungan melalui langkah penggunaan sumber daya alam yang minimal namun dapat menghasilkan produk atau manfaat yang berdaya guna dalam jangka waktu yang lama. Langkah ini merupakan wujud cerminan terhadap visi Provinsi Banten yang Berkelanjutan.

Upaya yang ada dalam misi ini untuk mewujudkan sosial budaya yang beradab dan ekologi yang lestari melalui kebijakan yang mengarahkan pada sosial budaya untuk menciptakan keberagaman yang maslahat; kebudayaan maju; keluarga yang berkualitas; dan masyarakat yang berkesetaraan gender dan inklusif. Upaya yang tidak kalah penting adalah penciptaan lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan keanekaragaman hayati; penguatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan peningkatan cakupan rumah tangga dengan sanitasi aman. Upaya ini dipadukan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan serta dapat mengoptimalkan kemampuan Banten dalam resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

4.2.6 MISI KE-6, MEWUJUDKAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU, PERKUATAN PEMERATAAN, DAN INTERKONEKSI PEMBANGUNAN

Misi ke-6 yaitu mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan interkoneksi pembangunan merupakan bagian daripada misi kerangka implementasi transformasi terhadap dukungan pada agenda misi ke-1 sampai dengan misi ke-5 yang telah dijabarkan di awal.

Upaya pada misi ini diwujudkan melalui pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan interkoneksi pembangunan dengan beberapa cara, meliputi: pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri, dan pariwisata; akselerasi pertumbuhan perekonomian berbasis komoditas unggulan Banten yang memiliki nilai tambah tinggi; penjagaan kondusifitas iklim investasi; penguatan keterhubungan wilayah Banten dengan ekonomi regional, nasional dan global melalui infrastruktur yang memadai dan merata; pengembangan ekonomi sirkular, ekonomi hijau, dan biru sesuai potensi wilayah; dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi

ketergantungan pada sektor yang rentan melalui peningkatan kolaborasi dan kerjasama antar berbagai *stakeholder*. Serta tidak kalah pentingnya yaitu kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat berkesetaraan *gender* untuk dapat mengakses pendidikan sehingga mampu menciptakan masyarakat berdaya saing dan mudah untuk mengakses lapangan pekerjaan.

4.2.7 MISI KE-7, MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI, BERKUALITAS, DAN BERKELANJUTAN

Misi ke-7 yaitu mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, yang mana misi ini juga termasuk kepada bagian daripada misi kerangka implementasi transformasi yang menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda misi ke-1 sampai dengan misi ke-5 yang telah dijabarkan di awal.

Upaya yang ada di dalam misi ini terkait dengan kemampuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, menciptakan manfaat di berbagai lini sektor pembangunan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan adil terhadap akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang dilakukan melalui penyediaan dan ketersediaan sarana dan prasarana tempat tinggal, air bersih, energi atau listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, pelatihan, kesejahteraan sosial, kebugaran, kreativitas, kepariwisataan, dan kebudayaan. Sehingga masyarakat Banten bisa memiliki sarana dan prasarana memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, serta diharapkan tidak ada lagi timbul kesenjangan antara Banten Utara dan Banten Selatan untuk mendukung pewujudan Indonesia Emas 2045.

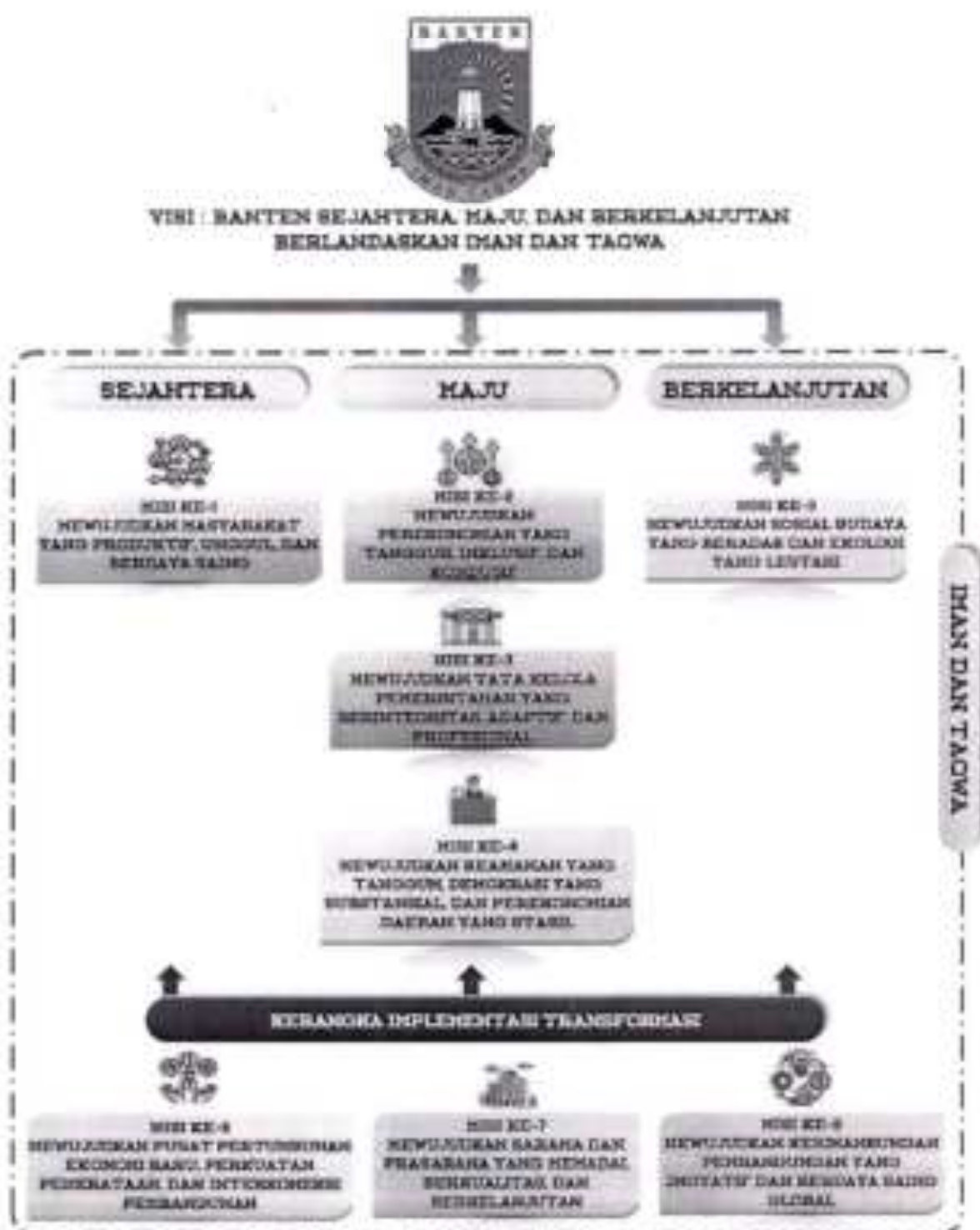
4.2.8 MISI KE-8, MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL

Misi ke-8 yaitu mewujudkan kesinambungan pembangunan yang inovatif dan berdaya saing global, misi ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dengan pembiayaan pembangunan inovatif dalam mendukung pelaksanaan agenda misi ke-1 sampai dengan misi ke-5 yang telah dijabarkan di awal. Hal ini dilakukan melalui serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang

berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih lanjut untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam dokumen ini, perumusan perencanaan juga diarahkan dengan memformulasikan secara SMART, target jelas (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), sesuai kondisi yang ada (*relevant*) dan waktu yang jelas (*time*).

Kewinambungan perencanaan dan pembangunan menjadi penting dalam menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan agar seluruh tahapan pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat terlaksana dengan baik melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan yang disertai dengan manajemen pembangunan berbasis risiko. Khusus dalam menghadapi perubahan mendasar yang memerlukan suatu perkuatan dan implementasi serta pembiayaan pembangunan yang inovatif, upaya inovatif pembiayaan pembangunan harus dilakukan melalui akselerasi pencarian sumber pendanaan yang sesuai aturan yang tidak memberatkan Provinsi Banten dalam mencapai target-target yang diturunkan ke daerah.

Kedelapan misi (agenda) pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan Iman dan Taqwa sebagai bagian daripada visi Provinsi Banten. Iman memberikan dasar keyakinan dan Taqwa mendorong seseorang yang bertindak sesuai keyakinan tersebut. Keduanya bersama-sama membentuk karakter yang kuat dan moral yang tinggi untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, keterkaitan misi dengan pokok visi tersaji pada gambar di bawah ini. Selanjutnya misi ini dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang akan dijabarkan pada bab selanjutnya.



Gambar IV.5
Hubungan Keterkaitan Pokok Visi Terhadap 8 (Delapan) Misi (Agenda)
Pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024)

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah target pencapaian dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan yang diterjemahkan prioritasnya pada setiap tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan.

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

Sebagaimana yang telah disinggung di awal, bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan yang dibagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan pembangunan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang dijabarkan per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Selanjutnya, arah kebijakan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

5.1.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Sesuai hasil evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 terdapat berbagai rekomendasi arah kebijakan untuk RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, kemudahan dan kemandirian berusaha bagi UMKM, serta peningkatan investasi; (2) peningkatan kualitas SDM dengan penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang; (4) penguatan strategi pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan bencana; serta (5) penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pembangunan.

Lebih lanjut, dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi Indonesia Emas 2045 "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,

Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan regional Pulau Jawa. Arah kebijakan Pembangunan nasional bagi pembangunan Banten yaitu: (1) Banten Utara diarahkan untuk pengembangan industri hijau ramah lingkungan; (2) pengembangan kawasan strategis industri; (3) pemanfaatan ALKI I di Wilayah Selat Sunda untuk menghubungkan rantai pasok domestik dan global yang terpadu; (3) peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa-Bali dengan pengembangan Merak-Bakauheni; (4) percepatan pembangunan optimalisasi/penguatan potensi wilayah dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan utamanya pada kawasan afirmasi di Jawa termasuk Banten Selatan.

Selaras dengan tahapan Pembangunan dalam RPJPN, tahapan Pembangunan di Provinsi Banten dibagi menjadi empat tahap dengan fokus arah kebijakan dan tema makro pembangunan setiap periode yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok sebagaimana tergambar berikut ini.



Gambar V.1
Pentahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

(Sumber: Ditah oleh Skppeda, 2024)

Sasaran pokok 5 (lima) tahunan ini merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD, maka berikut arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

5.1.1.1 TAHAP I TAHUN 2025-2029, PENGUATAN MODAL DASAR

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap RPJPD sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru serta penguatan riset dan inovasi; peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan; dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pada tahap periode pertama ini, Penguatan Modal Dasar pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini diselaraskan dengan arah kebijakan periode pertama RPJPN 2025-2045 berupa Perkuatan Fondasi Transformasi.

5.1.1.2 TAHAP II TAHUN 2030-2034, PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap pertama, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk melaksanakan peningkatan proses pembangunan. Peningkatan pembangunan diwujudkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kesehatan serta penguatan kualitas perlindungan sosial; peningkatan investasi dan penanaman modal dan pengoptimalan produktivitas UMKM daerah; penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; pengembangan diversifikasi dan konservasi energi; pengembangan kerjasama multipihak antar lembaga; dan penguatan fungsi infrastruktur di kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengintegrasian transportasi darat, laut, dan udara. Pada tahap kedua ini, Peningkatan Pembangunan pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini diselaraskan dengan arah kebijakan periode kedua RPJPN 2025-2045 berupa Akselerasi Transformasi.

5.1.1.3 TAHAP III TAHUN 2035-2039, PENGEMBANGAN KAPABILITAS

Berkesinambungan dengan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap kedua, arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga diarahkan untuk melaksanakan pengembangan kapabilitas daerah. Pengembangan kapabilitas diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualifikasi digital daerah; penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan ekspor; pengembangan agro technopark; pengoptimalan kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik; dan pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah, pengintegrasian transportasi darat, laut, dan udara, serta pengembangan kawasan perdesaan. Pada tahap ketiga ini, Pengembangan Kapabilitas pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini diselaraskan

dengan arah kebijakan periode ketiga RPJPN 2025-2045 berupa Ekspansi Global.

5.1.1.4 TAHAP IV TAHUN 2040-2045, PERWUJUDAN CAPAIAN PEMBANGUNAN

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap ketiga, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun keempat diarahkan untuk melaksanakan perwujudan capaian Pembangunan. Capai ini dilakukan melalui perwujudan kondisi lingkungan belajar sebagai pengoptimalan kualifikasi dan kompetensi pendidikan daerah; pemantapan inovasi yang berdaya saing tinggi; pemantapan pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan hidup; pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah; pemantapan kualitas desentralisasi fiskal; dan pemantapan penataan permukiman serta tata ruang wilayah. Pada tahap keempat ini, perwujudan capaian pembangunan pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini diselaraskan dengan arah kebijakan periode keempat RPJPN 2025-2045 berupa Perwujudan Indonesia Emas.

5.1.2 ARAH KEBIJAKAN PADA MISI RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

5.1.2.1 MISI 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING

Untuk dapat Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing telah dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1, yang mana arah kebijakan ini diarahkan guna mencapai 10 (sepuluh) indikator utama pembangunan terkait Misi 1. Sementara itu arah kebijakan pentahapan pembangunan tergambar dalam gambar di bawah ini.



Gambar V.2
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-1 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

(Sumber: Ditahab oleh Supriatna, 2024)

5.1.2.2 MISI 2, MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH, INKLUSIF, DAN KONDUSIF

Untuk dapat Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif telah dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1, yang mana arah kebijakan ini diarahkan guna mencapai 13 (tiga belas) indikator utama terkait Misi 2. Sementara itu arah kebijakan pentahapan pembangunan tergambar pada gambar di bawah ini.



Gambar V.3
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-2 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

(Sumber: Ditolah oleh Disprotek, 2024)

5.1.2.3 MISI 3, MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN PROFESIONAL

Untuk dapat Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional telah dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1, yang mana arah kebijakan ini diarahkan guna mencapai 4 (empat) indikator utama pembangunan terkait Misi 3. Sementara itu arah kebijakan pentahapan pembangunan tergambar dalam gambar di bawah ini.



Gambar V.4
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-3 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

(Sumber: Ditolah oleh Disprotek, 2024)

5.1.2.4 MISI 4, MEWUJUDKAN KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI YANG SUBSTANSIAL, DAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG STABIL

Untuk dapat Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil telah dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1, yang mana arah kebijakan ini diarahkan guna mencapai 9 (sembilan) indikator utama pembangunan terkait Misi 4. Sementara itu arah kebijakan pentahapan pembangunan tergambarkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar V.5
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-4 RPJPD Provinsi Banten
Tahun 2025-2045

(Sumber: Ditah oleh Bappeda, 2024)

5.1.2.5 MISI 5, MEWUJUDKAN SOSIAL BUDAYA YANG BERADAB DAN EKOLOGI YANG LESTARI

Untuk dapat Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi yang Lestari telah dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1, yang mana arah kebijakan ini diarahkan guna mencapai 9 (sembilan) indikator utama pembangunan terkait Misi 5. Sementara itu arah kebijakan pentahapan pembangunan tergambarkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar V.6
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-5 RPJPD Provinsi Banten
Tahun 2025-2045

(Sumber: Ditah oleh Bappeda, 2024)

5.1.2.6 MISI 6, MEWUJUDKAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU, PERKUATAN PEMERATAAN, DAN INTERKONEKSI PEMBANGUNAN

Untuk dapat Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Perkuatan Pemerataan, dan Interkoneksi Pembangunan telah dirumuskan arah kebijakan meliputi:

- a. Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan kawasan lainnya sebagai pusat produksi;
- b. Pengembangan inovasi teknologi industri dan hilirisasi produk industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- c. Pengembangan dan penguatan kawasan pelabuhan sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi sektor logistik maupun sektor transportasi penyeberangan penumpang dan barang;
- d. Pengembangan kawasan pariwisata dan kebudayaan lokal Banten sebagai pusat ekonomi kreatif;
- e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas UMKM/Bumdes/lembaga ekonomi mikro lainnya;
- f. Pengembangan kawasan perkotaan Serang menuju kota metropolitan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian, perdagangan, dan jasa;
- g. Pengembangan pusat pemerintahan baru sesuai potensi dan aspirasi masyarakat;
- h. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan *sport science* dan *Central Business District* (CBD) di wilayah Banten; dan
- i. Peningkatan interkoneksi pembangunan yang terpadu dan terstruktur melalui penguatan kerja sama antardaerah untuk menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

5.1.2.7 MISI 7, MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI, BERKUALITAS, DAN BERKELANJUTAN

Untuk dapat Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Berkualitas, dan Berkelanjutan telah dirumuskan arah kebijakan meliputi:

- a. Optimalisasi modalitas ALKI I Selat Sunda sebagai interkoneksi rantai pasok yang terpadu;
- b. Dukungan terhadap optimalisasi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai kawasan perekonomian *aerocity*;

- c. Optimalisasi dan pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui sistem angkutan umum massal berbasis bus dan rel beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
- d. Optimalisasi dan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*edusaintech*) serta balai-balai pelatihan keterampilan kerja;
- e. Optimalisasi dan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- f. Pembangunan dan optimalisasi jalan non tol dan jalan tol untuk menghubungkan pembangunan dan pemerataan antar daerah dan meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik;
- g. Optimalisasi dan pengembangan kawasan permukiman inklusif dan berkelanjutan;
- h. Optimalisasi dan pembangunan TPST Regional, TPS3R, dan sanitasi aman;
- i. Optimalisasi dan pengendalian kelangkaan air dan potensi banjir melalui penyediaan waduk, bendungan, irigasi, dll;
- j. Pengembangan energi bersih (*clean energy*) berbasis energi baru dan terbarukan.

5.1.2.8 MISI 8, MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL

Untuk dapat Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan yang Inovatif dan Berdaya Saing Global telah dirumuskan arah kebijakan meliputi:

- a. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Provinsi Banten dengan nasional;
- b. Dukungan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kabupaten/kota di Provinsi Banten;
- c. Pengintegrasian rencana pembangunan yang sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan sasaran prioritas nasional serta peningkatan sistem elektronik terpadu dalam tata kelola pemerintahan dan juga tata kelola data pembangunan pemerintahan;
- e. Pengembangan sumber pembiayaan baru yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Tabel V.1
Arah Kebijakan Misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PENGANGKUTAN (RUPP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
Banten Sejahtera, Maju, dan Berkeadilan berdasarkan hasil dan Tawar	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,36	80,34	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, penyediaan sarana prasarana kesehatan, peningkatan tenaga kesehatan pada pelayanan dasar kesehatan melalui pemanfaatan sistem pelayanan kesehatan berbasis digital serta dukungan terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang	Pengembangan kegiatan inovasi manajemen pengembangan sub spesialisasi layanan dengan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau bagi seluruh masyarakat dan tenaga medis yang berkompetensi serta peningkatan pengendalian terhadap kualitas dan kuantitas jumlah penduduk	Peningkatan upaya kesehatan dan akses layanan kesehatan universal melalui pengisian sistem kesehatan berbasis teknologi	Peningkatan kualitas hidup keluarga pada seluruh siklus kehidupan untuk meningkatkan status yang berdaya saing dan sejahter
		2. Kesehatan ibu dan anak						
		a) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	101,00	10,00	Peningkatan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan sarana, prasarana dan peningkatan data pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kegiatan multisektoral dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar
		b) Prevalensi stunting (persen) dan sangat pendek pada balita (%)	21,30	6,50	Peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan data dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan upaya pemerintah provinsi melalui intervensi sensitif dan spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting	Peningkatan kegiatan multisektoral dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan kolaborasi non pemerintah	Peningkatan kegiatan multisektoral kegiatan untuk meningkatkan stunting
		3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)						
		a) Cakupan pemeriksaan kasus Tuberkulosis	95,00	95,00	Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pemeriksaan kasus dan	Peningkatan upaya pemerintah dan pengelolaan kasus TBC melalui	Akselerasi kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan kasus	Peningkatan pengelolaan TBC sesuai perkembangan

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PENGANGKUTAN (IUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		(Treatment coverage) (%)			pengkajian data TBC secara digital	pengkatan pendampingan keluarga dan masyarakat	TBC pada seluruh lapisan masyarakat	
		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment success rate) (%)	92,80	98,00	Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan pengobatan TBC melalui lintas program dan lintas sektor	Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dalam memelihara keberhasilan pengobatan TBC	Penguatan kegiatan multisektor dalam keberhasilan pengobatan TBC	Perwujudan pengendalian dan pengobatan penyakit TBC secara terdistribusi
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,73	99,50	Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat	Pemenuhan Jaminan kesehatan nasional yang cukup dan berkelanjutan	Peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan Standar Praktik Minimal	Perwujudan jaminan kesehatan nasional yang adil, efektif dan efisien
		5. Hasil pembelajaran						
		a) Pemerintah kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada masing-masing tingkat nasional untuk:						
		6 Literasi membaca (%)	12,50-25,00	62,50-75,00	Peningkatan akses pendidikan dengan percepatan smpil belajar 13 tahun melalui keterpaduan sarana prasarana pendidikan dan diversifikasi layanan pendidikan	Peningkatan kualitas, sertifikasi dan distribusi guru dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, berbasis komunitas, dan non formal	Penguatan pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi data pendidikan untuk inovasi pembelajaran	Perwujudan pembelajaran yang berkualitas melalui penguatan kurikulum adaptif dan pemenuhan kompetensi melalui integrasi soft skill, hard skill dan life skill
		6) Persentase sesuai pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada masing-masing:						
		6 Literasi membaca (%)	34,43-36,43	63,23-67,23	Penguatan kurikulum dan materi kependidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis soft skill, karakter dan agama, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Arts, and Mathematics)	Peningkatan akses dan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis soft skill, karakter dan agama, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Arts, and Mathematics)	Pemenuhan pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis soft skill, karakter dan agama, digital dan teknologi informasi, STEAM	Perwujudan penyelenggaraan pendidikan tinggi trinitas pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					Technology, Engineering, Arts and Mathematics)	STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)	Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)	berkualitas, berbasis keunggulan wilayah yang bertaraf global dengan berlandaskan karakter dan agensi
		c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 65 atau 15 tahun (tahun)	9,86-9,88	12,49-12,52	Pemenuhan sarana dan prasarana menuju tercapainya 100 persen dayaampung bagi lulusan sekolah menengah pertama	Penguatan kualitas, efisiensi biaya dan pelayanan lembaga pendidikan	Penguatan ekosistem pembelajaran melalui diversifikasi layanan pendidikan	Pertajaman kualitas pembelajaran berdasarkan potensi dan minat bakat peserta didik
		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31-13,32	14,72-14,77	Peningkatan akses pendidikan menengah atas berkualitas serta peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kependidikan yang mendorong daya saing dan ketangguhan kerja melalui penguatan kompetensi dan keahlian baru	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah melalui inovasi pengembangan Center of Excellence	Penguatan kurikulum pendidikan menengah atas berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah penastuk kondisi keberagaman daerah)	Pertajaman penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global
		e. Proportional penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi (%)	9,84	9,84-10,26	Penguatan sistem peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan	Penguatan disseminasi akses dan informasi lembaga pendidikan tinggi berkualitas bagi pelajar tingkat menengah	Penguatan penataan anggaran pendidikan, pemerataan sumber dana manfaat dan dana abadi pendidikan, dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan	Pertajaman Center of Excellence bagi pelajar daerah yang memiliki tingkat keagenan unggul yang diarahkan dukungan informasi dan sumber pendanaan

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PENGANGKUTAN (RUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBERJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah hingga (%)	61,42	73,08	Penguatan lembaga pendidikan dan peningkatan kapasitas instruktur yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi dan keahlian baru	Penguatan kecerdasan manusia dan penguatan pembelajaran bidang keahlian sesuai kebutuhan DUDI melalui penguatan keterampilan sains dan teknologi	Dukungan kejasama penelitian dan kegiatan DUDI melalui penguatan program sertifikasi kompetensi bagi peningkatan prestasi kerja	Pemajuan keberhasilan dan sistem pembelajaran bersumber sumber Abad 21
		8. Tingkat keselamatan (%)	4,35-5,30	0,04-0,34	Peningkatan jaminan sosial terhadap persiapan pendidikan, keselamatan dan sikap tinggi bagi masyarakat rentan	Peningkatan dan kemudahan masyarakat rentan dalam mengakses kegiatan pendidikan formal dan non formal dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas diri	Peningkatan akses masyarakat terhadap dunia kerja	Pemajuan pemerataan keselamatan pada masyarakat rentan
		9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial keteragakerjaan promisi (%)	46,8	82,52	Peningkatan keadilan terhadap hak atas perlindungan sosial bagi masyarakat	Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat	Pemerataan perlindungan sosial bagi masyarakat	Pemajuan perlindungan sosial bagi masyarakat dalam rangka universal social protection
		10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	26,60	65,00	Pemerataan hak atas perlindungan dan pembelajaran ekonomi melalui peningkatan kemampuan kerja di sektor formal bagi kelompok penyandang disabilitas	Pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja bagi kelompok penyandang disabilitas yang berdaya saing global dan sertifikasi	Pemerataan dan penguatan penyediaan jaminan sosial, jaminan keteragakerjaan, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi kelompok penyandang disabilitas	Pemajuan kelompok penyandang disabilitas berdaya saing global yang memiliki kemampuan kerja di sektor formal
	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh	11. Basis PORD Industri Pengolahan (%)	30,48-31,30	34,99-36,13	Penguatan SDM, pengembangan dan pemanfaatan	Pengembangan industri hijau, peningkatan	Pembelajaran dan, pengembangan	Pemajuan kemajuan industri, industri hijau, SDM

VISI	MISI	INDIKATOR UTARA PENGANGKUTAN (UPU)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KERJA			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	Inklusif, dan Kondusif				teknologi tepat guna bagi UKM, pemanfaatan KPI, pengembangan dan penggunaan KI, dan hilirisasi berbasis sumber daya alam	kejasama industri kecil menengah dengan industri besar, dan pemanfaatan infrastruktur industri dan pengangkutan	Sektor Industri Kecil Industri Menengah (IKIM), dan penggunaan aset dan lokasi di sektor industri kecil menengah	regulasi, UKM, riset dan inovasi untuk meningkatkan daya sangat daerah
		12. Pengembangan Pariwisata:						
		a) Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	3,43	4,17	Penggunaan 6A (atraksi, amenities, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package), penciptaan pusat niaga lokal dan integrasi infrastruktur kelestarian pariwisata menuju destinasi wisata	Penggunaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), aksesibilitas pariwisata menuju destinasi wisata	Penggunaan modernisasi dan diferensiasi atraksi wisata berdasarkan kekhasan daerah berbasis rasa global	Penggunaan 6A (atraksi, amenities, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package) dan MICE (Meeting, incentive, Convention, and Exhibition) pada destinasi wisata sesuai standar global
		b) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (juta orang)	496,89	1.242,23	Penggunaan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan dan sumber daya lokal, peningkatan BUM perikanan, pengembangan infrastruktur kemunculan pada destinasi wisata	Penggunaan inovasi dan skala pemanfaatan kearifan, atraksi alam dan budaya yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan dan potensi wilayah	Penggunaan budaya rumah wisatawan pada masyarakat	Penggunaan pariwisata berkelanjutan yang didukung 6A (atraksi, amenities, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package)
		13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	5,36	6,62	Penggunaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, dan pengangkutan	Penggunaan ekonomi kreatif yang berbasis sangat berbudaya hak kekayaan budaya dan intelektual	Penggunaan tali ekonomi kreatif dan kluster ekonomi kreatif yang didukung teknologi informasi mutakhir	Penggunaan pertumbuhan start up kreatif dan digital berbasis seni dan budaya Banten sebagai trendsetter nasional dan global

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KERJA			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		14. Produktivitas UMKM, Raperan, BUMD						
	a-i	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,71	13,75	Peningkatan kualitas data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian	Pertumbuhan kesempatan berusaha melalui kemudahan aksesibilitas permodalan, kelembagaan dan penguatan melalui teknologi informasi	Pengediaan akses ruang bagi masyarakat, pembinaan usaha kecil dan menengah dengan subsidi	Pemantapan kelangkaan kesempatan, pendataan dan pembinaan melalui anggaran dan pemenuhan melalui rantai pasok domestik dan rantai pasok global
	a-ii	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,29	5,26	Peningkatan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Pengembangan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Penguatan dan pemertaan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Penguatan industri kecil dan menengah yang berdaya saing menghasilkan produk bernilai ekonomi global
	ii	Rasio kewirausahaan daerah (%)	1,11	3,93	Penguatan budaya, nilai, dan karakter wirausaha sejak usia dini dan pada lembaga kependidikan, dan penguatan pusat inkubasi bisnis	Pengembangan akses eksklusif dan insentif melalui talent pool, penguatan industri, dan business, dan pengembangan pusat inkubasi bisnis	Penguatan regulasi, pusat inkubasi bisnis dan standarisasi lembaga pembinaan kewirausahaan yang adaptif dengan trend global	Penguatan peran lembaga start, industri, dan lembaga pembiayaan dalam pembinaan calon wirausaha baru
	c	Rasio volume usaha koperasi terhadap PKDB (%)	0,57	4,39	Peningkatan kualitas data dan sistem informasi, dan kesiapan amanah pembinaan koperasi berdasarkan standar klasifikasi	Penguatan akses permodalan, pemasaran, dan pemahaman bagi koperasi	Penguatan koperasi non empuk pangan melalui akses bagan usaha dengan industri atau lembaga pengujian tinggi	Penguatan koperasi yang adaptif dan modern
	d	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,89	3,69	Korporatisasi BUMD melalui penguatan	Pemadatan ide aset daerah untuk dikelola oleh BUMD	Penguatan Pembiayaan dan pengurusan	Pewujudan BUMD yang dapat menghidupi

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	AKSI KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					penetapan dan pelaksanaan pemerintah	yang memiliki nilai ekonomis untuk penguatan pelayanan maupun peningkatan pendapatan daerah	pengelolaan aset pada BUMD	terwujudnya aset infrastruktur bernilai ekonomis
		15. Penguatan Lapangan Kerja yang Baik						
		a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87-7,24	6,17-7,14	Peningkatan keahlian angkatan kerja melalui pemberdayaan pendidikan dan pelatihan melalui Dik and match, teaching factory dan penempatan yang berbasis kebutuhan, dual system, dan kewirausahaan	Peningkatan pendidikan dan pelatihan re-skill dan up-skill bagi angkatan kerja dengan memanfaatkan teknologi seperti kewirausahaan digital	Peningkatan fasilitas kesehatan Pekerja untuk mengisi pasar kerja global	Perwujudan lapangan kerja menengah ke atas di sekitar sekitar produksi industri lapangan kerja higen, baru dan digital
		b) Persentase lapangan kerja formal (%)	36,00	83,00				
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,00	61,50	Penguatan proyek diskriminasi gender dan Penguatan kesadaran keamanan baik dalam akses pekerjaan kepada masyarakat	Peningkatan pelatihan re-skill dan up-skill bagi angkatan kerja perempuan dengan memanfaatkan teknologi seperti kewirausahaan digital	Dukungan fasilitas kesehatan pekerja perempuan untuk mengisi pasar kerja	Perwujudan tempat kerja ramah perempuan pada dunia usaha dan dunia industri
		17. Tingkat penguasaan IPTEK						
		a) Indeks Inovasi Daerah (indeks)	58,00-60,00	83,00	Peningkatan kualitas, percepatan fondasi dan arah kebijakan penguatan ketertarikan dan regulasi pengembangan daya saring daerah dan inovasi daerah	Peningkatan SDM riast yang unggul dan berdaya saing global	Penguatan penguatan riset, inovasi dan daya saing daerah	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing global
		18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	57,38	73,90	Peningkatan efisiensi dan pengurangan terhadap	Penguatan pengurangan terhadap	Penerapan ekonomi sirkular	Perwujudan penerapan Ekonomi Hijau di semua

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PENGANGUNAN [IUP]*	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KERJA			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					penggunaan sumber daya, perampangan daya guna produk dan material, peningkatan daya ulang, pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dan percepatan transisi energi strategis pemanfaatan energi baru terbarukan	penggunaan sumber daya, perampangan daya guna produk dan material, peningkatan daya ulang, pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi serta transisi energi asetnya berkeadilan dengan menyediakan keadilan dan kesempatan kerja baru	sektor industri prioritas nasional (pangan, ritel, elektronik, konstruksi, tekstil, dll)	
		14. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,8	72,21	Penerapan Konservasi dan Diversifikasi Energi	Penyediaan EBT untuk Kebutuhan Daerah	Peningkatan Penyediaan EBT untuk Kebutuhan Daerah	Penyediaan dalam pemanfaatan hasil Transisi Energi Baru Terbarukan
		19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	6,30	7,80	Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan TIK untuk mengurangi kesenjangan digital	Peningkatan kolaborasi dan komitmen bersama untuk dan komitmen dalam rangka pengembangan dan implementasi TIK	Penyediaan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi digital
		20. Kualitas rumah harga antarkelas tingkat provinsi	6,37	4,41	Peningkatan kualitas SDM, keterampilan serta penciptaan ekosistem legistik yang efisien	Peningkatan mutu pemerintahan baru yang efisien dan pengaman daya sangat pusat pertumbuhan KI dan KEK	Pengawasan legistik daerah melalui pemanfaatan teknologi digital	Penyediaan migrasi konktivitas dengan infra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi
		21. Penentuan Modal Tetap Fisik (MPT2005)	34,53	29,72	Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi, pengembangan sistem pendanaan dan badan inovatif serta pengujian	Penguatan iklim investasi, inovasi sumber pembiayaan alternatif dan kolaborasi badan usaha milik daerah dengan badan usaha lainnya guna	Penguatan citra Provinsi Banten sebagai destinasi investasi pilihan melalui kondusifitas daerah dan perdagangan	Penerapan citra Provinsi Banten sebagai daerah tujuan investasi

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ADAN KEBERJARAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					pelaksanaan badan usaha milik daerah melalui tata kelola dan proses bisnis yang efektif	perluasan layanan dan pertumbuhan bisnis guna mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah		
		22. Ekspor barang dan Jasa (% PDRB)	31,31	36,31	Peningkatan infrastruktur Distribusi Rantai pasok	Penguatan infrastruktur Distribusi Rantai pasok	Penguatan fasilitas infrastruktur dan fasilitas keuangan Distribusi rantai pasok	Peningkatan fasilitas infrastruktur dan fasilitas keuangan distribusi rantai pasok
		23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
		a) Persentase kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	24,63 WM Jakarta Herdai dan DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cileungsi	31,19 WM Jakarta Herdai dan DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cileungsi	Kolaborasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi guna meningkatkan iklim investasi, mendorong ekonomi domestik dan kespasian berusaha, serta integrasinya integrasi konektivitas infrastruktur dengan barang dan jasa secara hibrid	Penguatan perluasan sebagai hub ekonomi melalui integrasi konektivitas infrastruktur dengan barang dan jasa secara berkelanjutan, penguatan klaster ekonomi yang unggul dan berdaya saing	Penguatan perluasan sebagai hub ekonomi melalui integrasi konektivitas infrastruktur dengan barang dan jasa, penguatan klaster ekonomi yang unggul dan berdaya saing	Peningkatan perluasan budaya unggul tinggi integrasi intra dan antar pulau pertumbuhan di tingkat regional dan nasional maupun global
		b) Rumah tangga dengan akses layanan layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	87,98	100,00	Peningkatan rumah layak berbasis green and smart infrastructure and resilience	Perluasan layanan compact yang terintegrasi antar fungsi tingkat tinggi, kesehatan, transportasi,	Peningkatan kota kolaboratif dan inovatif	Peningkatan kota layak huni yang inklusif dan berkelanjutan

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		c) Persentase desa mandiri (%)	2,260	15,110	Penguatan kapasitas desa, kerjasama antar desa lintas kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, dan regulasi desa serta harmonisasi dan koordinasi kelembagaan desa.	reformasi, dan (sustainable city) Peningkatan sumber daya dan sarana dan prasarana desa, penyusunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	Peningkatan pembangunan desa dan partisipasi seluruh unsur desa	Perwujudan pembangunan dan komandiriasi desa
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	24. Indeks Reformasi Hukum (indeks)	65,00	100,00	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi beserta kompetensi pemegang praktik hukum daerah	Penguatan kualitas kelembagaan regulasi yang efektif dan penataan proses hukum regulasi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara terpadu	Peningkatan efisiensi dan peningkatan koordinasi serta harmonisasi penyusunan praktik hukum daerah	Perwujudan implementasi produk hukum daerah yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,50	5,00	Penguatan proses bisnis, regulasi dan kelembagaan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung dengan kompetensi SDM yang terampil tinggi dalam pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan koordinasi dan pengembangan collaborative governance serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan dukungan infrastruktur dan keamanan terhadap teknologi informasi	Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kompeten di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terhubung dengan keamanan terhadap teknologi informasi	Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten yang berintegritas, adaptif dan profesional dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		26. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3,00	5,00	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM serta penguatan sarana dan	Peningkatan partisipasi masyarakat publik dalam menetapkan kebijakan melalui	Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang aman dan cepat	Perwujudan Provinsi Banten yang prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	AKSI KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					penataan berbasis digital dalam rangka pelayanan publik	kemudahan pelayanan dan tindak lanjut respon aduan yang cepat		
		27. Indeks Integrasi Nasional (indeks)	72,74	87,61	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah	Penguatan internalisasi integrasi pada seluruh penyelenggara pemerintah daerah serta peningkatan partisipasi aktif publik dalam pengawasan	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta penguatan komitmen publik terhadap keterbukaan proses pembangunan	Perwujudan Provinsi Banten yang transparan dan berintegritas dalam pelaksanaan pelayanan pembangunan daerah
	Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substantif, dan Percepatan Daerah yang Stabil	28. Hukum Berkeadilan						
		a) Persentase penegakan hukum peraturan daerah (%)	70,00	100,00	Peningkatan Rumusam Kebijakan terkait Pembangunan Hukum	Penguatan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan pemerintahan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan penegakan HAM	Peningkatan pemertahan akses dan keragaman masyarakat dalam menerima hak atas aspek sipil dan publik serta hak atas aspek ekonomi, sosial dan budaya	Perwujudan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang berbond mematuhi HAM secara adil dan merata
		b) Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM (%)	60,00	80,00				
		29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area terpadu unggas (%)	55,29	72,67	Peningkatan Rumusam Kebijakan Terkait Transhumanisasi	Penguatan Kapasitas Aparatur dan Sarana Prasarana Pendukung Transhumanisasi	Penguatan Evaluasi Implementasi Kebijakan Transhumanisasi	Perwujudan Transhumanisasi yang berkelanjutan
		30. Indeks Demokrasi Provinsi (indeks)	Sedang	Tinggi	Harmonisasi Kebijakan Demokrasi	Pembangunan Nilai Riset Kebijakan dan Kebijakan yang Berdaulat	Pertumbuhan Keresahan dan Konflik Hak Asasi Manusia	Perwujudan demokrasi substantif yang berdampak bagi masyarakat
		31. Rasio Pengu terhadap PDRB (%)	2,34	5,00	Penguatan Kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan	Peningkatan Kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan	Akselerasi Kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam	Perwujudan iklim investasi yang kondusif

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (GUP)	BASELINE 2020*	TARGET 2045*	ARAH KEBELAJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					Iklim investasi yang kondusif	Iklim investasi yang kondusif	memertipkan iklim investasi yang kondusif	
		32. Tingkat inflasi (%)	3,30-3,60	1,10-3,10	Penguatan Kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga	Peningkatan Kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga	Akselerasi Kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga	Penguatan stabilitas ekonomi Provinsi Banten
		33. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan						
		a) Total dana pihak ketiga/POKH (%)	33,34	77,30	Penguatan peran Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoordinasikan berbagai stakeholder Dana Pihak Ketiga	Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan Dana Pihak Ketiga	Penguatan SIM di sektor perbankan	Penguatan digitalisasi mendukung peningkatan dana pihak ketiga
		b) Aset dana pensiun/POKH (%)	0,77	7,38	Peningkatan literasi dana pensiun	Penguatan SIM di sektor dana pensiun	Penguatan koordinasi antar stakeholder	Penguatan digitalisasi mendukung peningkatan aset dana pensiun
		c) Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rupiah)	17.909.655,76	199.641.708,14	Peningkatan literasi pasar saham	Pencapaian ekosistem pasar saham tingkat Provinsi Banten	Penguatan koordinasi antar stakeholder	Penguatan digitalisasi ekosistem pasar saham di Provinsi Banten
		d) Total kredit/POKH (%)	25,81	66,88	Peningkatan literasi kredit	Penguatan SIM di sektor keuangan	Penguatan koordinasi antar stakeholder	Penguatan digitalisasi mendukung peningkatan kredit
		34. Indeks kepercayaan (%)	91,83	99,62	Penguatan profil keuangan masyarakat	Peningkatan edukasi keuangan inklusi	Penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder	Penguatan peran digitalisasi dalam inklusi keuangan
		35. Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/ sister province (jumlah)	3,00	8,00	Penguatan koordinasi antar stakeholder dalam rangka perencanaan kerjasama antar provinsi dan penajaban kerjasama	Penguatan fasilitas kerjasama di berbagai bidang	Penguatan sinergi kerjasama serta tindak lanjut hasil Kerjasama	Penguatan pemanfaatan hasil hubungan kerjasama yang inklusif

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBERKIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		36. Indeks Ketahanan Nasional (indeks)	Cukup Tinggi	Sangat Tinggi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Ekonomi	Mengurangi Kesenjangan dan meningkatkan Pemerataan Infrastruktur, Konektivitas dan Pemberdayaan Masyarakat lokal	Peningkatan Daya Saing melalui Inovasi, Riset dan Pengembangan	Pewujudan pembangunan karakter daerah yang kuat dan berdaya guna berlandaskan iman dan Tawakal untuk ketahanan nasional
	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi Lestari	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (indeks)	53,63-53,67	62,37-62,77	Penguatan regulasi, perlindungan, pengembangan dan pelestarian warisan kebudayaan, nilai budaya dan pemertanian yang tersertifikasi serta peningkatan sertifikasi kompetensi pelaku kebudayaan	Pengembangan dan pelestarian warisan dan prasarana kebudayaan, nilai budaya dan pemertanian yang tersertifikasi dengan dukungan pelaku kebudayaan yang tersertifikasi	Pemertanian aset budaya sebagai landasan moral bagi peerti dan pemertanian masyarakat	Pewujudan kesadaran berkebudayaan secara berkelanjutan
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (indeks)	70,68-70,77	76,92-77,93	Peningkatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama melalui penguatan moderasi beragama, penegakan konflik agama serta pengembangan dan pendidikan karakter setiap generasi khususnya generasi muda untuk memiliki moral, etika dan berakhlakul karimah	Peningkatan kolaborasi antara stakeholder dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui penguatan pendidikan karakter	Penguatan kolaborasi dan implementasi kebijakan kerukunan umat beragama	Pewujudan Perilaku Iman yang memiliki toleransi beragama yang melahirkan dengan berlandaskan pada jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa
		39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (indeks)	69,76-69,78	74,75-74,78	Pengendalian penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, peningkatan	Penguatan kebijakan pengendalian penduduk dan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk	Penguatan pemberdayaan keluarga sebagai motor penggerak pembangunan	Pewujudan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PENGANGGARAN (IUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					penelitian dalam membangun keluarga dan peningkatan kapasitas serta ketahanan keluarga	mencapai keluarga harmonis dan berdaya sang		
		40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	0,442-0,443	0,220-0,208	Internalisasi kesetaraan gender dalam pembangunan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia), peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan kebijakan rumah keluarga dan layanan dukungan keluarga serta pemberdayaan pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas	Penguatan kapasitas gender dalam partisipasi pembangunan, pemberdayaan pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas, optimalisasi penyelenggaraan PUG dan peningkatan akses layanan dasar yang berkualitas	Pengoptimalan upaya pemberdayaan manusia berbasis gender	Perwujudan ketahanan dan kondisi gender anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia)
		41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Darah (indeks)	0,524	0,626	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kebijakan, inovasi (tugas dan rencana), identifikasi dan inventarisasi pengelolaan keanekaragaman dan perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati	Peningkatan ekosistem keanekaragaman hayati melalui identifikasi, inventarisasi, dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal, kekhazanah ekosistem, sponal dan kekayaan spesies	Penguatan partisipasi, kolaborasi dan pengintegrasian kebijakan inovatif dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Perwujudan inovasi pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis konservasi dan preservasi

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PENGANGKURAN (RUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		4.2. Kualitas Lingkungan Hidup						
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	66,92	74,92	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan keanekaragaman hayati, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta penganggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan teknologi sebagai sarana pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup	Perwujudan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan
		b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13,39	70,00	Peningkatan edukasi, edukasi, sosialisasi, peningkatan lingkungan, perbaikan perilaku masyarakat aktif masyarakat dan pemenuhan fasilitas infrastruktur akses sanitasi aman yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Pengaturan dan optimalisasi keberlanjutan dan tata kota, penyelenggaraan sanitasi, peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak secara aman dan terjangkau dengan pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi infrastruktur sanitasi serta pengoptimalan infrastruktur SPALD/SPALDT	Pengaturan kerja sama dan peningkatan pemerataan, percepatan layanan akses sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan efektif	Perwujudan transformasi layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan efektif
		c) Pengelolaan sampah - Tertutupi sampah setelah di fasilitas	0,00	90,00	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Penerapan teknologi tepat guna, terkini dan berkelanjutan	Pengoptimalan sarana dan pengembangan	Perwujudan perubahan perilaku menuju gaya hidup

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (RIPY) ^a	BASELINE 2025 ^a	TARGET 2045 ^a	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		pengelolaan sampah (%)			organik dan anorganik melalui pemertapan kebijakan berbasis extended producer responsibility (EPR), jaringan pengangkutan sampah, kerja sama antar rumah dan komunitas melalui penggunaan teknologi terkait dan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	untuk pemertapan sampah serta peningkatan retribusi mendukung perluasan pemertapan	teknologi rumah lingkungan dan pemertapan kolaborasi dan kerja sama antar lembaga dalam pengelolaan sampah	berkelanjutan untuk mengurangi timbunan sampah
		- Persiapan Rumah Tangga (RT) dengan layanan pemisahan pengumpulan sampah (% RT)	49,00	100,00	Peningkatan literasi dan paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, serta pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan ekonomi sirkular masyarakat	Pemerataan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, efektif dan efisien serta peningkatan infrastruktur dalam pengumpulan sampah yang terintegrasi dan penerapan teknologi tepat guna didukung sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah maupun perbaikan sistem retribusi mendukung pembiayaan pemertapan	Peningkatan keterlibatan masyarakat, penguatan keterbukaan, dan kolaborasi antar stakeholder dalam pemertapan sampah yang berkelanjutan	Pewujudan pelayanan pengelolaan dan pemertapan sampah yang berkelanjutan
4.1. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan								
a) Ketahanan energi								
		Konsumsi listrik per Kapita (kWh)	3.366,00	3.270,00	Penyediaan energi dan peningkatan pemanfaatan listrik	Peningkatan konservasi energi guna meningkatkan	Penggunaan aset, inovasi teknologi dan kolaborasi	Pewujudan transisi energi berkelanjutan melalui pemertapan

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	BASELINE 2023*	TARGET 2045*	ABAH KEBERLIKAAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					bagi masyarakat melalui peningkatan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi gas dan listrik, pengembangan prioritas energi terbarukan, serta penerapan aspek dekarbonisasi energi untuk mendukung ketahanan energi diarah dan nasional	efisiensi pemanfaatan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, kemampuan sumber daya energi, dan diversifikasi energi baru terbarukan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan berkelanjutan	dalam pemanfaatan energi baru terbarukan serta penguatan diversifikasi energi sebagai energi baru terbarukan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan berkelanjutan	transisi energi berkelanjutan terhadap energi baru terbarukan dan pembangunan rendah karbon untuk mencapai ketahanan energi domestik dan nasional
		- Intensitas energi primer (BHM/Rp Milyar)	200,00	170,00	Diversifikasi sumber energi, peningkatan ketahanan energi melalui riset, inovasi dan eksplorasi potensi dan cadangan energi, serta penguatan literasi publik dalam pemanfaatan energi secara efisien dan berkelanjutan	Mengurangi intensitas energi primer melalui penguatan transisi energi berbasis potensi lokal yang rendah emisi, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh strategi maupun industri potensial untuk mendukung ketahanan energi nasional serta dukungan terhadap investasi pada infrastruktur energi dan inovasi teknologi	Penguatan kolaborasi lintas stakeholder dalam pemanfaatan energi dan pengurangan intensitas energi primer serta dukungan investasi pada infrastruktur energi dan inovasi teknologi	Pemajuan pengurangan energi primer untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan
		b) Persentase keefektifan konsumsi pangan (Promotion of Undernutrition) (%)	0,63	0,67	Peningkatan sarana dan prasarana produksi, kelestarian, pangan lokal dan kualitas pangan dengan cukup, beragam, beragam, dan aman melalui inovasi	Peningkatan penerapan teknologi baru serta modernisasi sarana produksi pangan berkelanjutan, pengembangan produk pangan alternatif, diversifikasi dan hilirisasi pangan	Penguatan penerapan praktik kelestarian, pangan regional, adaptif dan rendah karbon, kerjasama dalam pengembangan	Pemajuan penerapan hak atas pangan bagi setiap individu secara inklusif, bergizi cukup, beragam, seimbang, dan aman

VISI	MINI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	BASELINE 2025*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					penggunaan teknologi mutakhir dan menjamin kecukupan pangan melalui pemukiman terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water)	lebel untuk mendukung konsumsi pangan dan jaringan distribusi yang lancar dalam upaya meningkatkan standar pangan yang sampai kepada masyarakat	perangai distribusi, keberpangsaan dan ketersediaan produk pangan alternatif yang keberlanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan	
		21. Rerata air - Kapasitas air baku (m ³ /kapita)	0,99	13,73	Konservasi SDA dalam rangka peningkatan ketersediaan air baku melalui perbaikan dan pengelolaan kawasan resapan air, pengelolaan limbah yang terintegrasi, dan peningkatan kualitas sungai (DAS) dan mitigasi struktural dan non struktural	tervansi pemangku pelaku yang prinsip sebagai pemerintahan kota terhadap kerangka lingkungan yang ditetapkan oleh pelaku usaha, pengelolaan lahan basah keberlanjutan serta pengelolaan sungai (DAS) secara terpadu baik secara struktural dan non struktural	Peningkatan implementasi pengelolaan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup implementasi sistem peringatan dan kualitas air serta pemetaan operasional dan pengendalian perilaku air melalui pengelolaan infrastruktur air baku perantara	Peningkatan ketersediaan air baku secara aman dan keberlanjutan dengan menerapkan teknologi terkini dan inovasi dalam pemetaan sumber dan distribusinya
		- Akses rumah tangga perantara terhadap air siap minum perantara (%)	30,46	100,00	Peningkatan infrastruktur air baku dan air minum dan peningkatan akses layanan air siap minum dengan mekanisme kerjasama antar daerah, koordinasi serta penjadwalan akses keberlanjutan dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM	Peningkatan kemampuan manajemen dan keberlanjutan penyelenggaraan SPAM, peningkatan penyelenggaraan infrastruktur air minum serta pemertanian akses layanan air siap minum	Peningkatan pemertanian infrastruktur air minum serta akses layanan air siap minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, keberlanjutan dan keberpangsaan dalam rangka dengan memantapkan teknologi terkini	Peningkatan Pemertanian layanan yang mencakup layanan air siap minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, keberlanjutan dan keberpangsaan dalam rangka dengan memantapkan teknologi terkini
		44. Indeks Baku Bersih (IBB) (Indeks)	100,17	89,56-76,17	Pengawasan dan pemertanian layanan	Optimalisasi layanan yang aman dan sehat	Peningkatan kapasitas dan keberlanjutan	Peningkatan pemertanian layanan dan layanan yang aman dan sehat

VISI	MISI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	BASELINE 2023*	TARGET 2045*	ARAH KEBIJAKAN			
					PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
					penanggulangan risiko bencana yang meringkas ruang dan daerah, perencanaan tata ruang dan penataan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan risiko bencana sesuai RTKA; penanggulangan bencana yang kolaboratif dan responif melalui penggunaan tata kelola, pemanfaatan teknologi mutakhir yang terintegrasi serta dibukung dengan pemerataan sumberdaya terhadap stake bencana dan perubahan iklim secara inklusif	lingkungan, peningkatan produktas tata ruang dengan memperhatikan risiko bencana melalui mitigasi struktural dan non struktural, peningkatan proteksi masyarakat dan sistem produksi umum bencana terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan profesionalisme SDM keberacasan yang tangguh serta komodifikasi teknologi terhadap layanan peringatan dini multi aspek bencana	penanganan bencana sesuai akutasi dan partisipatif serta pemberdayaan penanggulangan bencana sesuai terbuka potensi sumber daya bencana tinggi dan bencana prioritas	yang memperhatikan keberacasan dan realisasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan
45. Persentase peraturan daerah GRC (%)								
a) Kuantitas (%)			2,25	25,52	Peningkatan kapasitas masyarakat, kawasan strategis dan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim melalui mitigasi dan pembangunan resiliensi berbasis yang berkeadilan iklim	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem berbasis sistem seluruh upaya adaptasi-mitigasi krisis iklim dan pengoptimalan efektivitas lahan dalam rangka pengurangan pembangunan yang memperhatikan faktor risiko bencana dan krisis iklim	Penguatan sarana dan prasarana dan pengembangan teknologi sistem peringatan dini bencana dan krisis iklim yang efektif, efisien, mudah dan terintegrasi serta penerapan kolaborasi multistake yang berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan krisis iklim	Penguatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi berbasis yang berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
b) Kualitas (%)			8,93	70,7				

Sumber: *) SKB Mindaaji dan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penudukturan Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Ditah oleh Bappenda, 2024)

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD pada setiap tahapan.

Sasaran pokok ini digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dan dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan yang dijabarkan oleh arah kebijakan. Selain daripada itu, sasaran pokok disusun dengan merujuk terhadap hasil pemetaan masalah serta berbagai dokumen dan kebijakan yang ditelaah (RTRW, KLHS, kebijakan nasional dan provinsi). Sasaran pokok ini diturunkan dari setiap misi serta terdapat indikator kinerja sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan kondisi yang akan dicapai. Berikut disajikan rumusan sasaran pokok terhadap RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

5.2.1 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah di Provinsi Banten. Dari 8 (delapan) misi (agenda) yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang bersifat transformatif yang dituangkan sebagai Indonesia Emas (IE) 1 sampai dengan IE 17. Guna mengejawantahkan dan dukungan Provinsi Banten terhadap mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 maka disusunlah arah pembangunan daerah dengan menyelaraskan terhadap muatan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel V.2
Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 Dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045		RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN
1	Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	IE1. Kesehatan untuk Semua IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Perencanaan yang	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

NO	RPJPS TAHUN 2025-2045		RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH PENGEMBANGAN	TRANSFORMASI	ARAH PENGEMBANGAN
		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tangguh, Inklusif, dan Komfuf	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau
		IE6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi Digital
		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3	Tata Kelola	IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro
		IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gentar Kawasan
		IE13. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju		IE13. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi Lestari	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Diolah oleh Bappoda, 2024

- a. Untuk mencapai misi **Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing** dijabarkan melalui arah pembangunan dan sasaran pokok dengan kerangka kerja mencakup:
- IE1. Kesehatan untuk Semua**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkualitas untuk menghasilkan pelayanan kesehatan berkelas dunia;
 - IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok

- berupa terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam pelayanan pendidikan secara inklusif dan berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia berdaya saing global; dan
- iii. **IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dengan menjunjung tinggi prinsip berkeadilan dan inklusif menuju *universal social protection*.
- b. Untuk mencapai misi **Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif** dijabarkan melalui arah pembangunan dan sasaran pokok dengan kerangka kerja mencakup:
- i. **IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya akselerasi pertumbuhan produktivitas ekonomi Provinsi Banten secara inklusif dan berkelanjutan didukung oleh tata ruang, infrastruktur, regulasi, SDM iptek, dan inovasi yang adaptif dengan perkembangan global;
 - ii. **IE5. Penerapan Ekonomi Hijau**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten dalam penerapan potensi ekonomi sirkular menuju wilayah berkelanjutan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam;
 - iii. **IE6. Transformasi Digital**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam penerapan digitalisasi sebagai penopang daya saing dan produktivitas;
 - iv. **IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya peran strategis Provinsi Banten yang maju, kolaboratif serta aktif dalam perdagangan global yang terkoneksi oleh hub logistik nasional dan internasional; dan
 - v. **IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya peran strategis Provinsi Banten dalam menumbuhkan hunian layak, inklusif, dan berkelanjutan.

- c. Untuk mencapai misi **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional** dijabarkan melalui arah pembangunan dan sasaran pokok dengan kerangka kerja mencakup: **IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya regulasi yang berkualitas dan tata kelola pelayanan publik Provinsi Banten yang berintegritas, adaptif, dan profesional.
- d. Untuk mencapai misi **Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil** dijabarkan melalui arah pembangunan dan sasaran pokok dengan kerangka kerja mencakup:
 - i. **IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah yang tentram dan tertib berlandaskan kondisi demokrasi yang substantif dan penghormatan atas hak asasi manusia;
 - ii. **IE11. Stabilitas Ekonomi Makro**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya kestabilan perekonomian di Provinsi Banten menuju daerah yang maju; dan
 - iii. **IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gantar Kawasan**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah kolaboratif dan berkontribusi pada stabilitas keamanan nasional.
- e. Untuk mencapai misi **Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi Lestari** dijabarkan melalui arah pembangunan dan sasaran pokok dengan kerangka kerja mencakup:
 - i. **IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah beradab dan berbudaya yang berlandaskan Iman dan Taqwa;
 - ii. **IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten sebagai

daerah dengan keluarga yang berkualitas, gender yang setara, dan masyarakat yang inklusif;

- iii. **IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten yang memiliki kualitas hidup inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan;
- iv. **IE16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**, penggambaran ketercapaian visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian pangan, air, dan transisi energi berkelanjutan; dan
- v. **IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**, menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Provinsi Banten dengan sasaran pokok berupa terwujudnya Provinsi Banten yang maju dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

5.2.2 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi pengejawantahan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dalam mendukung tercapainya visi daerah. Untuk itu, disusunlah arah kebijakan transformasi dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dengan menyelaraskan terhadap muatan dalam BAB V RPJPN Tahun 2025-2045 tentang Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3
Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pemberdayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
2	Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
3	Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
4	Transformasi Sosial	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunitas dasar lengkap dengan pendekatan budaya
5	Transformasi Sosial	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan sesuai standar untuk menciptakan manusia yang berdaya saing dan inovatif
6	Transformasi Sosial	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
7	Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
8	Transformasi Sosial	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/incentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan)

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
9	Transformasi Sosial	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
10	Transformasi Sosial	Pemenuhan Kualitas SDM dan pengelolaan data dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting serta TBC melalui lintas program dan lintas sektor.
11	Transformasi Sosial	Peningkatan kesadaran pangan dan gas pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat untuk menuju zero new stunting.
12	Transformasi Sosial	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
13	Transformasi Sosial	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif).
14	Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk pendidikan menengah atas.
15	Transformasi Sosial	Perlindungan dan peningkatan bantuan pendayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
16	Transformasi Sosial	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
17	Transformasi Sosial	Pemampuan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berhasil untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global.
18	Transformasi Sosial	Penguatan kurikulum pendidikan menengah atas berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
19	Transformasi Sosial	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
20	Transformasi Sosial	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
21	Transformasi Sosial	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
22	Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui penguatan kompetensi dan keahlian baru kewirausahaan.
23	Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
24	Transformasi Sosial	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
25	Transformasi Sosial	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
26	Transformasi Sosial	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
27	Transformasi Sosial	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global dengan dukungan Pemerintah Pusat.
28	Transformasi Sosial	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
29	Transformasi Sosial	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis agama, terutama pada Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
30	Transformasi Sosial	Percepatan pembangunan dan pemantapan komunikasi terutama pada Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
31	Transformasi Sosial	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intra region & inter region pada Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
32	Transformasi Sosial	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (niche & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan).
33	Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
34	Transformasi Sosial	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan) melalui bertambahnya demand
35	Transformasi Sosial	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regasos agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
36	Transformasi Sosial	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan)
37	Transformasi Sosial	Pemantapan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan)
38	Transformasi Sosial	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi JTP (khususnya di Banten Selatan)
39	Transformasi Sosial	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
40	Transformasi Sosial	Percepatan eliminasi praktik buang Air Besar sembarangan (RABS) di seluruh rumah tangga
41	Transformasi Sosial	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
42	Transformasi Sosial	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah layak terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
43	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Banten Utara (Cidau-Ciujung-Cidurian) dan Banten Selatan (Cilimah-Ciawarna-Cilemer-Pasir Buri)
44	Transformasi Ekonomi	Pemantapan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi inovasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)
45	Transformasi Ekonomi	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berposansi masuk pasar ekspor/global
46	Transformasi Ekonomi	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
47	Transformasi Ekonomi	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform
48	Transformasi Ekonomi	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
49	Transformasi Ekonomi	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
50	Transformasi Ekonomi	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asosiasi pertanian
51	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi baru berbasis keunggulan wilayah, penguatan small & micro business pada investasi pertanian dan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEHLIAKAN TRANSFORMASI
52	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak
53	Transformasi Ekonomi	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/keahlian/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform
54	Transformasi Ekonomi	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak
55	Transformasi Ekonomi	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan
56	Transformasi Ekonomi	Penyediaan ruang, infrastruktur esensial terintegrasi (jalan, pelabuhan, power supply, dll) bagi upaya membangkitkan minat investor, peningkatan produktivitas perikanan, dan daya saing produk perikanan
57	Transformasi Ekonomi	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif
58	Transformasi Ekonomi	Modernisasi kapal, sarana, dan prasarana produksi perikanan serta inovasi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pengembangan perikanan
59	Transformasi Ekonomi	Peningkatan riset dan inovasi dalam penyediaan instrumen pengendali hama, obat, pakan ramah lingkungan dan ekonomis untuk meningkatkan produktivitas pengembangan perikanan budidaya
60	Transformasi Ekonomi	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Serang-Tengerang (daerah industri logam dasar, industri petrokimia, industri makanan dan minuman, industri mesin, industri tekstil, industri consumer goods & general manufactures)
61	Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan penguatan logistik daerah yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
62	Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
63	Transformasi Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jاهدatabek
64	Transformasi Ekonomi	Penguatan kelayakan Kota Serang sebagai ibukota provinsi menuju kota metropolitan yang memiliki kualitas fungsional, kualitas visual, dan kualitas lingkungan
65	Transformasi Ekonomi	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dll)
66	Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
67	Transformasi Ekonomi	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan Hybrid green & grey infrastructure/ pada kawasan perkotaan

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEHLIAKAN TRANSFORMASI
68	Transformasi Ekonomi	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan
69	Transformasi Ekonomi	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fiber connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan
70	Transformasi Ekonomi	Pendayagunaan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek
71	Transformasi Ekonomi	Peningkatan tata kota, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek
72	Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
73	Transformasi Ekonomi	Pemantapan atraksi, amenitas, aksesibilitas dan amfibi pada destinasi wisata sesuai standar global serta peningkatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan
74	Transformasi Ekonomi	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perikotaan secara inovatif, kolaboratif dan partisipatif disesuaikan dengan preferensi wisatawan dan potensi keunggulan wilayah
75	Transformasi Ekonomi	Penguatan kepariwisataan daerah melalui budaya ramah wisatawan, diferensiasi atraksi dan trademark wisata berdasarkan kebhinekaan daerah yang berbasis rasa global serta kolaborasi pemasaran pariwisata dengan media dan dunia usaha/ekonomi usaha berbasis digital
76	Transformasi Ekonomi	Peningkatan hub ekonomi kreatif melalui konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan klaster ekonomi kreatif yang didukung oleh rantai pasok yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan
77	Transformasi Ekonomi	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem ekspresway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda)
78	Transformasi Ekonomi	Penguatan pengkajian jalan daerah dan jalan desa untuk mendukung peningkatan perkotaan sebagai hub kluster ekonomi yang unggul dan berdaya saing
79	Transformasi Ekonomi	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Banten untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Rangkasbitung-Pinimbang dan - Panimbang-Muarababuangrun
80	Transformasi Ekonomi	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek
81	Transformasi Ekonomi	Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Rangkasbitung-Pandeglang (termasuk elektrifikasi dan jalur ganda)
82	Transformasi Ekonomi	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Rangkasbitung-Merah
83	Transformasi Ekonomi	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Banten/Ciwandan/Bojonegara dan Cigading
84	Transformasi Ekonomi	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afterside STP, terutama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
85	Transformasi Ekonomi	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang GDI nasional yang berdaya saing di tataran global melalui penguatan energi riset dan industri besar dalam hilirisasi mother industri, pengembangan skema rekrutmen dan insentif melalui talent pool, pemagangan industri, dan beasiswa
86	Transformasi Ekonomi	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya melalui housing compact

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEHLAKAN TRANSFORMASI
		yang terintegrasi antar fungsi tempat tinggal, kantor, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan <i>workable city</i>
87	Transformasi Ekonomi	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon
88	Transformasi Ekonomi	Penguatan ekosistem ekonomi biru melalui industri berbasis kelautan, perdagangan, transportasi dan logistik, pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi dan jasa ekonomi melalui pendekatan pilar ekonomi, lingkungan, sosial dan enabler
89	Transformasi Ekonomi	Industrialisasi koperasi melalui pemantapan regulasi, peningkatan SDM yang berkesetaraan gender, hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi riset dan inovasi teknologi baru berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah
90	Transformasi Ekonomi	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui pembinaan bagi koperasi, peningkatan dan penguatan akses ke sumber daya produktif (permawak pembiayaan/permodalan dan pemasaran), penerapan teknologi digitalisasi dan kemitraan usaha
91	Transformasi Ekonomi	Pemantapan rantai nilai global melalui ekma-ekma kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya
92	Transformasi Ekonomi	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
93	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD melalui penguatan penerapan asas-asas <i>good governance</i> , penguatan karakter budaya wiraswasta, penguatan iklim bisnis, kejelasan regulasi serta pelaksanaan pembinaan sesuai standar global
94	Transformasi Ekonomi	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki beban pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>caving</i> dan perulian menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk mempermudah penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan penerapan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
95	Transformasi Ekonomi	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperbaiki jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung ketahanan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan nelayan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)
96	Transformasi Tata Kelola	Perwujudan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
97	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, jika ada dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
98	Transformasi Tata Kelola	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
99	Transformasi Tata Kelola	Pemataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan berintegritas sesuai dengan kebutuhan daerah

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEHLAKAN TRANSFORMASI
100	Transformasi Tata Kelola	Penguatan tata kelola Pemerintah Provinsi Banten dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Provinsi Banten, menuju penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten yang profesional dan bebas korupsi.
101	Transformasi Tata Kelola	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
102	Transformasi Tata Kelola	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
103	Transformasi Tata Kelola	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
104	Transformasi Tata Kelola	Penguatan integritas partai politik sesuai kewenangan provinsi.
105	Kecamatan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas sesuai kewenangan provinsi.
106	Kecamatan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendagatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi penyediaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU/D, CSR, jasa ekowisata, perdagangan karbon, dll.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
107	Kecamatan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut sesuai kewenangan provinsi serta dukungan dari Pemerintah.
108	Kecamatan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
109	Kecamatan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pes militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi STP (khususnya di Banten Selatan) sesuai kewenangan provinsi serta dukungan dari Pemerintah.
110	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai kebudayaan Banten dalam jati diri dan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila.
111	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
112	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologi.
113	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alam.
114	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kewaspadaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi dengan dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Pusat.
115	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas serta keterampilan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
116	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasahan dan perawatan, pembentukan resilience, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
117	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
118	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penggiatan pengarusutamaan dan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam partisipasi pembangunan.
119	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan ketahanan air di kawasan tawar & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

NO	TRANSFORMASI	AKAR KEMAJAKAN TRANSFORMASI
120	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengelolaan sampah terpadu ibu-ibu dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengolahan sampah dengan pengembangan circular economy
121	Implementasi Transformasi	Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
122	Implementasi Transformasi	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan)
123	Implementasi Transformasi	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, hutan lindung, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir
124	Implementasi Transformasi	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clear, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
125	Implementasi Transformasi	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusi (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi baru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
126	Implementasi Transformasi	Percepatan pelaksanaan reforma agraria
127	Implementasi Transformasi	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
128	Implementasi Transformasi	Penegakan mitigasi struktural terhadap standar keamanan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim serta mitigasi non struktural melalui penguatan kapasitas masyarakat, dan sistem peringatan dini bencana
129	Implementasi Transformasi	Pemantapan pelaksanaan pemerintahan melalui pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance
130	Implementasi Transformasi	Sinkronisasi wabakansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
131	Implementasi Transformasi	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi
132	Implementasi Transformasi	Pemantapan akuntabilitas kinerja pmda berdasarkan sasaran prioritas nasional
133	Implementasi Transformasi	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
134	Implementasi Transformasi	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

Sumber: SEI Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelompokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Disalah oleh Bappenas, 2024)

5.2.3 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, terdapat 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai indikator pengukur keberhasilan dan pencapaian pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, disusun indikator utama RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang memperhatikan substansi muatan indikator utama RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel V.4
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPN Tahun 2025-2045 Dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

RPJPN TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
	BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
1. Usia Harapan Hidup (LHH) (tahun)	74,40	80,00	1. Usia Harapan Hidup (LHH) (tahun)	75,20	80,54
2. Kesehatan ibu dan anak			2. Kesehatan ibu dan anak		
a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122,0	16,0	a) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	101,00	10,00
b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	5,0	b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,30	6,50
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,0	76,0	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
			a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	95,00	95,00
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,80	98,00
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,77	99,50
5. Hasil Pembelajaran:			5. Hasil pembelajaran:		
a) Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
a-i Membaca	396,0	465,0	i) Literasi membaca (%)	12,50-25,00	62,50-75,00
a-ii Matematika	404,0	490,0	ii) Numerasi (%)	0,00-12,50	62,50-62,50
a-iii Bahasa	436,0	467,0			
b) Rata-rata nilai asesmen nasional			ii) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen:		
b-i Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi membaca (%)	24,43-36,43	65,23-67,23
b-ii Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi (%)	26,81-28,81	61,02-63,02
c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,00	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,86-9,88	12,49-12,52
d) Harapan Lama Sekolah	13,33	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31-13,33	14,72-14,77
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	9,84	9,84-10,26
7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	64,42	75,00

RPJPN TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
	BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,30-5,00	0,04-0,54
9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,50	9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	46,80	92,52
10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	26,00	65,00
11. Produktivitas Industri dan Pertanian			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13
a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		
12. Pengembangan Pariwisata			12. Pengembangan Pariwisata		
a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	a) Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	2,45	4,17
b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10	100,0	b) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (juta orang)	496,89	1.242,23
13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,0	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	5,38	4,62
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,71	13,76
b) Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8,0	a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	5,29	9,36
c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,11	3,95
d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	0,4	0,6	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,87	4,99
15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,89	3,60
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00	4,0	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,0	80,0	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87-7,24	6,17-7,14
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30	70,0	b) Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	56,00	85,00
17. Tingkat Penguasaan IPTEK			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,00	61,60
a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3	17. Tingkat penguasaan IPTEK		
			a) Indeks Inovasi Daerah (indeks)	58,00-65,00	85,00

RPJPN TAHUN 2025-2045			RPUPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
	BASLINE 2025	TARGET 2045		BASLINE 2025	TARGET 2045
b) Peningkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60,0	30 besar			
18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a) Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	57,58	73,90
b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,0	70,0	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,50	72,21
19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43,0	20 besar	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (indeks)	6,30	7,80
20. Biaya Logistik (% PDRB)	13,5	8,0	20. Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	6,37	4,41
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,1-30,3	27,3	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	34,35	29,72
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,0-21,6	40,0	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	31,21	56,21
23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	24,63 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur)	31,19 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur)
b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	67,0	100,0	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,08	100,00
c) Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	c) Persentase desa mandiri (%)	2,36	15,11
24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71	24. Indeks Reformasi Hukum (indeks)	88,80	100,00
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,32	5,00	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,50	5,00
26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00	26. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3,80	5,00

RPJPM TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
	BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
27. Anti Korupsi			27. Indeks	72,74	87,63
a) Indeks Integritas Nasional	74,32	96,98	Integritas Nasional (Indeks)		
b) Indeks Persepsi Korupsi	38,0	60,0			
28. Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89	28. Hukum berkeadilan		
			a) Persentase pengakuan hukum peraturan daerah (%)	70,00	100,00
			b) Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM (%)	60,00	80,00
29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	80,0	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	55,29	73,67
30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30. Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	Sedang	Tinggi
31. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDRB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	31. Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	2,55	5,00
32. Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32. Tingkat Inflasi (%)	3,20-3,60	1,10-3,00
33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan		
a) Aset Perbankan/PDRB (%)	66,9	200,0	a) Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	33,34	77,20
b) Aset Dana Penanaman/PDRB (%)	8,0	60,0	b) Aset dana penanaman/PDRB (%)	0,77	7,39
c) Aset Asuransi/PDRB (%)	9,1	20,0	c) Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rupiah)	17.909.635,76	199.641.708,14
d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDRB (%)	57,8	120,0	d) Total kredit/PDRB (%)	25,00	66,80
e) Total Kredit/PDRB (%)	37,8	80-90			
34. Indeks Keuangan (%)	91,0	98,0	34. Indeks keuangan (%)	91,83	99,02
35. Axis Power Index (Diplomatic Influence)	61,34	75,0-80,0	35. Hubungan kerjasama antara pemerintah provinsi/sabuk provinsi (jumlah)	2,06	8,00
36. Axis Power Index (Military Capability)	16,0	45,0	36. Indeks Ketahanan Nasional (Indeks)	Cukup Tangguh Sangat Tangguh	
37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	68,39	68,15	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	53,63-53,67	62,37-62,77
38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)	70,58-70,77	76,92-77,91
39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,00	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	69,76-69,76	74,73-74,78
40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,18	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,442-0,441	0,220-0,206

RPJPN TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
	BASLINE 2025	TARGET 2045		BASLINE 2025	TARGET 2045
41. Indeks Pengelolaan Kerangkastrategi Hayati	0,44	0,73	41. Indeks Pengelolaan Kerangkastrategi Hayati Daerah (indeks)	0,524	0,626
42. Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup		
a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,33	87,00	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	66,92	74,92
a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50			
a.iii. Indeks Kualitas Tanah (IKT)	77,97	79,74			
a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77			
b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70,0	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	15,39	70,00
c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (56% terdaur ulang)	90 (38% terdaur ulang)	c) Pengolahan sampah - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	5,00	90,00
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan pemuliharaan pengumpulan sampah (%) RT	49,00	100,00
43. Ketahanan Energi, Air, dan Kemudahan Menuju Ketahanan Pangan			43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
i) Ketahanan Energi			a) Ketahanan energi		
- Indeks Ketahanan Energi	0,77	8,24	- Konsumsi energi per Kapita (kWh)	2.386,00	3.270,00
			- Intensitas energi primer (SRM/Rp Milyar)	200,00	170,00
ii) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,21	0,77	ii) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment %)	2,65	0,67
iii) Ketahanan Air			c) Ketahanan air		
- Kapasitas Tampungan Air (m ³ /kapita)	65,18	200	- Kapasitas air baku (m ³ /kapita)	0,99	15,73
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	100	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	30,46	100,00
44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Bahai terhadap PDR (%)	0,137	0,11	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (indeks)	105,17	89,56-76,17
45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45. Persentase penurunan emisi GRK (%)		
a) Kumulatif	28,12	0,51	a) Kumulatif (%)	2,26	23,42
b) Tahunan	36,62	80,98	b) Tahunan (%)	8,92	70,70

Sumber: SEB Menuturi dan Menteri PPS/Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Disetujui Bappeda, 2024)

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tersebut, disusun sasaran pokok RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang memperhatikan substansi muatan indikator utama RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel V.5
Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)*	INDEKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	TARGET	
				BASLINE 2025*	TARGET 2045*
1	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkualitas untuk menghasilkan pelayanan kesehatan berkelas dunia	IE1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,20	80,54
			2. Kesehatan ibu dan anak		
			a) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	101,00	10,00
			b) Prevalensi stunting (rendek dan sangat rendek) pada balita (%)	21,30	6,50
			3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
			a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	95,00	95,00
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,80	98,00
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,77	99,50
2	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam pelayanan pendidikan secara inklusif dan berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia berdaya saing global	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil pembelajaran:		
			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i) Literasi membaca (%)	12,50-25,00	62,50-75,00
			ii) Numerasi (%)	0,00-12,50	62,50-62,50
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen:		
			i) Literasi membaca (%)	34,43-36,43	65,23-67,23
			ii) Numerasi (%)	26,81-28,81	61,02-63,02
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,86-9,86	12,49-12,53
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31-13,32	14,72-14,77
			6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	9,84	9,84-10,26
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dengan menjunjung tinggi prinsip berkeadilan dan inklusif menuju universal social protection	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	64,42	75,00
			8. Tingkat kemiskinan (%)	4,50-5,50	0,04-0,54
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	46,80	92,52
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	26,00	65,00

NO	BASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)*	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	TARGET	
				BASELINE 2025*	TARGET 2045*
4	Terwujudnya akselerasi pertumbuhan produktivitas ekonomi Provinsi Banten secara inklusif dan berkelanjutan didukung oleh tata ruang, infrastruktur, regulasi, SDM unggul, dan inovasi yang adaptif dengan perkembangan global	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13
			12. Pengembangan Pariwisata:		
			a) Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	2,45	4,17
			b) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)	496,89	1242,23
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	5,38	4,62
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,71	13,76
			a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	5,29	9,36
			b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,11	3,95
			c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,87	4,99
			d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,09	5,69
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87-7,24	6,17-7,14
			b) Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	56,00	85,00
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,00	61,60
			17. Tingkat penguasaan IPTEK		
			a) Indeks Inovasi Daerah (indeks)	58,00-65,00	83,00
5	Terwujudnya Provinsi Banten dalam penerapan potensi ekonomi sirkular menuju wilayah berkelanjutan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	57,58	73,90
			b) Persi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,50	72,21
6	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam penerapan digitalisasi sebagai penopang daya saing dan produktivitas	IE6. Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (indeks)	6,30	7,80
7	Terwujudnya peran strategis Provinsi Banten yang maju, kolaboratif serta aktif dalam	IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien variasi harga antardiswilayah tingkat provinsi	6,37	4,41
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%GDP)B	34,55	29,72

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)*	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)*	TARGET	
				BASELINE 2025*	TARGET 2045*
	perdagangan global yang terkoneksi oleh hub logistik nasional dan internasional		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	31,21	36,21
8	Terwujudnya peran strategis Provinsi Banten dalam menumbuhkan hunian layak, inklusif, dan berkelanjutan	IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	24,63 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur)	31,19 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur)
			b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,08	100,00
			c) Persentase desa mandiri (%)	2,26	15,11
9	Terwujudnya regulasi yang berkualitas dan tata kelola pelayanan publik Provinsi Banten yang berintegritas, adaptif, dan profesional	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum (indeks)	88,80	100,00
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,50	5,00
			26. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3,80	5,00
			27. Indeks Integritas Nasional (indeks)	72,74	87,63
10	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah yang tertutut dan terdistribusikan kondisi demokrasi yang substantif dan penghormatan atas hak asasi manusia	IE10. Hukum Berkeadilan, Kramanana Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substantif	28. Hukum berkeadilan a) Persentase penegakan hukum peraturan daerah (%)	70,00	100,00
			b) Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM (%)	60,00	80,00
			29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	55,29	72,67
			30. Indeks Demokrasi Provinsi (indeks)	Bedang	Tinggi
11	Terwujudnya kestabilan perekonomian di Provinsi Banten menuju daerah yang maju	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Basis Pajak terhadap PDRB (%)	2,55	5,00
			32. Tingkat inflasi (%)	3,20-3,40	1,10-3,00
			33. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan a) Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	13,34	77,20
			b) Aset dana pensiun/PDRB (%)	0,77	7,39
			c) Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rp/gis)	17.909.655,76	199.641.708,14
			d) Total kredit/PDRB (%)	25,00	66,80
			34. Inklusi keuangan (%)	91,83	99,02

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE) ^a	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP) ^a	TARGET	
				BASELINE 2025 ^a	TARGET 2045 ^a
12	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah kolaboratif dan berkontribusi pada stabilitas keamanan nasional	IK12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gantar Kawasan	35. Hubungan kerjasama antara pemerintah provinsi/ sister province (jumlah) 36. Indeks Ketahanan Nasional (indeks)	2,00 Cukup Tangguh	8,00 Sangat Tangguh
13	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah beradab dan berbudaya yang berlandaskan iman dan taqwa	IK13. Beragama Madanih dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Keladayaan (IPK) (indeks) 38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (indeks)	53,63-53,67 70,68-70,77	62,37-62,77 76,92-77,91
14	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah dengan keluarga yang berkualitas, gender yang setara, dan masyarakat yang inklusif	IK14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (indeks) 40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	69,76-69,76 0,442-0,441	74,75-74,78 0,220-0,208
15	Terwujudnya Provinsi Banten yang memiliki kualitas hidup inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan	IK15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengalihan Keanekaragaman Hayati Daerah (indeks) 42. Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks) b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c) Pengelolaan sampah - Timbulan sampah terdapat di fasilitas pengolahan sampah (%) - Persentase Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	0,524 66,92 15,39 5,00 49,00	0,520 74,92 70,00 90,00 100,00
16	Terwujudnya Provinsi Banten yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian pangan, air, dan transisi energi berkelanjutan	IK16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan energi - Konsumsi listrik per kapita (kWh) - Intensitas energi primer (SIEM/Kg Minyak) b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) c) Ketahanan air - Kapasitas air baku (m ³ /kapita) - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air map minum perpipaan (%)	2.386,00 200,00 2,65 0,99 30,40	3.270,00 170,00 0,67 15,73 100,00
17	Terwujudnya Provinsi Banten yang maju dan resilien terhadap bencana dan perubahan iklim	IE.17 Resilien terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (indeks) 45. Persentase penurunan emisi GRK (%) a) Kumulatif (%) b) Tahunan (%)	103,17 2,26 8,93	89,56-76,17 23,82 70,70

Sumber: ^a BSB Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/51 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Salah satu Bappenas, 2024)

5.3 SKENARIO PEMBANGUNAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

Skenario pembangunan disusun dengan melibatkan proyeksi berbagai kemungkinan atau lintasan untuk pembangunan, berdasarkan berbagai asumsi dan faktor, seperti pertumbuhan populasi, inovasi teknologi, ketersediaan sumber daya alam, investasi infrastruktur, dan keputusan kebijakan. Skenario pembangunan adalah cara untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi kemungkinan masa depan untuk wilayah tertentu, dan untuk mengidentifikasi pendorong dan tantangan utama yang dapat membentuk masa depan tersebut. Dalam skenario perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten dirumuskan dua skenario besar yaitu skenario *Business as Usual* (BAU) dan skenario dengan upaya tambahan (intervensi khusus untuk sektor pertanian, pariwisata, dan industri).

5.3.1 SKENARIO BUSINESS AS USUAL (BAU)

Skenario ini mengasumsikan perkembangan Provinsi Banten tidak berubah sebagaimana kondisi periode-periode sebelumnya. Kawasan utara Provinsi Banten (Cilegon, Kabupaten dan Kota Serang) akan tetap menjadi kawasan industri pengolahan berbasis komoditas sedangkan kawasan perkotaan yang berbatasan dengan Jakarta akan menjadi kawasan perdagangan, jasa dan industri pengolahan berkarakter *footloose*.

Berdasarkan hasil analisis dengan pelaksanaan skenario ini jika diterapkan maka ada beberapa kondisi yang akan terjadi di Tahun 2045, diantaranya:

- a. Capaian IPM di Provinsi Banten secara keseluruhan akan berada di angka 83,90 dan rerata IPM kabupaten/kota di Provinsi Banten berada di angka 80,60;
- b. Capaian TPT di Provinsi Banten berada di angka 7,08 persen dengan rerata kabupaten/kota di Provinsi Banten di angka 7,12 persen;
- c. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten akan berada di angka 5,22 persen dengan rerata kabupaten/kota di Provinsi Banten di angka 5,78 persen;
- d. LPE di Provinsi Banten mencatatkan nilai positif, namun nilai ini secara perlahan-lahan mengalami penurunan yang perlu diwaspadai.

Ada beberapa penyebab mengapa hasil proyeksi dari skenario *business as usual* ini menyebabkan data perekonomian tidak seperti yang diharapkan, diantaranya:

- a. Peningkatan jumlah penduduk dan terkonsentrasinya penduduk di perkotaan di wilayah utara;
- b. Upah riil meningkat karena peningkatan biaya hidup sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi harian masyarakat;
- c. Biaya produksi meningkat karena peningkatan harga lahan sebagai akibat keterbatasan lahan;
- d. Ketimpangan antar wilayah yang menyebabkan perbedaan taraf kesejahteraan juga memicu kontraksi ekonomi karena penurunan kesejahteraan akan berimplikasi kepada penurunan permintaan barang dan jasa yang dalam gilirannya akan menyebabkan penurunan permintaan secara agregat.

5.3.2 SKENARIO BEST CASE (DENGAN UPAYA TAMBAHAN)

Skenario ini dengan asumsi bahwa indikator-indikator makro yang mencatatkan perbaikan dari periode sebelumnya tetap dipertahankan, ketimpangan antar wilayah dikurangi dan distribusi kesejahteraan terus-menerus diupayakan untuk ditingkatkan. Fokus intervensi ditujukan kepada sektor yang memiliki potensial untuk dikembangkan seperti pertanian, pariwisata dan industri.

5.3.2.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI BANTEN

Sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Banten Selatan dan Tengah memiliki kontribusi yang besar terhadap distribusi PDRB ADHB, juga pada sektor ini menyerap lebih banyak tenaga kerja di Banten Selatan dibandingkan sektor lainnya, namun tentunya tetap perlu menjadi perhatian untuk dapat mengurangi ketimpangan wilayah selatan dengan utara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian khususnya terhadap tantangan pengembangan pada sektor pertanian ini, yaitu:

- a. Sumber daya manusia di sektor pertanian Provinsi Banten masih memiliki masalah di antaranya dominasi petani tua, lebih dari 60 persen petani di Provinsi Banten tergolong petani tua (di atas 45 tahun) yang menimbulkan tantangan dalam keterbukaan terhadap teknologi baru, kemampuan dalam berinovasi dan kekuatan fisik atau tenaga yang semakin berkurang;
- b. Regenerasi petani yang masih rendah, petani muda (di bawah 25 tahun) yang masuk kedalam golongan milenial di Provinsi Banten masih berada pada posisi kurang dari 15 persen;

- c. Rendahnya tingkat pendidikan petani, semakin tinggi diharapkan kemampuan berpikir dan menganalisis setiap usaha, daya penalaran dan pola pikir yang lebih baik, serta kecepatan adopsi teknologi dalam melakukan inovasi di bidang pertanian;
- d. Minimnya pendampingan petani dalam membantu untuk menganalisis masalah-potensi dalam pencarian solusi permasalahan yang terjadi;
- e. Keterlibatan Perempuan di sektor pertanian di Provinsi Banten yang masih rendah.

Ada beberapa strategi pengembangan pada sektor pertanian ini, diantaranya adalah:

- a. Potensi marine (pesisir dan kelautan) sejauh 12 mil laut yang dapat dikembangkan dengan strategi *Institute for Sustainable Oceans*, potensi optimalisasi sektor pertanian yang dikembangkan dengan strategi agro technopark yang dikelola oleh kewenangan provinsi;
- b. Mengutamakan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, melalui upaya intensifikasi pertanian dalam meningkatkan produksi maupun ekstensifikasi lahan pertanian melalui peretakan sawah baru di Provinsi Banten;
- c. Mengusahakan komoditas komersial menjadi lebih potensial (harga dan permintaan yang tinggi) untuk menarik minat pemuda dalam bertani;
- d. Membentuk kelompok tani muda agar memiliki ruang gerak lebih leluasa dalam mengembangkan usaha tani serta mendorong pemasaran hasil pertanian berbasis kelompok agar dapat memenuhi kebutuhan industri besar;
- e. Pelatihan non formal dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah keterampilan usaha tani, adopsi teknologi sederhana yang berdaya guna tinggi, dsb;
- f. Kerja sama dengan penyuluh swasta dengan sistem kemitraan (dengan industri yang mampu memberikan akses sarana produksi dan/atau menyerap hasil pertanian), meningkatkan penyuluh pertanian pemerintah, serta mendorong munculnya swadaya yang berasal dari petani berprestasi.

5.3.2.2 SKENARIO PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI PROVINSI BANTEN

Dalam konteks skenario pembangunan pariwisata, maka diperlukan analisis terhadap kondisi existing, tren perkembangan di masa lalu dan masa depan yang ingin diperoleh atau diciptakan. Skenario

pembangunan pariwisata akan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), pendekatan daya tampung pariwisata (*tourism carrying capacity*), dan *supply-demand analysis*. Diharapkan dengan ketiga pendekatan ini maka dapat diperoleh skenario pembangunan yang tepat untuk menghasilkan strategi kebijakan yang lebih praktis dan teknis untuk dapat diimplementasikan.

Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian khususnya terhadap tantangan pengembangan pada sektor pariwisata ini, yaitu:

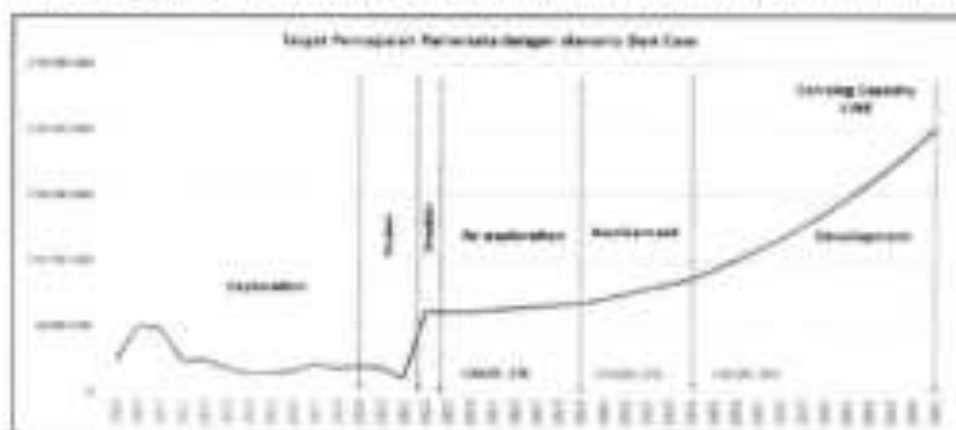
- a. Posisi Provinsi Banten yang memiliki garis pantai yang panjang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata Pantai yang potensial, namun juga dengan posisi ini menjadikan wilayah Provinsi Banten berada pada wilayah dengan risiko bencana (khususnya tsunami);
- b. Lingkungan fisik dan sumber daya alam, kondisi fisik-geologi yang memiliki kekhasan di Provinsi Banten ini tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan yang perlu adanya eksplorasi lebih lanjut guna memanfaatkan daya tarik tersebut;
- c. Masih adanya ketimpangan pembangunan pariwisata Banten Selatan dan Banten Utara;
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sarana dan prasarana khusus untuk kegiatan pariwisata belum optimal, misalnya fasilitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), rumah makan dan restoran untuk wisatawan, sekolah khusus vokasi pariwisata, *integrated-tourism information system*, *integrated transportation system* bagi wisatawan.

Ada beberapa strategi pengembangan pada sektor pariwisata ini, diantaranya adalah:

- a. Menyeimbangkan posisi *supply-demand* pariwisata dengan mengoptimalkan elemen pariwisata di destinasi wisata, peluang terhadap Pariwisata Bahari, Pariwisata Perkotaan, dan Pariwisata Pedesaan yang adaptif terhadap bencana sebagaimana pada gambar di bawah ini;
- b. Mengoptimalkan peran magnet pariwisata Tanjung Lesung, Geopark Bayah Dome, serta kawasan potensial pariwisata lainnya melalui

penguatan terhadap pendekatan aspek 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, *ancillary*, dan *available package*);

- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan dan kolaborasi;
- d. Meningkatkan promosi dengan membangun inovasi promosi terintegrasi;
- e. Mengoptimalkan industri pariwisata dengan menjalin kerja sama antara industri pariwisata di Provinsi Banten dan daerah lainnya;
- f. Peningkatan peran partisipatif masyarakat dalam ikut serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sesuai potensi lokal sehingga dapat terjalinnya keseimbangan antara manusia dan alam guna pencegahan terjadinya kerusakan maupun eksploitasi alam.



Gambar V.7

Target Pencapaian Pariwisata Provinsi Banten dengan Skenario *Best Case*
(Sumber: Ditah oleh Bappenas, 2023)

5.3.2.3 SKENARIO PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI BANTEN

Sektor industri pengolahan menjadi *leading sector* dalam perekonomian Provinsi Banten dimana terlihat dari data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir yang menunjukkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kinerja net ekspor mempengaruhi LPE. Melihat tren tersebut bahwa peningkatan sektor industri pengolahan di Banten Utara dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur perhubungan serta proyek strategis nasional yang beriringan dengan peningkatan investasi dan penanaman modal.

Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian khususnya terhadap tantangan pengembangan pada sektor industri ini, yaitu:

- a. Melemahnya daya tarik industri juga mengancam berkurangnya lapangan pekerjaan;

- b. Sentra produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang masih rendah;
- c. Belum ditunjang dengan infrastruktur penghubung (jalan, energi listrik, air bersih dan limbah) sentra produksi dan infrastruktur penunjang industri pengolahan.

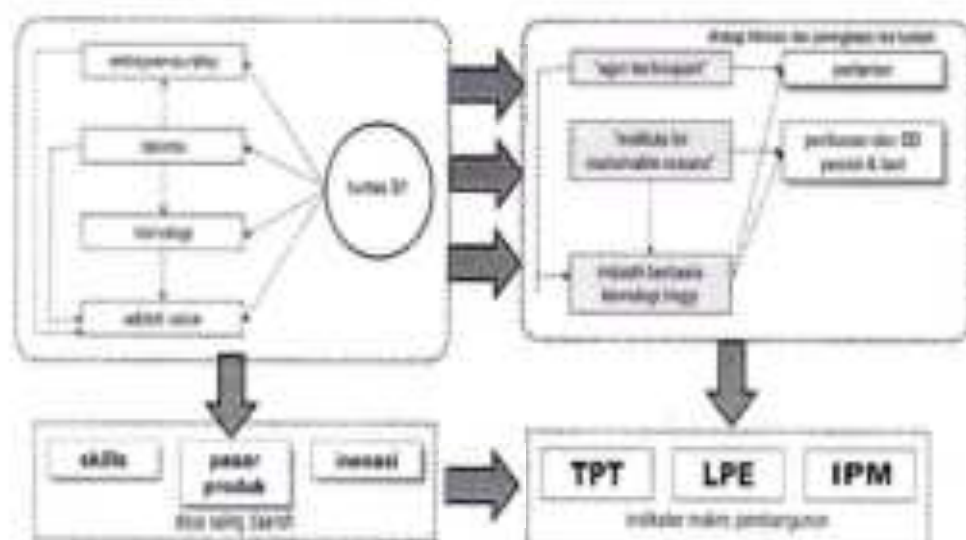
Ada beberapa strategi pengembangan pada sektor industri ini, diantaranya adalah:

- a. Kapasitas SDM yang tuntas SI dan memiliki basis keilmuan dan kewirausahaan untuk mendorong inovasi untuk menciptakan nilai tambah tinggi dari sumber daya wilayah Provinsi Banten;
- b. *Link & match* antara *agro technopark (green economy)* dan *institute for sustainable oceans (blue economy)* dengan industri/sektor swasta, termasuk pemanfaatan kedua lembaga itu sebagai *business incubator*, dan
- c. Mekanisme insentif melalui *tax holiday*, *tax abatement* ataupun strategi berbasis tempat untuk meningkatkan daya saing (*enterprise zones/empowerment zones*);
- d. Peningkatan hasil produksi komoditas utama dan unggulan melalui peningkatan luas lahan dan sarana produksi serta pengembangan kawasan industri teknologi tinggi sebagai strategi hilirisasi komoditas unggulan;
- e. Peningkatan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung hilirisasi industri tercapai melalui: a). Peningkatan fungsi, peran dan layanan metropolitan Serang-Cilegon yang dipadukan dengan Kawasan Industri Pancapuri dan Pelabuhan Cemindo serta kawasan sekitar pintu gerbang masuk untuk memeratakan pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan Barat Provinsi Banten untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian dan perikanan dan b). Infrastruktur penunjang kawasan untuk memperkuat peran Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda sebagai pintu masuk Regional Jawa dan pusat kegiatan nasional melalui Provinsi Banten;
- f. Transformasi sektor industri pengolahan terutama di Pancapuri dan Tangerang menuju ke industri teknologi tinggi yang ditunjang dengan kelembagaan riset (R&D) untuk meningkatkan dan memantapkan daya saing daerah Provinsi Banten di tingkat nasional, regional ASEAN dan global serta mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon;

- g. Peningkatan strategi pemasaran dan distribusi, perlunya *dry port* ataupun *logistic hub* yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan prioritas, sentra industri kecil berbasis komoditas maupun pengembangan minapolitan dan agropolitan.

5.3.3 PEMAJUAN DALAM HARMONI PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN

Strategi-strategi yang dijabarkan pada skenario best case diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pencapaian target kinerja indikator makro di Provinsi Banten menuju lebih baik, terhadap peningkatan daya saing daerah, penurunan TPT, peningkatan LPE, dan penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar V.8
Strategi Peningkatan Capaian Indikator Makro
(Sumber: Ditolah oleh Rappesda, 2012/1)

RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai pedoman penyusunan RPJPD memuat kerangka upaya transformasi super prioritas (*game changers*) yang memerlukan perhatian khusus. Maka dari itu, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang disusun untuk perwujudan capaian pembangunan Provinsi Banten 2045. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dirancang indikasi kunci intervensi pemajuan Provinsi Banten Tahun 2025-2045 melalui pendekatan transformasi:

5.3.3.1 HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS MISI KE-1 (SOSIAL)

Indikasi kunci pada transformasi ini mencakup pada sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial:

- a. Kesehatan adalah salah satu faktor penting dan krusial sebagai investasi jangka panjang untuk mencapai produktivitas dan kualitas hidup dengan kondisi spiritual, mental dan fisik yang baik. Terdapat beberapa indikasi pemajuan pelayanan dan fasilitas kesehatan meliputi:
 - i. Penataan tata kelola rumah sakit menuju pelayanan kesehatan berkelas dunia (efektivitas proses bisnis dan perencanaan strategis, optimalisasi kemampuan tenaga medis, dan hal lainnya) serta pengembangan *Center of Excellence* sektor kesehatan;
 - ii. Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gigi dan mulut, kasus kesehatan mental, kasus multi-penyakit pada lanjut usia, dan kasus ketergantungan obat;
 - iii. Pengembangan konsep *hospital tourism*, yaitu pelayanan kesehatan yang diselaraskan dengan kegiatan wisata sebagai upaya menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru (khususnya pada sektor ekonomi kreatif dan wisata);
 - iv. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif), penyediaan sarana-prasarana kesehatan primer dan rujukan, pemerataan pelayanan kesehatan serta penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular dan tropis terabaikan, dan penuntasan stunting.
- b. Pendidikan merupakan kunci peradaban masyarakat Provinsi Banten untuk dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam pemajuan pembangunan daerah, beberapa indikasi pemajuan kunci pengembangan pendidikan di Provinsi Banten yang memiliki pengaruh diantaranya:
 - i. Pengembangan *Center of Excellence*, *science park* dan *technopark* sebagai ruang untuk pengembangan keahlian khusus pada suatu bidang spesifik serta peningkatan kualitas dan profesionalitas peserta didik serta tenaga kependidikan dan pendidikan guru;
 - ii. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pembelajaran, penguatan *link and match* sebagai bentuk kolaborasi dengan multipihak dalam pengelolaan pendidikan maupun transformasi kemandirian dan kewirausahaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui mekanisme BLUD;

- iii. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif tingkat global;
 - iv. Pengembangan pendidikan tinggi sebagai pusat unggulan riset inovasi kemajuan dan keberlanjutan dan pusat kebudayaan iman dan taqwa;
 - v. Pengembangan kawasan sebagai hub pendidikan tinggi kelas dunia, digitalisasi, dan kesehatan; dan
 - vi. Penguatan kurikulum terhadap perkembangan global dan peningkatan partisipasi dan akses pendidikan tinggi pada program studi *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM).
- c. Perlindungan sosial merupakan suatu hak yang wajib diberikan secara menyeluruh kepada setiap individu di Provinsi Banten sepanjang siklus kehidupan, adapun indikasi kunci mencakup:
- i. Penuntasan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan dengan mengupayakan pengoptimalan pemanfaatan satu sistem Regasek sehingga cakupan perlindungan sosial masyarakat sesuai prinsip keadilan khususnya terhadap kelompok rentan dan marjinal.

5.3.3.2 HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS MISI KE-2 (EKONOMI)

Indikasi kunci pada transformasi ini mencakup beberapa hal penting seperti:

- a. Pembangunan dan pengembangan hilirisasi *mother of industries*, industri halal, industri hijau, industri biru maupun *Eco-Industrial Parks* (EIPs) khususnya industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor;
- b. Pengembangan kawasan olahraga dan infrastruktur penunjangnya sebagai kawasan kompetisi olahraga, bisnis, dan rekreasi yang mampu mendukung berbagai kegiatan nasional maupun internasional;
- c. Pengembangan transportasi publik massal yang ramah lingkungan, nyaman, mudah diakses, aman, efisien, dan murah disertai fasilitas penunjang yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- d. Pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dengan skema *carbon trade*;
- e. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KP3B dan infrastruktur penunjang lainnya sebagai pusat pemerintahan provinsi yang inklusif yang berkonsep "*smart green office*";

- f. Percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital untuk menjadikan provinsi yang modern dan canggih mendukung pemanfaatan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi;
- g. Pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur penunjang di selat sunda, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mengurangi inefisiensi waktu dan energi mobilitas barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera;
- h. Pembangunan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi berupa jalan baru, pengembangan, dan pemeliharaan kemantapan akses jalan;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana rest area laut untuk mendukung bisnis ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I;
- j. Dukungan pembangunan dan optimalisasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat menjadi magnet pusat pertumbuhan ekonomi baru baik yang sudah berjalan maupun indikasi usulan baru yang dapat berdampak besar bagi masyarakat dan diperkuat melalui usulan pembentukan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Banten;
- k. Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta beserta fasilitas penunjangnya menuju pengembangan ekosistem aerocity;
- l. Pengembangan dan optimalisasi kawasan permukiman yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.

5.3.3.3 HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS MISI KE-3 (TATA KELOLA)

Indikasi kunci pada transformasi ini mencakup beberapa hal pemaajuan seperti:

- a. Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait akses layanan pemerintahan dan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (khususnya di wilayah Banten Selatan);
- b. Penataan/pengembangan/pembentukan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan sumber daya daerah yang memiliki pola pengelolaan keuangan yang fleksibel;

- c. Adanya *Special Purpose Vehicle* sebagai akselerator pembangunan di Provinsi Banten dalam mengelola sumber pembiayaan pembangunan inovatif yang sah secara peraturan perundang-undangan;
- d. Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung layanan birokrasi yang *agile* dan peningkatan kualitas ASN yang memiliki etika kerja, bebas korupsi dan profesional menuju pelayanan prima.

5.3.3.4 HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS MISI KE-4 (KEAMANAN, DEMOKRASI DAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG STABIL)

Indikasi kunci pada sektor ini mencakup beberapa hal penting diantaranya:

- a. Penguatan ketenteraman, ketertiban dan keamanan melalui penegakan sanksi hukum yang berkeadilan disertai penguatan kesadaran akan nilai-nilai substansi demokrasi guna menjadikan wilayah Banten yang kondusif dan stabil;
- b. Penguatan peran BUMD sebagai stabilisator perekonomian daerah;
- c. Penguatan inovasi pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan skema pendanaan, pembiayaan inovatif, dan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah;
- d. Penguatan keterlibatan dan kolaborasi dengan mitra, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (multipihak) dalam pembangunan.

5.3.3.5 HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS MISI-5 (SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI)

Indikasi kunci pada sektor ini mencakup beberapa hal antara lain adalah:

- a. Penguatan nilai dan karakter budaya untuk menjaga jati diri masyarakat Banten yang religius melalui optimalisasi pengembangan pusat-pusat kebudayaan;
- b. Menciptakan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan masyarakat yang inklusif melalui penguatan pendidikan pra nikah dan keluarga
- c. Pengelolaan sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari hulu-hilir yang berkelanjutan;
- d. Penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten;

- e. Penguatan kawasan agrikultur pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*);
- f. Pengembangan pengunekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai karakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan;
- g. Pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*) guna mendukung ketahanan energi berbasis potensi alam yang dimiliki oleh Banten;
- h. Pengembangan dan optimalisasi sumber daya air beserta pemanfaatan potensi ekonomi dan ekologinya guna mendukung ketahanan air melalui bendung, waduk, situ dan sungai;
- i. Optimalisasi dan pengembangan wisata alam yang berkelanjutan untuk mendukung konservasi dan pelestarian serta menjadi peluang usaha sektor pariwisata;
- j. Resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung ketahanan daerah melalui proses pendidikan dan penyadaran sejak dini.

Tabel V.6

Penyclarasan Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 terhadap *Highlight* Indikasi Intervensi Super Prioritas

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS
Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	IE1. Kesehatan untuk Semua	1. Penataan tata kelola rumah sakit menuju pelayanan kesehatan berkelas dunia (efektivitas proses bisnis dan perencanaan strategis, optimalisasi kemampuan tenaga medis, dan hal lainnya) serta pengembangan <i>Center of Excellence</i> sektor kesehatan 2. Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gigi dan mulut, kasus kesehatan mental, kasus multi-gejala pada lanjut usia, dan kasus ketergantungan obat 3. Pengembangan konsep <i>hospital tourism</i>, yaitu pelayanan kesehatan yang diintegrasikan dengan kegiatan wisata sebagai upaya menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru (khususnya pada sektor ekonomi kreatif dan wisata) 4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif), penyediaan sarana-prasarana kesehatan primer dan rujukan, pemerataan pelayanan kesehatan serta penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular dan tropis terabaikan, dan penanganan stunting
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Pengembangan <i>Center of Excellence</i>, <i>science park</i> dan <i>techzone</i> sebagai ruang untuk pengembangan keahlian khusus pada suatu bidang spesifik serta peningkatan kualitas dan profesionalitas peserta didik serta tenaga kependidikan dan pendidikan guru 6. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pembelajaran, penguatan <i>link and match</i> sebagai bentuk kolaborasi dengan multipihak dalam peningkatan pendidikan maupun transformasi kemandirian dan kewirausahaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui mekanisme BLUD 7. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif tingkat global 8. Pengembangan pendidikan tinggi sebagai pusat unggulan riset inovasi kemajuan dan keberlanjutan dan pusat kebudayaan iman dan taqwa 9. Pengembangan kawasan sebagai hub pendidikan tinggi kelas dunia, digitalisasi, dan kesehatan 10. Penguatan kurikulum terhadap perkembangan global dan peningkatan partisipasi dan akse pendidikan tinggi pada program studi <i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM)</i>
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	11. Penuntasan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan dengan mengupayakan pengoptimalan pemanfaatan satu sistem <i>Regosek</i> sehingga cakupan perlindungan sosial masyarakat sesuai prinsip <i>kondisi khususnya terhadap kelompok rentan dan marginal</i>
	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	12. Pembangunan dan pengembangan <i>hubs of innovation</i>, industri halal, industri hijau, industri baru maupun <i>Eco-Industrial Parks (EIPs)</i> khususnya industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor 13. Pengembangan kawasan olahraga dan infrastruktur penunjangnya sebagai kawasan kompetisi olahraga, bisnis, pendidikan dan rekreasi yang mampu mendukung berbagai kegiatan nasional maupun internasional sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS
IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		14. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KP3B dan infrastruktur penunjang lainnya sebagai pusat pemerintahan provinsi yang inklusif yang berkonsep "smart green office"
		15. Pengembangan transportasi publik massal yang ramah lingkungan, nyaman, mudah diakses, aman, efisien, dan murah disertai fasilitas penunjang yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
		16. Pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dengan skema urban trade
IE6. Transformasi Digital		17. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KP3B dan infrastruktur penunjang lainnya sebagai pusat pemerintahan provinsi yang inklusif yang berkonsep "smart green office"
		18. Percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital untuk menjadikan provinsi yang modern dan cangkup mendukung pemanfaatan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi
IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		19. Pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur penunjang di selat sunda, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mengurangi inefisiensi waktu dan energi mobilitas barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera
		20. Pembangunan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi berupa jalan baru, pengembangan, dan pemeliharaan kuantitas akses jalan
		21. Pengembangan sarana dan prasarana rest area laut untuk mendukung bisnis ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I
IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		22. Dukungan pembangunan dan optimalisasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat menjadi magnet pusat pertumbuhan ekonomi baru baik yang sudah berjalan maupun induksi umatan baru yang dapat berdampak besar bagi masyarakat dan diperkuat melalui usulan pembentukan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Banten
		23. Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta beserta fasilitas penunjangnya menuju pengembangan ekosistem secara menyeluruh
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait akses layanan pemerintahan dan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (khususnya di wilayah Banten Selatan)
		25. Penataan/pengembangan/pembentukan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan sumber daya daerah yang memiliki pola pengelolaan keuangan yang fleksibel
		26. Adanya Special Purpose Vehicle sebagai akselerator pembangunan di Provinsi Banten dalam mengelola sumber pembiayaan pembangunan inovatif yang sah secara peraturan perundang-undangan
		27. Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung layanan birokrasi yang agile dan peningkatan kualitas ASN yang memiliki etika kerja, bebas korupsi dan profesional menuju pelayanan prima

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKASI INTERVENSI SUPER PRIORITAS
Mewujudkan Keamanan yang Tinggi.	II.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Penguatan ketenteraman, ketertiban dan keamanan melalui penegakan sanksi hukum yang berkeadilan disertai penguatan kesadaran akan nilai-nilai substansi demokrasi guna menjadikan wilayah Banten yang kondusif dan stabil
Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	II.11. Stabilitas Ekonomi Makro	29. Penguatan inovasi pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan sistem pendanaan, pembagian insentif, dan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah 30. Penguatan keterlibatan dan kolaborasi dengan mitra, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (multipihak) dalam pembangunan
Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Damai Lestari	II.13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II.14. Keluarga Berkualitas, Kemitraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II.15. Lingkungan Hidup Berkualitas II.16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	31. Penguatan nilai dan karakter budaya untuk menjaga jati diri masyarakat Banten yang religius melalui optimalisasi pengembangan pusat-pusat kebudayaan 32. Menciptakan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan masyarakat yang inklusif melalui penguatan pendidikan pra nikah dan keluarga 33. Pengkajian sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari hulu-hilir yang berkelanjutan 34. Penyediaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Berempat Intis kabupaten/kota di Provinsi Banten 35. Penguatan kawasan agrikultur pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water) 36. Pengembangan pengankaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai karakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan 37. Pengembangan energi terbarukan (renewable energy) guna mendukung ketahanan energi berbasis potensi alam yang dimiliki oleh Banten 38. Pengembangan dan optimalisasi sumber daya air beserta pemanfaatan potensi ekonomi dan ekologisnya guna mendukung ketahanan air melalui bendung, waduk, situ dan sungai 39. Optimalisasi dan pengembangan wisata alam yang berkelanjutan untuk mendukung konservasi dan pelestarian serta menjadi peluang usaha sektor pariwisata 40. Resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung ketahanan daerah melalui proses pendidikan dan penyadaran sejak dini

Sumber: Daftar oleh Dapriati, 2024

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai bentuk penjabaran dan/atau mengefektifkan muatan-muatan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah ini harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selaras dalam aturan tersebut juga dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini juga akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sementara itu untuk mewujudkan kesinambungan antara Provinsi Banten dengan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten perlu adanya kesinambungan mencakup beberapa hal:

- a. Visi dan misi perlu mampu menjabarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Banten yang disesuaikan karakteristik dan potensi keunggulan daerah;
- b. Tahapan periodisasi selaras dengan RPJPD Provinsi Banten;
- c. Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi mampu menyesuaikan substansi RPJPD Provinsi Banten disesuaikan karakteristik dan potensi keunggulan daerah;
- d. Komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota melalui kepemimpinan Gubernur dan Bupati/Walikota, melalui prinsip-prinsip keberlanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai kekhasan dari masing-masing kabupaten/kota;

- e. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan unsur-unsur yang diatur dalam aturan yang berlaku dan melibatkan keterlibatan multi pihak serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

Pendekatan-pendekatan perencanaan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih lanjut untuk mencapai cita-cita yang tertuang dalam dokumen ini, perumusan perencanaan juga perlu diformulasikan secara SMART, target jelas (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), sesuai kondisi yang ada (*relevant*) dan waktu yang jelas (*time*).

6.2 KAJIDAH PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Banten dalam menunjang ketercapaian Indonesia Emas 2045 dapat dilaksanakan melalui beberapa skema sumber pembiayaan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Pendanaan melalui pemberian insentif atas keterlibatan pelaku pembangunan yang berpartisipasi dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Pendanaan melalui pemanfaatan aset sebagai bentuk dukungan kerjasama ekonomi lainnya guna mencapai efisiensi dan efektivitas serta penugasan penuh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat melakukan kerja sama secara *Business-to-Business* (B2B) dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan;
- e. Pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik;
- f. Pendanaan Hibah atau *Grant*, pembiayaan melalui utang yang diperoleh dari Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri melalui perjanjian pinjaman yang bersumber dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor;

- g. Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), suatu dana yang disediakan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk bagian tanggung jawab atau komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri maupun komunitas atau masyarakat;
- h. Pendanaan terkait pemanfaatan ruang, suatu alternatif pendanaan yang dilakukan berkaitan terhadap pemanfaatan ruang di daerah melalui beberapa skema seperti:
 - i. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), suatu skema pendanaan terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur kepada pemohon yang ingin memanfaatkan ruang pada batasan sub zona tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - ii. Peralihan hak membangun atau *Transfer Development Rights* (TDR), adalah suatu instrumen pendanaan pembangunan yang sekaligus dapat digunakan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong pengalihan hak atas membangun dari suatu kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi kepada kawasan yang direncanakan untuk dapat dikembangkan.
 - iii. Kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), skema ini merupakan bentuk praktik baik yang telah dilakukan oleh Jakarta dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana publik yang dibiayai oleh para pengembang sebagai bentuk imbalan atau kompensasi terhadap pelampauan KLB yang lebih dari standar yang diizinkan.
- i. Pendanaan berbasis iklim atau *Green Climate Fund* (GCF), suatu skema pembiayaan yang bertujuan untuk dapat mendukung upaya mitigasi maupun mengatasi penyebab dan dampak dari perubahan iklim, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, selain itu pendanaan berbasis iklim ini juga mencakup berbagai skema seperti pasar karbon. Skema ini seperti yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia atau *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- j. Pendanaan pinjaman daerah, digunakan sebagai bentuk alternatif terhadap skema sumber pembiayaan pembangunan melalui utang

daerah dalam suatu perjanjian pinjaman yang dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan non-bank maupun lembaga lainnya;

- k. *Sovereign Wealth Fund (SWF)*, SWF negara lain merupakan dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh Pemerintah untuk memegang atau menguasai aset asing untuk tujuan jangka panjang;
- l. Dana umat dan filantropi, aktivitas berbagai dukungan dan sumber daya dengan sukarela yang dilakukan secara terorganisir untuk menangani kepentingan masyarakat untuk mencapai keadilan sosial secara inklusif serta pembangunan yang berkelanjutan.

6.3 KAJIDAH PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif yang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui jangka menengah dan jangka pendek daerah kepada Gubernur.

a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, sinkronisasi regulasi serta pewujudan cita-cita dalam RPUPD kepada dokumen perencanaan turunannya serta meningkatkan kualitas desain proyek prioritas daerah. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah (mencakup: 1) RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Banten; 2) kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya). Pengendalian jangka pendek (mencakup: 1) RKPD Provinsi Banten dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Banten; 2) kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya).

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pada jangka menengah dan jangka pendek, mencakup: 1) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional; 2) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; 3) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah dan 4) evaluasi

pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Banten.



Gambar VI.1
 Kerangka Pengendalian RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
 (Sumber: RPJPD Tahun 2025-2045)

Pemerintah Provinsi Banten akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Provinsi Banten.

6.4 KAJIDAH MEKANISME PERUBAHAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dalam keadaan kahar (*force majeure*) untuk mengantisipasi perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, dan deviasi pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya yang menyebabkan perubahan kondisi daerah yang berdampak terhadap pencapaian RPJPD Provinsi Banten dapat dimutakhirkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Secara bersamaan, Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini diinput dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan sistem elektronik terpadu lainnya yang legal berdasarkan ketentuan, maka dalam pelaksanaan mekanisme perubahan dokumen juga perlu diselaraskan dan disinergikan dengan memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama untuk menghasilkan satu data yang baik.

Dokumen ini juga perlu dikomunikasi kepada publik dalam mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang mengutamakan keterbukaan disertai oleh akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Komunikasi publik penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Banten dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama segenap pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Banten seperti kepala daerah kabupaten/kota, DPRD, kementerian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum, akademisi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), swasta, dan media.

Komunikasi publik ini juga dilakukan secara masif dan fleksibel sehingga dapat mengakomodir terhadap berbagai masukan, kritik termasuk masukan dari kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak.

Akhirnya, komunikasi publik yang transparan ini diharapkan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk kebersamaan dan berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 untuk menjadi **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**, melalui pelaksanaan visi **Banten Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa**.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk. I/IV,b

NIP. 19670619 199403 1 002